Udin Juhrodin

PAPAT KALIMA PANCER

Filosofi Merdeka dari Jawa Barat

(Refleksi atas Pidato KDM pada HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Halaman Gedung Sate)

JIM & ZAM

Udin Juhrodin

PAPAT KALIMA PANCER

Filosofi Merdeka dari Jawa Barat

(Refleksi atas Pidato KDM pada HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Halaman Gedung Sate)

JIM & ZAM

PAPAT KALIMA PANCER

Filosofi Merdeka dari Jawa Barat

(Refleksi atas Pidato KDM pada HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Halaman Gedung Sate)

Penyusun : Udin Juhrodin
Tata Letak : Udin Juhrodin
Desain Cover : Jim-Zam

Cetakan 1 (19 Agustus 2026)

Penerbit : Jim-Zam
Alamat : Komplek Griya Sampurna Blok E-136
Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung
Kabupaten Sumedang
Jawa Barat
Surel : udinjuhrodin@gmail.com
Phone : 082240452483

Buku Ini

Dibuat untuk kepentingan pribadi dan tujuan akademis.
Siapapun diperbolehkan untuk mengutip, membagikan atau mencetak
sebagian atau seluruh bagian buku ini
dengan tetap menyebutkan referesinya.

Disedekahkan Untuk
PARA
PECINTA ILMU DAN PENGETAHUAN

KATA PENGANTAR

Pidato selalu lahir dari sebuah peristiwa, tetapi tidak semua pidato sanggup melampaui peristiwanya. Ada pidato yang selesai begitu suara oratornya berhenti bergema; kalimat-kalimatnya menguap, tepuk tangannya memudar, dan ia kembali menjadi catatan protokoler yang tersimpan rapi dalam arsip. Namun, ada pula pidato yang justru memulai kerjanya setelah ia diucapkan. Ia tidak hanya terdengar, tetapi juga menggugah; ia tidak hanya melaporkan keadaan, tetapi juga membuka luka yang selama ini coba ditutup oleh kemeriahan seremoni. Pidato semacam itu tidak meminta hadirin untuk sekadar mendengar, melainkan mengajak mereka untuk berpikir, menimbang, dan akhirnya berubah. Pidato KDM pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Gedung Sate, menurut hemat kami, adalah salah satu pidato semacam itu.

Buku ini lahir dari keyakinan bahwa pidato tersebut layak dibaca tidak hanya sebagai dokumen politik, tetapi juga sebagai teks reflektif yang kaya akan lapisan makna. Di dalamnya, KDM tidak berbicara tentang keberhasilan dengan nada yang biasa didengar dalam pidato-pidato kenegaraan. Justru sebaliknya, ia membuka ruang bagi kejujuran: bahwa setelah 81 tahun merdeka, masih banyak rakyat yang hidup dalam kegelapan, masih banyak yang pulang dari rumah sakit dengan membawa utang, dan masih banyak generasi muda yang dihancurkan oleh penjajahan yang tidak terlihat. Kejujuran semacam ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan keberanian moral yang semakin jarang ditemukan di ruang-ruang publik.

Namun, apa yang membuat pidato ini lebih dari sekadar pengakuan adalah kemampuannya menarik akar-akar kearifan lokal sebagai jalan keluar. Di tengah kebisingan pembangunan yang serba material, KDM menghidupkan kembali *Papat Kalima Pancer*, sebuah konsep kosmologi Sunda yang menempatkan manusia sebagai pusat keseimbangan dari tanah, air, udara, dan matahari. Dari sanalah ia berbicara tentang keadilan komutatif dan distributif, tentang pertanian organik sebagai kedaulatan pangan, tentang kritik terhadap feodalisme yang menjajah bangsanya sendiri, tentang kepemimpinan yang berani menunda hasrat pribadinya, dan tentang nasionalisme sejati yang tidak berhenti pada pengibaran bendera, melainkan turun ke dalam perawatan terhadap tanah dan air.

Buku ini berusaha merangkai seluruh benang merah tersebut menjadi sebuah pembacaan yang utuh. Kami menulisnya dengan gaya yang mencoba mengalir, tidak tergesa, dan memberi ruang bagi permenungan. Sebab kami percaya bahwa memahami pidato ini tidak bisa dilakukan secara cepat; ia menuntut kesabaran, sebagaimana memahami *Papat Kalima Pancer* menuntut kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan mengejar kemajuan dan kembali merasakan keterhubungan dengan alam dan sesama.

Kami juga berusaha menjaga keseimbangan antara kekayaan rasa lokal dan keilmiahan. Karena itu, di beberapa bagian pembahasan, kami merujuk pada sejumlah pemikir, filsuf, dan hasil kajian yang relevan untuk memperkuat argumen. Meskipun demikian, rujukan-rujukan tersebut tidak dimaksudkan untuk menjauhkan pembaca dari nuansa reflektif buku ini, melainkan justru untuk menunjukkan bahwa kearifan lokal seperti *Papat Kalima Pancer* bukanlah gagasan yang terasing dari percakapan intelektual global. Ia sejajar dan mampu berdialog dengan tradisi-tradisi besar pemikiran dunia.

Pada akhirnya, buku ini hanyalah sebuah jembatan kecil. Jembatan yang menghubungkan sebuah pidato di halaman Gedung Sate dengan pertanyaan-pertanyaan besar tentang apa artinya merdeka. Kami tidak berpretensi memberikan jawaban yang final; kami justru ingin mengajak pembaca untuk ikut gelisah, ikut bertanya, dan ikut menimbang. Sebab kemerdekaan, sebagaimana diingatkan oleh pidato ini, bukanlah warisan yang selesai. Ia adalah pekerjaan yang harus diteruskan, sepetak demi sepetak, oleh setiap generasi yang mencintai tanah airnya.

Kepada semua pihak yang telah menginspirasi lahirnya buku ini, terutama kepada KDM yang telah berani menyampaikan kebenaran di tengah panggung yang biasanya hanya berisi laporan keberhasilan, kami haturkan terima kasih. Kepada para pembaca, kami hanya berharap semoga lembar-lembar ini tidak berhenti sebagai bacaan, melainkan menjadi percikan kecil untuk merawat tanah, air, udara, dan matahari di sekitar kita, dimulai dari tempat kita masing-masing.

Selamat membaca, selamat merenung, dan selamat melanjutkan kemerdekaan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ---------- **v**
Daftar Isi ---------- **vii**

BAGIAN SATU — MEMBUKA PINTU MAKNA
Pendahuluan: Dari Halaman Gedung Sate untuk Indonesia ---------- **3**
- Konteks Pidato: Mengapa Lokasi dan Audiensnya Penting ---------- 6
- Pidato yang Melampaui Seremoni ---------- 9
- Menempatkan Papat Kalima Pancer sebagai Pintu Masuk Memahami Kemerdekaan ---------- 12

BAGIAN DUA — FILOSOFI PAPAT KALIMA PANCER
Bab 1: Apa Itu Papat Kalima Pancer? ---------- **19**
- Asal-usul dan Makna Filosofis ---------- 22
- Empat Unsur: Tanah, Air, Udara, Matahari — dan Pancer sebagai Pusat Diri ---------- 25
- Relasi Manusia–Alam–Tuhan dalam Kosmologi Sunda ---------- 28

Bab 2: Papat Kalima Pancer dan Konsep Manusia Seutuhnya ---------- **32**
- Kesejajaran dengan Insan Kamil dalam Islam ---------- 34
- Relevansi dengan Pancasila sebagai Lima Sila yang Menyatu ---------- 37
- Kemerdekaan sebagai Keseimbangan Unsur ---------- 40

Bab 3: Alam yang Dimuliakan, Manusia yang Dimuliakan ---------- **44**
- Dari Tanah yang Dihormati Lahir Padi, Buah, Sayur yang Mulia ---------- 46
- Kesehatan sebagai Buah dari Hubungan Ekologis yang Benar ---------- 49
- "Dokter Sejati adalah Diri Kita Sendiri" ---------- 51

BAGIAN TIGA — KEMERDEKAAN YANG BELUM SELESAI
Bab 4: Kami Belum Bisa Memerdekakan Seluruh Rakyat ---------- **57**
- Pengakuan Pahit di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ---------- 59
- Ironi Listrik: Negeri Berenergi tapi Warganya Gelap Gulita ---------- 61
- Angka Kemiskinan, Akses Kesehatan, dan Pendidikan ---------- 64

Bab 5: Keadilan Komutatif — Hak yang Sama untuk Semua ---------- 67
- Hak Udara Bersih, Pendidikan, Layanan Kesehatan ---------- 69
- Kesetaraan di Mata Hukum ---------- 72
- Mengapa Keadilan Komutatif Belum Dinikmati Semua Warga ---------- 74

Bab 6: Keadilan Distributif — Ruang untuk Berprestasi ---------- 77
- Negara Harus Membuka Jalan bagi Semua ---------- 79
- "Tidak Ada Lagi Kaum Cacah, Tidak Ada Lagi Kaum Menak" ---------- 82
- Kritik terhadap Feodalisme Lama dan Baru ---------- 84

Bagian Empat — Penjajahan Tak Terlihat

Bab 7: Tramadol dan Perang Melawan Generasi ---------- 89
- Narkoba sebagai Senjata Penjajahan Gaya Baru ---------- 91
- Rusaknya Pikiran, Pendengaran, dan Khayalan Generasi Muda ---------- 94
- Bahaya Laten di Sudut-sudut Kampung ---------- 96

Bab 8: Menggugat Imperialisme Internal ---------- 100
- Sejarah Kelam Feodalisme Priangan ---------- 102
- Pemimpin Pribumi yang Justru Menjadi Alat Penjajah ---------- 105
- "Penjajah Memang Kejam, tapi Perilaku Feodalistik Jauh Lebih Kejam" 107

Bagian Lima — Kepemimpinan yang Berpihak

Bab 9: Menunda Hasrat Pribadi ---------- 113
- Mobil Baru, Baju Baru, Properti — dan Etika Pemimpin ---------- 115
- Kepemimpinan yang Fokus pada Kebutuhan Rakyat ---------- 118
- Tenda VIP untuk Petani, Kuli, dan Tukang Sapu ---------- 120

Bab 10: Menghormati yang Terlupakan ---------- 123
- Kuli Bangunan, Linmas, Tukang Sapu: Pahlawan Tanpa Tanda Jasa ---------- 125
- Gedung Sate sebagai Monumen Derita dan Jasa Rakyat Kecil ---------- 128
- Ucapan Terima Kasih yang Terlambat ---------- 131

Bagian Enam — Pertanian Hijau dan Kedaulatan Pangan

Bab 11: Pertanian Organik sebagai Jalan Kemandirian ---------- 137
- Kritik terhadap Pestisida dan Pupuk Kimia ---------- 139
- Negara Maju Menolak Produk Berpestisida — Mengapa Kita Masih Memakainya? ---------- 142
- Dinas Pertanian Bekerja Sepetak demi Sepetak ---------- 145

Bab 12: Tanah Air yang Mengikat Diri ---------- 148
- Pangan Berkualitas Lahir dari Tanah yang Dimuliakan ---------- 150
- Buah-buahan Khas Jawa Barat sebagai Identitas ---------- 152
- Dari Tanah yang Subur menuju Masyarakat Gemah Ripah Repeh Rapih 155

Bagian Tujuh — Refleksi dan Arah ke Depan

Bab 13: Nasionalisme Sejati adalah Menjaga Tanah dan Air ---------- 161
- Merdeka Bukan Hanya Melawan Penjajah ---------- 164
- Merdeka adalah Menjaga Kesuburan, Udara, dan Air ---------- 166
- Tuhan Hadir dalam Setiap Jengkal Tanah ---------- 169

Bab 14: Jawa Barat sebagai Model Kemerdekaan Holistik ---------- 173
- Pembangunan yang Menyatukan Ekonomi, Ekologi, Pendidikan, dan Spiritualitas ---------- 176
- Arah Baru Pembangunan Berbasis Filosofi Lokal ---------- 179
- Dari Jawa Barat untuk Indonesia ---------- 182

Lampiran

Lampiran 1: Teks Lengkap Pidato KDM ---------- 189
Lampiran 2: Glosarium Istilah Sunda ---------- 197
Lampiran 3: Daftar Pustaka dan Referensi ---------- 200

BAGIAN SATU
MEMBUKA PINTU MAKNA

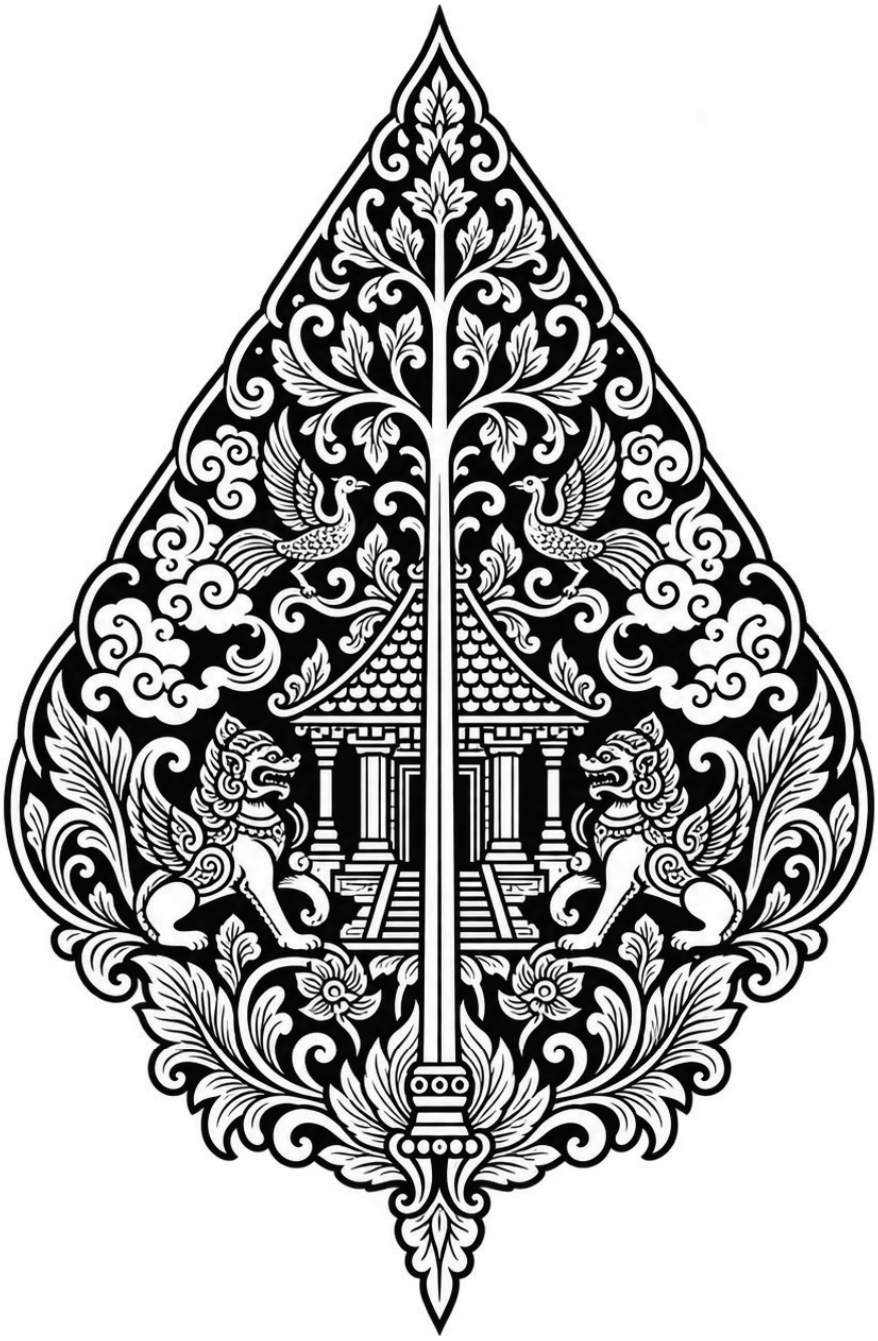

PENDAHULUAN
DARI HALAMAN GEDUNG SATE UNTUK INDONESIA

Setiap bangsa yang pernah dijajah selalu menyimpan luka yang tidak sepenuhnya sembuh, bahkan setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan dan bendera kebangsaan dikibarkan. Luka itu tidak selalu tampak sebagai bekas tembakan atau puing bangunan; ia bisa hadir dalam bentuk kemiskinan yang diwariskan, ketimpangan yang dibiarkan, atau cara pandang yang masih terjajah. Maka, membicarakan kemerdekaan bukanlah sekadar mengenang peristiwa sejarah, melainkan menelusuri sejauh mana cita-cita kemerdekaan itu benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks itulah pidato KDM pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di halaman Gedung Sate menjadi penting: ia tidak hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga mempertanyakannya, merenungkannya, dan menawarkannya kembali sebagai proyek yang belum selesai.

Kemerdekaan sering dimaknai secara politis sebagai lepasnya suatu wilayah dari kekuasaan asing. Namun, apakah kemerdekaan politik otomatis menghadirkan kemerdekaan ekonomi, kemerdekaan budaya, dan kemerdekaan batin? Pertanyaan semacam ini telah lama menjadi bahan perenungan para pemikir pascakolonial, dari Frantz Fanon yang mengkritik jebakan nasionalisme formal, hingga Soedjatmoko yang mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati menuntut kedaulatan akal budi dan keberanian merancang masa depan sendiri (Fanon, 1963; Soedjatmoko, 1984). Pidato KDM berdiri dalam arus perenungan yang sama: ia menolak menganggap kemerdekaan sebagai titik tuntas, dan justru menempatkannya sebagai perjalanan panjang yang menuntut pembenahan dari akar rumput hingga ke tataran kebijakan.

Halaman Gedung Sate sebagai lokasi pidato bukanlah pilihan yang netral. Gedung itu sendiri adalah artefak kolonial yang penuh makna: dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai pusat pemerintahan, melibatkan kerja paksa rakyat, dan hari ini menjadi simbol kekuasaan sekaligus warisan yang menyimpan derita panjang. Dengan memilih halaman Gedung Sate sebagai tempat upacara kemerdekaan, KDM menghubungkan masa lalu kolonial dengan masa kini pascakolonial, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa perjuangan melawan penjajahan belum berhenti

hanya karena gedung itu telah berubah fungsi. Sebaliknya, di tempat inilah kita dipanggil untuk merenungkan kembali apa arti merdeka dalam lanskap sosial yang masih menyimpan banyak ketidakadilan.

Melalui pidato itu, KDM tidak sedang menawarkan konsep kemerdekaan yang abstrak. Ia berbicara tentang rakyat yang belum menikmati listrik, tentang petani yang terjebak dalam pertanian kimiawi, tentang anak-anak yang dihantui tramadol, dan tentang para kuli bangunan yang jasanya kerap dilupakan. Semua persoalan itu disatukan oleh sebuah benang merah yang kemudian diangkat sebagai landasan filosofis: *Papat Kalima Pancer*. Di sinilah pidato itu menemukan kedalamannya, karena ia tidak hanya mengkritisi keadaan, tetapi juga menggali kembali kearifan lokal Jawa Barat sebagai cara pandang untuk memahami relasi antara manusia, alam, masyarakat, dan Tuhan. Buku ini lahir dari ketertarikan untuk menguraikan benang merah itu: bagaimana sebuah filosofi lama tentang keseimbangan unsur-unsur kehidupan dapat menjadi pintu masuk untuk memahami kembali makna kemerdekaan Indonesia.

Oleh karena itu, buku ini tidak ditujukan untuk menilai benar atau salah isi pidato, melainkan untuk membacanya sebagai teks reflektif yang membuka ruang permenungan. Ia adalah teks yang bercorak *profetik* karena tidak hanya melaporkan keadaan, tetapi juga mengajak pendengarnya untuk berubah; bercorak *filosofis* karena menggali konsep-konsep dasar seperti keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan; dan bercorak *kultural* karena menggali akar-akar nilai Sunda yang selama ini terpinggirkan oleh arus pembangunan yang serba material. Dengan menggabungkan ketiga corak itu, buku ini mencoba menghadirkan pembacaan yang utuh: kemerdekaan tidak semata-mata soal bendera dan pasal hukum, tetapi juga tentang cara kita memperlakukan tanah, air, udara, dan sesama manusia.

Pada titik inilah pentingnya merumuskan ulang kemerdekaan dalam kerangka yang lebih luas dari sekadar kedaulatan formal. Banyak bangsa pascakolonial terjebak pada apa yang oleh para kritikus budaya disebut sebagai "kemerdekaan seremonial," yaitu kemerdekaan yang dirayakan setiap tahun tetapi tidak dirasakan dalam kehidupan riil (Chatterjee, 1993). Upacara bendera, parade, dan pidato kenegaraan sering kali menjadi pengganti dari kerja-kerja perubahan yang lebih sulit dan lambat. Pidato KDM mencoba melawan kecenderungan itu dengan menghadirkan pengakuan yang jujur: bahwa setelah 81 tahun merdeka, masih banyak warga yang hidup dalam kegelapan, baik kegelapan harfiah karena ketiadaan listrik maupun kegelapan sosial karena ketiadaan akses dan kesempatan.

Pengakuan semacam itu bukanlah bentuk pesimisme, melainkan sebentuk keberanian intelektual untuk menghadapi kenyataan. Tidak semua pemimpin berani menyampaikan bahwa kemerdekaan belum sepenuhnya berhasil, karena hal itu dianggap mengurangi rasa syukur atau menodai semangat nasionalisme. Padahal, sebagaimana diingatkan oleh para pendiri bangsa, nasionalisme sejati

justru lahir dari kejujuran melihat kelemahan diri, bukan dari sikap menutupi kenyataan dengan simbol-simbol kosong (Hatta, 1977). Dengan menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Jawa Barat karena belum bisa memerdekakan mereka sepenuhnya, KDM sedang membalik arah pidato kenegaraan yang lazim: dari yang biasanya berisi laporan keberhasilan menjadi sebuah refleksi tanggung jawab.

Di sinilah letak relevansi pidato ini bagi Indonesia secara keseluruhan. Jawa Barat bukan sekadar sebuah provinsi; ia adalah salah satu pusat pertumbuhan, pusat pendidikan, dan pusat kebudayaan yang pengaruhnya melampaui batas administratif. Jika di Jawa Barat masih terdapat puluhan ribu keluarga tanpa listrik, masih ada rakyat yang pulang dari rumah sakit dalam keadaan terlilit utang, dan masih ada generasi muda yang dirusak oleh obat-obatan, maka persoalan itu bukan hanya masalah lokal. Ia adalah potret dari Indonesia yang lebih luas: negeri yang kaya sumber daya tetapi belum sepenuhnya mampu mengelola kekayaannya untuk kemakmuran rakyatnya.

Maka, membaca pidato KDM dari halaman Gedung Sate adalah membaca Indonesia dari salah satu titik pusatnya. Kita diajak untuk tidak hanya terpukau oleh keindahan gedung peninggalan kolonial, tetapi juga menoleh kepada nasib orang-orang yang membangunnya, yang sering terlupakan oleh sejarah resmi. Dengan cara itu, pidato ini membuka kembali ingatan kita tentang pentingnya keadilan sosial sebagai inti dari kemerdekaan. Keadilan sosial tidak akan lahir dari sekadar pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik, melainkan dari kesediaan untuk menata kembali relasi-relasi dasar dalam masyarakat: antara yang kaya dan yang miskin, antara penguasa dan rakyat, antara manusia dan alam.

Buku ini, dengan demikian, menempatkan *Papat Kalima Pancer* bukan sebagai slogan budaya, melainkan sebagai kerangka berpikir untuk menata ulang relasi-relasi tersebut. Dalam kosmologi Sunda, empat unsur—tanah, air, udara, matahari—tidak dapat dipisahkan dari *pancer*, yaitu pusat diri manusia yang menyeimbangkan semuanya. Jika ditarik ke dalam wacana kebangsaan, *Papat Kalima Pancer* mengingatkan kita bahwa negara tidak boleh dibangun dengan mengabaikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kelestarian alam, keadilan sosial, dan spiritualitas. Selama salah satu unsur diabaikan, maka kemerdekaan akan timpang, dan bangsa akan terus berada dalam kegelisahan meskipun bendera berkibar di mana-mana.

Dengan demikian, pendahuluan ini hendak menegaskan bahwa pidato KDM pada HUT ke-81 RI bukanlah sekadar pidato peringatan tahunan. Ia adalah undangan untuk berpikir ulang, untuk menoleh ke belakang dengan jujur, dan untuk menatap ke depan dengan cara yang lebih arif. Halaman Gedung Sate menjadi saksi bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan amanat yang harus terus diperjuangkan. Dan *Papat Kalima Pancer* adalah pintu masuk untuk memahami amanat itu dalam

bahasa yang tidak tercerabut dari akar budaya, tetapi justru berakar kuat pada cara pandang masyarakat Jawa Barat yang agraris, religius, dan komunal.

Pada bab-bab selanjutnya, kita akan menyusuri satu per satu lapisan makna yang terhampar dalam pidato itu: mulai dari konteks penyampaian, pilihan lokasi, komposisi audiens, hingga bangunan argumen filosofisnya. Kita akan melihat bagaimana pidato itu bekerja sebagai teks budaya, sebagai pernyataan politik, dan sebagai refleksi eksistensial tentang apa artinya menjadi bangsa yang merdeka. Dengan membaca perlahan dan mendalam, kita berharap dapat menangkap pesan yang barangkali luput dalam gemerlap upacara: bahwa kemerdekaan sejati adalah kerja panjang untuk memuliakan tanah, air, udara, matahari, dan manusia di dalamnya

Konteks Pidato

Untuk memahami bobot sebuah pidato, kita tidak bisa hanya membaca teksnya secara terpisah dari ruang dan waktu saat ia diucapkan. Setiap pidato lahir dari situasi sosial, dipengaruhi oleh lokasi, disaksikan oleh audiens tertentu, dan disampaikan oleh orang dengan posisi politik yang tidak pernah netral. Dalam tradisi retorika, Aristoteles telah menegaskan bahwa efektivitas sebuah tuturan ditentukan oleh tiga unsur: *ethos* (kredibilitas pembicara), *pathos* (daya sentuh emosi audiens), dan *logos* (kekuatan nalar yang ditawarkan) (Aristoteles, 2004). Pidato KDM pada peringatan HUT ke-81 RI di halaman Gedung Sate merupakan peristiwa retorika yang justru menempatkan ketiga unsur itu dalam ketegangan yang produktif: pembicara berbicara sebagai pemimpin, tetapi juga menempatkan diri sebagai pihak yang meminta maaf; audiens hadir dalam nuansa formal kenegaraan, tetapi juga diisi oleh mereka yang selama ini berada di luar lingkaran kekuasaan; dan lokasi pidato adalah simbol kolonial yang justru dipakai untuk membongkar sisa-sisa kolonialisme.

Lokasi adalah elemen pertama yang patut diperhatikan. Gedung Sate, yang kini menjadi ikon Kota Bandung sekaligus pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat, dibangun pada masa kolonial Belanda sebagai kantor *Gouvernements Bedrijven* atau Jawatan Pekerjaan Umum. Proses pembangunannya, sebagaimana banyak bangunan kolonial lain, tidak lepas dari kerja paksa rakyat pribumi yang sering kali tidak mendapat upah layak, bahkan nyawa mereka dianggap sebagai biaya yang tidak perlu dicatat (Kunto, 1986). Dengan demikian, Gedung Sate bukan sekadar bangunan indah berarsitektur campuran, melainkan juga monumen bisu dari penderitaan rakyat yang tersembunyi di balik kemegahan kolonial. Ketika KDM memilih halaman Gedung Sate sebagai tempat upacara kemerdekaan, pilihan itu mengandung kesadaran sejarah yang tajam: ia membawa para hadirin berdiri di

atas tanah yang pernah menjadi saksi penjajahan, dan dari tempat itu menyerukan bahwa perjuangan melawan penjajahan belum selesai.

Pidato itu semakin bermakna karena digelar bukan di lapangan Gasibu yang biasa digunakan untuk upacara-upacara besar, melainkan di halaman dalam Gedung Sate yang telah direnovasi dan dinamai *Pasanggrahan Pancarasa*. Perpindahan lokasi ini bukan persoalan teknis semata. Lapangan Gasibu adalah ruang publik yang luas, terbuka, dan cenderung impersonal, tempat ribuan orang berdiri dalam formasi rapi dengan jarak yang renggang dari pusat kekuasaan. Halaman Gedung Sate, sebaliknya, menawarkan keintiman yang berbeda: para hadirin berada lebih dekat dengan bangunan kekuasaan, lebih dekat dengan orator, dan lebih dekat satu sama lain dalam suasana yang memungkinkan dialog emosional lebih kuat. Dalam konteks ini, pemilihan lokasi menciptakan efek psikologis bahwa upacara kemerdekaan kali ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan sebuah pertemuan untuk saling menatap dan saling mendengar antara pemimpin dan rakyat.

Namun, lokasi bukanlah satu-satunya konteks yang penting. Komposisi audiens yang hadir dalam upacara itu justru menjadi pernyataan sosial tersendiri. Dalam pidatonya, KDM secara eksplisit menyampaikan permohonan maaf karena para tamu kehormatan tidak duduk di dalam tenda VIP. Tenda VIP justru diisi oleh para petani, nelayan, pengemudi ojek *online*, pengemudi Grab, dan kuli bangunan yang selama ini menjadi pekerja harian dalam proyek pembangunan di Jawa Barat. Pernyataan ini bukan sekadar basa-basi, melainkan sebentuk kritik simbolik terhadap tatanan sosial yang selama ini menempatkan para elite di ruang utama sementara rakyat kecil berada di pinggiran. Dengan memindahkan rakyat kecil ke dalam tenda VIP, KDM sedang memutarbalikkan logika ruang yang selama ini mapan: yang dianggap rendah justru diberi tempat terhormat, sementara para pejabat dan elite diminta berdiri di luar. Di sinilah pidato itu memperlihatkan keberaniannya, karena ia tidak hanya berbicara tentang keadilan, tetapi juga mempraktikkannya dalam tata ruang upacara.

Tindakan simbolik semacam itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-politik Jawa Barat yang tengah berhadapan dengan berbagai persoalan pelik: kemiskinan, ketimpangan akses listrik, beban biaya kesehatan, hingga darurat narkoba di kalangan muda. Dalam konteks seperti itu, menghadirkan petani, nelayan, dan kuli bangunan ke dalam tenda VIP adalah cara untuk mengatakan bahwa kemerdekaan harus diukur dari pengalaman mereka, bukan dari pidato-pidato di ruang ber-AC. Perspektif ini sejalan dengan pandangan kaum subaltern dalam kajian pascakolonial, yang menekankan bahwa sejarah dan pembangunan harus dibaca dari sisi mereka yang selama ini tidak terdengar, bukan hanya dari sudut pandang para penguasa dan elite (Spivak, 1988). Pidato KDM, dengan caranya sendiri, mencoba mengembalikan suara dan tempat kepada mereka yang selama ini menjadi objek pembangunan, bukan subjeknya.

Konteks waktu juga memainkan peran yang tidak kecil. Pidato disampaikan pada peringatan kemerdekaan yang ke-81, sebuah angka yang melambangkan kedewasaan sebuah bangsa, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa Indonesia tidak lagi muda. Pada usia seperti itu, sebuah bangsa seharusnya telah menyelesaikan persoalan-persoalan dasarnya: listrik, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan. Namun, kenyataan yang diungkapkan KDM justru menunjukkan bahwa di usia yang ke-81 itu, Jawa Barat masih memiliki puluhan ribu warga yang belum menikmati listrik, dan sebelumnya jumlah itu bahkan mencapai lebih dari lima ratus ribu jiwa. Dengan menyebut angka-angka itu secara terbuka dalam sebuah upacara resmi, KDM menempatkan pidatonya dalam kerangka laporan pertanggungjawaban moral, bukan sekadar laporan prestasi. Ia sedang mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak boleh berhenti pada simbol, tetapi harus turun ke dalam urusan sehari-hari rakyat yang paling konkret: lampu yang menyala di malam hari, rumah sakit yang tidak menahan KTP pasien, dan sekolah yang benar-benar mencerdaskan.

Konteks kultural juga tidak kalah pentingnya. KDM bukanlah orator yang berbicara dalam ruang hampa budaya. Ia menggunakan sapaan *Sampurasun* yang khas Sunda, menyebut istilah-istilah seperti *Papat Kalima Pancer*, *gemah ripah repeh rapih*, dan merujuk pada tokoh-tokoh Sunda seperti Solihin GP. Dengan cara itu, pidatonya menegaskan bahwa persoalan kebangsaan tidak harus selalu dibahas dalam bahasa teknokratik yang dingin, tetapi juga dapat disuarakan melalui kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Di saat yang sama, penggunaan istilah-istilah lokal itu bukanlah bentuk pengerdilan makna kebangsaan, melainkan justru pengayaan: Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari banyak lapisan budaya, dan kesadaran nasional yang sehat justru lahir dari kemampuan untuk mengangkat kearifan lokal ke tingkat refleksi kebangsaan (Geertz, 1973). Dengan menjadikan filosofi Sunda sebagai pintu masuk untuk memahami kemerdekaan, KDM sedang menunjukkan bahwa nasionalisme dan lokalitas tidak harus dipertentangkan, melainkan dapat saling memperkuat.

Lebih jauh lagi, konteks kehadiran para tamu undangan yang disebutkan satu per satu dalam pidato—mulai dari para mantan gubernur, pimpinan DPRD, Pangdam, Kapolda, hingga para pelajar peraih medali internasional—menegaskan bahwa pidato itu sedang menyapa banyak lapisan sekaligus. Ia menyapa para elite kekuasaan untuk diajak malu dan berbenah, menyapa para sesepuh untuk dihormati, menyapa para pelajar untuk diberi kebanggaan, dan menyapa rakyat kecil untuk diberi tempat. Dengan menyebut nama-nama itu secara terbuka, KDM sedang membangun sebuah ruang kebersamaan yang tidak dibangun di atas keseragaman, melainkan di atas kesediaan untuk saling mengakui peran masing-masing. Di sinilah pidato itu bekerja sebagai teks yang mempersatukan tanpa meniadakan perbedaan, sebuah ciri penting dari kepemimpinan yang sehat dalam masyarakat majemuk.

Konteks yang lebih luas adalah konteks Indonesia kontemporer, di mana kepercayaan publik terhadap janji-janji politik sering kali berada dalam titik nadir. Banyak pidato kenegaraan dipandang sebagai ritual kosong yang penuh dengan angka-angka keberhasilan tetapi miskin sentuhan kemanusiaan. Dalam iklim semacam itu, pidato yang berani mengakui kegagalan, menyampaikan permohonan maaf, dan menempatkan rakyat kecil di ruang utama adalah sebuah kejutan yang menyegarkan. Namun, kejutan itu tidak boleh berhenti sebagai kekaguman sesaat. Ia harus dibaca sebagai panggilan untuk mengubah cara kita memahami dan mempraktikkan kemerdekaan itu sendiri. Pidato di halaman Gedung Sate itu, dengan demikian, adalah konteks yang tidak berdiri sendiri; ia terhubung dengan sejarah panjang ketimpangan, dengan luka kolonial yang belum sembuh, dan dengan harapan akan hadirnya bentuk kebangsaan yang lebih adil dan lebih manusiawi.

Dengan memahami konteks lokasi, audiens, waktu, dan kulturalnya, kita menjadi lebih siap untuk masuk ke dalam isi pidato secara lebih mendalam. Kita tidak lagi memandangnya sebagai teks yang lepas, melainkan sebagai peristiwa budaya yang lahir dari dan untuk zamannya. Pada sesi berikutnya, kita akan menelusuri bagaimana pidato itu melampaui fungsi seremoni kenegaraan, menjadi sebentuk pernyataan moral yang menggugat cara kita merayakan kemerdekaan selama ini.

Pidato yang Melampaui Seremoni

Pidato kenegaraan di Indonesia sering kali dibayangkan sebagai bagian dari ritual tahunan yang berfungsi memperkuat simbol-simbol kebangsaan: bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, para pejabat mengenakan pakaian adat, dan rakyat menyaksikan dari kejauhan. Ritual semacam ini memang penting dalam membangun kohesi sosial dan menegaskan eksistensi negara di hadapan warganya. Namun, ada bahaya laten di dalamnya: ketika seremoni menjadi begitu dominan, pesan yang disampaikan cenderung kehilangan daya gugahnya. Pidato berubah menjadi sekadar laporan pembangunan, sapaan-sapaan formal, dan janji-janji yang akrab di telinga tetapi jarang menyentuh kesadaran. Dalam konteks inilah pidato KDM pada HUT ke-81 RI layak ditempatkan sebagai sebuah anomali yang menyegarkan, sebab ia berbicara dari dalam seremoni, tetapi arah geraknya justru melampaui bingkai seremoni itu sendiri.

Melampaui seremoni berarti berani memanfaatkan panggung resmi untuk menyampaikan sesuatu yang tidak enak didengar. Sebuah upacara kemerdekaan pada umumnya adalah panggung untuk menampilkan capaian, menabuh optimisme, dan memperlihatkan kewibawaan negara. Namun, KDM membuka pidatonya dengan pengakuan yang jarang terdengar dalam forum resmi: “81

tahun Indonesia merdeka. Kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat." Kalimat ini adalah sebuah pengakuan yang jujur, hampir seperti pengakuan dosa politik. Dalam tradisi retorika kekuasaan, mengakui kegagalan di hadapan publik sering dianggap sebagai tanda kelemahan. Padahal, dalam tradisi filsafat politik, pengakuan semacam itu justru merupakan tanda kekuatan moral, karena menunjukkan adanya kesediaan untuk bertanggung jawab atas realitas yang tidak ideal (Arendt, 1958). Dengan mengucapkan permohonan maaf, KDM sedang memindahkan pidatonya dari ranah seremoni menuju ranah pertanggungjawaban.

Keberanian itu semakin terang ketika ia menyebutkan angka-angka konkret: masih ada 80.000 rakyat Jawa Barat yang belum memiliki listrik, dan sebelumnya angka itu bahkan mencapai lebih dari 500.000 jiwa. Dalam banyak pidato resmi, angka kemiskinan atau ketimpangan biasanya diolah sedemikian rupa agar tetap tampak optimistis, atau paling tidak dikemas dalam bahasa teknis yang tidak menggugah perasaan. KDM memilih cara yang berbeda. Ia menyodorkan angka-angka itu tanpa bungkus retoris yang melembutkan maknanya, dan justru menempatkannya dalam bingkai ironi: Jawa Barat adalah pusat energi, tempat berdirinya pembangkit-pembangkit besar seperti Jatiluhur, Cirata, Saguling, dan Jatigede, tetapi masih ada warga yang tidak memiliki listrik di dekat sumber-sumber energi itu. Ironi semacam ini bukan sekadar data, melainkan sebentuk kritik yang menelanjangi ketidakberesan cara kita mengelola kekayaan bersama.

Yang membuat pidato ini benar-benar melampaui seremoni adalah kesediaannya untuk membongkar ulang makna kemerdekaan itu sendiri. Di hadapan para pejabat, ia tidak berbicara tentang kedaulatan politik atau pertahanan negara, melainkan tentang keadilan komutatif dan distributif, tentang hak setiap warga untuk menghirup udara bersih, memperoleh pendidikan, dan menerima layanan kesehatan. Ia juga berbicara tentang hal-hal yang lebih sederhana tetapi jarang dianggap serius dalam forum kenegaraan: rakyat yang pulang dari rumah sakit dalam keadaan berutang, bayi yang lahir melalui operasi caesar lalu KTP ibunya ditahan karena tidak mampu membayar, dan pasien miskin yang meninggal tanpa sempat ditangani dokter. Semua ini adalah potret kemerdekaan yang gagal, dan justru karena dipaparkan di dalam upacara resmi, potret itu menjadi pukulan telak bagi kesadaran kita bahwa ada jurang lebar antara cita-cita kemerdekaan dan kenyataan hidup rakyat.

Di titik inilah kita bisa melihat bahwa pidato tersebut menjalankan fungsi ganda. Di permukaan, ia tetap mengikuti tata cara upacara: ada sapaan, penghormatan, ucapan terima kasih, dan penutup yang khidmat. Namun di kedalaman, ia bergerak sebagai sebuah khotbah kebangsaan yang berusaha menggugah nurani para pendengarnya. Ia tidak berhenti pada kewajiban seremonial, melainkan mengubah panggung upacara menjadi semacam ruang refleksi bersama. Dalam ruang itu, para pejabat tidak lagi duduk sebagai penonton yang sekadar hadir, tetapi ditempatkan

sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas keadaan. Bahkan, KDM secara halus menyentil para pejabat dengan mengajak mereka untuk menunda hasrat pribadi: menunda membeli mobil baru, menunda membeli baju baru, menunda menambah properti rumah dinas dengan uang negara. Kalimat-kalimat semacam ini bukan lagi bahasa laporan, melainkan bahasa etika politik yang menuntut pergeseran cara hidup para pemimpin.

Melampaui seremoni juga berarti menolak menjadikan upacara sebagai panggung pencitraan semu. Dalam banyak perayaan kemerdekaan, yang tampil di depan adalah kemegahan panggung, kerapihan barisan, dan kemewahan busana. KDM justru mengalihkan perhatian kepada mereka yang biasanya tidak terlihat: para tukang sapu yang berusia lanjut, anggota Linmas yang masih berdiri tegak meskipun rata-rata berusia 60 tahun, para kuli bangunan yang bekerja membangun halaman Gedung Sate meski tidak tamat sekolah dasar, serta para petani, nelayan, dan pengemudi ojek online yang diberi tempat di tenda VIP. Dengan menyebut mereka satu per satu, KDM sedang memulihkan martabat orang-orang kecil yang selama ini terpinggirkan dari narasi besar kebangsaan. Ia tidak sedang berpidato di hadapan rakyat; ia sedang berpidato bersama rakyat, bahkan untuk rakyat yang jarang terdengar suaranya.

Pidato ini juga melampaui seremoni karena ia menyentuh wilayah yang lebih dalam dari sekadar urusan administrasi negara, yaitu wilayah krisis generasi dan penjajahan tak terlihat. Di tengah perayaan kemerdekaan, KDM justru mengangkat isu tramadol, obat-obatan terlarang, tawuran, perampokan, dan penghancuran masa depan generasi muda. Ia menyebutnya sebagai "penjajahan yang tidak terlihat," sebuah istilah yang mengandung kesadaran bahwa penjajahan tidak selalu datang dalam bentuk kapal perang dan serdadu, tetapi juga dalam bentuk sistem yang merusak pikiran, mengaburkan kesadaran, dan melemahkan daya juang bangsa. Dengan cara itu, KDM menghubungkan peringatan kemerdekaan dengan tantangan-tantangan kontemporer yang lebih samar, tetapi tidak kalah berbahaya dibanding kolonialisme lama.

Ada semacam keberanian budaya dalam pidato ini: ia tidak ragu mengangkat istilah-istilah lokal seperti *Papat Kalima Pancer* dan *gemah ripah repeh rapih* ke dalam ruang pidato resmi. Di tengah arus globalisasi yang sering kali mendorong para pemimpin untuk berbicara dalam bahasa-bahasa pembangunan yang seragam, KDM justru menoleh ke dalam, menggali kearifan Sunda sebagai sumber makna. Langkah ini bukanlah bentuk romantisme budaya yang naif, melainkan sebentuk perlawanan terhadap cara berpikir yang selalu menempatkan standar luar sebagai ukuran kemajuan. Ia bahkan menyinggung bahwa negara-negara maju yang dulu mendorong penggunaan pestisida kini justru menolak produk pertanian yang tidak organik. Ketergantungan pada standar asing, menurutnya, membuat kita tidak

pernah benar-benar merdeka. Maka, kembali kepada kearifan lokal adalah bagian dari strategi untuk membangun kedaulatan yang sejati.

Dengan segala lapisan itu, pidato KDM layak dibaca sebagai teks yang melampaui fungsinya sebagai sambutan kenegaraan. Ia adalah esai lisan tentang keadilan, ekologi, sejarah, dan budaya, yang disampaikan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh rakyat banyak. Ia juga merupakan sebentuk "pidato yang tidak patuh" terhadap konvensi, karena alih-alih menghibur dengan janji, ia justru menghadirkan kegelisahan; alih-alih memuja kemajuan, ia membongkar ironi; dan alih-alih menjaga jarak antara pemimpin dan rakyat, ia justru meruntuhkannya. Dalam konteks komunikasi politik, pidato semacam ini lebih menyerupai *public confession* daripada *public address*, sebuah bentuk tuturan yang tidak banyak muncul dalam panggung kekuasaan modern yang serba hati-hati.

Namun, sebagaimana dikatakan oleh banyak pemikir, keberanian untuk jujur di ruang publik adalah syarat awal lahirnya perubahan sosial. Tanpa pengakuan akan luka, tidak akan ada penyembuhan; tanpa pengakuan akan kegagalan, tidak akan ada perbaikan; dan tanpa keberanian untuk mempertanyakan kemerdekaan, kemerdekaan itu sendiri akan berubah menjadi sekadar tanggal dalam kalender (Freire, 1970). Pidato KDM, dengan demikian, bukan hanya berbicara *tentang* kemerdekaan, tetapi juga berusaha *menghidupkan* kemerdekaan itu dalam cara berpikir dan cara berbicara. Ia menolak menjadikan upacara sebagai alat untuk meninabobokan, dan justru mengubahnya menjadi panggung untuk membangun kesadaran.

Pada akhirnya, melampaui seremoni bukan berarti menolak tradisi upacara itu sendiri, melainkan menagihnya agar tidak berhenti pada keindahan formasi dan keheningan khidmat. Upacara hanya bermakna apabila ia mampu menembus kesadaran para pesertanya, bukan sekadar mengisi jadwal tahunan. Pidato KDM menunjukkan bahwa panggung kenegaraan dapat dipakai untuk menyampaikan kebenaran yang pahit sekalipun, selama ada keberanian dari oratornya dan kesediaan dari para pendengarnya untuk menerima kenyataan secara jujur. Dengan demikian, halaman Gedung Sate pada pagi itu tidak hanya menjadi lokasi upacara, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan antara kekuasaan dan hati nurani, antara sejarah dan harapan, antara kemerdekaan yang dirayakan dan kemerdekaan yang masih harus diperjuangkan.

Menempatkan Papat Kalima Pancer sebagai Pintu Masuk Memahami Kemerdekaan

Setelah menelusuri konteks dan keberanian pidato KDM melampaui seremoni, tibalah kita pada inti reflektif yang menjadi fondasi buku ini: *Papat Kalima Pancer*.

Istilah ini tidak sekadar muncul sebagai ornamen budaya dalam pidato; ia dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu relasi antara manusia, alam, sesama, dan Tuhan dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam pandangan hidup Sunda, *Papat Kalima Pancer* merujuk pada empat arah mata angin yang mengelilingi satu pusat, atau dalam tafsir kosmologis sering dimaknai sebagai empat unsur kehidupan—tanah, air, udara, dan matahari—yang bertemu dan ditata oleh *pancer*, yaitu manusia sebagai pusat kesadaran (Mustapa, 2013). Dari titik pusat itulah manusia menyeimbangkan, merawat, dan memaknai semua unsur yang menghidupinya. Karena itu, *Papat Kalima Pancer* bukan hanya warisan kultural yang elok didengar, melainkan sebuah kerangka berpikir yang menuntut tanggung jawab moral: menjadi manusia berarti menjadi penjaga keseimbangan, bukan perusak kesatuan.

Dalam pidato KDM, filosofi ini tidak diuraikan secara akademis, tetapi dihidupkan melalui bahasa yang puitis dan reflektif. Ia menyebut bahwa tanah, air, matahari, dan udara saling mengikatkan diri untuk melahirkan energi dan tanaman-tanaman yang berkualitas. Petani yang mencintai tanahnya, menghormati tanahnya, dan memuliakan tanahnya akan melahirkan padi, jagung, dan buah-buahan yang mulia; dan buah-buahan yang mulia itu, ketika dimakan, akan membentuk warga yang mulia—mulia darahnya, detak jantungnya, tatapan matanya, bahkan ucapannya. Di sini kita tidak sedang berhadapan dengan gagasan mistis yang mengawang-awang, tetapi dengan semacam etika ekologis yang berakar pada kesadaran bahwa kualitas manusia ditentukan oleh kualitas lingkungan tempat ia hidup. Gagasan ini sejalan dengan pemikiran ekologi-dalam (*deep ecology*) yang menegaskan bahwa manusia bukanlah tuan atas alam, melainkan bagian dari jaring-jaring kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya (Naess, 1973). Bedanya, *Papat Kalima Pancer* merumuskannya dalam bahasa budaya yang sudah lama hidup di tanah Sunda, sehingga ia bukan gagasan impor, melainkan kearifan lokal yang menunggu untuk diberi relevansi baru.

Menempatkan *Papat Kalima Pancer* sebagai pintu masuk memahami kemerdekaan berarti menggeser pusat perhatian kita dari kemerdekaan yang bersifat formal-politik menuju kemerdekaan yang bersifat holistik. Selama ini, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, yang pertama kali terbayang adalah proklamasi, bendera, batas negara, tentara, dan konstitusi. Semua itu penting, tetapi tidak cukup. Sebuah bangsa bisa saja memiliki semua atribut formal itu, namun rakyatnya tetap hidup dalam ketergantungan, ketakutan, dan ketidakberdayaan. KDM menyadari hal ini. Ia tidak berhenti pada ucapan "Dirgahayu Republik Indonesia," melainkan membawa para pendengarnya masuk ke dalam pertanyaan yang lebih mengganggu: Sudahkah kemerdekaan itu dirasakan oleh petani di pinggir sawah, oleh keluarga yang belum memiliki listrik, oleh pasien miskin yang tak mampu membayar rumah sakit, oleh anak muda yang dirusak obat-obatan

terlarang? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan yang lahir dari kesadaran *Papat Kalima Pancer*: bahwa hidup yang merdeka adalah hidup yang seimbang, tidak timpang, dan tidak tercerabut dari akar-akar kehidupan yang menghidupinya.

Dalam konteks buku ini, *Papat Kalima Pancer* dipahami sebagai lensa untuk membaca keseluruhan pidato dan, lebih jauh lagi, keseluruhan persoalan kemerdekaan yang masih membelit Indonesia. Empat unsur yang ada dalam filosofi itu tidak harus dibaca secara harfiah, melainkan dapat diperluas menjadi empat pilar kehidupan bangsa: **ekologi** (tanah dan air), **sosial** (udara dan ruang hidup bersama), **ekonomi** (matahari sebagai sumber energi dan kehidupan), serta **spiritualitas** (pancer sebagai pusat kesadaran yang menata semuanya). Ketika salah satu pilar itu diabaikan, maka bangunan kemerdekaan akan timpang. Jika tanah dan air dirusak oleh pertanian kimiawi yang berlebihan, maka pangan rakyat terancam dan kesehatan publik memburuk. Jika ruang hidup bersama dikuasai oleh ketidakadilan dan feodalisme, maka rakyat kecil tidak akan pernah merasa merdeka meskipun bendera berkibar di setiap sudut. Jika ekonomi hanya dikuasai segelintir elite dan mengabaikan pemerataan, maka ironi akan terus berulang: negeri kaya raya tetapi rakyatnya miskin. Dan jika manusia kehilangan kesadaran sebagai pusat yang bertanggung jawab, maka pembangunan akan berjalan tanpa arah, bahkan menghancurkan sumber-sumber kehidupannya sendiri.

KDM tampak menyadari bahwa krisis kemerdekaan Indonesia hari ini adalah krisis keseimbangan. Ia berbicara tentang rakyat yang belum menikmati listrik di tengah negeri yang kaya energi, tentang pasien yang berutang setelah pulang dari rumah sakit, tentang petani yang bergantung pada pestisida, tentang generasi muda yang dihancurkan oleh narkoba, dan tentang para pejabat yang masih sibuk memenuhi hasrat pribadinya. Semua itu adalah gejala dari hilangnya kesadaran akan *pancer*, hilangnya kemampuan untuk menempatkan diri sebagai pusat yang menjaga, bukan sebagai pusat yang mengeksploitasi. Dalam banyak hal, krisis itu juga merupakan krisis dari dalam: kita gagal menjadi merdeka bukan semata-mata karena tekanan dari luar, tetapi karena kita sendiri belum mampu menata relasi kita dengan alam, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Maka, memulihkan kemerdekaan harus dimulai dengan memulihkan kesadaran akan posisi manusia sebagai penjaga keseimbangan, bukan penguasa yang serakah.

Menariknya, *Papat Kalima Pancer* juga mengajarkan tentang kesatuan. Empat unsur itu tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling mengikat. Demikian pula kemerdekaan sejati tidak bisa dipilah-pilah: tidak ada kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi; tidak ada kemerdekaan ekonomi tanpa kelestarian ekologi; dan tidak ada kelestarian ekologi tanpa kesadaran spiritual yang menempatkan alam sebagai amanat, bukan sekadar objek eksploitasi. Dalam kosmologi Sunda, keterikatan itu disebut *papat kalima pancer*: air, matahari, tanah, dan udara bersatu padu melahirkan kehidupan, dan manusia adalah pusat yang memaknai kesatuan

itu. Jika kita tarik ke dalam konteks kebangsaan, maka Merah Putih, sebagaimana diucapkan KDM, juga bukan sesuatu yang terpisah: merah dan putih adalah satu kesatuan. Barangkali yang dimaksud adalah bahwa keberanian dan kesucian, perjuangan dan kedamaian, darah yang tumpah dan niat yang luhur, semuanya harus menyatu dalam satu tekad. Nasionalisme yang sejati adalah nasionalisme yang menjaga kesatuan itu, bukan yang memecah-belah, bukan pula yang mengorbankan rakyat demi simbol.

Dengan menempatkan *Papat Kalima Pancer* sebagai pintu masuk, buku ini ingin mengajak pembaca untuk tidak hanya memahami pidato KDM sebagai peristiwa politik, tetapi sebagai undangan untuk kembali kepada cara pandang yang lebih utuh. Dalam dunia yang semakin terspesialisasi, orang semakin pandai berbicara tentang ekonomi tanpa memikirkan ekologi, tentang pendidikan tanpa memikirkan kesehatan jiwa, tentang pembangunan tanpa memikirkan keadilan. *Papat Kalima Pancer* menawarkan sebuah cara pandang yang menolak keterpecahan itu. Ia mengajarkan bahwa manusia hanya akan merdeka apabila ia mampu menyeimbangkan empat relasi dasarnya: dengan alam, dengan sesama, dengan sejarah, dan dengan Tuhan. Dalam bahasa KDM, manusia yang hidup dalam keseimbangan itu akan menjadi "manusia Indonesia seutuhnya," atau dalam istilah Islam, *insan kamil*—manusia yang sempurna bukan karena kekayaan dan jabatannya, tetapi karena kesediaannya untuk menjadi penjaga kehidupan.

Oleh karena itu, buku ini akan memperlakukan *Papat Kalima Pancer* bukan sekadar sebagai istilah yang disebut satu kali dalam pidato, melainkan sebagai sumbu dari seluruh argumen yang dibangun. Setiap bab selanjutnya akan mengurai salah satu unsur dari kesatuan itu: tanah dan air sebagai dasar ekologi; udara dan ruang hidup sebagai dasar keadilan sosial; matahari dan energi sebagai dasar ekonomi yang memihak rakyat; serta *pancer* sebagai panggilan spiritual dan etis bagi para pemimpin dan warga. Dengan struktur seperti itu, kita tidak hanya membaca pidato KDM, tetapi juga membaca ulang Indonesia dari sudut pandang yang jarang dipakai dalam diskursus kebangsaan arus utama: sudut pandang yang berakar pada kearifan lokal, tetapi berbicara tentang masalah-masalah yang mendunia.

Pada akhirnya, menempatkan *Papat Kalima Pancer* sebagai pintu masuk adalah sebuah upaya untuk merebut kembali makna kemerdekaan dari tangan para teknokrat yang mereduksinya menjadi angka-angka pembangunan, dan dari tangan para politisi yang memakainya sebagai slogan. Kemerdekaan harus dikembalikan kepada rakyat, kepada tanah, kepada air, kepada udara, dan kepada matahari yang menyinari seluruh negeri. Itu berarti kemerdekaan harus dipahami sebagai keseimbangan yang terus-menerus diperjuangkan, bukan sebagai status yang sekali diraih lalu selesai. Di sinilah pidato KDM dan filosofi *Papat Kalima Pancer* bertemu: keduanya mengingatkan bahwa menjadi merdeka adalah menjadi penjaga yang setia, bukan menjadi penonton yang pasif. Dari halaman Gedung Sate, suara

itu disampaikan bukan untuk dikenang sebagai pidato semata, melainkan untuk dihidupi sebagai arah.

BAGIAN DUA
FILOSOFI
PAPAT KALIMA PANCER

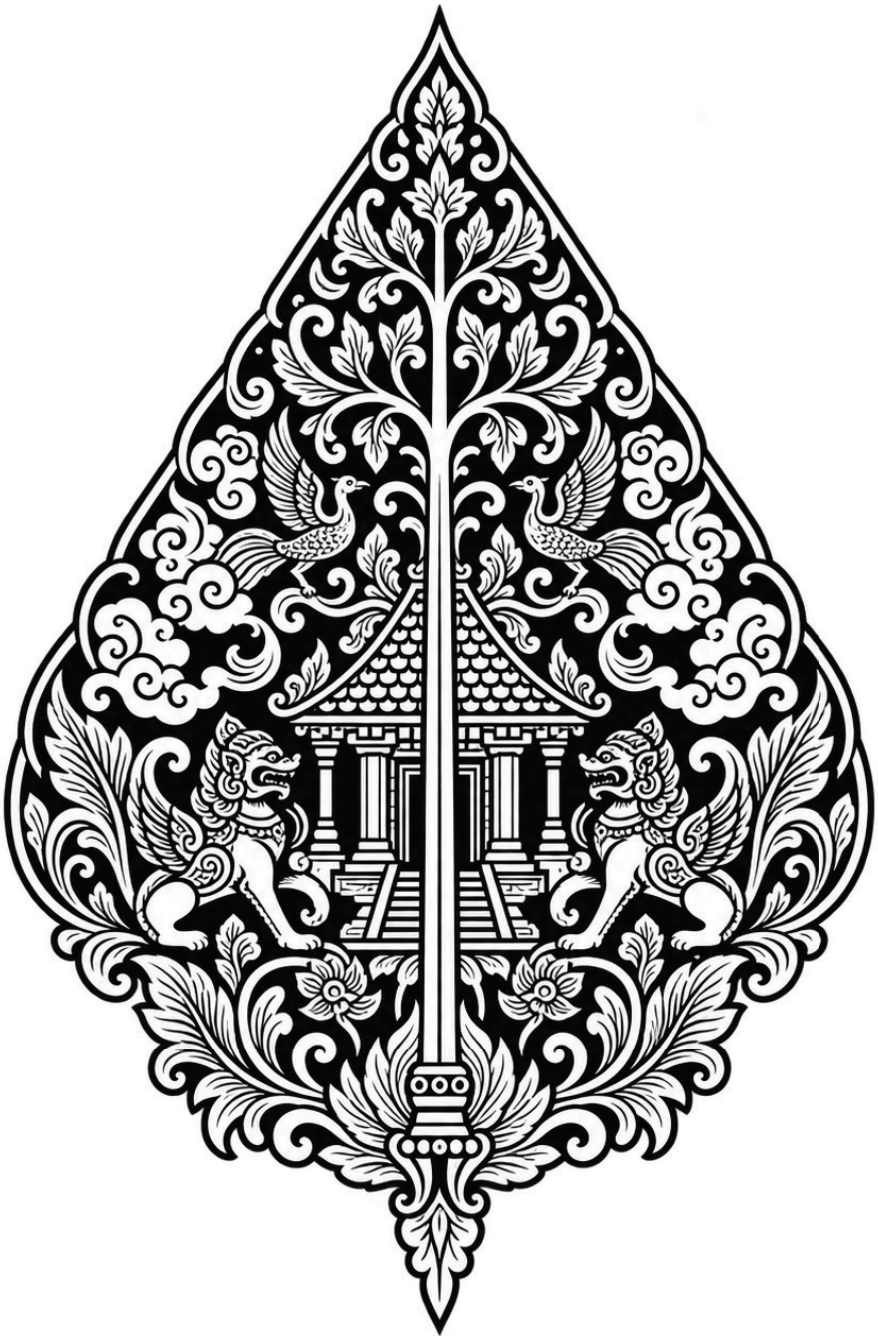

BAB 1
APA ITU PAPAT KALIMA PANCER?

Ketika seseorang mendengar istilah *Papat Kalima Pancer* untuk pertama kalinya, barangkali yang muncul adalah kesan asing namun samar-samar akrab. Asing karena istilah ini jarang diajarkan di ruang-ruang kelas formal, jarang disebut dalam pidato-pidato kenegaraan, dan jarang pula dijelaskan dalam buku-buku pelajaran. Namun samar-samar akrab karena ia masih hidup di dalam lapisan kesadaran masyarakat Sunda yang sehari-harinya berpijak pada relasi yang dalam antara manusia, alam, dan leluhurnya. Istilah ini adalah salah satu warisan kosmologi Nusantara yang telah lama meredup oleh arus modernisasi, tetapi tidak sepenuhnya hilang. Ia menunggu untuk diangkat kembali, bukan sebagai peninggalan masa lampau yang eksotik, melainkan sebagai sumber makna yang dapat menjawab kegelisahan zaman sekarang.

Buku ini menempatkan *Papat Kalima Pancer* sebagai konsep kunci, bukan karena ia istimewa secara linguistik semata, melainkan karena ia mengandung cara pandang yang dalam tentang kehidupan. Di dalamnya tersimpan pemahaman bahwa manusia tidak berdiri sendirian sebagai makhluk yang terpisah dari alam. Manusia berada di tengah-tengah kekuatan-kekuatan yang menghidupinya: tanah tempat ia berpijak, air yang mengalir di tubuh dan sawah-sawahnya, udara yang dihirupnya setiap detik, serta matahari yang menyinari dan memberi kehangatan. Semua itu bukan sekadar latar kehidupan, melainkan bagian dari diri manusia itu sendiri. Karena itu, memahami *Papat Kalima Pancer* berarti memahami bahwa batas antara manusia dan alam sebenarnya tipis, bahkan tidak ada. Kita adalah bagian dari alam, dan alam adalah bagian dari kita.

Di sinilah letak pentingnya mengawali bab ini dengan kejernihan: bahwa *Papat Kalima Pancer* bukan sekadar rumus budaya, melainkan cara pandang eksistensial. Ia berbicara tentang bagaimana manusia menempatkan dirinya dalam kesemestaan. Dalam banyak tradisi filsafat besar dunia, pertanyaan tentang posisi manusia selalu menjadi awal dari segala permenungan. Siapakah aku? Dari mana asalku? Apa yang menghidupiku? Ke mana aku akan kembali? Dalam tradisi Sunda, pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab dengan rumusan doktrinal yang kaku, melainkan dirajut dalam simbol-simbol dan metafora yang bersifat lisan, salah

satunya melalui *Papat Kalima Pancer*. Oleh karena itu, mempelajarinya adalah upaya untuk menyelami cara orang Sunda memaknai hidup, dan pada saat yang sama cara mereka merawat keseimbangan dunia.

Dalam pidato KDM, *Papat Kalima Pancer* disebut justru ketika ia sedang membicarakan persoalan-persoalan yang sangat konkret: pertanian, kesehatan, kualitas pangan, dan masa depan generasi. Ini menarik dan perlu digarisbawahi. KDM tidak menggunakan istilah itu untuk berbicara tentang dunia gaib atau sekadar menghias pidato dengan sentuhan budaya. Ia memakainya untuk menjelaskan bahwa kerusakan alam, krisis pangan, dan penurunan kualitas manusia saling berhubungan. Ketika tanah diperlakukan dengan buruk, hasilnya adalah pangan yang buruk; ketika pangan buruk dikonsumsi, kualitas manusia pun ikut merosot. Sebaliknya, ketika tanah dimuliakan, hasilnya adalah tanaman yang mulia, dan ketika tanaman mulia dimakan, lahirlah warga yang mulia. Dalam logika sederhana inilah *Papat Kalima Pancer* bekerja: ia menghubungkan yang mikro dengan yang makro, yang jasmani dengan yang rohani, yang alamiah dengan yang sosial.

Bab ini akan menjadi pintu untuk memahami dasar-dasar kosmologi Sunda tersebut. Kita akan menelusuri asal-usul istilah *Papat Kalima Pancer*, menimbang berbagai tafsir yang berkembang, dan menggali makna empat unsur yang disebut di dalamnya. Namun, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci, penting untuk menegaskan sikap kita dalam membaca warisan budaya ini. Kita tidak akan memperlakukannya sebagai barang antik yang harus dipamerkan, melainkan sebagai kearifan hidup yang masih relevan untuk diterjemahkan ke dalam konteks kekinian. Dengan kata lain, kita akan membaca *Papat Kalima Pancer* sebagai filsafat, bukan sekadar folklor; sebagai cara berpikir, bukan sekadar peninggalan adat.

Pembedaan ini penting karena banyak kekayaan intelektual Nusantara yang gagal diperlakukan secara setara dengan filsafat-filsafat besar dunia. Selama ini ada kecenderungan untuk memandang pemikiran lokal sebagai bagian dari "pengetahuan tradisional" yang bercorak mitis, sedangkan filsafat dianggap milik tradisi Yunani, Eropa, atau Timur Tengah. Akibatnya, konsep-konsep seperti *Papat Kalima Pancer* lebih sering dikaji sebagai objek antropologis daripada sebagai sumber pemikiran yang hidup dan dapat berdialog dengan persoalan-persoalan kontemporer. Padahal, sebagaimana diingatkan oleh para pemikir pascakolonial, penjajahan tidak hanya menguasai tanah, tetapi juga cara berpikir, sehingga kita menjadi asing terhadap kekayaan intelektual sendiri (Al-Attas, 1993). Membaca *Papat Kalima Pancer* sebagai filsafat adalah bagian dari upaya untuk memulihkan kedaulatan akal budi.

Dengan menempatkannya sebagai filsafat, kita juga memberi ruang bagi kelahiran pertanyaan-pertanyaan kritis. Apakah *Papat Kalima Pancer* masih relevan di tengah kehidupan modern yang ditandai oleh teknologi, urbanisasi, dan ekonomi global? Apakah ia mampu menjawab tantangan kerusakan lingkungan,

ketimpangan sosial, dan krisis makna yang melanda masyarakat kita? Ataukah ia sekadar nostalgia masa lalu yang tidak lagi sanggup memberi arah? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dengan jujur, tanpa memuja berlebihan dan tanpa merendahkan. Justru dengan mempertanyakannya, kita memberi penghormatan tertinggi kepada warisan itu, karena kita memperlakukannya sebagai gagasan hidup yang sanggup diuji, bukan sebagai peninggalan mati yang hanya boleh dikagumi dari kejauhan.

Pengantar bab ini juga ingin menegaskan bahwa memahami *Papat Kalima Pancer* tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Ia menuntut kesabaran, sebagaimana memahami filsafat mana pun. Kita perlu mendengar simbol-simbolnya, merasakan irama bahasanya, dan menimbang konteks-konteks di mana ia lahir. Terlebih lagi, istilah ini tidak memiliki definisi tunggal yang baku seperti istilah-istilah dalam kamus modern. Ia hidup dalam keragaman tafsir, dari yang bercorak agraris, mistis, hingga etis. Justru dalam keragaman itulah kekayaannya tersembunyi. *Papat Kalima Pancer* tidak ingin dipakukan pada satu arti, melainkan ingin direnungkan sebagai simbol yang membuka banyak jalan pemahaman. Sikap ini sejalan dengan cara berpikir banyak masyarakat Nusantara yang lebih menyukai kebijaksanaan yang mengalir daripada dogma yang kaku.

Oleh karena itu, bab ini disusun sebagai undangan untuk menyelami, bukan sebagai pelajaran yang harus dihapal. Kita akan berjalan perlahan, dari asal-usul hingga tafsir-tafsirnya, dari unsur-unsur alamiah hingga relasi spiritualnya. Dengan begitu, ketika nanti kita memasuki bab-bab selanjutnya yang membahas keadilan, penjajahan tak terlihat, kepemimpinan, dan pertanian hijau, kita telah memiliki landasan yang kokoh. *Papat Kalima Pancer* akan kita pakai sebagai kacamata untuk membaca persoalan-persoalan itu. Tanpa landasan ini, pembacaan kita terhadap pidato KDM hanya akan menjadi tafsir politik sesaat. Dengan landasan ini, kita diajak untuk melihat bahwa di balik setiap persoalan sosial, ada persoalan kosmologis: manusia yang lupa pada tanahnya, airnya, udaranya, dan mataharinya akan kehilangan arah dalam membangun bangsanya.

Akhirnya, pengantar ini ingin menyampaikan satu pesan sederhana tetapi mendalam: bahwa di tengah keriuhan dunia modern yang serba cepat dan bising, ada baiknya kita berhenti sejenak untuk merenungkan kembali dari mana kita berasal dan apa yang menghidupi kita. *Papat Kalima Pancer* adalah salah satu jalan untuk merenungkan hal itu. Ia mengajak kita menengok ke tanah yang kita injak, air yang kita minum, udara yang kita hirup, dan matahari yang menyinari hari-hari kita. Di tengah masyarakat yang semakin sibuk mengejar kemajuan material, ajakan semacam ini mungkin terasa naif. Tetapi justru di situlah letak kekuatannya: ia mengingatkan bahwa kemajuan sejati tidak pernah boleh melupakan asal-usul kehidupan. Bangsa yang lupa pada tanah, air, udara, dan mataharinya adalah bangsa

yang sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri, meskipun di permukaan tampak gemerlap.

Dengan kerangka itu, kita siap melangkah ke pembahasan berikutnya tentang asal-usul *Papat Kalima Pancer*. Kita akan menelusuri jejak-jejaknya dalam kebudayaan Sunda dan Nusantara, memahami dari mana istilah ini lahir, serta bagaimana ia menjadi bagian dari cara pandang masyarakat agraris yang menghormati alam sebagai sumber kehidupan. Dari sanalah kita akan melihat bahwa apa yang disampaikan KDM dalam pidatonya bukanlah gagasan yang lahir tiba-tiba, melainkan buah dari persentuhan yang panjang antara manusia Sunda dengan tanah dan lingkungannya.

Asal-usul Papat Kalima Pancer

Menelusuri asal-usul *Papat Kalima Pancer* bukanlah pekerjaan sederhana, sebab ia tidak lahir dari sebuah kitab tunggal atau tokoh tertentu yang tercatat secara tertib dalam sejarah. Ia adalah konsep yang tumbuh dari pengalaman panjang masyarakat agraris Nusantara dalam membaca alam dan menempatkan dirinya di tengah-tengahnya. Dalam kebudayaan Sunda, konsep-konsep semacam ini umumnya diwariskan secara lisan, terpatri dalam ungkapan-ungkapan orang tua, dalam tutur para sesepuh, dalam pantun dan cerita rakyat, serta dalam praktik-praktik keseharian yang sering kali tidak dianggap serius oleh peradaban modern. Justru karena sifatnya yang lisan dan menyebar inilah, *Papat Kalima Pancer* tidak pernah menjadi semacam doktrin baku; ia lebih menyerupai mata air yang mengalir ke banyak arah, membasahi berbagai wilayah kehidupan.

Secara etimologis, istilah ini terdiri dari tiga kata dalam bahasa Sunda: *papat* yang berarti empat, *kalima* yang berarti kelima, dan *pancer* yang berarti pusat atau titik tetap. Dengan demikian, *Papat Kalima Pancer* dapat dipahami sebagai "empat yang kelimanya adalah pusat" atau "empat unsur yang dipusatkan oleh yang kelima." Dalam kosmologi tradisional, empat sering kali melambangkan arah mata angin—timur, barat, utara, selatan—atau unsur-unsur dasar kehidupan—tanah, air, api, dan angin—yang pada akhirnya harus ditarik ke satu pusat. Pusat itu adalah manusia, atau lebih tepatnya kesadaran manusia yang mampu menata dan menyeimbangkan semesta kecil di sekelilingnya. Dalam kerangka inilah manusia disebut sebagai *pancer*, bukan karena ia penguasa yang berdiri di atas alam, melainkan karena ia titik keseimbangan yang menyatukan semuanya (Mustapa, 2013).

Penting untuk dicatat bahwa gagasan tentang empat unsur dan satu pusat ini bukanlah monopoli kebudayaan Sunda. Banyak tradisi besar dunia memiliki struktur kosmologis yang serupa. Dalam filsafat Yunani kuno, Empedokles menyebut

empat unsur dasar—tanah, air, udara, dan api—yang membentuk seluruh kenyataan (Kingsley, 1995). Dalam tradisi India, dikenal konsep *pañcamahabhuta*, yaitu lima elemen dasar yang meliputi tanah, air, api, udara, dan ether. Demikian pula dalam tradisi Tionghoa kuno, dikenal konsep *wu xing* atau lima unsur yang saling menghidupi dan mengendalikan. Semua ini menunjukkan bahwa manusia di berbagai belahan dunia, ketika mencoba memahami asal-usul kehidupan, cenderung merujuk pada unsur-unsur alam yang paling dekat dengan pengalaman kesehariannya. Bedanya, setiap kebudayaan memberi tekanan yang berbeda pada relasi antara unsur-unsur itu dengan manusia sebagai subjek yang merasakan dan memaknainya.

Dalam konteks Sunda, *Papat Kalima Pancer* bukan sekadar rumus kosmologis, melainkan juga panduan hidup yang menyatu dengan pengalaman agraris. Masyarakat Sunda di masa lampau adalah masyarakat petani yang hidup dari tanah, air, udara, dan matahari. Dari pengalaman mengolah sawah, menanam padi, menunggu hujan, dan menyaksikan terbit serta terbenamnya matahari, mereka belajar bahwa hidup ini bergantung pada keseimbangan unsur-unsur alam. Jika hujan turun terlalu banyak, sawah kebanjiran; jika terlalu sedikit, tanah menjadi kering dan tanaman layu. Jika tanah dirawat, hasilnya melimpah; jika tanah ditelantarkan atau dirusak, hasilnya mengecewakan. Dari pengalaman panjang inilah lahir kesadaran bahwa manusia tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap alam. Ia harus membaca tanda-tanda, menjaga keseimbangan, dan menempatkan diri sebagai bagian dari siklus yang lebih besar. Dalam bahasa yang lebih modern, masyarakat agraris Sunda telah lama mempraktikkan apa yang kini disebut sebagai kearifan ekologis.

Sumber-sumber tertulis yang dapat dijadikan rujukan tentang *Papat Kalima Pancer* memang tidak sebanyak sumber-sumber filsafat Barat. Namun, bukan berarti jejaknya hilang sama sekali. Dalam naskah-naskah kuno Sunda seperti *Sanghyang Siksa Kandang Karesian*, *Amanat Galunggung*, dan *Sewaka Darma*, kita dapat menemukan cara pandang yang menempatkan manusia dalam relasi yang erat dengan alam, leluhur, dan Tuhan. Naskah-naskah itu mengajarkan bahwa hidup yang benar adalah hidup yang menjaga keselarasan, tidak serakah, tidak merusak, dan tidak melupakan asal-usul. *Sanghyang Siksa Kandang Karesian*, misalnya, berbicara tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan lahir dan batin, antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, antara manusia dan lingkungannya (Danasasmita, 1987). Dalam konteks ini, *Papat Kalima Pancer* dapat dibaca sebagai rumusan yang merangkum ajaran-ajaran itu dalam bentuk simbol yang padat.

Meskipun istilah *Papat Kalima Pancer* tidak selalu muncul secara eksplisit dalam naskah-naskah tersebut, semangatnya hidup dalam cara masyarakat Sunda menata ruang, waktu, dan relasi sosial. Dalam penataan ruang, misalnya, masyarakat Sunda

lama mengenal pembagian wilayah berdasarkan arah mata angin dan pusat, di mana pusat selalu dianggap sebagai tempat yang paling penting karena menjadi titik pertemuan dari segala arah. Dalam penataan waktu, dikenal pembagian musim yang sangat terkait dengan pergerakan matahari dan siklus hujan, yang menentukan kapan menanam, kapan memanen, dan kapan beristirahat. Dalam relasi sosial, dikenal pembagian peran yang seimbang antara pemimpin, rakyat, sesepuh, dan generasi muda. Semua ini adalah wujud nyata dari logika *Papat Kalima Pancer*: ada empat sisi, dan ada satu pusat yang menjaga keseimbangan di antara keempatnya.

Dalam banyak tradisi lisan Sunda, *Papat Kalima Pancer* juga dikaitkan dengan proses kelahiran manusia. Ada kepercayaan bahwa ketika seorang bayi lahir, ia disertai oleh empat saudara gaib yang dianggap sebagai "saudara" yang menyertai perjalanan hidupnya: kakang kawah, adi ari-ari, getih, dan pusar. Empat elemen ini kemudian dipusatkan oleh diri si anak sebagai *pancer*. Dalam tafsir yang lebih simbolik, kakang kawah mewakili air, adi ari-ari mewakili tanah, getih mewakili api atau energi, dan pusar mewakili udara atau napas. Manusia yang lahir ke dunia, dengan demikian, tidak pernah sendirian; ia selalu ditemani oleh unsur-unsur yang menghidupinya sejak ia masih di dalam kandungan. Tafsir ini memperlihatkan betapa dalamnya pemahaman masyarakat Sunda tentang keterhubungan antara manusia dan unsur-unsur alam, bahkan sejak detik-detik pertama kehidupannya.

Dalam kaitannya dengan pidato KDM, asal-usul *Papat Kalima Pancer* yang agraris dan spiritual ini menjadi penting. Ketika KDM mengucapkan istilah itu di hadapan para pejabat dan rakyat, ia seolah-olah sedang mengajak hadirin untuk kembali kepada cara pandang yang telah lama ditinggalkan: bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan tanah, air, udara, dan matahari; bahwa manusia tidak boleh menjadi pusat yang serakah, melainkan pusat yang menjaga. Ia juga mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak hanya diukur dari gedung-gedung yang berdiri, tetapi dari kualitas relasi manusia dengan alam dan sesamanya. Dengan menghidupkan kembali *Papat Kalima Pancer* dalam pidato kenegaraan, KDM sedang menautkan masa lalu yang arif dengan masa kini yang gelisah, serta memberi arah bagi masa depan yang lebih seimbang.

Kita juga perlu mencatat bahwa upaya mengangkat kembali kosmologi lokal semacam ini bukannya tanpa tantangan. Dunia modern telah begitu jauh meninggalkan cara pandang agraris, dan banyak orang menganggap istilah-istilah seperti *Papat Kalima Pancer* hanyalah peninggalan masa lalu yang tidak relevan dengan zaman teknologi. Namun, justru di tengah krisis ekologi global, krisis pangan, dan krisis makna yang melanda masyarakat modern, kearifan-kearifan seperti ini menemukan kembali relevansinya. Banyak pemikir kontemporer yang mulai menoleh kepada kebudayaan-kebudayaan lokal untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan pembangunan yang serba material (Shiva, 1993). Dalam konteks

itulah kita pantas bersyukur bahwa dalam pidato HUT ke-81 RI, istilah *Papat Kalima Pancer* sempat diucapkan, karena hal itu menandai kembalinya kesadaran akan pentingnya akar-akar budaya dalam membangun bangsa.

Dengan memahami asal-usul dan latar historisnya, kita menjadi lebih siap untuk menguraikan makna empat unsur dalam *Papat Kalima Pancer* secara lebih terperinci. Keempat unsur itu tidak boleh dipandang sebagai benda-benda mati; dalam kosmologi Sunda, tanah, air, udara, dan matahari adalah kekuatan hidup yang memiliki peran masing-masing, dan semuanya bermuara pada manusia sebagai pusat kesadaran. Pada sesi berikutnya, kita akan membedah satu per satu keempat unsur tersebut, menggali makna simboliknya, serta melihat bagaimana KDM memakainya untuk membangun argumen tentang kemerdekaan yang lebih utuh.

Empat Unsur — Tanah, Air, Udara, Matahari — dan Pancer sebagai Pusat Diri

Dalam kosmologi Sunda, alam tidak dipandang sebagai sekadar kumpulan benda mati yang menunggu untuk dieksploitasi. Alam adalah jalinan kekuatan hidup yang saling terkait dan terus-menerus bekerja sama untuk memungkinkan kehidupan berlangsung. *Papat Kalima Pancer* merangkum pemahaman ini dengan menampilkan empat unsur utama—tanah, air, udara, dan matahari—sebagai pilar-pilar yang menopang kehidupan, serta manusia sebagai *pancer*, titik pusat yang menyeimbangkan dan memaknai keempatnya. Dalam bab ini, kita akan membedah keempat unsur tersebut satu per satu, bukan sebagai objek ilmiah semata, melainkan sebagai simbol yang sarat makna filosofis, etis, dan spiritual. Dari sanalah kita akan melihat betapa dekatnya cara pandang ini dengan apa yang disampaikan KDM dalam pidatonya, terutama ketika ia berbicara tentang pertanian, kesehatan, dan kemerdekaan yang tidak boleh tercerabut dari alam.

Tanah adalah unsur pertama dan paling sering disebut dalam pidato KDM. Ia tidak berbicara tentang tanah sekadar sebagai lahan atau properti, melainkan sebagai ibu kehidupan, tempat segala sesuatu tumbuh dan kembali. Dalam banyak kebudayaan agraris, tanah dipandang sebagai entitas yang hidup, yang memiliki kesuburan, kehendak, dan bahkan kemuliaan. Masyarakat Sunda lama mengenal ungkapan-ungkapan yang menghormati tanah, seperti *ngamumule lemah cai*, yang berarti memelihara tanah dan air sebagai warisan leluhur. Sikap ini lahir dari kesadaran bahwa tanah bukan milik mutlak manusia; manusia hanyalah pengelola yang kebetulan hidup di atasnya untuk sementara waktu. Dalam konteks pidato KDM, penghormatan terhadap tanah menjadi dasar bagi gagasan pertanian organik. Ia berkata bahwa para petani harus mencintai, menghormati, mengurus,

dan memuliakan tanahnya. Dari tanah yang dimuliakan itulah lahir tanaman yang mulia, dan dari tanaman yang mulia lahir manusia yang mulia. Logika ini menegaskan bahwa kualitas moral dan fisik manusia tidak bisa dipisahkan dari cara kita memperlakukan tanah.

Air adalah unsur kedua yang dalam filosofi *Papat Kalima Pancer* menempati posisi yang sama pentingnya. Air adalah darah kehidupan; ia mengalir dalam tubuh manusia, mengairi sawah, mengisi sungai dan danau, serta menjadi syarat mutlak bagi keberlangsungan hidup. Dalam tradisi Sunda, air juga memiliki dimensi spiritual. Banyak ritual dan penghormatan dilakukan di dekat mata air, sungai, atau sumber-sumber air yang dianggap keramat. Air yang bersih melambangkan hati yang jernih, sementara air yang kotor melambangkan keserakahan dan ketidakseimbangan. Dalam pidato KDM, air disebut sebagai bagian dari ikatan kosmis yang menyatukan kehidupan. Ia menyebut bahwa tanah, air, matahari, dan udara saling mengikatkan diri untuk melahirkan tanaman yang berkualitas. Ini berarti air tidak boleh dipandang hanya sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai amanat yang harus dijaga kebersihannya. Ketika air tercemar, bukan hanya tubuh yang sakit, tetapi juga jiwa yang kehilangan kejernihannya. Karena itu, upaya memerdekakan rakyat tidak mungkin selesai tanpa memerdekakan air dari pencemaran, sebagaimana ditegaskan dalam gagasan KDM tentang masyarakat yang sehat dan bermutu.

Udara, meskipun tidak selalu disebut secara eksplisit oleh KDM, hadir dalam keseluruhan gagasannya tentang kualitas hidup. Udara bersih adalah hak dasar yang disebutnya dalam bagian tentang keadilan komutatif: setiap warga berhak menghirup udara bersih setiap hari. Dalam kosmologi Sunda, udara atau napas sering dikaitkan dengan ruh, dengan hembusan kehidupan yang tak terlihat tetapi menentukan. Manusia bisa bertahan beberapa hari tanpa air dan beberapa minggu tanpa makanan, tetapi hanya beberapa menit tanpa udara. Karena itu, udara adalah unsur yang paling dekat dengan kehidupan itu sendiri, namun justru paling sering dilupakan. Ketika udara tercemar oleh kendaraan, pabrik, dan pembakaran sampah, maka seluruh warga—tanpa kecuali—menanggung akibatnya. Dalam hal ini, keadilan udara adalah metafora dari keadilan sosial: ada hal-hal yang tidak boleh dikuasai atau dirusak oleh sekelompok orang karena dampaknya dirasakan oleh semua. Memerdekakan udara berarti memulihkan ruang hidup bersama agar setiap orang dapat bernapas tanpa takut akan racun.

Matahari adalah unsur keempat yang dalam pidato KDM memperoleh makna yang lebih dari sekadar sumber cahaya dan energi. Matahari adalah lambang kekuatan, keteguhan, dan kemurahan yang tidak pilih kasih. Ia menyinari semua orang, tanpa memandang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa. Dalam konteks ini, matahari menjadi simbol keadilan kosmis: energi yang tersedia melimpah bagi semua, tetapi pengelolaannya sering kali dikuasai oleh segelintir pihak. KDM

menyebut bahwa Jawa Barat adalah pusat energi—geotermal, pembangkit listrik tenaga air, dan sumber energi lainnya berlimpah—tetapi masih ada puluhan ribu warga yang tidak menikmati listrik. Di sinilah ironi itu muncul: matahari bersinar, air mengalir, tanah menyimpan panas bumi, tetapi rakyat di sekitarnya hidup dalam kegelapan. Dalam perspektif *Papat Kalima Pancer*, kegelapan itu bukan karena alam yang pelit, melainkan karena manusia yang gagal menjadi *pancer* yang adil. Energi yang berlimpah tidak dikelola untuk kesejahteraan bersama, melainkan mengikuti logika keuntungan yang timpang. Maka, memerdekakan rakyat dari kegelapan adalah bagian dari menegakkan kembali keseimbangan kosmis yang telah rusak.

Setelah memahami keempat unsur tersebut, kita sampai pada inti terdalam dari filosofi ini: *pancer*. Dalam struktur *Papat Kalima Pancer*, manusia tidak berada di atas alam, tetapi di tengah-tengahnya. Ia adalah pusat yang seharusnya menyeimbangkan, bukan menguasai. Posisi ini menuntut tanggung jawab yang besar, karena kerusakan pada salah satu unsur akan berimbas pada keseluruhan, dan manusia sebagai pusat akan merasakan akibatnya paling dalam. Dalam bahasa yang lebih modern, manusia adalah *steward* atau penjaga bumi, bukan pemilik mutlak. Namun, dalam praktiknya, manusia modern justru sering berubah menjadi perusak paling ulung. Ia mengeruk tanah, mengotori air, mencemari udara, dan menghalangi akses sesamanya terhadap energi yang tersedia. Dalam situasi seperti ini, *pancer* tidak lagi berfungsi sebagai pusat keseimbangan, melainkan sebagai pusat keserakahan. Maka, panggilan untuk kembali kepada *Papat Kalima Pancer* adalah panggilan untuk bertobat: memulihkan posisi manusia sebagai penjaga, bukan sebagai penguasa yang rakus.

Penting juga untuk memahami bahwa dalam kosmologi Sunda, *pancer* bukan hanya soal etika lingkungan, tetapi juga soal kematangan spiritual. Seorang manusia menjadi *pancer* sejati ketika ia mampu menyatukan empat unsur dalam dirinya: menjaga tubuhnya (tanah), menjernihkan hatinya (air), menata pikirannya (udara), dan menghidupkan semangatnya (matahari). Dengan kata lain, keseimbangan alam dan keseimbangan diri adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Manusia yang tidak mampu menyeimbangkan dirinya akan sulit menyeimbangkan lingkungannya; sebaliknya, lingkungan yang rusak akan merusak keseimbangan diri manusia yang hidup di dalamnya. Di sinilah KDM menyentuh dimensi yang dalam ketika ia berbicara tentang "warga yang mulia"—mulia darahnya, detak jantungnya, tatapan matanya, pendengarannya, dan pengucapannya. Ia sedang menggambarkan manusia yang hidup dalam keseimbangan penuh, baik secara fisik, mental, maupun spiritual.

Dalam konteks kebangsaan, empat unsur ini dapat pula dibaca sebagai metafora dari empat pilar yang harus dijaga agar sebuah bangsa benar-benar merdeka: keadilan sosial (tanah sebagai sumber penghidupan), kejernihan hati para pemimpin (air sebagai lambang kebeningan niat), kebebasan berpikir yang

sehat (udara sebagai ruang bernapasnya akal), dan semangat serta energi untuk membangun (matahari sebagai sumber daya dan daya juang). Ketika keempatnya seimbang, bangsa itu akan berdiri tegak. Ketika salah satunya timpang, maka seluruh bangunan kebangsaan akan goyah. KDM, dengan menyebut *Papat Kalima Pancer*, sesungguhnya sedang memberikan diagnosa atas ketimpangan yang terjadi: tanah dirusak, air dicemari, udara dikotori, energi dikuasai, dan manusia kehilangan pusatnya. Maka, pemulihan kemerdekaan harus dimulai dari pemulihan keseimbangan ini.

Dengan demikian, memahami empat unsur dalam *Papat Kalima Pancer* bukanlah pekerjaan intelektual yang kering. Ia adalah latihan kesadaran untuk kembali merasakan keterhubungan kita dengan tanah, air, udara, dan matahari. Di tengah kehidupan modern yang semakin menjauhkan manusia dari alam, kita sering lupa bahwa setiap butir nasi yang kita makan adalah hasil kerja sama tanah, air, udara, dan matahari; setiap teguk air adalah pemberian yang mengalir dari siklus yang lebih besar dari kita; setiap helaan napas adalah bukti bahwa kita hidup dalam jaring-jaring kosmis yang tidak bisa kita kuasai sepenuhnya. Kesadaran semacam ini bukanlah pelarian ke masa lalu, melainkan dasar untuk membangun masa depan yang tidak merusak. Di sinilah relevansi *Papat Kalima Pancer* bagi kita hari ini: ia memberi kita bahasa untuk berbicara tentang pembangunan tanpa kehilangan akar, tentang kemajuan tanpa menghancurkan alam, dan tentang kemerdekaan tanpa melupakan yang paling dasar.

Relasi Manusia–Alam–Tuhan dalam Kosmologi Sunda

Dalam pandangan hidup masyarakat Sunda, alam tidak pernah dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari Tuhan. Alam adalah ayat-ayat yang terbentang, tempat manusia membaca kehadiran Yang Maha Kuasa melalui gunung, sungai, hutan, sawah, hujan, dan panas matahari. Karena itu, relasi manusia dengan alam bukanlah relasi subjek-objek yang dingin, melainkan relasi yang sarat dengan kesadaran transendental: ketika manusia memuliakan alam, ia sedang memuliakan Tuhan; ketika manusia merusak alam, ia sedang mengingkari amanat yang dititipkan kepadanya. Dalam struktur *Papat Kalima Pancer*, relasi tiga arah ini—manusia, alam, dan Tuhan—terjalin sangat erat. Manusia adalah *pancer* yang berdiri di tengah empat unsur alam, sementara Tuhan hadir sebagai sumber dan tujuan dari seluruh keseimbangan itu. Tidak ada satu pun unsur yang berdiri sendiri; semuanya saling menunjuk dan saling mengikat.

Pandangan semacam ini sebenarnya tidak hanya hidup dalam kebudayaan Sunda, tetapi juga menjadi napas dari banyak kosmologi Nusantara. Di berbagai

daerah, masyarakat adat memiliki keyakinan bahwa tanah, air, hutan, dan gunung bukan benda mati, melainkan memiliki daya hidup yang harus dihormati. Dalam studi-studi ekologi religius, cara pandang seperti ini sering disebut sebagai *sacred ecology*, yaitu ekologi yang dilekatkan pada kesadaran akan yang sakral (Berkes, 1999). Alam dirawat bukan semata-mata karena perhitungan ekonomi, melainkan karena ia dianggap sebagai rumah bersama yang dihuni oleh manusia, leluhur, dan kekuatan-kekuatan ilahi. Dalam konteks *Papat Kalima Pancer*, kesadaran ini terwujud dalam sikap hati-hati terhadap tanah, kesediaan menjaga mata air, penghormatan terhadap siklus musim, dan keyakinan bahwa merusak alam sama artinya dengan melukai diri sendiri serta melanggar kehendak Tuhan.

KDM dalam pidatonya menyinggung dimensi spiritual ini dengan cara yang halus tetapi tegas. Ia berkata, "Dan Tuhan hadir dalam setiap jengkal tanah, melahirkan kesuburan, melahirkan masyarakat Jawa Barat yang subur makmur, gemah ripah, repeh, rapih." Kalimat ini bukanlah sekadar ungkapan puitis; ia adalah pernyataan teologis tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di masjid, gereja, atau tempat-tempat ibadah. Dalam kalimat itu tersimpan pandangan bahwa tanah yang subur bukan hanya hasil kerja teknis, melainkan juga anugerah yang mengandung kehadiran ilahi. Ketika manusia bekerja di sawah, merawat air, menanam padi, dan memanen hasilnya, ia sebenarnya sedang berada dalam medan perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu, bekerja di atas tanah adalah ibadah, dan memperlakukan tanah dengan baik adalah bentuk syukur yang paling nyata.

Relasi manusia–alam–Tuhan dalam kosmologi Sunda juga tercermin dalam konsep *insan kamil* yang disebut KDM di ujung pidatonya. Dalam tradisi Islam, *insan kamil* adalah manusia sempurna yang mampu memancarkan sifat-sifat ilahi dalam kehidupan, manusia yang tidak hanya saleh secara ritual, tetapi juga saleh secara sosial dan ekologis (Schimmel, 1975). Dengan menyandingkan *insan kamil* dan "manusia Indonesia seutuhnya," KDM sedang mempertemukan dua arus besar: spiritualitas Islam dan cita-cita kebangsaan. Ia ingin menegaskan bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya diukur dari kekuatan militer atau pertumbuhan ekonomi, tetapi dari lahirnya manusia-manusia yang utuh, yang seimbang antara akal dan hatinya, antara kerja dan doanya, antara cintanya kepada Tuhan dan cintanya kepada tanah air. Dalam bingkai *Papat Kalima Pancer*, manusia yang utuh adalah manusia yang mampu menempatkan dirinya sebagai pusat yang menjaga keseimbangan empat unsur, sekaligus menyadari bahwa keseimbangan itu adalah amanat dari Tuhan.

Relasi ini juga bisa kita lihat dari cara masyarakat Sunda memaknai *pancer* bukan sebagai posisi yang dominan, melainkan sebagai posisi yang rendah hati. Dalam banyak kisah dan ajaran Sunda, orang yang bijak justru digambarkan sebagai orang yang mampu "ngalah," mengalah bukan karena lemah, melainkan karena

memahami bahwa hidup ini bukan soal menang-menangan. Ia adalah orang yang tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri, kapan harus bekerja dan kapan harus beristirahat, kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dalam hubungannya dengan alam, sikap ini melahirkan tindakan yang tidak serakah: mengambil secukupnya, mengembalikan sisanya, dan memastikan bahwa generasi berikutnya masih bisa menikmati apa yang hari ini kita nikmati. Sikap rendah hati inilah yang membuat manusia tidak merasa sebagai tuan atas alam, tetapi sebagai bagian dari alam yang diberi kepercayaan untuk merawatnya.

Di sinilah letak kritik tajam yang bisa kita tarik dari filosofi *Papat Kalima Pancer* terhadap cara pembangunan modern. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi cenderung menempatkan manusia di luar alam, atau bahkan di atas alam. Alam dianggap sebagai stok sumber daya yang bisa dikeruk, diolah, dan dijual tanpa perlu dipikirkan lagi keseimbangannya. Relasi dengan Tuhan pun sering kali dipinggirkan, karena ukuran keberhasilan hanya dihitung dari angka-angka material. Maka, tidak heran jika kita menyaksikan ironi seperti yang diungkap KDM: negeri yang kaya energi tetapi rakyatnya gelap gulita; tanah yang subur tetapi petaninya miskin; air melimpah tetapi banyak desa yang kekurangan air bersih. Ironi-ironi itu adalah buah dari cara pandang yang memisahkan manusia dari alam dan dari Tuhan, lalu menempatkan keuntungan jangka pendek sebagai satu-satunya arah.

Sebaliknya, *Papat Kalima Pancer* menawarkan cara pandang yang menyatukan kembali apa yang telah dicerai-beraikan. Ia mengajak kita untuk memandang tanah sebagai amanat, air sebagai berkah, udara sebagai napas kehidupan, matahari sebagai sumber energi yang adil, dan manusia sebagai pusat yang bertanggung jawab. Dalam kerangka ini, pembangunan tidak boleh dinilai dari seberapa cepat ia menghasilkan uang, tetapi dari seberapa dalam ia memperkuat keseimbangan hidup. Pertanian organik yang didorong KDM, misalnya, bukan hanya soal teknik bercocok tanam, tetapi juga soal memulihkan relasi manusia dengan tanah, air, dan udara. Ia menolak penggunaan pestisida dan pupuk kimia bukan semata-mata karena alasan kesehatan, tetapi karena penggunaan itu mencerminkan sikap yang ingin memaksa alam melampaui kemampuannya. Dengan menolak pemaksaan itu, manusia kembali ke posisinya sebagai penjaga, bukan sebagai penguasa yang rakus.

Kesadaran akan relasi manusia–alam–Tuhan ini juga memberi kekuatan moral dalam perjuangan melawan penjajahan tak terlihat. KDM menyebut tramadol dan obat-obatan terlarang sebagai bagian dari sistem yang merusak pikiran dan masa depan generasi. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, narkoba adalah perusak keseimbangan dalam diri manusia. Ia merusak akal yang seharusnya menjadi pusat kesadaran, mematikan hati yang seharusnya menjadi tempat kehadiran Tuhan, dan menghancurkan tubuh yang dibentuk dari unsur tanah dan air. Melawan narkoba,

dengan demikian, bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal menjaga kesucian diri sebagai *pancer*. Generasi yang sehat adalah generasi yang pikirannya jernih seperti udara pagi, hatinya bening seperti air pegunungan, tenaganya kuat seperti sinar matahari, dan akarnya kokoh seperti tanah yang subur.

Dengan demikian, sesi ini menegaskan bahwa *Papat Kalima Pancer* bukan sekadar rumus kosmologis, melainkan sebuah etika kehidupan yang utuh. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak bisa hidup baik tanpa alam yang baik, dan alam tidak bisa baik tanpa manusia yang sadar akan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Di tengah krisis ekologi, krisis moral, dan krisis kebangsaan yang kita alami hari ini, filosofi ini menjadi semacam panggilan untuk pulang: pulang ke tanah, pulang ke air, pulang ke udara, pulang ke matahari, dan pulang ke pusat diri yang telah lama hilang. KDM dalam pidatonya telah membuka jalan itu. Kini tugas kita adalah menelusurinya lebih jauh, agar kemerdekaan yang kita rayakan tidak berhenti sebagai seremoni, melainkan menjadi kenyataan yang hidup di dalam diri setiap warga.

BAB 2
PAPAT KALIMA PANCER DAN KONSEP MANUSIA SEUTUHNYA

Setiap zaman memiliki krisisnya sendiri, dan setiap krisis selalu bermuara pada satu pertanyaan yang sama: seperti apakah manusia yang baik, yang utuh, yang pantas menjadi teladan? Pertanyaan ini tidak pernah usang, karena di setiap generasi selalu ada godaan untuk mereduksi manusia menjadi sekadar angka, jabatan, harta, atau fungsi ekonomi. Dalam dunia modern yang serba materialistis, manusia sering diukur dari produktivitasnya, bukan dari kedalaman jiwanya; dari penampilannya, bukan dari kejujurannya; dari kekuasaannya, bukan dari kebijaksanaannya. Maka, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa krisis terbesar bangsa ini bukan semata krisis ekonomi atau politik, melainkan krisis konsep tentang manusia itu sendiri. Kita kehilangan gambaran yang utuh tentang apa artinya menjadi manusia Indonesia, manusia yang merdeka, dan manusia yang seutuhnya.

Dalam pidato KDM, kegelisahan semacam ini memperoleh ungkapannya yang jernih. Ia menyebut *Papat Kalima Pancer* sebagai cara pandang yang menempatkan manusia di pusat keseimbangan unsur-unsur kehidupan, lalu menyandingkannya dengan konsep *insan kamil* dalam Islam dan "manusia Indonesia seutuhnya" dalam wacana kebangsaan. Penyandingan ini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah upaya untuk mempertemukan warisan lokal, spiritualitas, dan cita-cita nasional dalam satu napas. Di sinilah letak kekayaan pidato itu: ia tidak berbicara tentang manusia seutuhnya secara abstrak, tetapi mengaitkannya dengan tanah, air, udara, matahari, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan kata lain, manusia seutuhnya dalam pandangan KDM adalah manusia yang seimbang, yang tidak hanya pandai menguasai alam tetapi juga sanggup merawatnya, tidak hanya mengejar kemajuan tetapi juga menjaga keadilan, dan tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk sesama dan Tuhannya.

Bab ini akan menguraikan kesejajaran antara *Papat Kalima Pancer* dan konsep *insan kamil* dalam Islam, kemudian melihat relevansinya dengan Pancasila sebagai lima sila yang seharusnya menyatu, dan akhirnya menarik benang merahnya ke

dalam pemahaman tentang kemerdekaan sebagai keseimbangan unsur. Kita akan melihat bahwa filosofi Sunda ini sebenarnya tidak berdiri sendirian; ia berdialog dengan tradisi-tradisi besar yang juga merindukan lahirnya manusia yang utuh. Justru dalam dialog itulah *Papat Kalima Pancer* menemukan daya hidupnya: ia bukan fosil budaya, melainkan gagasan yang sanggup berbicara melintasi zaman dan tradisi.

Penting untuk dicatat bahwa pembahasan tentang manusia seutuhnya bukanlah pembahasan yang ringan. Ia menyangkut pertanyaan-pertanyaan dasar tentang hakikat manusia, tujuan hidup, dan ukuran keberhasilan sebuah peradaban. Masyarakat yang sibuk membangun gedung-gedung pencakar langit tetapi warganya kehilangan kedamaian jiwa, sesungguhnya belum layak disebut maju. Sebaliknya, masyarakat yang sederhana tetapi warganya jujur, rukun, dan menghormati alam, mungkin justru lebih dekat kepada cita-cita kemerdekaan sejati. Dalam konteks inilah kita perlu mendengar kembali kearifan lama seperti *Papat Kalima Pancer*, karena ia mengingatkan kita bahwa ukuran kemajuan bukan hanya pada apa yang tampak di permukaan, melainkan pada kualitas batin yang menopang semuanya.

Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci, perlu ditegaskan bahwa istilah "manusia seutuhnya" dalam bab ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan sosok yang sempurna tanpa cela. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang dimaksud adalah manusia yang berusaha menjaga keseimbangan dalam dirinya, tidak membiarkan satu sisi mendominasi sisi yang lain. Manusia yang pikirannya tajam tetapi hatinya dingin adalah contoh ketidakutuhan; demikian pula manusia yang rajin beribadah tetapi tidak peduli pada lingkungan sekitarnya. Keutuhan adalah proses, bukan hasil akhir; ia adalah arah, bukan tempat berhenti. Dengan pemahaman ini, kita akan terhindar dari kesan bahwa *Papat Kalima Pancer* atau *insan kamil* adalah utopia yang tidak terjangkau, dan sebaliknya kita akan memandangnya sebagai panggilan untuk terus berusaha memperbaiki diri.

Bab ini juga akan memperlihatkan bahwa konsep manusia seutuhnya sangat erat kaitannya dengan kemerdekaan. Orang yang tidak utuh tidak akan sanggup merasakan dan memperjuangkan kemerdekaan dengan benar. Orang yang pikirannya terjajah, misalnya, akan selalu bergantung pada penilaian orang lain; ia merdeka secara hukum, tetapi tidak merdeka secara mental. Orang yang serakah tidak akan pernah merasa cukup; ia merdeka secara ekonomi, tetapi batinnya selalu gelisah. Maka, kemerdekaan sejati harus dimulai dari dalam diri manusia: merdeka dari kebodohan, merdeka dari keserakahan, merdeka dari rasa rendah diri, dan merdeka dari kesombongan. *Papat Kalima Pancer* memberikan jalan ke arah itu dengan mengajak manusia kembali ke pusat dirinya, menyeimbangkan empat unsur yang ada di sekelilingnya, dan menyadari bahwa semuanya adalah amanat dari Tuhan.

Dengan demikian, pengantar bab ini ingin menegaskan bahwa kita sedang memasuki wilayah yang dalam, tetapi juga sangat praktis. Sebab berbicara tentang manusia seutuhnya pada akhirnya akan membawa kita kepada pertanyaan-pertanyaan sederhana yang menguji hidup kita sehari-hari: Apakah kita sudah memperlakukan tanah, air, udara, dan matahari dengan hormat? Apakah kita sudah berlaku adil kepada sesama? Apakah kita sudah menahan diri dari keinginan yang berlebihan? Apakah kita sudah menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, minimal bagi diri kita sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu akan menemani kita sepanjang bab ini, dan barangkali juga sepanjang sisa perjalanan buku ini.

Pada sesi berikutnya, kita akan mulai dengan menelusuri kesejajaran antara *Papat Kalima Pancer* dan konsep *insan kamil* dalam Islam. Kita akan melihat bagaimana dua tradisi ini, meskipun lahir dari rahim budaya yang berbeda, bertemu dalam satu keyakinan bahwa manusia sejati adalah manusia yang menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani, antara dirinya dan alam, serta antara dirinya dan Tuhan. Dari titik temu itulah kita akan belajar bahwa kearifan lokal dan ajaran agama tidak harus dipertentangkan, melainkan dapat saling memperkuat dalam membentuk manusia Indonesia yang utuh.

Kesejajaran dengan Insan Kamil dalam Islam

Dalam tradisi Islam, terutama dalam tasawuf, istilah *insan kamil* merujuk pada manusia sempurna, yaitu manusia yang mampu memantulkan sifat-sifat ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini berakar pada pemahaman bahwa manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an, dan diberi tanggung jawab untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ibn Arabi, salah satu pemikir tasawuf terbesar, memaknai *insan kamil* sebagai cermin sempurna yang melaluinya Tuhan melihat diri-Nya, sekaligus sebagai jembatan antara dunia yang tampak dan yang tak tampak (Chittick, 1989). Dalam diri *insan kamil*, akal, hati, dan perbuatan berjalan seiring, sehingga ia tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga jernih secara spiritual dan luhur secara akhlak.

Konsep ini sejalan dengan *Papat Kalima Pancer* dalam hal yang sangat mendasar: keduanya menempatkan manusia sebagai pusat yang harus menyeimbangkan berbagai kekuatan yang menghidupinya. Dalam kosmologi Sunda, manusia adalah *pancer* yang berdiri di tengah tanah, air, udara, dan matahari. Dalam tasawuf, manusia adalah khalifah yang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan alam dan menebarkan rahmat ke seluruh makhluk. Dua-duanya menolak cara pandang yang meletakkan manusia sebagai makhluk yang terpisah dari alam, atau lebih buruk, sebagai penguasa alam yang bebas melakukan apa saja. Dengan kata lain, menjadi

manusia sejati dalam kedua tradisi ini adalah menjadi penjaga, bukan perusak; menjadi pusat keseimbangan, bukan pusat keserakahan.

Salah satu titik temu yang paling mencolok antara *Papat Kalima Pancer* dan *insan kamil* adalah pandangan bahwa kualitas batin seseorang akan memengaruhi dunia di sekitarnya. Dalam pidatonya, KDM berbicara tentang tanah yang dimuliakan akan melahirkan tanaman yang mulia, dan tanaman yang mulia akan melahirkan manusia yang mulia. Ini bukan logika materialistik sederhana, melainkan pengakuan bahwa ada hubungan batiniah antara manusia dan alam. Dalam tasawuf, pandangan semacam ini dikenal dengan istilah *barakah*, yaitu energi kebaikan yang mengalir dari hati yang bersih kepada lingkungan sekitarnya. Orang yang saleh bukan hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga menghadirkan keberkahan bagi tanah, air, hewan, dan sesama manusia. Maka, ketika manusia memuliakan alam, ia sedang memuliakan dirinya sendiri; dan ketika ia merusak alam, ia sedang menghancurkan dirinya sendiri, baik secara fisik maupun spiritual.

Kesejajaran berikutnya terletak pada pemahaman tentang keseimbangan antara empat unsur dalam diri manusia. Dalam tasawuf, manusia sering digambarkan memiliki empat unsur yang harus diseimbangkan: akal, hati, nafsu, dan ruh. Akal yang tidak diimbangi hati akan melahirkan kesombongan intelektual; nafsu yang tidak dikendalikan ruh akan melahirkan kehancuran moral; ruh yang tidak dibimbing akal akan membuat orang melayang tanpa pijakan. Demikian pula dalam *Papat Kalima Pancer*, tanah, air, udara, dan matahari bukan hanya unsur alam, tetapi juga simbol dari unsur-unsur dalam diri: tubuh yang harus dirawat, hati yang harus dijernihkan, pikiran yang harus dijaga kejernihannya, dan semangat yang harus tetap menyala. Manusia yang seimbang adalah manusia yang tidak menindas salah satu unsurnya, tetapi merawat semuanya dengan adil.

KDM sendiri secara eksplisit menyandingkan *Papat Kalima Pancer* dengan *insan kamil* dalam pidatonya. Ia berkata bahwa sifat saling mengikatkan antara manusia, alam, dan Tuhan adalah sifat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dalam kaidah Islam, kata dia, itulah *insan kamil*; dalam kaidah kebangsaan, itulah manusia Indonesia seutuhnya. Pernyataan ini sangat penting karena ia menegaskan bahwa warisan budaya lokal dan ajaran agama tidak harus dipertentangkan. Justru keduanya bertemu dalam satu cita-cita yang sama: melahirkan manusia yang utuh, yang tidak hanya pandai bekerja tetapi juga pandai merasakan; tidak hanya taat beribadah tetapi juga peduli pada sesama; tidak hanya mencintai Tuhan tetapi juga mencintai tanah air sebagai bagian dari tanggung jawab keimanan.

Dari perspektif psikologi modern, gagasan tentang manusia seutuhnya ini menemukan gemanya dalam konsep *self-actualization* yang dipopulerkan oleh Abraham Maslow. Manusia yang mengaktualisasikan dirinya adalah manusia yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya secara sehat—mulai dari

kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta, harga diri, hingga kebutuhan transendensi (Maslow, 1971). Dalam bahasa *Papat Kalima Pancer*, aktualisasi diri berarti tercapainya keseimbangan antara tanah (kebutuhan jasmani), air (kesejahteraan emosional), udara (kejernihan berpikir), dan matahari (spiritualitas dan semangat hidup). Ketika satu sisi saja terabaikan, manusia tidak akan mencapai keutuhan, dan ketidakutuhan itu akan memancar keluar sebagai perilaku yang merusak: korupsi, kekerasan, perusakan alam, dan ketidakpedulian sosial.

Namun, ada satu perbedaan penting yang perlu dicatat. Dalam banyak teori modern, manusia seutuhnya sering kali dipahami sebagai pencapaian individu yang berdiri sendiri. Sementara itu, baik *insan kamil* maupun *Papat Kalima Pancer* menekankan bahwa keutuhan manusia tidak dapat dicapai sendirian. Ia selalu terkait dengan relasi kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada alam. Manusia tidak utuh hanya karena ia merasa bahagia atau sukses secara pribadi; ia utuh ketika keberadaannya membawa kebaikan bagi lingkungannya. Dalam tasawuf, hal ini disebut *akhlaq karimah*, budi pekerti luhur yang menuntun orang untuk berbuat baik kepada semua makhluk. Dalam *Papat Kalima Pancer*, hal ini tercermin dalam kesediaan untuk memuliakan tanah, menjaga air, membersihkan udara, dan membagi energi secara adil. Dengan kata lain, keutuhan adalah urusan kolektif, bukan sekadar urusan pribadi.

Penyatuan antara *Papat Kalima Pancer* dan *insan kamil* juga memberi kita bahasa untuk menjembatani spiritualitas dan kebangsaan. Selama ini, banyak orang menganggap bahwa urusan agama dan urusan negara harus dipisahkan secara tegas, bahkan kadang dipertentangkan. Padahal, dalam pengalaman Indonesia, nilai-nilai agama dan kearifan lokal telah lama menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan cita-cita kebangsaan. Pancasila sendiri lahir dari pergumulan antara nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kearifan Nusantara. Dengan mempertemukan *insan kamil* dan *Papat Kalima Pancer*, KDM sedang mengingatkan kita bahwa pembangunan bangsa tidak boleh kering dari dimensi spiritual dan budaya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang warganya tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak; tidak hanya sejahtera, tetapi juga adil; tidak hanya merdeka, tetapi juga bertanggung jawab.

Dengan demikian, kesejajaran antara *Papat Kalima Pancer* dan *insan kamil* bukanlah persoalan akademis yang jauh dari kehidupan. Ia adalah jawaban atas kerinduan kita akan sosok manusia Indonesia yang hilang: manusia yang jujur, pekerja keras, hormat kepada alam, dan takut kepada Tuhan. Sosok seperti inilah yang diperlukan untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Tanpa lahirnya manusia-manusia utuh, kemerdekaan hanya akan menjadi panggung bagi para pemimpin yang haus kekuasaan dan rakyat yang apatis. Sebaliknya, jika manusia-manusia utuh lahir di banyak tempat, di desa-desa, di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, dan di rumah-rumah, maka kemerdekaan

akan hidup dengan sendirinya, karena kemerdekaan sejati memang bermula dari dalam diri.

Relevansi dengan Pancasila sebagai Lima Sila yang Menyatu

Pancasila sering disebut sebagai dasar negara, tetapi jarang direnungkan sebagai satu kesatuan organik yang hidup. Ia dihafal, diucapkan dalam upacara, ditulis di buku-buku pelajaran, dan dikutip dalam pidato-pidato resmi, namun maknanya sering kali tereduksi menjadi lima butir yang berdiri sendiri-sendiri. Sila pertama dianggap urusan agama, sila kedua urusan kemanusiaan, sila ketiga urusan kebangsaan, sila keempat urusan demokrasi, dan sila kelima urusan kesejahteraan. Padahal, kekuatan Pancasila justru terletak pada kesatuannya: kelima sila itu saling menjiwai dan tidak boleh dipisahkan, sebagaimana sebuah tubuh tidak boleh dicerai-beraikan organ-organnya. Dalam konteks inilah filosofi *Papat Kalima Pancer* memberikan sumbangan tafsir yang menarik: Pancasila dapat dipahami sebagai wujud kebangsaan dari kesadaran akan keseimbangan, di mana manusia dan bangsa berdiri sebagai *pancer* yang menyeimbangkan berbagai kekuatan hidup, baik yang bersifat spiritual, sosial, maupun alamiah.

Ketika KDM menyebut bahwa sifat saling mengikatkan antara manusia, alam, dan Tuhan adalah "sifat ketuhanan, sifat kemanusiaan, sifat persatuan, sifat kerakyatan, dan sifat keadilan," ia sebenarnya sedang memproyeksikan logika *Papat Kalima Pancer* ke dalam bingkai Pancasila. Ketuhanan adalah pusat dari segala pusat, sumber keseimbangan tertinggi yang menjiwai seluruh sila. Kemanusiaan adalah pengakuan bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama, sebagaimana tanah, air, udara, dan matahari memberi hidup kepada semua tanpa pilih kasih. Persatuan adalah ikatan yang menegaskan bahwa merah dan putih, seperti halnya empat unsur, tidak boleh dipisahkan. Kerakyatan adalah cara hidup bersama yang menghormati suara dan hak setiap orang dalam semangat musyawarah. Keadilan sosial adalah buah dari semua sila itu, yaitu keadaan di mana setiap warga dapat menikmati kesejahteraan dan kesempatan yang setara. Dengan kata lain, Pancasila adalah rumusan kebangsaan dari keseimbangan kosmis yang dalam budaya Sunda diungkapkan melalui *Papat Kalima Pancer*.

Kita dapat memperdalam tafsir ini dengan melihat bagaimana setiap sila sesungguhnya menuntut keseimbangan unsur-unsur yang berbeda, bukan dominasi satu unsur atas unsur lain. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan bahwa bangsa ini dibangun di atas kesadaran transenden, bukan atas dasar kekuasaan duniawi semata. Negara bukan tuhan, dan kekuasaan bukan tujuan akhir. Sila ini mengingatkan para pemimpin bahwa mereka hanyalah *pancer*

yang diberi amanat, bukan pemilik mutlak dari kekuasaan. Dalam bahasa *Papat Kalima Pancer*, Tuhan hadir dalam setiap jengkal tanah, dan karena itu tidak ada jengkal kekuasaan yang boleh diperlakukan tanpa rasa takut dan tanggung jawab kepada-Nya. Maka, korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan penindasan atas nama negara adalah pengingkaran terhadap sila pertama sekaligus perusakan terhadap keseimbangan kosmis.

Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, berbicara tentang martabat manusia yang harus dihormati dalam keadaan apa pun. Ini sejalan dengan gagasan bahwa setiap manusia adalah *pancer* yang memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan diri dan lingkungannya. Karena itu, tidak boleh ada manusia yang diperlakukan sebagai alat, diperas tenaganya, atau dibiarkan hidup dalam kegelapan. Ketika KDM mengungkapkan bahwa tenda VIP diisi oleh petani, nelayan, kuli bangunan, dan tukang sapu, ia sedang menghidupkan sila kedua itu: mengembalikan martabat orang-orang kecil yang selama ini dipandang sebelah mata. Kemanusiaan yang adil dan beradab bukan hanya soal menolong yang lemah, tetapi juga soal menata ruang bersama agar setiap orang mendapat tempat yang layak. Dalam *Papat Kalima Pancer*, tidak ada unsur yang boleh dianggap lebih rendah; tanah, air, udara, dan matahari sama-sama penting. Demikian pula dalam bangsa, tidak ada warga yang boleh dianggap lebih rendah dari yang lain.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, berbicara tentang kesatuan dalam keberagaman. KDM mengucapkan hal ini dengan indah ketika ia berkata bahwa merah dan putih bukan sesuatu yang terpisah, melainkan satu kesatuan. Dalam *Papat Kalima Pancer*, empat unsur berbeda disatukan oleh pusat yang satu. Keberagaman tidak dihapus, tetapi diikat dalam keseimbangan. Begitulah seharusnya bangsa ini: perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya tidak boleh dijadikan alasan untuk bercerai-berai, tetapi justru menjadi kekuatan yang saling melengkapi. Persatuan tidak berarti penyeragaman, melainkan kesediaan untuk berdiri bersama tanpa saling meniadakan. Sebagaimana tanah tidak mengubah dirinya menjadi air, dan matahari tidak berhenti menjadi matahari, demikian pula setiap kelompok dalam bangsa ini boleh mempertahankan jati dirinya, asalkan semuanya setia pada pusat yang sama: Indonesia.

Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, menegaskan bahwa cara bernegara yang sehat adalah dengan mendengar banyak suara, bukan dengan menindas perbedaan. Dalam kosmologi Sunda, pusat yang baik adalah pusat yang mampu menyeimbangkan empat arah; bukan pusat yang memaksakan satu arah kepada semua. Musyawarah adalah wujud dari kesediaan untuk mendengar suara dari berbagai penjuru, lalu mengambil keputusan yang menjaga keseimbangan bersama. KDM dalam pidatonya berbicara tentang kerja bersama antara Pemerintah Provinsi, DPRD, kejaksaan, kepolisian, Kodam, pengadilan, dan Kementerian Agama. Ia menegaskan

bahwa meskipun instansi berbeda-beda, tujuannya satu: mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Ini adalah gambaran kerakyatan yang sehat, di mana perbedaan lembaga tidak menjadi alasan untuk saling menjatuhkan, tetapi justru menjadi kekuatan untuk saling melengkapi.

Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah puncak dari seluruh keseimbangan itu. Keadilan sosial tidak mungkin tercapai jika sila-sila sebelumnya hanya menjadi slogan. Keadilan sosial adalah buah dari ketuhanan yang hidup, kemanusiaan yang dihormati, persatuan yang dijaga, dan kerakyatan yang dijalankan dengan jujur. Dalam pidato KDM, keadilan sosial ini dibahasakan secara sangat konkret: tidak boleh ada rakyat yang pulang dari rumah sakit dalam keadaan berutang, tidak boleh ada bayi yang KTP ibunya ditahan karena tidak mampu membayar, tidak boleh ada warga yang hidup tanpa listrik di tengah negeri yang kaya energi. Keadilan sosial bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi, tetapi soal bagaimana setiap warga merasakan bahwa negara hadir untuknya, terutama ketika ia lemah dan tidak berdaya. Dalam bahasa *Papat Kalima Pancer*, keadilan sosial adalah keadaan di mana tanah, air, udara, dan matahari dapat dinikmati oleh semua orang, bukan hanya oleh segelintir pihak.

Dengan melihat kaitan yang erat antara *Papat Kalima Pancer* dan Pancasila, kita menyadari bahwa menggali kearifan lokal bukanlah bentuk pengerdilan terhadap kebangsaan, melainkan penguatan. Pancasila sebagai dasar negara akan semakin hidup jika ia berakar pada nilai-nilai yang tumbuh di bumi Nusantara. Sebaliknya, kearifan lokal seperti *Papat Kalima Pancer* akan semakin relevan jika ia mampu berdialog dengan cita-cita kebangsaan yang lebih luas. KDM dalam pidatonya telah memberikan contoh bagaimana dialog itu dirajut: ia tidak mempertentangkan antara Sunda, Islam, dan Indonesia, tetapi menempatkan semuanya dalam satu jalinan yang saling menguatkan. Inilah jalan kebudayaan yang sehat: tidak menolak warisan sendiri, tetapi juga tidak menutup diri dari nilai-nilai universal.

Pada titik ini, kita juga perlu mengingat bahwa Pancasila bukanlah benda mati yang selesai dirumuskan pada tahun 1945. Ia adalah dasar yang harus terus dihidupi oleh setiap generasi, ditafsirkan ulang sesuai dengan tantangan zaman, dan diisi dengan praktik-praktik nyata. Jika dulu Pancasila dirumuskan untuk melawan penjajahan dan menyatukan bangsa, hari ini ia harus dihidupkan untuk melawan kemiskinan, ketidakadilan, kerusakan ekologi, dan penjajahan-penjajahan baru yang tidak kasat mata. Dalam perjuangan itu, *Papat Kalima Pancer* dapat menjadi salah satu sumber inspirasi yang kaya, karena ia mengajarkan bahwa keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian hanya akan tercapai jika manusia bersedia menjaga keseimbangan hidup, mulai dari dirinya sendiri, keluarganya, masyarakatnya, hingga alam semestanya.

Dengan demikian, relevansi *Papat Kalima Pancer* dengan Pancasila bukan hanya terletak pada kesamaan struktur lima-empat, melainkan pada semangatnya yang

sama-sama menolak segala bentuk pemisahan dan penindasan. Pancasila menolak pemisahan antara agama dan negara, antara manusia dan sesamanya, antara warga dan tanah airnya, serta antara rakyat dan kesejahteraannya. *Papat Kalima Pancer* menolak pemisahan antara manusia dan alam, antara tubuh dan jiwa, antara akal dan hati, serta antara dunia dan Tuhan. Keduanya adalah panggilan untuk hidup utuh, adil, dan seimbang. Inilah sebabnya mengapa pembahasan tentang Pancasila dan *Papat Kalima Pancer* tidak boleh berhenti pada tataran teori, melainkan harus turun ke dalam praksis: bagaimana kita menata pemerintahan, mengelola alam, mendidik generasi, dan membangun ekonomi yang berpihak kepada yang lemah.

Kemerdekaan sebagai Keseimbangan Unsur

KEMERDEKAAN, sebagaimana dihayati oleh banyak orang, sering kali diartikan secara sempit sebagai terbebasnya suatu bangsa dari kekuasaan asing. Dalam arti ini, kemerdekaan adalah peristiwa politik yang ditandai oleh proklamasi, pengakuan kedaulatan, dan berdirinya pemerintahan sendiri. Tidak ada yang salah dengan pemahaman tersebut; ia adalah fondasi yang memang harus ada terlebih dahulu. Tetapi jika kita berhenti di situ, kita akan kehilangan kedalaman makna dari kata "merdeka" itu sendiri. Merdeka bukan sekadar bebas dari penjajahan, melainkan juga bebas untuk menjadi manusia yang utuh, bebas dari rasa takut, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan yang menindas, dan bebas untuk menjalin relasi yang sehat dengan alam, sesama, dan Tuhan. Dalam perspektif *Papat Kalima Pancer*, kemerdekaan adalah keadaan seimbang di mana seluruh unsur kehidupan berada pada tempatnya masing-masing, saling menghidupkan, tanpa ada yang menindas atau ditindas.

Ketika KDM dalam pidatonya mengakui bahwa "kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat," ia sedang mengoreksi pemahaman yang sempit itu. Ia tidak berbicara tentang kemerdekaan dalam arti lepas dari penjajah, karena hal itu sudah terjadi 81 tahun lalu. Ia berbicara tentang kemerdekaan yang belum tuntas, yaitu kemerdekaan yang masih tertahan oleh ketiadaan listrik, beban biaya kesehatan, ketimpangan akses pendidikan, dan ancaman narkoba. Rakyat yang hidup tanpa listrik di malam hari, meskipun secara hukum adalah warga negara merdeka, sesungguhnya belum merasakan makna kemerdekaan itu. Mereka masih dijajah oleh kegelapan, oleh kebijakan yang timpang, oleh ironi negeri kaya energi yang gagal membagi cahaya kepada warganya sendiri. Maka, mengakui ketidaktuntasan itu adalah langkah awal menuju kemerdekaan yang sejati: kejujuran untuk melihat kenyataan, dan keberanian untuk memperbaikinya.

Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, kemerdekaan yang sejati adalah keseimbangan empat unsur yang kita bahas sebelumnya. Tanah yang dimerdekakan

adalah tanah yang subur, dirawat, dan tidak diracuni oleh pestisida berlebihan. Air yang dimerdekakan adalah air yang bersih, mengalir jernih, dan dapat diminum oleh semua orang tanpa takut akan pencemaran. Udara yang dimerdekakan adalah udara yang sehat, yang membuat setiap helaan napas terasa ringan dan menyehatkan. Matahari yang dimerdekakan adalah energi yang terbagi secara adil, sehingga cahaya dan kehangatannya sampai ke rumah-rumah paling terpencil sekalipun. Dan manusia sebagai *pancer* yang dimerdekakan adalah manusia yang tidak lagi dibelenggu oleh ketakutan, kebodohan, keserakahan, dan rasa rendah diri. Ia berdiri tegak di pusat keseimbangan itu, menjalankan amanatnya sebagai penjaga, bukan sebagai penindas.

Kemerdekaan sebagai keseimbangan unsur juga berarti bahwa kebijakan pembangunan tidak boleh bertumpu hanya pada satu aspek dengan mengorbankan aspek yang lain. Pembangunan ekonomi yang mengabaikan kelestarian alam akan berakhir dengan rusaknya tanah, air, dan udara, yang pada gilirannya justru melahirkan kemiskinan baru. Pembangunan yang hanya berfokus pada gedung-gedung megah tetapi melupakan keadilan sosial akan menciptakan masyarakat yang timpang, di mana segelintir orang menikmati hasil kerja banyak orang tanpa rasa malu. Dalam pidato KDM, ada seruan agar para pemimpin menunda hasrat pribadinya—menunda membeli mobil baru, menunda membeli baju baru, menunda menambah properti—agar uang negara diarahkan kepada yang lebih mendasar: pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Seruan itu adalah seruan untuk mengembalikan keseimbangan: antara kepentingan pribadi dan kepentingan rakyat, antara gaya hidup mewah dan kebutuhan dasar warga, antara kemauan dan kesanggupan.

Keseimbangan juga harus terjadi di dalam diri manusia. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang warganya merdeka secara batiniah. Orang yang pikirannya dijajah oleh konsumerisme, oleh rasa iri, oleh kebencian, atau oleh obat-obatan, tidak akan pernah merasa cukup dan tidak akan pernah merasakan kemerdekaan sejatinya. Dalam pidato KDM, isu tramadol dan narkoba disebut sebagai penjajahan yang tidak terlihat. Ini adalah bentuk penjajahan yang lebih halus tetapi tidak kalah kejam, karena ia merusak kesadaran, melemahkan kemauan, dan menghancurkan masa depan tanpa perlu menduduki wilayah secara fisik. Melawan penjajahan jenis ini menuntut lahirnya manusia-manusia yang kuat secara mental, jernih secara akal, dan teguh secara spiritual. Dengan kata lain, melawan penjajahan tak terlihat adalah melawan dengan membangun keseimbangan dalam diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Lebih jauh, kemerdekaan sebagai keseimbangan juga menyentuh relasi antara manusia dan Tuhan. Bangsa yang warganya tidak takut lagi pada Tuhan akan dengan mudah menindas sesamanya, merusak alam, dan mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadanya. KDM menyinggung hal ini dengan menyebut bahwa

Tuhan hadir dalam setiap jengkal tanah. Kesadaran akan kehadiran Tuhan inilah yang membuat seseorang tidak bisa berlaku seenaknya, karena ia tahu bahwa tidak ada perbuatan yang tersembunyi dari penglihatan Ilahi. Maka, kemerdekaan yang sejati tidak mungkin dibangun di atas landasan sekularisme yang meniadakan peran nilai-nilai transenden, tetapi juga tidak boleh dibajak oleh formalisme agama yang hanya sibuk dengan simbol. Kemerdekaan sejati lahir dari kesalehan yang hidup: kesalehan yang merawat tanah, yang membela yang lemah, yang jujur dalam bekerja, dan yang rendah hati dalam memimpin.

Dalam konteks kebangsaan, kemerdekaan sebagai keseimbangan adalah jawaban atas berbagai ketimpangan yang selama ini membelit Indonesia. Kita adalah negeri yang kaya, tetapi rakyatnya banyak yang miskin. Kita memiliki tanah yang subur, tetapi petaninya hidup pas-pasan. Kita memiliki energi melimpah, tetapi sebagian warga masih hidup tanpa listrik. Kita memiliki sumber daya manusia yang cerdas, tetapi banyak yang pergi bekerja di negeri orang karena di dalam negeri tidak ada ruang yang layak. Semua ini adalah gejala ketidakseimbangan: antara kekayaan dan pemerataan, antara potensi dan pengelolaan, antara cita-cita dan kenyataan. Memerdekakan bangsa ini berarti bekerja sungguh-sungguh untuk menutup jurang-jurang itu, bukan dengan janji-janji manis, tetapi dengan tata kelola yang jujur, adil, dan berkelanjutan.

Penting juga untuk menegaskan bahwa keseimbangan bukanlah keadaan statis yang sekali dicapai lalu selesai. Keseimbangan adalah sesuatu yang dinamis, harus terus dirawat, diperiksa, dan disesuaikan dengan perubahan zaman. Sebagaimana sebuah sepeda hanya bisa berjalan lurus jika terus dikayuh dan dijaga keseimbangannya, demikian pula kemerdekaan sebuah bangsa hanya akan tegak jika terus-menerus dirawat oleh kejujuran, kerja keras, dan kesediaan untuk memperbaiki diri. Dalam *Papat Kalima Pancer*, manusia sebagai pusat bukanlah penonton yang duduk diam; ia adalah penjaga yang setiap hari harus memeriksa tanahnya, airnya, udaranya, dan semangatnya. Jika ia lengah, keseimbangan akan goyah, dan kemerdekaan yang telah diperjuangkan bisa runtuh pelan-pelan tanpa terasa.

Pada akhirnya, memahami kemerdekaan sebagai keseimbangan unsur adalah panggilan untuk menolak segala bentuk pemisahan yang merusak. Kita menolak pemisahan antara ekonomi dan ekologi, karena ekonomi yang sehat hanya mungkin lahir dari alam yang sehat. Kita menolak pemisahan antara akal dan hati, karena akal tanpa hati akan menjadi kejam, dan hati tanpa akal akan tersesat. Kita menolak pemisahan antara pemimpin dan rakyat, karena kekuasaan yang jauh dari penderitaan rakyat akan berubah menjadi penindasan. Dan kita menolak pemisahan antara manusia dan Tuhan, karena tanpa Tuhan, manusia akan kehilangan arah dan menuhankan dirinya sendiri. Dalam kesatuan itulah terletak kemerdekaan sejati:

ketika manusia, alam, masyarakat, dan Tuhan berada dalam jalinan yang harmonis, saling menguatkan, dan saling memuliakan.

BAB 3
Alam yang Dimuliakan, Manusia yang Dimuliakan

Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, kita nyaris tidak pernah bertanya dari mana asal makanan yang kita makan. Nasi yang tersaji di piring dianggap sebagai hasil akhir dari sebuah proses yang jauh dan tidak perlu dipikirkan. Sayur yang dimasak di dapur hanyalah barang dagangan yang dibeli di pasar. Buah yang dimakan di sela kesibukan hanyalah pelepas lapar, bukan cerminan dari kualitas tanah yang melahirkannya. Kita telah menjadi masyarakat yang demikian terputus dari asal-usul makanannya sendiri, sehingga kita kehilangan kesadaran paling dasar: bahwa apa yang kita makan adalah tanah, air, udara, dan matahari yang telah bertransformasi menjadi tubuh kita. Dalam bahasa yang lebih filosofis, kita adalah alam yang sedang menyantap dirinya sendiri, dan kualitas alam menentukan kualitas manusia yang menyantapnya.

Bab ini hendak mengembalikan kesadaran itu. Bahwa relasi antara manusia dan alam bukan sekadar relasi pemanfaatan, melainkan relasi yang membentuk. Apa yang kita lakukan kepada tanah, air, udara, dan matahari akan kembali kepada kita dalam bentuk kesehatan atau penyakit, dalam wujud kekuatan atau kelemahan, dalam rupa kejernihan atau kekeruhan. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, manusia sebagai *pancer* tidak bisa lari dari kenyataan bahwa ia dikelilingi oleh empat unsur yang menghidupinya. Jika unsur-unsur itu dimuliakan, maka manusia pun ikut termuliakan. Jika unsur-unsur itu dirusak, maka manusia pun ikut terhina, bahkan tanpa ia sadari. Dengan demikian, memperlakukan alam dengan hormat bukanlah tindakan romantis yang berlebihan, melainkan keharusan etis yang menyangkut keselamatan manusia itu sendiri.

KDM dalam pidatonya menyentuh hal ini dengan sangat kuat ketika ia berbicara tentang pertanian organik, kualitas pangan, dan kesehatan. Ia tidak memisahkan antara kebijakan pertanian, kebijakan kesehatan, dan pembangunan manusia. Baginya, semuanya terhubung: tanah yang dirawat akan melahirkan padi yang mulia; padi yang mulia akan melahirkan tubuh yang sehat; tubuh yang sehat akan melahirkan pikiran yang jernih; dan pikiran yang jernih akan melahirkan bangsa

yang kuat. Sebaliknya, tanah yang diracuni pestisida akan melahirkan pangan yang bermasalah; pangan yang bermasalah akan merusak tubuh; tubuh yang rusak akan melemahkan jiwa; dan jiwa yang lemah tidak akan sanggup menjaga kemerdekaan bangsanya. Inilah logika sederhana namun dalam, yang sering terlupakan oleh para pengambil kebijakan yang hanya mengejar angka produksi dan keuntungan sesaat.

Bab ini juga ingin menegaskan bahwa kesehatan bukanlah semata-mata urusan rumah sakit, dokter, obat, dan alat-alat medis. Kesehatan adalah buah dari hubungan yang benar antara manusia dan lingkungannya. Ketika air bersih tersedia, ketika udara segar terhirup, ketika tanah subur menghasilkan pangan bermutu, maka sebagian besar penyakit sebenarnya dapat dicegah sebelum ia sempat muncul. KDM mengungkapkan hal ini dengan kalimat yang tajam: "Dokter yang sejati adalah diri kita sendiri." Artinya, penjaga kesehatan yang paling utama bukanlah profesi medis, melainkan kesadaran setiap orang untuk hidup seimbang, makan dari sumber yang baik, dan merawat lingkungan tempat ia hidup. Dalam perspektif ini, pembangunan kesehatan sejati harus dimulai dari pembangunan ekologis, bukan hanya dari pembangunan rumah sakit yang megah.

Dengan kerangka seperti itu, bab ini akan disusun dalam tiga bagian utama. Pertama, kita akan melihat bagaimana tanah yang dihormati melahirkan padi, buah, dan sayur yang mulia. Di sini kita akan membahas hubungan antara cara bertani dan kualitas pangan, serta bagaimana pertanian kimiawi telah merusak rantai kehidupan yang seharusnya murni. Kedua, kita akan menelusuri kesehatan sebagai buah dari hubungan ekologis yang benar. Kita akan melihat bahwa kesehatan masyarakat tidak bisa dipisahkan dari kesehatan tanah, air, dan udara, serta bagaimana kebijakan yang abai terhadap ekologi pada akhirnya menciptakan beban besar bagi sektor kesehatan. Ketiga, kita akan merenungkan makna dari ungkapan "dokter sejati adalah diri kita sendiri" sebagai panggilan untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab pribadi dalam menjaga keseimbangan hidup.

Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk mencatat bahwa cara pandang yang menghubungkan alam dan manusia ini bukanlah sesuatu yang asing dalam sejarah pemikiran. Banyak tradisi besar dunia menyimpan keyakinan serupa. Dalam filsafat Timur, dikenal konsep yin-yang dan unsur-unsur kehidupan yang harus seimbang. Dalam tradisi Islam, ada ajaran bahwa bumi diciptakan untuk manusia, tetapi manusia diberi amanat untuk merawatnya. Dalam pemikiran Barat pun, para pemikir ekologi seperti Aldo Leopold menegaskan pentingnya "etika tanah" yang menempatkan manusia sebagai warga dari komunitas alam, bukan sebagai penakluknya (Leopold, 1949). Dengan demikian, apa yang disampaikan KDM tentang tanah yang dimuliakan dan manusia yang dimuliakan adalah bagian dari warisan kemanusiaan yang lebih luas, bukan sekadar kearifan lokal yang terisolasi.

Namun, yang membuat pidato KDM menarik adalah keberaniannya untuk menarik gagasan filosofis ini ke dalam urusan pemerintahan dan kebijakan publik.

Ia tidak berhenti pada seruan moral, tetapi menyentuh hal-hal yang sangat konkret: Dinas Pertanian harus bekerja sepetak demi sepetak untuk mengubah sawah-sawah menjadi organik; sistem keuangan pemerintah harus ditata agar berpihak pada kebutuhan dasar warga; dan para pejabat harus menunda hasrat pribadinya agar uang negara bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih penting. Ini adalah langkah yang jarang terjadi: seorang pemimpin daerah berbicara tentang filsafat ekologi dalam pidato resmi, lalu menurunkannya menjadi arah kebijakan. Mungkin inilah yang dimaksud dengan menjadikan filosofi sebagai pijakan, bukan sekadar hiasan.

Dengan membaca bab ini, kita diajak untuk merenungkan kembali cara kita memandang makanan, kesehatan, dan tanggung jawab pribadi. Kita juga diajak untuk kritis terhadap sistem yang telah menjauhkan kita dari alam: sistem pangan yang mengutamakan kuantitas di atas kualitas, sistem kesehatan yang lebih sibuk mengobati daripada mencegah, dan gaya hidup yang lebih percaya pada obat daripada pada keseimbangan. Dalam keheningan renungan itu, barangkali kita akan menemukan kembali makna dari apa yang oleh orang Sunda disebut *gemah ripah repeh rapih*: kehidupan yang subur, damai, tertib, dan harmonis, yang hanya mungkin lahir dari tanah yang dimuliakan, air yang dijaga, udara yang dibersihkan, dan matahari yang disyukuri.

Dari Tanah yang Dihormati Lahir Padi, Buah, Sayur yang Mulia

Tanah adalah awal dari hampir semua yang kita makan. Dari tanahlah padi tumbuh, jagung menjulang, sayur merambat, dan buah bergelantungan di ranting-ranting pohon. Bahkan daging yang kita konsumsi pun pada akhirnya berasal dari hewan yang makan tumbuhan yang tumbuh di tanah. Dengan kata lain, tanah adalah ibu dari segala pangan. Ketika kita berbicara tentang kualitas makanan, sebenarnya kita sedang berbicara tentang kualitas tanah tempat makanan itu dilahirkan. Makanan yang baik tidak mungkin lahir dari tanah yang rusak; sebagaimana anak yang sehat tidak mungkin lahir dari ibu yang kekurangan gizi. Dalam kesadaran inilah kita dapat memahami mengapa KDM menempatkan penghormatan terhadap tanah sebagai awal dari lahirnya padi, buah, dan sayur yang mulia. Ia tidak sedang berbicara dalam bahasa puitis yang kosong, melainkan menyampaikan kebenaran ekologis yang mendasar: hidup ini bersambung, dari tanah ke tanaman, dari tanaman ke manusia, dan dari manusia kembali ke tanah.

Dalam pandangan masyarakat agraris Sunda, tanah bukan sekadar benda mati yang bisa dijual, digali, dan dieksploitasi. Tanah adalah entitas yang hidup, yang memiliki kesuburan dan kepekaan. Ia bisa tersenyum melalui panen yang melimpah, tetapi juga bisa murka melalui gagal panen dan banjir. Karena itu, memperlakukan

tanah dengan hormat adalah bagian dari sikap hidup yang arif. KDM menggunakan kata-kata yang kuat: mencintai tanah, menghormati tanah, mengurus tanah, memuliakan tanah. Keempat kata kerja itu menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan tanah seharusnya bukan hubungan eksploitatif, melainkan hubungan kasih sayang yang menuntut tanggung jawab. Dari tanah yang diperlakukan seperti itu, lahirlah apa yang ia sebut sebagai "tanaman-tanaman yang mulia"—padi yang mulia, jagung yang mulia, bawang merah dan bawang putih yang mulia. Kata "mulia" di sini tidak boleh dianggap sebagai metafora belaka. Ia menunjuk pada kualitas nyata: pangan yang tumbuh dari tanah yang sehat, tanpa racun, tanpa pemaksaan, akan memiliki kandungan gizi yang lebih baik, rasa yang lebih alami, dan energi yang lebih murni.

Di sinilah kita bertemu dengan kritik KDM terhadap pertanian kimiawi. Ia menyebut bahwa pertanian yang terus-menerus menggunakan pestisida dan pupuk kimia tidak bisa lagi masuk ke pasar dunia, dan yang lebih penting, tidak bisa membuat para petani untung. Ini bukan sekadar soal ekonomi, melainkan soal keselamatan lingkungan dan kesehatan manusia. Pestisida memang dapat meningkatkan produksi dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang ia merusak struktur tanah, membunuh mikroorganisme yang menyuburkan, mencemari air, dan meninggalkan residu berbahaya pada hasil panen. Pupuk kimia yang berlebihan juga membuat tanah menjadi keras dan kehilangan daya hidupnya. Dengan kata lain, pertanian kimiawi adalah bentuk kekerasan terhadap tanah, dan kekerasan itu akan berbalik kepada manusia dalam bentuk penyakit, kemiskinan, dan ketergantungan.

Dalam banyak penelitian kontemporer, kekhawatiran ini telah terbukti. Para ahli ekologi dan kesehatan masyarakat telah lama memperingatkan bahwa residu pestisida dalam makanan dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, mulai dari gangguan hormon, kerusakan saraf, hingga risiko kanker (Carson, 1962). Demikian pula, praktik monokultur yang bergantung pada pupuk kimia telah menyebabkan penurunan kesuburan tanah di banyak tempat, yang pada gilirannya menurunkan kualitas gizi tanaman. Maka, seruan KDM untuk mengubah sawah-sawah di Jawa Barat menjadi pertanian organik, sepetak demi sepetak, adalah seruan yang selaras dengan temuan ilmiah modern. Ia bukan hanya berbicara tentang kearifan lokal, tetapi juga tentang keharusan ekologis yang mendesak.

Namun, peralihan dari pertanian kimiawi ke pertanian organik bukanlah perkara mudah. Ia menuntut kesabaran, keberanian, dan dukungan kebijakan yang serius. Petani yang telah terbiasa dengan pupuk kimia dan pestisida akan merasa gamang ketika diminta beralih ke cara-cara alami yang hasil awalnya mungkin menurun. Karena itu, KDM mengusulkan agar perubahan dilakukan secara bertahap, "sepetak demi sepetak." Ini adalah pendekatan yang bijak, karena menghormati realitas petani yang hidup dalam tekanan ekonomi. Perubahan besar yang

dipaksakan secara serentak tanpa persiapan hanya akan melahirkan kegagalan dan kekecewaan. Sebaliknya, perubahan yang dimulai dari skala kecil, dibuktikan hasilnya, lalu diperluas secara bertahap, akan lebih berpeluang untuk bertahan dan berkembang. Dalam pendekatan ini kita melihat bagaimana filosofi *Papat Kalima Pancer* bekerja: keseimbangan tidak diwujudkan dengan cara menggulingkan yang lama secara kasar, tetapi dengan merawat peralihan secara sabar.

Lebih dari sekadar teknik bercocok tanam, pertanian organik adalah cara untuk memulihkan martabat tanah dan martabat petani. Petani yang mempraktikkan pertanian organik bukan lagi sekadar pekerja yang mengejar target produksi, melainkan perawat kehidupan yang memahami siklus alam. Ia belajar membaca cuaca, memperhatikan jenis tanah, memanfaatkan kompos, dan menghormati musim. Dengan cara itu, ia menjadi *pancer* yang sejati: manusia yang berdiri di tengah empat unsur dan merawat keseimbangannya. KDM tampaknya menyadari hal ini ketika ia menghubungkan pertanian organik dengan kualitas manusia. Dari tanah yang dimuliakan, katanya, lahir tanaman yang mulia; dari tanaman yang mulia, lahir warga yang mulia; dan dari warga yang mulia, lahir bangsa yang bermartabat. Ini adalah rantai kebaikan yang dimulai dari hal yang paling sederhana: cara kita memperlakukan segenggam tanah.

Kita juga perlu memperhatikan bahwa KDM menyebut buah-buahan khas Jawa Barat seperti pisang, rambutan, manggis, dan duren sebagai bagian dari kekayaan yang harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Ini bukan sekadar nasionalisme rasa, melainkan kesadaran akan kedaulatan pangan. Di tengah serbuan buah-buahan impor yang membanjiri pasar, masyarakat sering kali lupa bahwa negeri ini memiliki buah-buahan yang tidak kalah bermutu. Dengan mendorong peningkatan kualitas buah-buahan lokal, KDM sedang membangun kesadaran untuk mencintai dan memuliakan produk sendiri. Dalam jangka panjang, kesadaran semacam ini akan memperkuat ekonomi rakyat, mengurangi ketergantungan pada impor, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas sebagai bangsa agraris.

Pada titik ini, kita dapat melihat bahwa pembicaraan tentang tanah, padi, buah, dan sayur bukanlah pembicaraan yang sempit. Ia menyangkut keseluruhan cara hidup sebuah bangsa. Bangsa yang menghormati tanahnya adalah bangsa yang tahu dari mana ia berasal dan ke mana ia akan kembali. Bangsa yang merusak tanahnya adalah bangsa yang sedang menggergaji dahan tempat ia duduk. KDM, dengan menghidupkan kembali penghormatan terhadap tanah, sedang mengajak kita untuk kembali ke akar yang selama ini kita tinggalkan. Ia sedang mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati tidak mungkin berdiri di atas tanah yang diracuni, air yang dicemari, dan udara yang dikotori. Kemerdekaan sejati tumbuh dari tanah yang dirawat dengan cinta, dan berbuah dalam wujud manusia-manusia yang sehat, jernih, dan berakhlak.

Kesehatan sebagai Buah dari Hubungan Ekologis yang Benar

Kesehatan sering kali dipahami sebagai urusan pribadi: apakah saya makan cukup, apakah saya tidur cukup, apakah saya berolahraga, dan apakah saya memeriksakan diri ke dokter ketika sakit. Pandangan ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi ia terlalu sempit. Kesehatan pribadi sebenarnya bertumpu pada fondasi yang jauh lebih luas, yaitu kesehatan lingkungan tempat orang itu hidup. Udara yang dihirup setiap hari, air yang diminum, tanah yang menumbuhkan makanan, dan sinar matahari yang menyentuh kulit—semuanya adalah penentu kesehatan yang sering kali luput dari perhatian. Seseorang bisa saja hidup dengan pola makan yang teratur dan olahraga yang disiplin, tetapi jika udara di sekitarnya tercemar, airnya tercemar, dan makanannya mengandung residu racun, maka semua usaha pribadinya menjadi rapuh. Dengan kata lain, kesehatan adalah buah dari hubungan ekologis yang benar antara manusia dan lingkungannya. Jika hubungan itu rusak, maka rusak pulalah kesehatan manusia, baik secara fisik maupun mental.

Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, gagasan ini menemukan rumahnya. Manusia sebagai *pancer* hidup di tengah empat unsur—tanah, air, udara, matahari—yang semuanya berpengaruh langsung terhadap kesehatannya. Tanah yang subur dan tidak tercemar akan menumbuhkan makanan yang bersih; air yang jernih akan menjaga fungsi organ tubuh; udara yang sehat akan membuat pernapasan lancar dan pikiran jernih; matahari yang cukup akan memberi energi dan memperkuat daya tahan tubuh. Empat unsur ini adalah obat alami yang paling dasar, yang tersedia melimpah dan tidak perlu dibeli. Sebaliknya, jika tanah tercemar pestisida, air tercemar limbah, udara dipenuhi asap, dan matahari terhalang polusi, maka manusia akan hidup dalam kondisi yang melemahkan dirinya sendiri. Ia mungkin masih bisa bertahan berkat obat-obatan dan rumah sakit, tetapi itu lebih mirip tambal sulam daripada kesembuhan yang sejati.

KDM dalam pidatonya menyentuh gagasan ini dengan tegas ketika ia menyatakan bahwa "kesehatan tidak melulu rumah sakit, tidak melulu puskesmas, tidak melulu alat kesehatan, tidak melulu paramedis, tidak melulu dokter." Pernyataan ini mungkin terasa mengejutkan bagi telinga yang terbiasa memuja institusi medis sebagai satu-satunya penjaga kesehatan. Tetapi maksudnya bukan meremehkan rumah sakit atau dokter, melainkan mengembalikan kesehatan pada tempatnya yang lebih luas: kesehatan adalah tanggung jawab ekologis dan sosial, bukan sekadar tanggung jawab medis. Rumah sakit adalah tempat terakhir untuk menolong orang yang sudah jatuh sakit, tetapi mencegah orang jatuh sakit adalah pekerjaan yang jauh lebih besar, yang melibatkan pengelolaan lingkungan, kebersihan air, mutu pangan, dan kesadaran hidup sehat. Dalam bahasa yang sederhana, lebih baik menjaga mata air daripada membangun banyak rumah sakit,

karena mata air yang bersih mencegah penyakit, sementara rumah sakit hanya mengobatinya.

Kita bisa melihat keterkaitan ini dalam banyak kasus nyata. Masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai yang tercemar limbah industri cenderung mengalami gangguan kulit, pencernaan, dan pernapasan lebih tinggi dibanding masyarakat yang tinggal di lingkungan yang bersih. Petani yang terpapar pestisida dalam jangka panjang memiliki risiko gangguan saraf dan hormonal yang lebih besar. Anak-anak yang tumbuh di perkotaan dengan polusi udara tinggi lebih rentan terkena asma dan gangguan perkembangan paru-paru. Semua ini menunjukkan bahwa kesehatan bukan hanya soal perilaku individu, tetapi juga soal kebijakan lingkungan, tata kelola air, dan praktik pertanian yang sehat. Jika negara serius ingin menyehatkan warganya, maka ia harus mulai dari pembenahan ekologi, bukan hanya dari pembangunan rumah sakit dan pencetakan dokter. Rumah sakit memang penting, tetapi ia hanya akan menjadi hilir dari sungai persoalan yang bermuara pada pilihan-pilihan ekologis di hulu.

Dalam konteks itulah pertanian organik yang diserukan KDM memperoleh makna kesehatan yang mendalam. Pertanian organik bukan hanya cara bertani yang ramah tanah, tetapi juga cara menjaga kesehatan masyarakat secara luas. Dengan menghindari pestisida dan pupuk kimia, pertanian organik mencegah racun masuk ke dalam rantai makanan, menjaga kebersihan air tanah, dan melindungi petani dari paparan bahan berbahaya. Makanan yang dihasilkan pun lebih bersih dan lebih bernutrisi, sehingga tubuh yang mengonsumsinya menjadi lebih kuat dan lebih tahan terhadap penyakit. Dalam jangka panjang, masyarakat yang pangannya organik akan menikmati penurunan risiko penyakit degeneratif, gangguan pencernaan, dan berbagai masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh residu kimia. Dengan kata lain, pertanian organik adalah bentuk pencegahan penyakit yang paling hulu, yang menyentuh sumber kehidupan itu sendiri: tanah dan air.

Kita juga tidak boleh melupakan dimensi kesehatan mental dalam hubungan ekologis ini. Hidup di lingkungan yang kotor, bising, penuh polusi, dan miskin ruang terbuka hijau akan menekan jiwa manusia secara perlahan. Orang menjadi mudah lelah, mudah marah, sulit berkonsentrasi, dan kehilangan kegembiraan. Sebaliknya, lingkungan yang bersih, tenang, dan hijau memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas. Anak-anak yang tumbuh dengan akses ke alam, ke tanah, ke sungai, dan ke udara segar memiliki kecenderungan yang lebih baik dalam perkembangan emosi dan kreativitasnya. Dalam banyak penelitian psikologi lingkungan, kedekatan dengan alam terbukti menurunkan stres, memperbaiki suasana hati, dan meningkatkan kualitas tidur (Kaplan & Kaplan, 1989). Maka, menjaga alam bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal kesehatan jiwa. Kota-kota yang kehilangan ruang hijau, sungai yang berubah menjadi selokan, dan sawah yang berubah menjadi beton adalah bentuk-bentuk perampasan hak kesehatan mental warga.

Dalam pandangan KDM, semua ini terkait dengan cara kita memahami kemerdekaan. Rakyat yang sakit-sakitan tidak akan sanggup menikmati kemerdekaan dengan baik. Rakyat yang hidup di lingkungan rusak akan terus bergantung pada obat-obatan dan bantuan, dan dengan begitu tidak pernah benar-benar merdeka. Maka, memerdekakan rakyat dari kemiskinan dan kebodohan juga berarti memerdekakan mereka dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang rusak. Kesehatan yang lahir dari hubungan ekologis yang benar adalah bagian dari kedaulatan rakyat: kedaulatan untuk hidup di tanah yang bersih, minum air yang jernih, menghirup udara yang segar, dan makan dari pangan yang mulia. Tanpa itu, kemerdekaan hanyalah kata yang indah tetapi kosong.

Kita juga perlu menyadari bahwa hubungan ekologis yang benar tidak bisa dibangun hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan perubahan cara pandang masyarakat secara luas. Masyarakat yang terbiasa membuang sampah ke sungai, membakar sampah plastik, atau menyemprot pestisida secara berlebihan harus diberi kesadaran bahwa tindakan mereka sedang meracuni diri sendiri dan orang lain. Demikian pula para pelaku industri yang membuang limbah sembarangan harus diberi sanksi yang tegas, karena keuntungan mereka diperoleh dengan merampas kesehatan banyak orang. Di sinilah pendidikan dan penegakan hukum berjalan beriringan. Kesadaran ekologis harus ditanamkan sejak dini, dan aturan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, semua ini adalah bagian dari kerja merawat keseimbangan, yang tidak boleh berhenti pada wacana, tetapi harus menjadi praktik sehari-hari.

Dengan demikian, kesehatan sebagai buah dari hubungan ekologis yang benar adalah gagasan yang menuntut perubahan menyeluruh: dari cara kita bertani, cara kita mengelola air, cara kita menata kota, hingga cara kita mendidik generasi. KDM telah membuka pintu untuk perubahan itu dengan pidatonya yang berani. Kini tugas kita adalah menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah yang nyata, dimulai dari yang paling sederhana: memuliakan tanah, menjaga air, membersihkan udara, dan mensyukuri matahari. Jika itu kita lakukan, maka kesehatan akan tumbuh sebagai buah yang manis dari hubungan kita yang benar dengan alam, dan dokter yang paling sibuk tidak lagi berurusan dengan penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah.

"Dokter Sejati adalah Diri Kita Sendiri"

Di tengah kemajuan ilmu kedokteran modern, kita cenderung menempatkan dokter sebagai sosok yang paling tahu tentang tubuh kita. Kita percaya pada resep, pada alat-alat canggih, pada obat-obatan yang diiklankan secara luas. Tidak ada yang salah dengan kepercayaan itu selama ia ditempatkan pada porsinya. Tetapi ada bahaya laten ketika manusia sepenuhnya menyerahkan urusan kesehatannya

kepada orang lain: ia menjadi lupa bahwa tubuhnya adalah tanggung jawab pertamanya sendiri. Ia lupa bahwa sebelum penyakit datang, dirinyalah yang paling tahu apa yang ia makan, bagaimana ia tidur, sejauh mana ia bergerak, dan seperti apa pikirannya bekerja. Kalimat KDM, "Dokter sejati adalah diri kita sendiri," adalah pengingat yang dalam: bahwa penyembuh yang paling awal, paling setia, dan paling bertanggung jawab atas hidup kita bukanlah orang lain, melainkan kesadaran kita sendiri.

Ungkapan ini bukanlah penolakan terhadap profesi medis, melainkan upaya untuk menempatkan manusia sebagai subjek yang berdaulat atas tubuh dan jiwanya. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, setiap manusia adalah *pancer*—pusat yang seharusnya menyeimbangkan tanah, air, udara, dan matahari di dalam dirinya. Ketika keseimbangan itu rusak, muncullah penyakit. Namun, kerusakan itu sering kali berawal dari kelalaian manusia sendiri: makan berlebihan tetapi tidak bergerak, menahan marah tanpa menyelesaikannya, membiarkan pikiran dipenuhi kecemasan, atau hidup di lingkungan yang ia sendiri turut merusaknya. Maka, tidak ada dokter yang lebih tahu daripada diri sendiri tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang menggerogoti kesehatan itu. Dokter hanya bisa menolong setelah kerusakan terjadi; diri kita sendiri yang bisa mencegah sebelum kerusakan itu datang.

Konsep ini sejalan dengan banyak tradisi pengobatan kuno yang menempatkan pencegahan sebagai inti dari kesehatan. Dalam tradisi Yunani kuno, Hippokrates menekankan pentingnya gaya hidup seimbang—makan, tidur, kerja, dan istirahat yang teratur—sebagai kunci kesehatan. Dalam tradisi Islam, ada konsep bahwa perut adalah sumber penyakit, dan menahan diri dari makan berlebihan adalah bagian dari iman. Dalam pengobatan tradisional Nusantara, sehat dipahami sebagai keseimbangan unsur-unsur dalam tubuh dan lingkungan. Semua tradisi itu bersepakat bahwa manusia tidak boleh hidup sembarangan lalu berharap dokter akan menyelamatkannya. Sebaliknya, manusia harus hidup dengan penuh kesadaran, karena dari kesadaran itulah lahir kesehatan yang sejati.

KDM menghubungkan gagasan ini dengan pertanian organik dan kualitas pangan. Jika kita ingin sehat, kita harus kembali ke sumber kesehatan yang paling dasar: makanan yang tumbuh dari tanah yang baik, air yang bersih, udara yang segar, dan matahari yang cukup. Ketika manusia memilih makanan yang bersih, ia sedang menjadi dokter bagi dirinya sendiri. Ketika ia menolak makanan yang penuh zat kimia, ia sedang melindungi tubuhnya dari racun. Ketika ia menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih, ia sedang merawat sumber kehidupan bagi dirinya dan orang lain. Dengan kata lain, "dokter sejati" dalam kalimat KDM bukanlah sosok yang duduk di ruang praktik, melainkan kesadaran yang hidup di dalam diri setiap orang yang memilih untuk hidup selaras dengan alam.

Tentu saja, menjadi dokter bagi diri sendiri bukan berarti mengabaikan ilmu medis. Ada banyak penyakit yang memerlukan pertolongan ahli, obat-obatan, dan

perawatan rumah sakit. Tidak ada manusia yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri dari semua penyakit. Tetapi justru di sinilah letak kebijaksanaannya: kesadaran diri tidak meniadakan dokter, melainkan menjadikan kita pasien yang lebih baik, yang tidak datang terlambat, yang tidak menutupi kebiasaan buruk, dan yang sanggup menjalankan nasihat medis dengan disiplin. Orang yang sadar akan tubuhnya akan lebih cepat menyadari tanda-tanda awal penyakit dan segera mencari pertolongan. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki kesadaran diri akan membiarkan penyakit tumbuh tanpa disadari, lalu menyalahkan nasib atau menuntut keajaiban dari dokter. Maka, kesadaran diri adalah awal dari hubungan yang sehat dengan para profesional medis.

Dalam konteks sosial yang lebih luas, ungkapan "dokter sejati adalah diri kita sendiri" juga mengandung kritik terhadap sistem kesehatan yang terlalu berorientasi pada pengobatan dan melupakan pencegahan. Selama ini, banyak negara, termasuk Indonesia, menghabiskan banyak anggaran untuk membangun rumah sakit dan membiayai pengobatan, tetapi kurang serius menangani penyebab-penyebab utama penyakit: lingkungan yang rusak, pangan yang tidak sehat, dan gaya hidup yang tidak seimbang. KDM mengingatkan bahwa kesehatan tidak boleh dimulai dari rumah sakit, melainkan dari dapur, dari kebun, dari sumber air, dari udara yang kita hirup, dan dari kesadaran kita sendiri. Jika kesadaran ini tumbuh luas di masyarakat, maka beban penyakit akan menurun, dan sumber daya kesehatan bisa diarahkan untuk hal-hal yang lebih produktif.

Ada dimensi spiritual yang juga perlu digali dari ungkapan ini. Dalam banyak tradisi, penyakit bukan hanya persoalan fisik, melainkan juga cermin dari jiwa yang tidak tenteram. Kebencian, iri hati, keserakahan, dan ketakutan yang tidak dikelola akan menekan tubuh dan melemahkan daya tahan. Maka, merawat kesehatan juga berarti merawat batin: belajar memaafkan, berdamai dengan keadaan, menjaga pikiran tetap jernih, dan memperbanyak syukur. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, ini adalah bagian dari menjaga keseimbangan unsur-unsur batiniah—tanah sebagai keteguhan, air sebagai kejernihan hati, udara sebagai kebebasan berpikir, dan matahari sebagai semangat yang tidak padam. Orang yang jiwanya sehat akan lebih sanggup menghadapi tekanan hidup, dan tubuhnya pun akan lebih kuat menghadapi penyakit.

Kita juga dapat memaknai "dokter sejati" sebagai panggilan untuk berdaulat. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang tidak menggantungkan hidupnya sepenuhnya pada pihak lain. Begitu pula individu yang merdeka adalah individu yang tidak sepenuhnya menggantungkan kesehatannya pada orang lain. Ia berusaha memahami tubuhnya, menjaga makanannya, mengatur waktunya, dan merawat lingkungannya. Kemandirian semacam ini bukanlah kesombongan, melainkan wujud kedaulatan diri yang paling dasar. Sebab, jika seseorang sudah tidak mampu merawat dirinya sendiri, bagaimana ia bisa ikut merawat bangsa dan negaranya?

KDM tampaknya ingin menegaskan bahwa kemerdekaan harus dimulai dari hal-hal yang paling kecil dan paling pribadi: kemampuan untuk menjaga diri sendiri agar tidak menjadi beban bagi orang lain, dan justru menjadi sumber kekuatan bagi sesama.

BAGIAN TIGA
KEMERDEKAAN YANG BELUM SELESAI

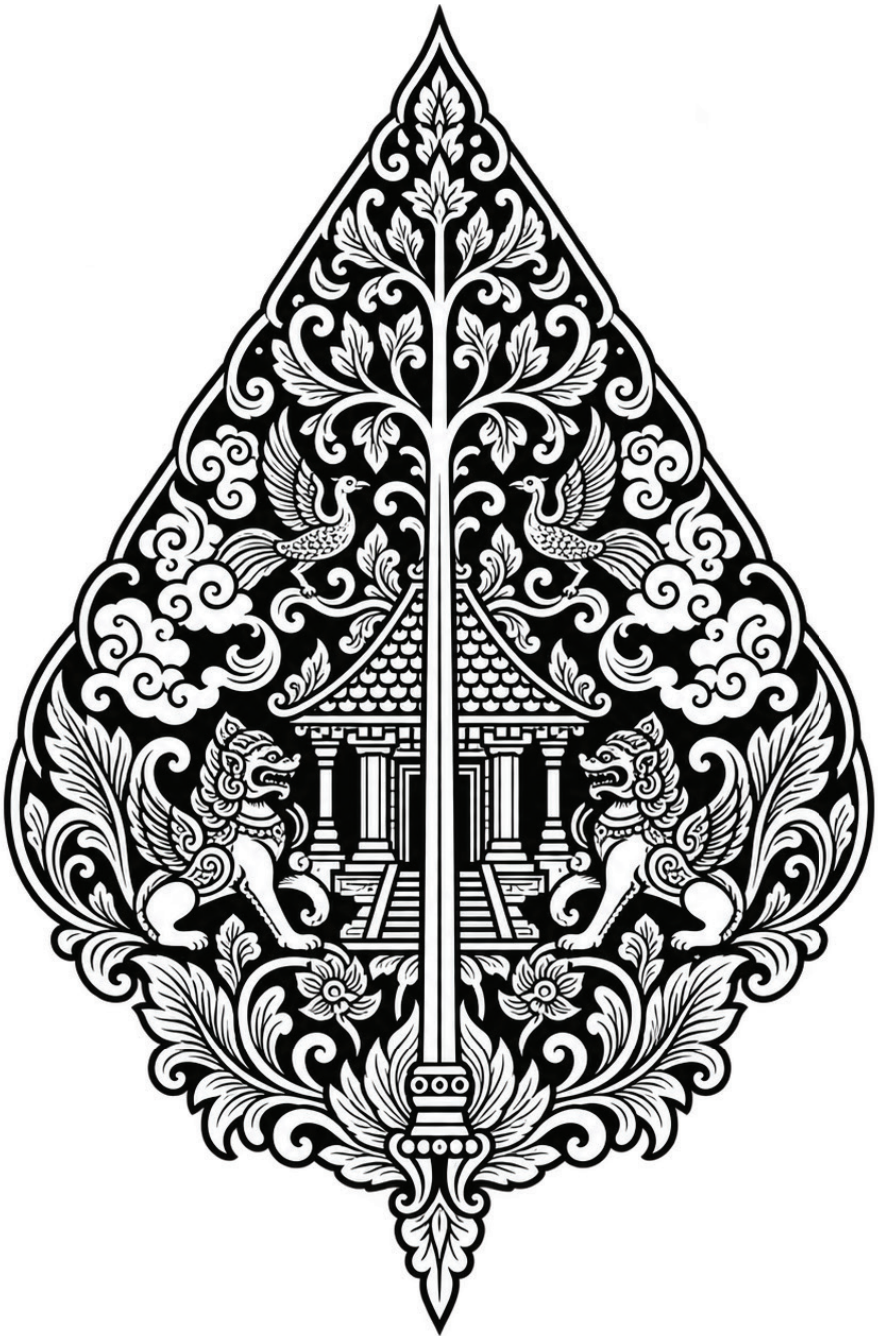

BAB 4
KAMI BELUM BISA MEMERDEKAKAN SELURUH RAKYAT

Kemerdekaan sering kali dirayakan sebagai titik akhir dari sebuah perjuangan. Proklamasi dibacakan, bendera dikibarkan, dan bangsa pun dianggap telah merdeka. Tetapi sejarah tidak berhenti pada peristiwa-peristiwa besar. Setelah proklamasi, kehidupan terus berjalan, dan di dalamnya terbentang persoalan-persoalan yang tidak kalah berat: kemiskinan, kebodohan, ketimpangan, dan ketidakadilan. Maka, pertanyaan yang seharusnya menyertai setiap peringatan kemerdekaan bukanlah "Sudahkah kita merdeka?" melainkan "Sudahkah kemerdekaan itu dirasakan oleh semua warga?" Pertanyaan ini mungkin terasa mengganggu di tengah suasana perayaan, tetapi justru di situlah letak kematangan sebuah bangsa: bersedia mengevaluasi dirinya sendiri tanpa kehilangan rasa syukur.

Pidato KDM pada HUT ke-81 RI menjadi istimewa justru karena ia berani menyampaikan pengakuan yang pahit di hari yang seharusnya penuh kemeriahan. Ia tidak menutup-nutupi kenyataan, tidak memoles data, dan tidak bersembunyi di balik retorika keberhasilan. Dengan nada yang rendah hati, ia mengucapkan kalimat yang menusuk: "81 tahun Indonesia merdeka. Kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat." Kalimat ini adalah pengakuan resmi dari seorang pemimpin bahwa cita-cita kemerdekaan belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Di hadapan para pejabat, tamu undangan, dan rakyat yang hadir, ia membuka luka yang selama ini cenderung ditutup-tutupi dalam pidato-pidato kenegaraan.

Bab ini akan membahas lebih dalam pengakuan tersebut. Kita akan melihat bahwa apa yang disampaikan KDM bukanlah sekadar ungkapan emosional, melainkan refleksi dari realitas sosial yang nyata. Ada puluhan ribu warga yang masih hidup tanpa listrik, ada keluarga yang tidak mampu membayar biaya rumah sakit, ada anak-anak yang pendidikannya terputus karena kemiskinan, dan ada banyak orang yang bekerja sepanjang hari tetapi tetap tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasarnya. Semua ini adalah wajah kemerdekaan yang belum selesai, wajah yang harus dilihat dengan jujur jika kita benar-benar ingin memperbaikinya.

Kita juga akan menelusuri ironi yang paling mencolok dalam pidato itu: ironi listrik. Jawa Barat adalah provinsi yang kaya akan sumber energi. Di wilayahnya

terdapat pembangkit-pembangkit besar seperti Jatiluhur, Cirata, Saguling, dan Jatigede, serta potensi geotermal yang melimpah di pegunungan. Namun, justru di tengah kelimpahan itu, masih ada rakyat yang hidup dalam kegelapan. Mereka yang tinggal di dekat sumber-sumber energi justru tidak menikmati aliran listrik. Ironi ini adalah simbol dari ketidakberesan yang lebih luas: kekayaan alam yang melimpah tidak otomatis menjadi kesejahteraan rakyat, karena di antara keduanya ada tata kelola yang timpang, ada kebijakan yang tidak berpihak, dan ada mentalitas yang lebih mementingkan keuntungan daripada pemerataan.

Lebih jauh, bab ini akan menyinggung angka-angka kemiskinan, akses kesehatan, dan pendidikan yang menjadi indikator belum tuntasnya kemerdekaan. Kemiskinan bukan hanya soal tidak punya uang; ia adalah mata rantai yang menjerat manusia dari generasi ke generasi. Orang miskin cenderung sulit mengakses pendidikan yang baik, sehingga anak-anaknya tumbuh tanpa keterampilan yang memadai. Orang miskin juga sulit mengakses layanan kesehatan, sehingga penyakit yang seharusnya bisa dicegah menjadi beban yang menghancurkan. Dalam lingkaran kemiskinan seperti ini, kemerdekaan menjadi kata yang jauh, hampir seperti dongeng yang diceritakan setiap tahun tetapi tidak pernah menjadi kenyataan.

Namun, pengakuan KDM tidak boleh dibaca sebagai pesimisme. Justru sebaliknya, pengakuan itu adalah titik tolak untuk bekerja lebih serius. Seorang pemimpin yang berani mengakui kegagalan adalah pemimpin yang masih memiliki hati nurani dan rasa tanggung jawab. Dari pengakuan itu, lahir komitmen untuk menyelesaikan persoalan, misalnya target penyediaan listrik yang disebut akan selesai pada 2027. Apakah target itu realistis atau tidak, itu soal lain. Yang penting adalah adanya kesadaran bahwa kemerdekaan adalah pekerjaan yang belum selesai, dan bahwa setiap generasi memiliki tugas untuk melanjutkannya. Dalam bahasa yang lebih filosofis, kemerdekaan adalah proses yang tidak pernah selesai; ia selalu menuntut perbaikan, karena selalu ada bentuk-bentuk penjajahan baru yang muncul, baik dalam wujud ketimpangan, ketidakadilan, maupun kerusakan alam.

Bab ini juga ingin menegaskan bahwa keberanian untuk jujur adalah bagian dari integritas kebangsaan. Bangsa yang sehat adalah bangsa yang warganya tidak takut melihat kenyataan. Kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah jika kita terus-menerus menyangkalnya. Pengakuan KDM bahwa rakyat Jawa Barat belum sepenuhnya merdeka adalah contoh kecil dari sikap yang seharusnya dimiliki oleh para pemimpin di semua tingkatan: jujur tentang kondisi rakyatnya, lalu bekerja untuk mengubahnya. Tanpa kejujuran semacam itu, kemerdekaan akan terus menjadi seremoni tahunan yang indah di permukaan tetapi kosong di dalam.

Dalam bab ini juga kita akan melihat bahwa persoalan kemerdekaan yang belum selesai bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ia adalah tanggung jawab semua pihak: para pemimpin, para pengusaha, para tokoh agama, para pendidik,

dan seluruh warga. Pemerintah memang memegang peran utama dalam membuat kebijakan dan menyediakan layanan, tetapi tanpa dukungan dan partisipasi rakyat, kebijakan terbaik pun akan gagal. Demikian pula, rakyat tidak boleh hanya menunggu dan menuntut; mereka juga harus berusaha, menjaga lingkungannya, mendidik anak-anaknya, dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, semua unsur harus seimbang: pemerintah dan rakyat, pusat dan daerah, kota dan desa, ekonomi dan ekologi. Ketika keseimbangan itu tercapai, barulah kemerdekaan yang belum selesai itu dapat diteruskan ke tahap berikutnya.

Dengan demikian, bab ini adalah bab tentang kejujuran dan tanggung jawab. Ia mengajak kita untuk tidak menutup mata terhadap kenyataan yang pahit, tetapi juga tidak menyerah pada keputusasaan. Di balik pengakuan bahwa kita belum bisa memerdekakan seluruh rakyat, tersimpan harapan bahwa kita masih bisa memperbaikinya, asalkan ada kemauan untuk bekerja bersama. Halaman Gedung Sate yang menjadi tempat pidato itu bukan hanya saksi dari pengakuan, tetapi juga saksi dari harapan: bahwa di negeri ini masih ada pemimpin yang berani jujur, masih ada rakyat yang mau berjuang, dan masih ada hari esok yang bisa diperbaiki.

Pengakuan Pahit di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan

Dalam tradisi kenegaraan, peringatan hari kemerdekaan biasanya menjadi panggung untuk menyampaikan keberhasilan. Para pemimpin bergantian mengabarkan capaian pembangunan, menaikkan angka pertumbuhan, dan menabur janji-janji kemajuan. Suasana dibuat semeriah mungkin; optimisme dibangun setinggi mungkin. Tidak ada yang salah dengan semua itu, sebab bangsa memang perlu diingatkan akan hal-hal baik yang telah dicapai. Namun, ada satu hal yang sering kali hilang dari panggung semacam itu: kejujuran tentang kegagalan. Padahal, bangsa yang besar bukan hanya diukur dari keberaniannya merayakan keberhasilan, tetapi juga dari kesediaannya mengakui kekurangan. Di titik inilah pidato KDM pada HUT ke-81 RI mengambil jalan yang berbeda. Ia justru menjadikan hari ulang tahun kemerdekaan sebagai momen untuk menyampaikan pengakuan yang pahit, sebuah tindakan yang jarang dilakukan oleh pemimpin mana pun.

Kalimat "Kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat" adalah bentuk pengakuan yang mengandung risiko politik. Dalam budaya kekuasaan yang cenderung menampilkan citra kuat dan sempurna, mengakui kegagalan sering kali dianggap sebagai kelemahan. Seorang pemimpin yang jujur tentang kekurangan bisa dinilai tidak cakap, tidak mampu, atau tidak layak memimpin. Namun, KDM memilih untuk mengambil risiko itu. Ia berdiri di hadapan para pejabat, tokoh masyarakat, dan rakyat, lalu mengakui bahwa kemerdekaan yang dirayakan hari itu belum sepenuhnya dirasakan oleh semua. Ini bukan tindakan yang lahir

dari keputusasaan, melainkan dari kesadaran bahwa rakyat berhak mendengar kenyataan, bukan hanya kata-kata indah.

Dalam perspektif filsafat politik, pengakuan semacam ini memiliki nilai yang sangat berharga. Para pemikir republikan sejak zaman kuno menekankan bahwa kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang sanggup mempertanggungjawabkan dirinya kepada publik. Dalam tradisi itu, kejujuran bukanlah kelemahan, melainkan keutamaan yang menjaga kekuasaan tetap berpihak pada rakyat (Pocock, 1975). Seorang pemimpin yang berani mengakui bahwa cita-cita kemerdekaan belum terwujud sedang menolak godaan untuk menutupi kenyataan demi menjaga citra. Ia memilih berdiri di pihak rakyat yang selama ini merasakan pahitnya ketimpangan, ketimbang di pihak mereka yang ingin mendengar laporan manis. Dengan demikian, pengakuan itu bukan sekadar pernyataan, melainkan sebentuk keberpihakan.

Kita juga perlu mencatat bahwa pengakuan KDM bukanlah pengakuan yang abstrak. Ia menyebutkan hal-hal yang sangat konkret: masih ada puluhan ribu warga yang belum memiliki listrik, ada rakyat yang pulang dari rumah sakit dengan utang, ada ibu yang KTP-nya ditahan karena tidak mampu membayar biaya persalinan caesar, dan ada warga yang meninggal tanpa sempat mendapat perawatan dokter. Dengan menyebut hal-hal itu secara terbuka, KDM sedang memindahkan penderitaan rakyat ke dalam arena resmi, memberinya tempat di hadapan para pemangku kebijakan. Penderitaan yang selama ini hanya menjadi bisikan di kampung-kampung, keluh kesah di ruang tunggu rumah sakit, dan jeritan yang tidak terdengar di lorong-lorong kota, tiba-tiba mendapat tempat di halaman Gedung Sate. Inilah kekuatan dari pengakuan itu: ia membuat yang tersembunyi menjadi terlihat.

Dalam banyak kebudayaan, mengakui kesalahan atau kekurangan adalah tanda kebesaran jiwa, bukan kerendahan martabat. Dalam ajaran Islam, misalnya, taubat adalah pintu untuk memperbaiki diri; dalam tradisi Jawa dan Sunda, orang yang mau "ngaku" dan "ngalah" justru dianggap bijaksana. Pengakuan KDM dapat dibaca dalam terang kearifan semacam ini. Ia sedang memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak harus selalu tampil dengan wajah angkuh yang mengklaim segalanya beres. Kekuasaan juga bisa tampil dengan wajah yang jujur, yang sanggup menundukkan kepala dan berkata, "Kami belum selesai." Barangkali justru dari sikap seperti itulah kepercayaan rakyat bisa tumbuh kembali: bukan dari janji-janji yang muluk, tetapi dari kejujuran yang membumi.

Pengakuan ini juga menjadi kritik halus terhadap budaya laporan yang menipu. Di banyak kesempatan, pejabat cenderung memoles data agar terlihat baik di mata atasan atau publik. Angka kemiskinan diturunkan dengan mengubah definisi, angka pengangguran disembunyikan di balik statistik yang rumit, dan keberhasilan pembangunan dibesar-besarkan dengan proyek-proyek mercusuar. Akibatnya, rakyat tidak pernah tahu keadaan yang sebenarnya, dan kebijakan pun disusun di

atas fondasi yang rapuh. Dengan berbicara jujur tentang kegagalan, KDM sedang menunjukkan bahwa ada cara lain untuk memimpin: dengan menyampaikan kenyataan apa adanya, lalu mengajak semua pihak untuk memperbaikinya. Ini adalah teladan yang sayangnya masih langka di negeri ini.

Tentu saja, pengakuan itu tidak boleh berhenti sebagai momen haru belaka. Ia harus diikuti oleh kerja nyata. Publik berhak bertanya: apa yang akan dilakukan setelah pengakuan itu? KDM menjawabnya dengan menyebut target penyelesaian listrik pada 2027, ajakan untuk menata ulang anggaran, dan seruan untuk membangun pertanian organik. Apakah semua itu akan berhasil, hanya waktu yang bisa membuktikan. Tetapi setidaknya, arahnya jelas: dari pengakuan menuju perbaikan. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, ini adalah gerakan dari pusat kesadaran menuju keseimbangan baru. Manusia yang berani mengakui ketidakseimbangan adalah manusia yang siap untuk memulihkan keseimbangan itu, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan.

Pada akhirnya, pengakuan pahit di hari ulang tahun kemerdekaan adalah undangan bagi kita semua untuk berhenti sejenak dari kemeriahan dan bertanya: sudahkah kita benar-benar merdeka? Pertanyaan itu tidak boleh dijawab dengan terburu-buru, apalagi dengan slogan. Ia harus dijawab dengan melihat ke dalam: ke rumah-rumah yang belum berlistrik, ke keluarga yang tidak mampu membayar biaya sekolah, ke petani yang terjerat utang, ke anak-anak muda yang dirusak obat-obatan. Jika kita berani melihat semuanya, maka kita akan memahami mengapa pengakuan KDM itu penting. Ia bukan untuk melemahkan semangat, melainkan untuk membangunkan kita dari tidur panjang yang dibuai oleh seremoni.

Ironi Listrik
Negeri Berenergi tapi Warganya Gelap Gulita

Di antara semua pengakuan yang disampaikan KDM, persoalan listrik adalah salah satu yang paling mudah dipahami dan paling menusuk akal sehat. Sebab listrik bukanlah barang mewah; ia adalah kebutuhan dasar yang menopang hampir seluruh aspek kehidupan modern. Tanpa listrik, anak-anak sulit belajar di malam hari, rumah sakit tidak dapat menjalankan peralatan medisnya, usaha kecil tidak dapat berkembang, dan informasi tidak dapat mengalir. Dalam dunia yang semakin terang oleh teknologi, hidup tanpa listrik berarti hidup dalam keterbelakangan yang dipaksakan. Maka, ketika KDM menyebut bahwa masih ada puluhan ribu warga Jawa Barat yang belum menikmati listrik, ia sedang menyingkap luka yang tidak boleh ditutup-tutupi: ada sebagian dari bangsa ini yang masih hidup dalam kegelapan di tengah pesta cahaya negerinya sendiri.

Ironi paling tajam dari semua ini adalah bahwa Jawa Barat justru termasuk provinsi yang kaya akan sumber energi. Di wilayahnya berdiri pembangkit-pembangkit besar yang telah lama menjadi tulang punggung kelistrikan Jawa dan bahkan Indonesia: Waduk Jatiluhur, Cirata, Saguling, dan Jatigede. Keempat waduk itu bukan hanya berfungsi sebagai pengendali banjir dan irigasi, tetapi juga sebagai pembangkit listrik tenaga air yang kapasitasnya sangat besar. Belum lagi potensi geotermal yang tersimpan di pegunungan Jawa Barat, yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Dengan kekayaan seperti itu, seharusnya tidak ada satu pun rumah di Jawa Barat yang gelap. Tetapi kenyataan berbicara lain: sumber-sumber energi itu tidak otomatis menerangi rumah-rumah di sekitarnya. Listrik yang dihasilkan mengalir jauh ke kota-kota besar, ke kawasan industri, ke tempat-tempat yang sudah terang, sementara sebagian warga yang tinggal dekat sumber energi justru masih menyalakan lilin di malam hari.

KDM menyebut angka yang mengejutkan: pada saat ia mulai menjabat, ada lebih dari 500.000 rakyat Jawa Barat yang tidak memiliki listrik. Angka itu kemudian menurun, tetapi masih tersisa sekitar 80.000 jiwa yang hingga hari ini hidup tanpa aliran listrik. Dalam skala provinsi dengan belasan juta penduduk, angka itu mungkin terlihat kecil. Namun, di balik angka ada nyawa, ada keluarga, ada anak-anak yang harus mengerjakan pekerjaan rumah dengan penerangan seadanya. Menghitung mereka hanya sebagai persentase akan menghilangkan wajah kemanusiaan dari persoalan ini. Setiap rumah yang gelap adalah saksi dari ketimpangan yang belum selesai, dan setiap anak yang belajar di bawah lampu minyak adalah pengingat bahwa kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan.

Mengapa ironi semacam ini bisa terjadi? Jawabannya tidak sederhana, tetapi dapat ditarik ke beberapa hal: tata kelola energi yang belum berpihak pada rakyat kecil, infrastruktur yang belum merata, biaya penyambungan yang dianggap mahal, serta kebijakan yang lebih memprioritaskan kawasan industri dan perkotaan. Di banyak desa terpencil, jaringan listrik belum sampai karena dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi. Perusahaan listrik, sebagai badan usaha, tentu memiliki pertimbangan bisnis; tetapi di sisi lain, negara tidak boleh membiarkan warganya hidup tanpa listrik hanya karena alasan untung-rugi. Di sinilah peran pemerintah sebagai penyeimbang harus hadir: menyediakan energi bagi warganya sebagai wujud kewajiban, bukan semata-mata sebagai peluang pasar.

Dalam konteks *Papat Kalima Pancer*, listrik adalah perwujudan dari unsur matahari: energi yang seharusnya membagi terang dan kehangatan secara adil. Matahari tidak pilih kasih; ia menyinari semua orang, kaya dan miskin, kota dan desa. Maka, ketika listrik hanya dinikmati oleh sebagian warga, terjadilah pengingkaran terhadap prinsip keadilan kosmis itu. Energi tidak lagi menjadi anugerah yang merata, melainkan menjadi komoditas yang timpang. KDM menyebut ironi ini dengan nada yang nyaris getir: "Ketika kita memiliki energi yang besar, tetapi

rakyat kita, bahkan yang dekat di pembangkit itu, tidak memiliki listrik." Kalimat ini adalah cermin yang dihadapkan kepada bangsa ini: kita kaya, tetapi tidak adil.

Untuk keluar dari ironi itu, tidak cukup hanya dengan membangun pembangkit baru. Yang lebih penting adalah membenahi sistem distribusi dan menata ulang prioritas. Pembangunan infrastruktur listrik harus diarahkan ke daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan, bukan hanya ke kawasan yang sudah ramai. Subsidi atau bantuan penyambungan listrik harus diberikan kepada keluarga miskin yang tidak mampu membayar biaya instalasi. Pemerintah daerah dan pusat harus duduk bersama dengan perusahaan listrik untuk memetakan titik-titik gelap yang masih tersisa, lalu menetapkan target penyelesaian yang jelas. KDM menyebut tahun 2027 sebagai target penyelesaian sisa warga yang belum berlistrik. Terlepas dari optimisme atau skeptisisme kita terhadap target itu, yang jelas arahnya sudah benar: ada tenggat waktu, ada pengakuan, dan ada niat untuk menuntaskan.

Kita juga perlu melihat bahwa listrik bukan hanya soal penerangan. Listrik adalah pintu masuk menuju pendidikan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang lebih layak, dan ekonomi yang lebih hidup. Dengan listrik, sekolah-sekolah di desa dapat menggunakan alat bantu belajar modern; puskesmas dapat menyimpan vaksin dengan aman; pengusaha kecil dapat menghidupkan mesin jahit, kulkas, atau penggilingan padi. Listrik juga memungkinkan akses informasi melalui televisi, radio, dan internet, yang membuka wawasan dan menghubungkan desa dengan dunia. Maka, setiap rumah yang dialiri listrik adalah satu langkah menuju kemerdekaan yang lebih nyata. Sebaliknya, setiap rumah yang tetap gelap adalah satu bentuk penjajahan yang masih berlangsung, meskipun tidak lagi dalam wujud pasukan asing.

Dalam pidato KDM, ironi listrik ini menjadi simbol dari ironi yang lebih besar: negeri yang kaya sumber daya tetapi masih banyak rakyatnya miskin. Kita patut merenungkan mengapa kekayaan alam yang melimpah belum juga menjadi kesejahteraan bersama. Jawabannya terletak pada cara kita mengelola, membagi, dan memprioritaskan. Jika pengelolaan hanya berorientasi pada keuntungan segelintir pihak, maka rakyat akan terus menjadi penonton di negeri sendiri. Tetapi jika pengelolaan diarahkan pada keadilan, maka listrik, air, tanah, dan energi akan menjadi berkah yang merata. Di sinilah panggilan *Papat Kalima Pancer* kembali relevan: kita perlu memulihkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial, antara pusat dan pinggiran, antara yang sudah terang dan yang masih gelap.

Pada akhirnya, ironi listrik di Jawa Barat adalah cermin bagi Indonesia. Masih banyak daerah di negeri ini yang mengalami nasib serupa: kaya sumber daya tetapi warganya tertinggal. Selama kita tidak berani melihat ironi ini dengan jujur, selama itu pula kita akan terus merayakan kemerdekaan di atas penderitaan yang tersembunyi. KDM telah membuka mata kita dengan menyebut angka-angka itu

secara terbuka. Tugas kita sekarang adalah memastikan bahwa pengakuan itu tidak berhenti sebagai pidato, melainkan berlanjut menjadi kerja nyata: memasang kabel, menyalakan lampu, dan menerangi rumah-rumah yang telah terlalu lama gelap.

Angka Kemiskinan, Akses Kesehatan, dan Pendidikan

Listrik hanyalah satu wajah dari kemerdekaan yang belum selesai. Di belakangnya, ada wajah-wajah lain yang tidak kalah pucat: kemiskinan yang bercokol kuat, layanan kesehatan yang belum berpihak, dan pendidikan yang belum merata. Ketiganya saling berkaitan, membentuk lingkaran setan yang menjerat manusia sejak lahir hingga akhir hayat. Orang miskin sulit mengakses pendidikan yang baik; pendidikan yang rendah membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak; pekerjaan yang buruk membuat mereka tidak mampu menjaga kesehatan; kesehatan yang rapuh membuat mereka tidak bisa bekerja; dan begitu seterusnya. Lingkaran ini adalah penjajahan yang halus, yang tidak membutuhkan serdadu asing, tetapi cukup bekerja melalui struktur sosial yang timpang. Dalam konteks inilah pengakuan KDM bahwa Jawa Barat belum sepenuhnya merdeka memperoleh maknanya yang paling dalam: kemerdekaan politik tidak akan berarti banyak selama kemerdekaan sosial dan ekonomi masih jauh dari jangkauan rakyat.

Kemiskinan adalah pangkal dari hampir semua penderitaan sosial. Di Jawa Barat, meskipun secara statistik angka kemiskinan terus diperdebatkan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak keluarga yang hidup pas-pasan. Mereka makan seadanya, tinggal di rumah yang sederhana, dan tidak memiliki tabungan untuk menghadapi keadaan darurat. Ketika harga bahan pokok naik, mereka harus memilih antara membeli beras atau membayar iuran sekolah anak. Ketika anggota keluarga sakit, mereka harus memilih antara membawa ke puskesmas atau menahan sakit di rumah. Kemiskinan bukan hanya soal kekurangan uang, melainkan juga soal hilangnya pilihan-pilihan hidup. Orang miskin tidak bebas memilih; mereka hanya bisa menjalani apa yang tersisa.

KDM menyinggung penderitaan ini dengan menyebut hal-hal yang sangat konkret: rakyat yang masuk rumah sakit lalu pulang dengan utang, pasien miskin yang meninggal tanpa perawatan memadai, dan ibu yang KTP-nya ditahan oleh rumah sakit karena tidak mampu membayar biaya persalinan caesar. Kasus-kasus seperti ini bukan fiksi; ia terjadi di banyak tempat, sering kali tanpa terdengar oleh publik. Penahanan KTP pasien adalah bentuk paling kasar dari ketidakadilan layanan kesehatan, karena ia memperlakukan orang sakit sebagai debitur yang harus diawasi, bukan sebagai manusia yang harus ditolong. Padahal, dalam

semangat kemerdekaan, layanan kesehatan adalah hak dasar yang seharusnya tidak diperjualbelikan seperti barang dagangan.

Akses kesehatan yang timpang menunjukkan bahwa sistem kesehatan kita masih jauh dari cita-cita keadilan sosial. Rumah sakit besar dibangun di kota-kota, sementara di desa-desa terpencil masyarakat harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk mendapatkan pertolongan medis. Alat-alat canggih tersedia di rumah sakit swasta, tetapi harganya tidak terjangkau oleh rakyat kecil. Asuransi kesehatan, meskipun sudah banyak diperluas, masih sering menyisakan biaya-biaya yang harus ditanggung sendiri oleh pasien. Akibatnya, orang miskin tetap menanggung beban paling berat ketika sakit: mereka harus membayar dengan uang yang tidak mereka miliki, atau membayar dengan nyawa yang seharusnya bisa diselamatkan. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, kesehatan yang timpang ini adalah tanda bahwa unsur air—kejernihan, kebersihan, dan kesegaran hidup—belum dirasakan secara merata oleh seluruh warga.

Pendidikan juga memperlihatkan jurang yang tidak kalah dalam. Secara formal, hampir semua anak di Jawa Barat bisa bersekolah. Tetapi antara sekolah di kota dan sekolah di pelosok terbentang perbedaan mutu yang sangat besar. Ada sekolah yang memiliki laboratorium lengkap, perpustakaan yang kaya, dan guru-guru yang terlatih; tetapi ada juga sekolah yang atapnya bocor, bukunya terbatas, dan gurunya harus merangkap mengajar beberapa kelas sekaligus. KDM menyebut bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Jawa Barat masih berkutat di angka 8 tahun, dan ia menargetkan minimal 12 tahun ke depan. Ini artinya masih banyak anak yang putus sekolah sebelum menamatkan pendidikan menengah, baik karena alasan biaya, jarak, maupun tuntutan untuk bekerja membantu keluarga. Padahal, pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Tanpa pendidikan yang baik, anak-anak dari keluarga miskin akan mewarisi kemiskinan orang tuanya, dan kemerdekaan akan terus menjadi mimpi yang tidak pernah terwujud.

Kita juga perlu menyoroti kualitas pendidikan yang tidak hanya diukur dari lama sekolah, tetapi dari isi pengajarannya. Sekolah yang baik bukan hanya mengajarkan anak untuk lulus ujian, tetapi juga menumbuhkan rasa ingin tahu, keberanian berpikir, dan kepekaan sosial. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, pendidikan seharusnya membantu anak-anak memahami posisinya sebagai *pancer*: manusia yang hidup di tengah alam, bertanggung jawab terhadap sesama, dan terhubung dengan Tuhan. Pendidikan yang hanya berorientasi pada nilai akademik akan melahirkan lulusan yang cerdas tetapi kering hati nurani. Sebaliknya, pendidikan yang seimbang akan melahirkan manusia-manusia yang tidak hanya pandai bekerja, tetapi juga pandai hidup. Sayangnya, orientasi pendidikan kita masih lebih banyak tertuju pada angka dan peringkat, bukan pada pembentukan manusia seutuhnya.

Dalam pidatonya, KDM juga menyinggung bahwa kesempatan kerja tidak lahir dengan sendirinya, melainkan harus diciptakan melalui iklim yang sehat. Ini adalah

isyarat bahwa kemiskinan dan pengangguran bukan semata-mata tanggung jawab individu, melainkan akibat dari struktur ekonomi yang belum berpihak pada rakyat kecil. Selama lapangan kerja yang layak masih langka, selama harga-harga kebutuhan pokok terus naik tanpa diimbangi pendapatan, dan selama akses modal masih dikuasai segelintir orang, maka rakyat kecil akan terus berada dalam keadaan tertindas. Maka, kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk menciptakan pemerataan: membantu petani kecil, mendukung usaha mikro, membuka akses pendidikan dan pelatihan, serta memastikan bahwa kekayaan daerah mengalir kepada warganya, bukan hanya kepada segelintir pengusaha.

Kita juga harus jujur mengakui bahwa angka-angka kemiskinan sering kali tidak mencerminkan penderitaan yang sesungguhnya. Banyak keluarga yang secara statistik tidak tergolong miskin, tetapi hidup dalam kerentanan: begitu ada anggota keluarga yang sakit, begitu harga naik, begitu panen gagal, mereka langsung jatuh ke bawah garis kemiskinan. Kerentanan ini tidak terlihat dalam laporan-laporan resmi, tetapi ia nyata di kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa KDM, mereka adalah rakyat yang "belum merdeka" meskipun tidak terdaftar sebagai miskin. Maka, pembangunan tidak boleh hanya mengejar penurunan angka, tetapi harus memastikan bahwa setiap warga memiliki daya tahan untuk menghadapi guncangan hidup.

Dengan melihat kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan secara bersama-sama, kita menjadi paham mengapa KDM meminta maaf kepada rakyat Jawa Barat. Ia sedang menghadapi kenyataan bahwa kemerdekaan yang dirayakan setiap tahun belum juga mengangkat derajat sebagian warganya. Tetapi, sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, pengakuan ini bukanlah akhir. Ia adalah panggilan untuk bekerja lebih keras, menata ulang anggaran, membangun sistem yang lebih adil, dan menumbuhkan kesadaran bersama bahwa kemerdekaan adalah tanggung jawab kolektif. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, semua ini berarti memulihkan keseimbangan antara tanah, air, udara, dan matahari; memastikan bahwa energi dan kekayaan alam tidak hanya dinikmati segelintir orang; dan menjadikan manusia sebagai pusat yang adil, yang merawat sesama dan alamnya dengan penuh tanggung jawab.

BAB 5
KEADILAN KOMUTATIF
HAK YANG SAMA UNTUK SEMUA

Dalam hidup bermasyarakat, keadilan sering kali menjadi kata yang diucapkan tetapi jarang dirasakan. Setiap orang mendambakan keadilan, tetapi tidak banyak yang mampu menjelaskan dengan jernih apa yang dimaksud. Sebagian mengartikan keadilan sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan; sebagian lagi mengartikannya sebagai pembagian harta yang merata. Padahal, keadilan adalah konsep yang jauh lebih luas dan lebih dalam dari sekadar urusan hukum atau ekonomi. Ia menyangkut bagaimana kita memperlakukan sesama manusia, bagaimana negara hadir bagi warganya, dan bagaimana hak-hak dasar setiap orang dihormati tanpa kecuali. Dalam pidato KDM, gagasan keadilan ini dibahas dengan cara yang menarik: ia membedakan antara keadilan komutatif dan keadilan distributif, lalu menempatkan keduanya sebagai syarat penting bagi kemerdekaan yang sejati.

Keadilan komutatif, dalam pengertian yang disampaikan KDM, adalah keadilan yang berkaitan dengan hak-hak dasar yang setara bagi semua warga. Ia berbicara tentang hal-hal yang seharusnya diterima oleh setiap orang semata-mata karena ia manusia dan warga negara: udara bersih, pendidikan, layanan kesehatan, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, dan perlakuan yang setara di mata hukum. Dalam konsep ini, tidak ada seorang pun yang boleh diperlakukan lebih rendah atau lebih tinggi hanya karena latar belakangnya. Semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia, dan negara wajib menjamin kesetaraan itu. Inilah bentuk keadilan yang paling mendasar, yang menjadi fondasi bagi tegaknya martabat manusia dalam kehidupan bersama.

KDM menegaskan bahwa keadilan komutatif ini belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh warga. Ia berkata, “Walaupun seluruh kemerdekaan itu pun belum bisa dinikmati oleh seluruh warga.” Kalimat ini adalah pengakuan bahwa hak-hak dasar yang seharusnya setara ternyata masih timpang dalam praktiknya. Ada warga yang bisa menghirup udara bersih karena tinggal di lingkungan yang sehat, tetapi ada juga warga yang setiap hari menghirup asap dan debu karena tinggal di

kawasan industri atau di tepi jalan raya yang padat. Ada anak yang bisa bersekolah dengan nyaman, tetapi ada juga anak yang putus sekolah karena kemiskinan. Ada orang yang bisa mendapatkan perawatan kesehatan terbaik, tetapi ada juga orang yang meninggal tanpa sempat ditangani dokter. Ketimpangan-ketimpangan inilah yang membuat keadilan komutatif masih menjadi cita-cita yang jauh.

Bab ini akan membahas lebih dalam tentang keadilan komutatif sebagaimana diungkapkan KDM. Kita akan melihat bagaimana hak-hak dasar seperti udara bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan seharusnya diperlakukan sebagai milik bersama yang tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang. Kita juga akan menelusuri makna kesetaraan di mata hukum, yang sering kali lebih banyak tertulis di atas kertas daripada dipraktikkan dalam kenyataan. Pada akhirnya, kita akan merenungkan mengapa keadilan komutatif masih sulit dinikmati oleh semua warga, dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya. Sebagaimana bab-bab sebelumnya, kita akan memakai kerangka *Papat Kalima Pancer* untuk memahami bahwa ketidakadilan adalah bentuk ketidakseimbangan, dan bahwa memulihkan keadilan berarti memulihkan keseimbangan itu.

Penting untuk dicatat bahwa keadilan komutatif bukanlah utopia yang mustahil diwujudkan. Ia adalah tuntutan moral yang sederhana: bahwa setiap orang diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat. Namun, justru kesederhanaan inilah yang sering kali diabaikan. Dalam masyarakat yang terlanjur terbiasa dengan hierarki, kita sering kali menganggap wajar jika orang kaya mendapat layanan lebih baik daripada orang miskin, jika orang berpangkat lebih didengar daripada rakyat biasa, dan jika kota lebih diperhatikan daripada desa. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang melanggengkan ketidakadilan komutatif. Maka, membahas keadilan komutatif berarti membongkar kebiasaan-kebiasaan itu, menyadari bahwa mereka tidak sejalan dengan cita-cita kemerdekaan, dan berusaha membangun tatanan yang lebih setara.

Dalam perspektif sejarah, gagasan tentang kesetaraan hak dasar telah menjadi inti dari perjuangan-perjuangan besar dunia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1948 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi, serta berhak atas pendidikan, pekerjaan, dan standar hidup yang layak (United Nations, 1948). Konstitusi Indonesia juga menjamin hak-hak tersebut, misalnya dalam Pasal 28 dan Pasal 31 tentang pendidikan serta Pasal 34 tentang fakir miskin dan anak terlantar. Dengan demikian, apa yang disampaikan KDM tentang keadilan komutatif bukanlah gagasan yang mengawang-awang, melainkan tuntutan konstitusional yang seharusnya dijalankan oleh negara. Persoalannya memang bukan pada aturan, melainkan pada pelaksanaan dan pembagian akses yang masih timpang.

Kita juga perlu memahami bahwa keadilan komutatif berkaitan erat dengan perasaan dihargai sebagai manusia. Orang yang tidak mendapat akses yang

sama terhadap layanan dasar akan merasa direndahkan, dianggap tidak penting, dan ditinggalkan oleh negerinya sendiri. Perasaan semacam ini lama-kelamaan melahirkan kekecewaan, kemarahan, bahkan radikalisme. Banyak konflik sosial yang akarnya bukan pada perbedaan ideologi, melainkan pada ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Karena itu, memperjuangkan keadilan komutatif bukan hanya soal moralitas, tetapi juga soal stabilitas dan masa depan bangsa. Bangsa yang ingin damai harus lebih dulu adil; bangsa yang ingin bersatu harus lebih dulu menghormati hak-hak dasar warganya.

Dengan kerangka itu, kita akan memasuki pembahasan yang lebih rinci. Kita akan mulai dari hak atas udara bersih, yang mungkin merupakan bentuk hak paling mendasar tetapi paling sering diabaikan. Dari sana kita akan beralih ke kesetaraan di mata hukum, lalu menutup dengan renungan tentang mengapa keadilan komutatif belum dinikmati semua warga. Sebagaimana biasa, kita akan membaca semua persoalan ini dalam terang *Papat Kalima Pancer*: bahwa keadilan adalah keseimbangan, dan bahwa manusia sebagai pusat harus memastikan tidak ada unsur yang dirampas, dirusak, atau dimonopoli oleh pihak tertentu.

Hak Udara Bersih, Pendidikan, dan Layanan Kesehatan

Ketika kita berbicara tentang hak asasi, sering kali pikiran kita langsung tertuju pada hal-hal besar seperti kebebasan berpendapat, hak pilih, atau kebebasan beragama. Hal-hal itu memang penting, tetapi ada hak-hak yang lebih mendasar dan lebih dekat dengan hidup sehari-hari, yang justru sering luput dari perhatian: hak untuk menghirup udara bersih, hak untuk mengenyam pendidikan, dan hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Tiga hak ini adalah wujud paling nyata dari keadilan komutatif, karena ia menyangkut kebutuhan dasar yang menentukan hidup mati, tumbuh kembang, dan martabat seseorang. Tanpa udara bersih, tubuh tidak bisa sehat; tanpa pendidikan, pikiran tidak bisa merdeka; tanpa layanan kesehatan, nyawa tidak bisa diselamatkan. Maka, membicarakan keadilan komutatif harus dimulai dari hal-hal yang tampak sederhana ini.

Hak atas udara bersih adalah hak yang paling tidak terlihat tetapi paling meluas dampaknya. Setiap hari, setiap orang menghirup ribuan liter udara tanpa bisa memilih. Orang kaya dan orang miskin, pejabat dan rakyat biasa, semuanya menghirup udara yang sama di kota yang sama. Namun, akses terhadap udara bersih ternyata tidak sama rata. Mereka yang tinggal di kawasan industri, di tepi jalan raya yang padat, atau di sekitar tempat pembuangan sampah, setiap hari terpapar polusi yang merusak paru-paru dan memperpendek umur. Sementara itu, mereka yang mampu tinggal di perumahan asri dengan banyak pohon menikmati

udara yang jauh lebih segar. Dalam hal ini, udara bersih telah menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh sebagian orang, padahal ia seharusnya menjadi milik bersama yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun.

KDM menyebut udara bersih sebagai salah satu hak yang seharusnya dimiliki semua warga, tetapi ia juga jujur bahwa "udaranya tidak semua bersih sampai hari ini." Kalimat ini adalah pengakuan bahwa kita hidup di lingkungan yang telah rusak, di mana asap kendaraan, cerobong pabrik, dan pembakaran sampah telah mencampuri udara yang kita hirup. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, udara adalah unsur yang menopang napas kehidupan; jika ia tercemar, maka keseimbangan hidup akan goyah. Manusia tidak bisa lepas dari udara, dan karena itu ia tidak bisa lari dari akibat polusi. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan berpolusi akan membawa dampaknya seumur hidup: paru-paru yang lemah, daya tahan tubuh yang rendah, dan risiko penyakit kronis yang lebih tinggi. Maka, memerdekakan udara dari pencemaran adalah bagian dari memerdekakan manusia.

Pendidikan adalah hak dasar kedua yang menjadi inti keadilan komutatif. Melalui pendidikan, seorang anak belajar membaca, berpikir, dan memahami dunianya. Pendidikan adalah alat untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka pintu kesempatan yang lebih luas. Karena itu, setiap anak berhak atas pendidikan yang layak, tanpa memandang asal-usul, status sosial, atau tempat tinggalnya. Namun, kenyataan di lapangan masih jauh dari ideal. Masih banyak anak yang putus sekolah karena biaya, masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas, dan masih banyak guru yang harus bekerja dalam kondisi sulit. KDM menyebut bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Jawa Barat masih berada di sekitar 8 tahun, yang artinya masih jauh dari target minimal 12 tahun. Ini adalah gambaran bahwa pendidikan belum sepenuhnya menjadi hak yang dapat dinikmati oleh semua.

Lebih dari sekadar angka, masalah pendidikan juga menyangkut mutu. Sekolah yang baik tidak hanya mengajarkan anak untuk lulus ujian, tetapi juga membentuk karakter, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan mengajarkan cara hidup yang seimbang. Dalam semangat *Papat Kalima Pancer*, pendidikan seharusnya membantu anak memahami dirinya sebagai pusat yang bertanggung jawab: bertanggung jawab kepada tubuhnya, kepada alamnya, kepada sesamanya, dan kepada Tuhannya. Jika pendidikan hanya menjadi ajang mengejar nilai dan gelar, maka ia akan kehilangan ruhnya. Maka, pemerataan pendidikan bukan hanya soal membangun gedung sekolah, tetapi juga soal membangun manusia. Keadilan komutatif dalam pendidikan berarti setiap anak, di mana pun ia dilahirkan, mendapat kesempatan yang sama untuk tumbuh menjadi manusia yang utuh.

Layanan kesehatan adalah hak dasar ketiga yang tidak kalah pentingnya. Sehat adalah modal awal untuk hidup, bekerja, dan beribadah. Tanpa kesehatan, semua hal lain menjadi tidak berarti. Karena itu, layanan kesehatan harus tersedia bagi semua orang, bukan hanya bagi mereka yang mampu membayar. Dalam

kenyataannya, kita masih mendengar kisah-kisah yang menyedihkan: rakyat yang tidak berani ke rumah sakit karena takut biaya, pasien yang ditahan KTP-nya karena belum melunasi pembayaran, dan orang miskin yang meninggal tanpa mendapat perawatan. KDM menyebut hal-hal ini dengan tegas dalam pidatonya, dan menyatakannya sebagai sesuatu yang "tidak boleh lagi" terjadi. Pernyataan ini adalah bentuk keadilan komutatif dalam wujudnya yang paling konkret: bahwa nyawa manusia tidak boleh diperlakukan sebagai barang yang bisa ditawar.

Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, kesehatan adalah buah dari keseimbangan antara tanah, air, udara, dan matahari, dengan manusia sebagai pusatnya. Layanan kesehatan yang baik seharusnya menjaga keseimbangan itu, bukan hanya mengobati orang setelah keseimbangannya rusak. Maka, sistem kesehatan yang adil bukan hanya sistem yang menyediakan dokter dan obat, tetapi juga sistem yang mencegah timbulnya penyakit dengan menjaga lingkungan, menjamin pangan bersih, dan mendidik masyarakat tentang pola hidup sehat. Dalam arti ini, keadilan komutatif di bidang kesehatan menuntut perubahan yang lebih luas: dari pengobatan menuju pencegahan, dari rumah sakit menuju sumber-sumber kehidupan, dari keuntungan menuju keselamatan nyawa.

Ketiga hak dasar ini—udara bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan—sesungguhnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Udara yang bersih menunjang kesehatan; kesehatan yang baik menunjang kemampuan belajar; pendidikan yang baik menumbuhkan kesadaran untuk menjaga udara tetap bersih. Ketiganya adalah unsur-unsur yang saling mengikat, persis seperti logika *Papat Kalima Pancer*. Maka, memperjuangkan keadilan komutatif berarti memperjuangkan ketiganya secara bersama-sama, bukan secara terpisah-pisah. Kebijakan yang hanya memperbaiki rumah sakit tanpa memperbaiki lingkungan tidak akan menyelesaikan masalah kesehatan; kebijakan yang hanya membangun sekolah tanpa menjamin kesehatan anak-anak tidak akan melahirkan generasi yang kuat; dan kebijakan yang hanya mengatur polusi tanpa memperhatikan pendidikan akan sulit mengubah perilaku masyarakat.

Pada akhirnya, hak udara bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan adalah hak yang melekat pada martabat manusia. Ia tidak boleh diperlakukan sebagai hadiah yang diberikan oleh negara dengan penuh belas kasihan, melainkan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara sebagai konsekuensi dari kemerdekaan. Rakyat yang tidak mendapat hak-hak itu adalah rakyat yang belum merdeka, meskipun benderanya berkibar di depan rumahnya. KDM telah menegaskan hal ini dengan jujur. Kini kita semua—pemerintah, masyarakat, dan setiap individu—harus ikut memikul tanggung jawab untuk memenuhinya. Sebab keadilan komutatif bukan hanya urusan para pemimpin; ia adalah pekerjaan bersama untuk memastikan bahwa setiap orang, siapa pun dia, bisa bernapas lega, belajar dengan tenang, dan hidup dengan sehat.

Kesetaraan di Mata Hukum

Salah satu ukuran paling jelas dari sebuah bangsa yang beradab adalah bagaimana hukum memperlakukan warganya. Dalam masyarakat yang sehat, hukum seharusnya menjadi payung yang sama bagi semua orang: melindungi yang lemah, mengikat yang kuat, dan tidak memandang wajah, jabatan, atau isi dompet. Itulah yang dimaksud dengan kesetaraan di mata hukum, prinsip yang telah diakui oleh hampir semua negara modern, termasuk Indonesia. Namun, antara prinsip dan kenyataan sering kali terbentang jurang yang lebar. Hukum yang tertulis memang menyatakan semua orang setara, tetapi dalam praktiknya hukum sering kali tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Orang kecil yang melakukan kesalahan kecil bisa berurusan panjang dengan aparat, sementara orang besar yang melakukan kesalahan besar sering kali berkelit dengan mudah. Di sinilah letak persoalan keadilan komutatif yang paling mengusik hati: kesetaraan yang dijanjikan belum sepenuhnya menjadi kenyataan.

KDM menyentuh persoalan ini dengan kalimat yang sederhana namun penuh bobot: "Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum." Kalimat ini bukan sekadar pengulangan bunyi undang-undang; ia adalah penegasan moral bahwa tidak boleh ada warga yang diperlakukan sebagai warga kelas dua. Dalam pidatonya, ia juga menyinggung warisan feodalistik yang masih membayangi cara kita bersikap, yaitu kecenderungan untuk menjunjung tinggi orang-orang tertentu dan merendahkan yang lain. Dalam masyarakat yang masih feodal, hukum tidak berjalan lurus; ia berbelok mengikuti kepentingan, kedekatan, dan kekuasaan. Orang yang dekat dengan penguasa bisa lolos dari jerat hukum, sementara rakyat kecil yang tidak punya akses harus menanggung beban yang tidak seimbang. Maka, memperjuangkan kesetaraan di mata hukum adalah bagian dari perjuangan melawan feodalisme, baik yang lama maupun yang baru.

Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, hukum yang setara dapat dipahami sebagai pusat yang menyeimbangkan empat penjuru. Ia tidak boleh berpihak pada satu arah saja, tidak boleh memihak yang kuat dan mengabaikan yang lemah. Hukum harus menjadi *pancer* yang menjaga keseimbangan sosial, memastikan bahwa setiap orang mendapat perlindungan yang sama. Ketika hukum berpihak, keseimbangan itu rusak. Masyarakat kehilangan kepercayaan, dan kekuasaan berubah menjadi alat untuk menindas. Sejarah telah menunjukkan berkali-kali bahwa bangsa yang hukumnya tidak adil akan hancur dari dalam, bukan karena serangan dari luar, tetapi karena rakyatnya sendiri merasa dikhianati. Keadilan hukum adalah fondasi kepercayaan publik, dan tanpa kepercayaan itu, tidak ada pembangunan yang bisa bertahan lama.

Masalahnya, kesetaraan di mata hukum bukan hanya soal isi aturan, tetapi juga soal akses dan kekuasaan. Orang kaya bisa menyewa pengacara terbaik, sementara

orang miskin harus pasrah dengan pendampingan seadanya. Orang berpendidikan paham cara memperjuangkan haknya, sementara orang buta huruf sering kali tidak tahu harus memulai dari mana. Di sinilah negara harus hadir untuk menyeimbangkan: memberikan bantuan hukum bagi yang tidak mampu, menyederhanakan prosedur yang berbelit, dan mengawasi aparat agar tidak menyalahgunakan wewenang. Jika tidak, kesetaraan hanya akan menjadi kata-kata indah di atas kertas, sementara di lapangan hukum akan terus menjadi hutan belantara yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang kuat.

Kita juga perlu menyoroti bagaimana hukum sering kali digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti rakyat kecil, sementara pelanggaran oleh para elite justru ditoleransi. Banyak kasus di negeri ini yang memperlihatkan bahwa orang kecil bisa dipidana karena mencuri ayam atau mengambil kayu di hutan, sementara perampok uang negara miliaran rupiah bisa menghirup udara segar dengan cepat. Ketidakadilan semacam ini bukan hanya melukai rasa keadilan rakyat, tetapi juga mengajarkan sinisme: bahwa kejujuran tidak ada gunanya, bahwa hukum hanyalah permainan kekuasaan, dan bahwa yang kuat selalu menang. Padahal, dalam semangat kemerdekaan, hukum seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan alat untuk menekan mereka.

KDM juga menyinggung bahwa "negara merdeka tidak ada lagi kalimat kaum cacah, negara merdeka tidak ada lagi kalimat kaum menak, negara merdeka tidak lagi orang berpangkat." Kalimat ini adalah seruan untuk memutus warisan feodal yang menempatkan manusia dalam kelas-kelas sosial yang kaku. Dalam tatanan feodal, kaum menak dianggap lebih tinggi martabatnya daripada kaum cacah; orang berpangkat lebih dihormati daripada rakyat biasa. Akibatnya, hukum pun ikut terpengaruh: ia lebih melindungi yang berstatus tinggi dan lebih mudah menghukum yang berstatus rendah. Maka, kemerdekaan harus dibangun di atas pengakuan bahwa semua orang, tanpa kecuali, adalah warga negara yang setara. Tidak ada lagi kelas-kelas yang menentukan seberapa berharga seseorang di hadapan hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari, kesetaraan di mata hukum bisa kita lihat dalam hal-hal yang sederhana namun menentukan. Misalnya, ketika seorang buruh melaporkan majikannya yang tidak membayar upah, apakah laporannya ditanggapi dengan serius? Ketika seorang perempuan melaporkan kekerasan yang dialaminya, apakah ia didengar atau justru disalahkan? Ketika warga desa bersengketa dengan perusahaan besar, apakah hakim memihak pada keadilan atau pada kekuatan modal? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menguji apakah kesetaraan itu nyata atau sekadar slogan. Jika jawabannya masih timpang, maka kita belum bisa mengklaim bahwa keadilan komutatif telah berjalan.

Membangun kesetaraan di mata hukum membutuhkan reformasi yang serius: penegakan hukum yang tidak pandang bulu, transparansi dalam proses peradilan,

perlindungan bagi saksi dan korban, serta pendidikan hukum bagi masyarakat luas. Aparat penegak hukum juga harus dibersihkan dari perilaku koruptif dan mentalitas feodal yang masih melekat. Mereka harus sadar bahwa mereka adalah pelayan keadilan, bukan pemegang kuasa yang bisa memperjualbelikan hukum. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, aparat hukum adalah bagian dari pusat yang harus menjaga keseimbangan; jika mereka sendiri tidak seimbang, maka seluruh bangunan keadilan akan runtuh.

Pada akhirnya, kesetaraan di mata hukum adalah cermin dari martabat sebuah bangsa. Bangsa yang menghormati hukum akan melahirkan rasa aman, kepercayaan, dan kebanggaan pada warganya. Sebaliknya, bangsa yang hukumnya timpang akan melahirkan ketakutan, sinisme, dan kemarahan. KDM telah mengingatkan kita untuk kembali pada cita-cita itu: bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kini tugas kita adalah menjaganya agar tidak berhenti sebagai kalimat dalam pidato, tetapi menjadi kenyataan yang dirasakan oleh semua orang, terutama mereka yang paling lemah dan paling kecil.

Mengapa Keadilan Komutatif Belum Dinikmati Semua Warga

Setelah menelusuri hak-hak dasar dan kesetaraan di mata hukum, pertanyaan yang mengemuka adalah: mengapa keadilan komutatif belum juga dirasakan oleh seluruh warga? Bukankah aturan-aturan sudah ada, lembaga-lembaga sudah berdiri, dan para pemimpin sudah sering mengucapkan kata keadilan? Jawabannya tentu tidak sederhana. Keadilan komutatif tidak akan terwujud hanya dengan membuat undang-undang atau membangun gedung-gedung layanan. Ia membutuhkan perubahan cara pandang, perbaikan struktur, dan keberpihakan yang nyata kepada mereka yang selama ini berada di pinggir. Selama hal-hal itu belum terjadi, keadilan komutatif akan terus menjadi cita-cita yang digantung terlalu tinggi untuk dijangkau rakyat kecil.

Akar pertama dari belum terwujudnya keadilan komutatif adalah cara pandang yang masih membeda-bedakan martabat manusia. Dalam masyarakat yang feodal, sebagian orang dianggap lebih berharga karena keturunan, jabatan, atau hartanya, sementara sebagian lain dianggap rendah karena pekerjaannya kasar atau pendidikannya kurang. Cara pandang ini merembes ke dalam banyak hal: pelayanan publik, perlakuan aparat, sampai kesempatan kerja. Orang yang berpenampilan mewah akan lebih dihormati di kantor-kantor pelayanan, sementara orang kecil harus menunggu lebih lama atau diperlakukan dengan nada menggurui. Selama cara pandang ini tidak dicabut sampai ke akarnya, maka keadilan komutatif akan terus tersendat oleh feodalisme yang bersembunyi di balik modernitas. Dalam

pidato KDM, feodalisme ini disebut sebagai "perilaku feodalistik yang suka menjajah bangsanya sendiri," dan justru dianggap lebih kejam daripada penjajahan yang datang dari luar.

Akar kedua adalah struktur ekonomi yang timpang. Keadilan komutatif sulit terwujud ketika kesenjangan antara kaya dan miskin begitu lebar. Orang kaya dapat membeli hampir semua hal: pendidikan terbaik, layanan kesehatan terbaik, bahkan perlakuan istimewa dari hukum. Sementara itu, orang miskin harus berjuang sekuat tenaga hanya untuk sekadar makan. Dalam struktur yang seperti ini, hak-hak dasar memang tersedia secara formal, tetapi tidak terjangkau oleh sebagian besar rakyat. Udara bersih hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu tinggal di perumahan asri; pendidikan bermutu hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu membayar mahal; layanan kesehatan terbaik hanya bisa dibeli oleh mereka yang berduit. Keadilan komutatif menuntut agar hak-hak ini tidak diperjualbelikan sebagai barang mewah, melainkan disediakan sebagai milik bersama yang bermutu untuk semua.

Akar ketiga adalah lemahnya penegakan hukum. Hukum yang adil tidak akan berarti apa-apa jika pelaksanaannya bisa dibeli, dipengaruhi, atau diputarbalikkan. Di banyak tempat, rakyat kecil yang bersengketa dengan pihak kuat sering kali kalah bukan karena salah, tetapi karena tidak punya akses dan kekuatan. Mereka tidak mampu menyewa pengacara, tidak paham prosedur, dan tidak berani melawan karena takut akan pembalasan. Sementara itu, para pelanggar yang punya uang dan koneksi bisa memperlambat proses, mengaburkan fakta, dan menghindar dari tanggung jawab. Keadaan ini membuat hukum tidak lagi menjadi pelindung, melainkan alat kekuasaan. Keadilan komutatif akan terus tertunda selama hukum tidak ditegakkan secara setara, tanpa pandang bulu, dan tanpa bisa dibeli.

Akar keempat adalah kebijakan publik yang belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil. Banyak kebijakan dibuat di ruang-ruang rapat yang jauh dari kehidupan sehari-hari, oleh orang-orang yang tidak pernah merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau tanpa kepastian besok mau makan apa. Akibatnya, kebijakan yang lahir sering kali lebih menguntungkan kelompok menengah ke atas atau pengusaha besar, sementara rakyat kecil hanya mendapat sisa-sisa. Subsidi yang salah sasaran, pembangunan yang berpusat di kota, dan privatisasi layanan-layanan dasar adalah contoh-contoh bagaimana kebijakan justru memperlebar ketimpangan. Keadilan komutatif menuntut agar kebijakan publik diukur dari dampaknya terhadap mereka yang paling rentan, bukan hanya dari angka pertumbuhan atau indikator-indikator yang tampak indah di atas kertas.

Akar kelima adalah lemahnya kesadaran warga akan hak-haknya. Banyak rakyat yang tidak tahu bahwa mereka berhak atas layanan yang baik, atau tahu tetapi tidak berani menuntut karena merasa tidak punya posisi. Rasa rendah diri ini adalah warisan dari penjajahan dan feodalisme yang telah mengakar lama. Orang kecil

sering kali merasa bahwa dirinya tidak pantas mengeluh, tidak pantas menuntut, dan harus bersyukur apa adanya. Padahal, dalam negara yang merdeka, setiap warga memiliki hak yang sama, dan tidak ada seorang pun yang boleh merasa lebih rendah dari yang lain. Maka, pendidikan tentang hak-hak warga dan keberanian untuk bersuara adalah bagian dari perjuangan mewujudkan keadilan komutatif. Rakyat yang sadar haknya tidak akan mudah diperlakukan tidak adil.

Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, semua akar persoalan ini dapat diringkas menjadi satu kata: ketidakseimbangan. Keadilan komutatif belum terwujud karena unsur-unsur kehidupan tidak berada dalam keseimbangannya. Tanah, air, udara, dan matahari tidak lagi dinikmati secara adil; manusia sebagai pusat tidak lagi berfungsi sebagai penjaga, melainkan sebagai pengeksploitasi; dan Tuhan yang seharusnya menjadi sumber keadilan telah dijauhkan dari ruang-ruang pengambilan keputusan. Maka, memulihkan keadilan komutatif berarti memulihkan keseimbangan itu: memastikan bahwa sumber daya alam dibagi secara adil, bahwa hukum ditegakkan tanpa pilih kasih, bahwa kebijakan berpihak kepada yang lemah, dan bahwa setiap orang menyadari hak-haknya sebagai warga negara yang merdeka.

Tentu saja, semua ini bukan pekerjaan yang selesai dalam satu atau dua tahun. Ia adalah perjuangan panjang yang melibatkan semua pihak. Pemerintah harus berani mengubah prioritas anggaran dan menata ulang birokrasi agar melayani, bukan menyulitkan. Para pemimpin harus memberi teladan dengan hidup sederhana dan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri. Aparat hukum harus membersihkan dirinya dari korupsi dan mental feodal. Masyarakat harus berani menyuarakan haknya dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Dan semua pihak harus kembali kepada nilai-nilai dasar: bahwa semua manusia setara, bahwa keadilan adalah syarat kemerdekaan, dan bahwa bumi serta isinya adalah amanat yang harus dijaga bersama.

BAB 6
KEADILAN DISTRIBUTIF
RUANG UNTUK BERPRESTASI

Setelah membahas keadilan komutatif yang menuntut persamaan hak-hak dasar bagi semua warga, kita sampai pada bentuk keadilan yang lain, yaitu keadilan distributif. Jika keadilan komutatif berbicara tentang apa yang seharusnya diterima setiap orang secara setara, maka keadilan distributif berbicara tentang bagaimana negara membagi kesempatan, penghargaan, dan kedudukan sesuai dengan prestasi, kemampuan, dan usaha seseorang. Keadilan distributif tidak menghendaki semua orang diperlakukan sama rata tanpa membedakan apa pun, tetapi justru mengakui bahwa setiap orang memiliki bakat dan sumbangsih yang berbeda, sehingga harus diberi ruang yang adil untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Dalam bahasa yang sederhana, keadilan distributif berarti negara harus membuka jalan bagi siapa saja untuk berprestasi, tanpa memandang asal-usul, keturunan, atau latar belakang sosialnya.

KDM menyebut hal ini dengan tegas dalam pidatonya ketika ia berbicara tentang ruang untuk berprestasi. Ia menolak cara pandang lama yang membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas kaku: kaum cacah dan kaum menak, orang kecil dan orang berpangkat. Menurutnya, negara merdeka tidak boleh lagi mengenal pembedaan semacam itu. Setiap orang berhak mendapatkan yang terbaik dan berhak meraih kedudukan tertinggi di negeri ini, asalkan ia mau bekerja keras dan menunjukkan prestasinya. Dalam perspektif ini, negara bukanlah mesin yang hanya melayani segelintir orang, melainkan ruang terbuka yang memberi kesempatan yang sama kepada semua anak bangsanya. Keadilan distributif adalah janji bahwa jalan menuju keberhasilan tidak boleh ditutup oleh tembok-tembok feodal, korupsi, atau nepotisme.

Bab ini akan menguraikan tiga hal utama. Pertama, kita akan melihat bagaimana negara seharusnya membuka jalan bagi semua warga untuk maju, melalui pendidikan yang bermutu, lapangan kerja yang layak, dan akses terhadap modal serta kesempatan. Kedua, kita akan merenungkan makna dari seruan KDM bahwa tidak ada lagi kaum cacah dan kaum menak, sebagai panggilan untuk menghapus

kasta-kasta sosial yang masih membayangi kehidupan kita. Ketiga, kita akan mengkritik feodalisme, baik yang lama maupun yang baru, yang masih bekerja secara halus dalam bentuk mentalitas, struktur, dan kebijakan yang menutup ruang bagi rakyat kecil untuk naik ke tangga kehidupan yang lebih baik.

Keadilan distributif sangat penting karena ia menyangkut rasa percaya rakyat terhadap sistem. Jika rakyat melihat bahwa kesempatan hanya terbuka bagi mereka yang punya koneksi, uang, atau nama besar, maka mereka akan kehilangan motivasi untuk berusaha. Rasa putus asa ini berbahaya, karena ia melahirkan apatisme, sinisme, dan akhirnya keinginan untuk melawan. Sebaliknya, jika rakyat melihat bahwa kerja keras, kejujuran, dan prestasi benar-benar dihargai, maka mereka akan terdorong untuk memberikan yang terbaik bagi diri dan bangsanya. Dalam bahasa *Papat Kalima Pancer*, keadilan distributif adalah keseimbangan yang memberi ruang kepada setiap unsur untuk berkembang menurut kodratnya, tanpa menindas dan tanpa ditindas.

Kita juga perlu memahami bahwa keadilan distributif bukan berarti negara harus membagi-bagikan sesuatu secara gratis kepada semua orang. Yang dituntut bukanlah hasil yang sama, melainkan kesempatan yang sama. Negara tidak bisa menjamin semua orang menjadi kaya, tetapi negara harus memastikan bahwa setiap orang memiliki jalan yang sama untuk mengejar kehidupannya. Dalam banyak hal, justru ketidaksamaan hasil adalah wajar, karena manusia memang berbeda-beda dalam bakat dan usahanya. Tetapi ketidaksamaan itu menjadi tidak adil apabila ia lahir dari perbedaan akses yang tidak adil, bukan dari perbedaan usaha. Maka, negara harus hadir untuk meratakan akses, membuka jalan, dan menyingkirkan rintangan-rintangan yang menghambat mereka yang selama ini terpinggirkan.

Dalam konteks Indonesia, keadilan distributif memiliki kaitan erat dengan cita-cita kemerdekaan. Para pendiri bangsa memimpikan sebuah negeri di mana setiap anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Mimpi itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Namun, antara mimpi dan kenyataan masih terbentang jarak yang jauh. Masih banyak anak-anak cerdas di desa-desa yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena biaya; masih banyak pemuda berbakat yang tidak bisa mengembangkan usahanya karena tidak punya modal; dan masih banyak orang jujur yang kalah bersaing dengan mereka yang curang. Di sinilah keadilan distributif menjadi pekerjaan besar yang belum selesai.

KDM dalam pidatonya memberi isyarat bahwa pekerjaan ini harus dimulai dari perubahan cara pandang. Selama kita masih memandang sebagian orang lebih mulia karena keturunan atau jabatannya, selama itu pula keadilan distributif akan tersendat. Negara merdeka harus berani memutus warisan feodal yang menempatkan manusia dalam kelas-kelas. Dalam negara yang merdeka, tidak ada

lagi anak rakyat jelata yang harus menunduk kepada anak bangsawan; tidak ada lagi warga yang harus merasa rendah karena pekerjaannya kasar; dan tidak ada lagi orang yang bisa dengan mudah meraih jabatan hanya karena namanya besar. Semua harus kembali kepada prestasi, kerja keras, dan integritas. Inilah inti dari keadilan distributif yang disuarakan KDM.

Dengan demikian, bab ini akan menjadi semacam panggilan untuk menata ulang cara kita membuka ruang bagi anak-anak bangsa. Kita akan diajak untuk memeriksa kembali sejauh mana sistem pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan kita telah memberi kesempatan yang adil kepada semua orang. Kita juga akan diajak untuk berani mengkritik feodalisme, baik yang datang dari luar maupun yang tumbuh di dalam diri kita sendiri. Sebab, sebagaimana dikatakan KDM, penjajah memang kejam, tetapi perilaku feodalistik yang suka menjajah bangsanya sendiri jauh lebih kejam. Jika kita ingin benar-benar merdeka, maka kita harus memutus rantai itu, dan memberi ruang yang seluas-luasnya bagi setiap orang untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah.

Negara Harus Membuka Jalan bagi Semua

Salah satu tugas utama negara yang merdeka adalah membuka jalan bagi seluruh warganya untuk berkembang dan berprestasi. Negara tidak boleh dibiarkan menjadi milik segelintir orang yang kebetulan lahir dari keluarga kaya, berkuasa, atau memiliki nama besar. Sebaliknya, negara harus hadir sebagai penjaga pintu-pintu kesempatan, memastikan bahwa setiap anak bangsa, dari mana pun asalnya, memiliki akses yang layak untuk menggapai cita-citanya. Dalam kerangka keadilan distributif, membuka jalan berarti menyediakan pendidikan yang bermutu, menciptakan lapangan kerja yang layak, memberi akses terhadap modal dan pelatihan, serta menghilangkan rintangan-rintangan yang selama ini membuat rakyat kecil sulit naik ke jenjang kehidupan yang lebih baik. Tanpa jalan yang terbuka, bakat-bakat terbaik negeri ini akan mati dalam kemiskinan dan keterbatasan, dan bangsa ini akan kehilangan potensi besar yang seharusnya menjadi kekuatannya.

Pendidikan adalah jalan pertama dan paling utama yang harus dibuka oleh negara. Melalui pendidikan, seorang anak dari keluarga paling sederhana sekalipun dapat mengubah nasibnya. Sejarah telah membuktikan bahwa banyak tokoh besar lahir dari keluarga miskin, tetapi berhasil mencapai puncak karena mereka mendapat kesempatan untuk belajar. Karena itu, negara harus memastikan bahwa pendidikan bermutu tidak hanya tersedia di kota-kota besar atau di sekolah-sekolah mahal, tetapi juga di desa-desa terpencil, di daerah perbatasan, dan di kantong-kantong kemiskinan. Guru-guru yang baik harus didistribusikan secara adil, fasilitas belajar harus diperbaiki, dan biaya pendidikan harus ditanggung oleh negara bagi mereka

yang tidak mampu. KDM menyebut target agar rata-rata lama sekolah masyarakat Jawa Barat naik dari 8 tahun menjadi minimal 12 tahun. Ini adalah langkah penting, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan mutu, bukan hanya angka partisipasi semata.

Selain pendidikan, negara juga harus membuka jalan melalui lapangan kerja yang layak. Banyak anak muda yang telah menyelesaikan sekolahnya tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai, bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, ijazah yang dimiliki tidak banyak berarti; ia hanya menjadi selembar kertas yang tidak bisa mengubah keadaan. Negara harus hadir untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat, mendorong tumbuhnya industri, pertanian, dan usaha kecil, serta membuka akses terhadap pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. KDM menyebut bahwa kesempatan kerja tidak lahir dengan sendirinya, tetapi harus diciptakan dalam sebuah iklim yang mendukung. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, iklim yang sehat adalah keseimbangan antara modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan kebijakan yang adil. Jika salah satu unsur timpang, maka kesempatan kerja akan menyempit dan rakyat kecil akan terus terpinggirkan.

Negara juga harus membuka akses terhadap modal dan dukungan usaha bagi rakyat kecil. Banyak orang miskin sebenarnya memiliki kemauan dan keterampilan untuk bekerja, tetapi tidak memiliki modal untuk memulai. Mereka bisa saja menjadi petani yang baik, pengrajin yang terampil, atau pedagang yang ulet, tetapi semuanya terhenti karena tidak ada uang untuk membeli benih, peralatan, atau barang dagangan. Keadilan distributif menuntut agar negara menyediakan akses permodalan yang mudah dan murah bagi rakyat kecil, bukan hanya bagi pengusaha besar. Kredit usaha rakyat, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha harus menjangkau sampai ke desa-desa, bukan hanya berhenti di kota. Jika rakyat kecil diberi jalan untuk berusaha, maka mereka tidak akan selamanya bergantung pada bantuan; mereka akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan bermartabat.

Membuka jalan bagi semua juga berarti menghilangkan rintangan-rintangan yang selama ini menghambat mobilitas sosial. Di negeri ini, masih banyak anak muda yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena biaya; masih banyak perempuan yang tidak bisa bekerja karena beban rumah tangga yang tidak dibagi; masih banyak penyandang disabilitas yang tidak mendapat akses yang layak; dan masih banyak kelompok minoritas yang tersisih karena diskriminasi. Keadilan distributif menuntut agar semua rintangan ini dipetakan dan ditangani secara serius. Negara tidak boleh tinggal diam melihat warganya tertahan oleh keadaan yang seharusnya bisa diubah. Dalam bahasa KDM, negara harus "memberikan ruang bagi siapapun warganya untuk berprestasi tanpa dihalang-halangi." Kalimat ini adalah seruan untuk membongkar semua tembok yang menghalangi rakyat kecil untuk maju.

Kita juga harus menyadari bahwa membuka jalan bagi semua bukanlah pekerjaan yang murah. Ia membutuhkan anggaran yang besar, birokrasi yang efisien, dan kemauan politik yang kuat. Pemerintah harus berani mengalihkan anggaran dari hal-hal yang tidak prioritas kepada hal-hal yang langsung menyentuh kehidupan rakyat. KDM menyinggung hal ini dengan mengajak para pemimpin untuk menunda hasrat pribadinya—menunda membeli mobil baru, menunda membeli baju baru, menunda menambah properti—agar uang negara bisa digunakan untuk membuka jalan bagi rakyat. Ini adalah teladan yang jarang terdengar dalam pidato-pidato pejabat. Ia menyadari bahwa keadilan distributif tidak akan terwujud selama para pemimpinnya masih sibuk memenuhi keinginan pribadinya. Maka, membuka jalan bagi semua harus dimulai dari kesederhanaan dan keberpihakan para pemimpinnya.

Dalam skala yang lebih luas, membuka jalan bagi semua juga berarti membangun infrastruktur yang merata. Jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan jaringan internet adalah prasarana yang menghubungkan rakyat dengan kesempatan. Desa yang terisolasi tanpa jalan yang baik akan sulit menjual hasil buminya; kampung yang tidak memiliki internet akan tertinggal dalam arus informasi; rumah yang tidak dialiri listrik akan gelap dari kemajuan zaman. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk membuka keterisolasian, bukan hanya untuk mempermudah kota yang sudah ramai. Dalam kerangka keadilan distributif, infrastruktur adalah alat untuk meratakan kesempatan, bukan sekadar proyek fisik yang memamerkan kemegahan.

Pada akhirnya, membuka jalan bagi semua adalah wujud nyata dari semangat kemerdekaan. Bangsa yang merdeka bukanlah bangsa yang hanya bebas dari penjajahan asing, tetapi juga bangsa yang berhasil memerdekakan warganya dari keterbatasan yang tidak adil. Dalam masyarakat yang adil, setiap anak bisa bermimpi tinggi, dan setiap mimpi punya jalan untuk dikejar. Pendidikan, pekerjaan, modal, dan infrastruktur adalah jalan-jalan itu. Jika negara mampu membukanya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menyaksikan lahirnya generasi yang percaya diri, kreatif, dan mencintai bangsanya. Tetapi jika jalan-jalan itu tetap tertutup, maka kita hanya akan menyaksikan lahirnya generasi yang putus asa, yang mencari jalan pintas, atau yang pergi mencari kesempatan di negeri orang. KDM telah mengingatkan kita bahwa kesempatan kerja dan ruang untuk berprestasi tidak lahir dengan sendirinya. Ia harus diperjuangkan, dan perjuangan itu dimulai dari keberanian negara untuk membuka jalan bagi semua.

"Tidak Ada Lagi Kaum Cacah, Tidak Ada Lagi Kaum Menak"

Dalam sejarah masyarakat Sunda, istilah *cacah* dan *menak* bukan sekadar kata-kata lama yang hanya hidup di masa lalu. Ia adalah jejak dari struktur sosial feodal yang pernah mengakar kuat di tanah Priangan. Kaum *menak* adalah golongan bangsawan, keturunan pejabat, atau orang-orang yang dianggap memiliki darah tinggi, sedangkan kaum *cacah* adalah rakyat kebanyakan yang berada di lapisan bawah. Struktur ini tidak hanya menentukan tata krama, tetapi juga menentukan seberapa berharga seseorang di mata masyarakat, seberapa jauh ia boleh bermimpi, dan seberapa besar akses yang bisa ia peroleh. Meskipun zaman telah berubah dan istilah-istilah itu tidak lagi diucapkan secara resmi, semangatnya masih terasa dalam bentuk-bentuk baru: orang kaya diperlakukan lebih hormat daripada orang miskin, anak pejabat lebih cepat naik pangkat daripada anak petani, dan yang berpendidikan tinggi dianggap lebih suci daripada yang tidak sekolah. Dengan kata lain, kasta sosial tidak benar-benar hilang; ia berganti baju.

Ketika KDM menyatakan bahwa "negara merdeka tidak ada lagi kalimat kaum cacah, negara merdeka tidak ada lagi kalimat kaum menak, negara merdeka tidak lagi orang berpangkat," ia sedang membongkar sisa-sisa feodalisme yang masih bersembunyi di balik modernitas. Kalimat ini adalah penegasan bahwa kemerdekaan harus dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk kasta yang merendahkan martabat manusia. Dalam negara yang merdeka, tidak boleh ada warga yang merasa lebih tinggi hanya karena kelahiran, jabatan, atau kekayaannya; dan tidak boleh ada warga yang merasa lebih rendah hanya karena pekerjaannya kasar atau asal-usulnya sederhana. Semua orang harus diperlakukan sebagai warga negara yang setara, dengan hak yang sama untuk hidup, bekerja, dan berprestasi.

Seruan ini bukan sekadar retorika politik; ia adalah panggilan untuk mengubah cara kita memandang manusia. Selama ini, kita sering kali menilai seseorang dari luarnya: dari pakaiannya, dari mobilnya, dari gelarnya, dari nama belakangnya. Orang yang berpenampilan mewah cenderung lebih didengar, lebih dihormati, dan lebih dipercaya, meskipun belum tentu isi pikirannya baik. Sebaliknya, orang yang berpakaian sederhana, apalagi yang pekerjaannya dianggap rendah, sering kali dipandang sebelah mata. Cara pandang seperti ini adalah warisan feodal yang masih hidup dalam keseharian kita, dan ia bertentangan dengan cita-cita keadilan distributif. Negara yang adil tidak boleh membiarkan martabat seseorang diukur dari gemerlapnya, karena martabat adalah milik setiap manusia tanpa syarat.

Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, penghapusan kasta adalah bagian dari pemulihan keseimbangan. Dalam kosmologi itu, tidak ada unsur yang lebih mulia dari unsur lain; tanah, air, udara, dan matahari sama-sama penting, dan pusat hanyalah penjaga keseimbangan, bukan penguasa yang boleh merendahkan yang

lain. Demikian pula dalam masyarakat, tidak ada golongan yang boleh merasa lebih tinggi dari golongan lain. Petani, buruh, pedagang, guru, dokter, pejabat—semuanya adalah unsur yang saling mengikat dan saling membutuhkan. Jika satu golongan dianggap lebih rendah, maka keseimbangan sosial akan rusak, dan rusaknya keseimbangan itu akan dirasakan oleh semua. Karena itu, menghapus kasta adalah langkah untuk memulihkan keseimbangan, sekaligus memulihkan martabat manusia yang selama ini terluka.

Penting untuk dicatat bahwa kasta tidak hanya dibuat oleh mereka yang berada di atas, tetapi juga sering kali dipelihara oleh mereka yang berada di bawah. Rasa rendah diri yang berlebihan, kecenderungan untuk menyanjung-nyanjung orang kaya dan pejabat, serta keengganan untuk berdiri sama tinggi adalah bentuk-bentuk feodalisme yang justru diperkuat oleh rakyat sendiri. Perilaku seperti ini tidak boleh dianggap sepele, karena ia melanggengkan ketimpangan dengan cara yang halus. Maka, penghapusan kasta bukan hanya tanggung jawab para elite, tetapi juga pekerjaan kesadaran bagi semua warga. Setiap orang harus berani memandang dirinya sebagai manusia yang bermartabat, tidak lebih rendah dari siapa pun, tetapi juga tidak lebih tinggi dari sesamanya.

Dalam dunia kerja dan pemerintahan, seruan untuk menghapus kasta berarti membuka seleksi yang adil berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan koneksi atau latar belakang. Jabatan tidak boleh diwariskan seperti harta; ia harus diraih melalui kerja keras, kejujuran, dan kompetensi. Demikian pula penghargaan dan fasilitas tidak boleh diberikan karena kedekatan, tetapi karena prestasi. Selama praktik-praktik nepotisme, kolusi, dan suap masih terjadi, selama itu pula kasta-kasta baru akan terus bermunculan, dan rakyat kecil akan terus tersingkir dari ruang-ruang kesempatan. Keadilan distributif menuntut agar semua pintu dibuka berdasarkan aturan yang jelas dan berlaku sama untuk semua. Tidak ada lagi kata "anak siapa", tetapi yang ada adalah "mampu apa dan berbuat apa".

Kita juga perlu mengkaitkan seruan ini dengan budaya kerja dan budaya hormat yang sehat. Menghapus kasta bukan berarti menghapus rasa hormat kepada orang tua, guru, atau pemimpin. Rasa hormat tetap diperlukan sebagai bagian dari akhlak dan tata krama. Yang harus dihapus adalah budaya hormat yang lahir dari ketakutan, dari perhitungan untung-rugi, atau dari keyakinan bahwa ada manusia yang lebih mulia dari manusia lain. Dalam masyarakat yang sehat, hormat diberikan karena kualitas pribadi—ilmu, akhlak, pengabdian—bukan karena jabatan atau kekayaan. Dengan cara itu, hormat menjadi tulus, dan relasi antarmanusia menjadi lebih jujur dan setara.

Pada akhirnya, pernyataan KDM bahwa tidak ada lagi kaum cacah dan kaum menak adalah cermin dari cita-cita Indonesia yang paling dalam: bahwa kemerdekaan adalah milik semua orang, dan bahwa setiap orang berhak atas ruang yang sama untuk hidup dan berkembang. Cita-cita ini tidak akan terwujud hanya

dengan mengubah aturan; ia harus dihidupkan dalam cara kita berbicara, bekerja, mendidik, dan memimpin. Selama masih ada orang yang merasa rendah karena pekerjaannya, selama masih ada anak yang minder karena asal-usulnya, dan selama masih ada pemimpin yang sombong karena jabatannya, maka pekerjaan kita belum selesai. Keadilan distributif akan benar-benar tegak ketika setiap orang bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, bukan karena dipaksa, tetapi karena itulah cara hidup yang diyakini paling benar.

Kritik terhadap Feodalisme Lama dan Baru

Feodalisme sering kali dibayangkan sebagai peninggalan masa lalu yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan modern. Kita membayangkan raja-raja, bupati, bangsawan, dan rakyat jelata yang hidup dalam tatanan abad pertengahan, lengkap dengan upeti, tanah lungguh, dan tata krama yang kaku. Gambaran itu memang tidak sepenuhnya keliru, tetapi ia terlalu sempit. Feodalisme bukan hanya sistem politik lama; ia adalah cara pandang yang menempatkan manusia dalam tingkatan-tingkatan yang tidak setara, dan cara pandang itu ternyata masih hidup sampai hari ini dalam bentuk-bentuk yang lebih halus. Ia tidak lagi mengenakan pakaian kebesaran, tetapi ia bekerja dalam birokrasi, dalam dunia usaha, dalam pendidikan, bahkan dalam pergaulan sehari-hari. Dalam pengertian inilah KDM mengingatkan bahwa karakter kolonialisme dan perilaku imperialisme bukan hanya milik penjajah asing, tetapi juga tumbuh di antara kita sendiri, dalam wujud feodalisme yang menjajah bangsanya sendiri.

Feodalisme lama di tanah Priangan meninggalkan jejak yang dalam. Dalam catatan sejarah, kaum feodal di Priangan dikenal hidup mewah di atas penderitaan rakyat. Mereka bekerja sama dengan pemerintah kolonial, memungut upeti, mengerahkan tenaga rakyat untuk kerja paksa, dan bahkan menikmati hasil dari penderitaan itu. KDM menyebut bahwa upah yang seharusnya dibayarkan kepada rakyat atas kerja pembangunan jalan dan gedung—yang disebut *rodi*—sering kali tidak dibayarkan. Rakyat bekerja tanpa upah, sementara para bangsawan dan pejabat lokal hidup dalam kemewahan. Sejarah semacam ini sering kali tidak diajarkan secara jujur di sekolah-sekolah, sehingga kita tidak belajar dari luka itu. Padahal, dari sanalah kita bisa memahami bahwa penjajahan tidak akan berlangsung lama tanpa bantuan dari dalam, dan bahwa pengkhianatan oleh elite lokal sering kali lebih menyakitkan daripada kekejaman penjajah asing.

Feodalisme baru, meskipun tidak lagi menggunakan istilah raja dan kawula, bekerja dengan logika yang sama: membagi manusia ke dalam kelas-kelas yang tidak setara. Bedanya, feodalisme baru tidak diwariskan melalui darah bangsawan, tetapi melalui uang, jabatan, koneksi, dan penampilan. Orang kaya diperlakukan

sebagai "bangsawan baru" yang suaranya lebih didengar, kebutuhannya lebih didahulukan, dan kesalahannya lebih mudah dimaafkan. Sementara itu, orang miskin diperlakukan sebagai "kawula baru" yang harus menunggu, mengalah, dan bersyukur dengan apa pun yang diberikan. Dalam birokrasi, feodalisme baru tampak dari budaya pejabat yang minta dihormati secara berlebihan, bawahan yang takut menyampaikan pendapat, dan pelayanan publik yang masih diskriminatif terhadap orang kecil. Dalam dunia kerja, ia tampak dari atasan yang menganggap dirinya pemilik kebenaran dan bawahan yang tidak berani membantah meskipun tahu ada yang salah.

Kritik terhadap feodalisme baru ini menjadi penting karena ia bekerja secara senyap dan sering kali dianggap wajar. Kita sudah terbiasa mendengar bahwa "orang dalam" lebih diutamakan dalam penerimaan kerja, bahwa anak pejabat lebih cepat naik pangkat, atau bahwa pengusaha besar lebih mudah memperoleh izin. Kebiasaan-kebiasaan ini dianggap sebagai bagian dari cara kerja dunia, padahal sebenarnya ia adalah bentuk ketidakadilan yang merusak. Ia menutup ruang bagi mereka yang tidak punya akses, dan membuka jalan bagi mereka yang tidak selalu kompeten. Dalam jangka panjang, feodalisme baru ini akan melemahkan daya saing bangsa, karena posisi-posisi penting tidak lagi diisi oleh orang-orang terbaik, melainkan oleh orang-orang yang paling dekat dengan kekuasaan.

Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, feodalisme adalah bentuk dari ketidakseimbangan yang ekstrem. Dalam tatanan feodal, pusat bukan lagi penjaga keseimbangan, melainkan penguasa yang menindas. Ia menarik semua sumber daya ke dirinya sendiri, sementara unsur-unsur di sekelilingnya dibiarkan lemah dan tergantung. Akibatnya, tanah, air, udara, dan matahari tidak lagi menjadi milik bersama, melainkan dikuasai oleh segelintir orang. Rakyat kecil yang seharusnya menjadi bagian dari keseimbangan itu justru tersingkir dan tidak berdaya. Maka, melawan feodalisme adalah bagian dari memulihkan keseimbangan: mengembalikan tanah kepada yang menggarapnya, mengembalikan air kepada yang membutuhkannya, mengembalikan udara dan cahaya sebagai hak semua, dan mengembalikan manusia ke posisinya sebagai penjaga, bukan sebagai penindas.

Kritik KDM terhadap feodalisme juga menyentuh soal mentalitas. Ia mencontohkan bagaimana orang feodal ingin selalu dihormati, dijunjung tinggi, dan diangkat-angkat di hadapan orang lain, tetapi di hadapan kolonial ia menundukkan badan dan membungkuk. Ini adalah gambaran dari mentalitas yang tidak merdeka: takut kepada yang lebih kuat, tetapi ingin menindas yang lebih lemah. Mentalitas semacam ini masih bisa kita temukan hari ini, dalam bentuk atasan yang galak kepada bawahannya tetapi penjilat kepada atasannya, atau pejabat yang sombong kepada rakyat tetapi tunduk kepada penguasa dan pemodal. Mentalitas ini harus dilawan dengan membangun manusia-manusia yang tegak, yang berani berkata benar di hadapan siapa pun, dan yang tidak menggadaikan martabatnya demi

keuntungan sesaat. Dalam bahasa KDM, manusia yang merdeka adalah manusia yang berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan siapa pun.

Feodalisme baru juga bekerja melalui bahasa dan simbol. Kita masih sering mendengar istilah-istilah yang merendahkan pekerjaan tertentu, seperti "tukang sapu", "kuli", atau "buruh kasar", yang diucapkan dengan nada menghina. Padahal, pekerjaan-pekerjaan itu adalah penopang kehidupan kota dan negara. Tanpa tukang sapu, kota akan tenggelam dalam sampah; tanpa kuli bangunan, gedung-gedung tidak akan berdiri; tanpa buruh, pabrik-pabrik tidak akan berjalan. KDM mengingatkan hal ini dengan menyebut para kuli bangunan yang membangun halaman Gedung Sate, para tukang sapu yang membersihkan jalan, dan para petani yang memberi makan kita semua. Ia memberi tempat terhormat kepada mereka, bukan karena belas kasihan, tetapi karena mereka memang layak dihormati. Maka, melawan feodalisme juga berarti mengubah bahasa kita: berhenti merendahkan pekerjaan orang lain, dan mulai menghormati setiap bentuk kerja yang jujur.

Pada akhirnya, kritik terhadap feodalisme lama dan baru adalah panggilan untuk menyelesaikan pekerjaan kemerdekaan yang belum tuntas. Selama masih ada kasta, selama masih ada penjajahan dari dalam, selama masih ada orang yang merasa lebih mulia dari orang lain, maka kemerdekaan itu belum benar-benar menjadi milik semua. KDM telah membuka jalan dengan jujur mengakui hal ini. Tugas kita adalah meneruskannya: membongkar mentalitas feodal, membuka ruang yang setara, dan membangun masyarakat yang menghormati martabat setiap manusia. Hanya dengan begitu keadilan distributif dapat tegak, dan hanya dengan itu pula kita bisa menyebut diri kita bangsa yang merdeka dalam arti yang sesungguhnya.

BAGIAN EMPAT
PENJAJAHAN TAK TERLIHAT

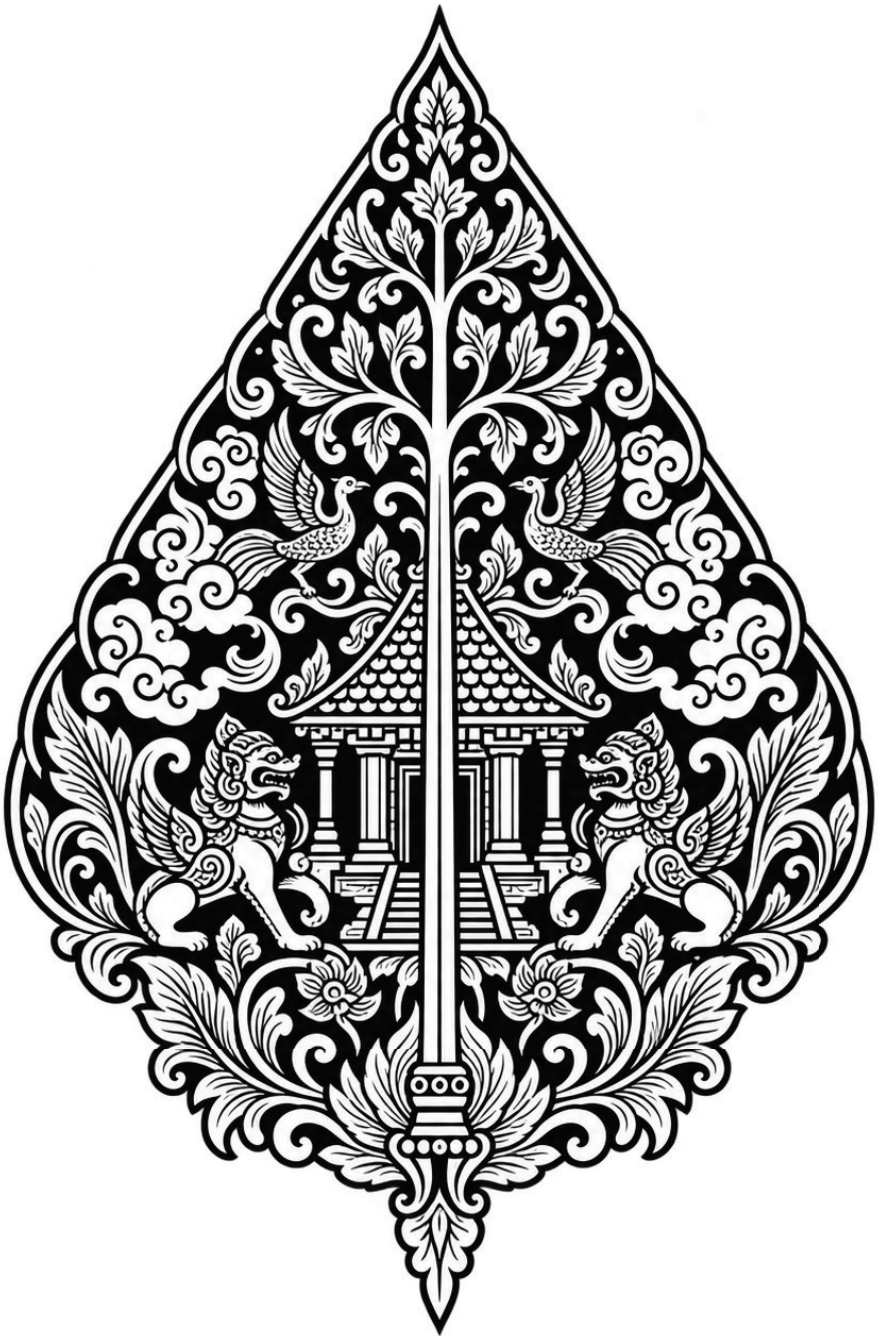

BAB 7
TRAMADOL DAN PERANG MELAWAN GENERASI

Kita terbiasa membayangkan penjajahan dalam wujud yang tampak: kapal-kapal perang, serdadu bersenjata, benteng-benteng pertahanan, dan kompeni yang memungut upeti. Gambaran itu melekat kuat dalam ingatan sejarah kita, dan memang begitulah penjajahan dulu bekerja. Tetapi zaman telah berubah, dan penjajahan pun menyesuaikan diri. Ia tidak lagi harus datang dengan pasukan dan meriam; ia cukup masuk melalui pil-pil kecil, serbuk putih, atau cairan yang disuntikkan ke dalam tubuh. Ia tidak perlu menduduki wilayah secara fisik; ia cukup menduduki pikiran, melemahkan kesadaran, dan menghancurkan kemauan dari dalam. Penjajahan jenis ini tidak terlihat secara kasat mata, tetapi dampaknya tidak kalah dahsyat, bahkan bisa lebih mengerikan karena korbannya sering kali tidak menyadari bahwa dirinya sedang dijajah.

Dalam pidatonya, KDM menyebut fenomena ini dengan istilah "penjajahan yang tidak terlihat". Ia merujuk pada peredaran obat-obatan terlarang, khususnya tramadol, yang telah menjangkiti banyak anak muda di kampung-kampung. Tramadol, yang seharusnya merupakan obat pereda nyeri yang digunakan dalam pengawasan medis, telah disalahgunakan sebagai barang candu yang murah dan mudah didapat. Dari sinilah lahir gelombang kejahatan yang meresahkan: tawuran, pembacokan, pencopetan, perampokan, hingga pembunuhan. Semua itu, menurut KDM, bukanlah sekadar kenakalan remaja biasa, melainkan bagian dari perang yang lebih besar: perang melawan generasi, perang yang dirancang untuk melemahkan masa depan bangsa dengan cara merusak generasi mudanya sejak dini.

Bab ini akan mengupas lebih dalam gagasan tentang narkoba sebagai senjata penjajahan gaya baru. Kita akan melihat bagaimana zat-zat terlarang bekerja menghancurkan manusia secara bertahap, mulai dari tubuh, pikiran, hingga jiwanya. Kita juga akan menelusuri bagaimana kerusakan itu menjalar ke lingkungan sosial, menciptakan ketakutan, kekerasan, dan hilangnya rasa aman di tengah masyarakat. Lebih jauh, kita akan merenungkan mengapa bahaya ini begitu sulit dideteksi, karena ia bekerja secara diam-diam di sudut-sudut kampung, di warung-warung kecil, di tempat-tempat yang tampak biasa saja. Dengan memahami cara kerja penjajahan tak terlihat ini, kita diharapkan menjadi lebih waspada, bukan dengan

ketakutan yang berlebihan, tetapi dengan kesadaran yang jernih akan pentingnya menjaga generasi dari kehancuran.

Persoalan narkoba sebenarnya bukan hal baru. Sudah banyak kampanye, razia, dan program rehabilitasi yang dilakukan pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Namun, kenyataannya peredaran zat terlarang justru semakin canggih, semakin murah, dan semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tramadol, misalnya, bisa dibeli dengan harga yang sangat terjangkau oleh anak-anak sekolah. Ia tidak selalu dijual di tempat-tempat gelap yang mencurigakan, tetapi bisa beredar melalui teman sebaya, warung, atau bahkan media sosial. Inilah yang membuat perang melawan narkoba menjadi sulit: musuhnya tidak terlihat, jaringannya tersebar, dan korbannya adalah orang-orang yang paling rentan, yaitu anak-anak muda yang sedang mencari jati diri.

Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, narkoba adalah perusak keseimbangan yang paling telak. Ia menghancurkan unsur-unsur kehidupan dalam diri manusia: tanah sebagai keteguhan tubuh, air sebagai kejernihan hati, udara sebagai kejernihan pikiran, dan matahari sebagai semangat hidup. Ketika keempat unsur itu rusak, manusia kehilangan pusatnya; ia tidak lagi mampu menjadi penjaga keseimbangan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya. Ia berubah menjadi beban, bahkan ancaman, bagi sesamanya. Maka, melawan narkoba bukan hanya soal menegakkan hukum, tetapi juga soal memulihkan keseimbangan hidup, mengembalikan manusia kepada pusat kesadarannya, dan menyelamatkan generasi dari kehancuran yang direncanakan.

Kita juga perlu menyadari bahwa perang melawan generasi ini tidak berjalan sendiri. Ia ditopang oleh kondisi sosial yang rapuh: kemiskinan, putus sekolah, pengangguran, keluarga yang berantakan, dan lingkungan yang tidak lagi memberi teladan. Anak-anak muda yang kehilangan arah lebih mudah terjerumus, karena mereka mencari pelarian dari rasa sakit, bosan, atau putus asa. Zat terlarang menawarkan kesenangan sesaat yang menipu, seolah-olah menjadi jalan keluar dari masalah. Padahal, ia justru menambah masalah: kecanduan, utang, kekerasan, dan masa depan yang hancur. Karena itu, melawan narkoba harus dibarengi dengan upaya memperbaiki kondisi sosial yang membuat generasi muda rentan. Pendidikan yang baik, lapangan kerja yang layak, keluarga yang hangat, dan lingkungan yang sehat adalah benteng-benteng yang lebih kokoh daripada sekadar razia dan hukuman.

Bab ini disusun untuk mengajak kita melihat lebih jauh dari sekadar berita-berita kriminal yang berseliweran. Di balik setiap kasus penyalahgunaan narkoba, ada anak-anak yang gagal dilindungi, ada keluarga yang kehilangan harapan, dan ada bangsa yang sedang kehilangan masa depannya. KDM menyebut ini sebagai kewaspadaan nasional, dan itu memang benar. Sebab bangsa yang kehilangan generasinya akan kehilangan segalanya: tenaga kerjanya, pemikirnya, penjaga

budayanya, dan penerus cita-citanya. Maka, perang melawan narkoba adalah perang yang harus dimenangkan, bukan oleh pemerintah saja, tetapi oleh seluruh masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, tetangga, hingga para tokoh agama dan pemuda.

Dengan pemahaman ini, kita akan memasuki pembahasan yang lebih dalam tentang bagaimana narkoba bekerja sebagai senjata penjajahan gaya baru, bagaimana ia merusak pikiran dan jiwa generasi muda, serta bagaimana ia menyebar secara laten di sudut-sudut kampung tanpa disadari. Kita akan menutup bab ini dengan harapan bahwa kesadaran yang tumbuh dari pemahaman ini akan menggerakkan kita untuk bertindak: menjaga anak-anak kita, mengawasi lingkungan kita, dan menolak segala bentuk penjajahan yang mencoba menghancurkan bangsa ini dari dalam.

Narkoba sebagai Senjata Penjajahan Gaya Baru

Penjajahan gaya baru tidak membutuhkan seragam militer, bendera asing, atau penguasaan teritorial. Ia bekerja melalui jalur yang jauh lebih halus: perdagangan, budaya, teknologi, dan yang paling mematikan, zat-zat yang merusak kesadaran. Dalam konteks inilah narkoba dapat dipahami bukan sekadar sebagai barang haram yang diperdagangkan secara gelap, tetapi sebagai instrumen kekuasaan yang sistematis. Sejarah mencatat bahwa peredaran opium oleh kolonial di Asia, termasuk di Nusantara, bukanlah semata-mata bisnis kotor, melainkan bagian dari strategi untuk melemahkan perlawanan rakyat. Orang yang kecanduan opium kehilangan semangat kerja, kehilangan daya juang, dan kehilangan kepekaan sosialnya; ia menjadi tubuh yang hidup tetapi jiwanya mati. Dengan cara itulah penjajah dapat menguasai wilayah tanpa harus selalu menghadapi pemberontakan (Trocki, 1999). Yang terjadi hari ini adalah kelanjutan dari logika yang sama, hanya substansinya yang berganti: dari opium ke tramadol, dari kapal dagang ke jaringan gelap yang menyusup ke kampung-kampung.

KDM menempatkan tramadol sebagai simbol dari penjajahan tak terlihat itu. Ia menyebut bahwa tren hari ini adalah tramadol, sebuah obat yang seharusnya digunakan secara medis untuk meredakan nyeri, tetapi disalahgunakan sebagai zat adiktif yang murah dan mudah diakses. Penyalahgunaan tramadol tidak terjadi dalam ruang kosong; ia terjadi karena ada rantai pasok yang terorganisir, ada permintaan yang terus dipelihara, dan ada keuntungan besar yang mengalir kepada para pengedar. Dalam banyak kasus, narkoba justru menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi segelintir orang, sementara korbannya menanggung kehancuran seumur hidup. Keuntungan itu tidak hanya berupa uang, tetapi juga kekuasaan: mengendalikan orang lain melalui ketergantungan adalah bentuk

penjajahan yang paling dalam, karena korban tidak lagi mampu berpikir merdeka dan bertindak merdeka (Singer, 2008).

Lebih jauh, narkoba sebagai senjata penjajahan gaya baru bekerja dengan menyerang pusat kesadaran manusia. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, manusia adalah *pancer* yang menyeimbangkan tanah, air, udara, dan matahari. Kesadaran adalah inti dari pusat itu; ketika kesadaran dirusak, seluruh keseimbangan menjadi kacau. Tubuh yang kecanduan tidak lagi bisa berfungsi sebagai tanah yang subur, hati yang keruh tidak lagi bisa menjernihkan air kehidupan, pikiran yang kabur tidak lagi bisa menghirup udara kejernihan, dan semangat yang padam tidak lagi bisa menyerap energi matahari. Korban narkoba kehilangan kemampuannya untuk menjadi penjaga keseimbangan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya. Ia menjadi beban, bahkan ancaman, bagi keluarganya, tetangganya, dan masyarakat luas. Dengan demikian, penjajahan ini tidak hanya merampas kemerdekaan individu, tetapi juga merampas kemerdekaan kolektif, karena generasi yang seharusnya menjadi tulang punggung bangsa justru dilumpuhkan dari dalam.

Salah satu alasan mengapa narkoba begitu efektif sebagai alat penjajahan adalah karena ia menawarkan pelarian dari penderitaan. Banyak anak muda yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan zat bukan karena mereka jahat, melainkan karena mereka sedang mencari jalan keluar dari kondisi yang menyakitkan: kemiskinan, perpecahan keluarga, tekanan sekolah, atau rasa putus asa akan masa depan. Zat terlarang memberikan kesenangan sesaat yang menipu, seolah-olah semua masalah lenyap. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya: masalah tetap ada, bahkan bertambah besar, sementara kemampuan untuk menghadapinya semakin melemah. Di sinilah letak bahaya laten dari penjajahan gaya baru: ia tidak perlu memaksa korban untuk tunduk, karena korban akan datang dengan sendirinya, mencari pelipur lara yang akhirnya memperbudaknya (Alexander, 2010). Dalam bahasa KDM, orang seperti disenangkan, tetapi dia dihancurkan.

Kita juga perlu melihat bahwa peredaran narkoba tidak mungkin berkembang begitu luas tanpa adanya kondisi sosial yang mendukung. Masyarakat yang kehilangan ruang publik yang sehat, keluarga yang kehilangan kehangatan, sekolah yang kehilangan daya tarik, dan ekonomi yang kehilangan harapan, semuanya menjadi lahan subur bagi tumbuhnya penyalahgunaan zat. Ketika anak-anak muda tidak lagi memiliki tempat untuk bermain, berekspresi, dan bertumbuh, mereka akan mencari tempat lain yang mungkin tidak sehat. Ketika orang dewasa sibuk mengejar kebutuhan hidup, pengawasan terhadap anak-anak melemah. Ketika lingkungan sekitar tidak lagi saling peduli, gerakan-gerakan kecil di sudut kampung bisa berlangsung tanpa terdeteksi. Penjajahan gaya baru memanfaatkan celah-celah ini dengan cerdik, menyusup ke ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh negara dan masyarakat.

Dari sudut pandang kebangsaan, peredaran narkoba adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang warganya memiliki kedaulatan atas dirinya sendiri: berdaulat secara politik, ekonomi, budaya, dan psikologis. Orang yang kecanduan narkoba telah kehilangan kedaulatan psikologisnya; ia dikuasai oleh zat, bukan oleh akalnya sendiri. Jika kecanduan ini meluas di kalangan generasi muda, maka bangsa ini sedang menyaksikan perampasan kedaulatan secara diam-diam. Tidak perlu ada tank dan pesawat tempur; cukup dengan pil-pil murah yang beredar di warung-warung, sebuah bangsa bisa dilumpuhkan dalam satu generasi. KDM menyebut ini sebagai "kewaspadaan nasional", dan itu memang bukan istilah yang berlebihan. Sebab apa yang dihadapi bukan sekadar masalah kesehatan atau kriminalitas, melainkan ancaman eksistensial terhadap keberlanjutan bangsa.

Penting pula untuk menegaskan bahwa melawan narkoba sebagai senjata penjajahan tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan hukum dan penindakan. Razia, penangkapan, dan hukuman memang perlu, tetapi ia hanya menyentuh permukaan. Yang lebih mendasar adalah memutus akar-akar sosial yang membuat narkoba tumbuh subur: kemiskinan, ketidakadilan, putus sekolah, dan hilangnya ruang-ruang pembinaan generasi. Selain itu, perlu ada pendidikan yang menumbuhkan daya tolak dalam diri setiap anak, bukan sekadar pengetahuan tentang bahaya narkoba, tetapi juga pembentukan karakter yang kuat, rasa percaya diri, dan kemampuan untuk menghadapi tekanan hidup tanpa lari ke zat terlarang. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, pendidikan semacam itu adalah upaya memperkuat pusat kesadaran anak, sehingga ia tidak mudah goyah oleh godaan yang datang dari empat penjuru.

Dengan memahami narkoba sebagai senjata penjajahan gaya baru, kita tidak lagi melihat penyalahgunaan zat hanya sebagai kesalahan individu semata. Ia adalah bagian dari pergulatan besar antara kekuatan yang ingin menghidupkan dan kekuatan yang ingin menghancurkan. Pihak yang diuntungkan dari kehancuran generasi muda tidak akan tinggal diam; mereka akan terus mencari celah, mengembangkan zat baru, dan menyasar kelompok yang paling rentan. Karena itu, respons kita pun tidak boleh setengah hati. Keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, dan aparat harus bergerak bersama, bukan saling menunggu. Sebab perang melawan penjajahan tak terlihat ini adalah perang yang menentukan masa depan kita sebagai bangsa: apakah kita akan menjadi bangsa yang kuat dan berdaulat, atau bangsa yang habis digerogoti dari dalam oleh zat-zat yang mematikan.

Rusaknya Pikiran, Pendengaran, dan Khayalan Generasi Muda

Dalam pidato KDM, ada sebuah kalimat yang mungkin terdengar ganjil pada awalnya, tetapi menyimpan kedalaman yang menggetarkan: penjajahan tak terlihat bekerja dengan cara "merusak pikiran kita, merusak pendengaran kita, merusak khayalan kita dalam sistem yang tidak terlihat." Tiga sasaran ini—pikiran, pendengaran, dan khayalan—bukanlah pilihan kata yang acak. Ketiganya adalah pintu-pintu utama yang membentuk kesadaran manusia. Pikiran adalah tempat kita mengolah makna, pendengaran adalah saluran yang memasukkan nilai-nilai dari luar, dan khayalan adalah ruang batin tempat kita membayangkan masa depan, harapan, dan kemungkinan-kemungkinan hidup. Jika ketiganya dirusak, manusia tidak hanya kehilangan kemampuan berpikirnya, tetapi juga kehilangan arah, kehilangan harapan, dan kehilangan masa depannya. Itulah yang sedang terjadi pada sebagian generasi muda kita, dan itulah yang membuat penjajahan gaya baru ini begitu mengerikan.

Pikiran adalah pusat kendali manusia. Dari sanalah lahir keputusan, pertimbangan, dan kesadaran akan benar dan salah. Narkoba, termasuk tramadol yang disalahgunakan, bekerja dengan mengacaukan sistem saraf dan kimia otak, sehingga pikiran tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Orang yang berada di bawah pengaruh zat tidak lagi mampu menimbang akibat dari perbuatannya; ia bertindak menurut dorongan sesaat yang kacau. Dalam jangka panjang, kerusakan ini tidak hanya berhenti pada saat zat itu bekerja, tetapi juga menetap dalam bentuk gangguan kognitif, hilangnya daya ingat, dan melemahnya kemampuan berpikir kritis. Generasi yang kehilangan daya pikirnya adalah generasi yang tidak akan sanggup menghadapi tantangan zaman; ia akan mudah dibohongi, mudah diprovokasi, dan mudah diperalat. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, pikiran adalah udara yang memberi napas pada kesadaran; ketika udara itu diracuni, manusia kehilangan kejernihannya dan berjalan dalam kabut.

Pendengaran yang dirusak juga tidak kalah berbahayanya. Manusia belajar banyak hal melalui telinga: nasihat orang tua, pelajaran guru, petuah para bijak, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tetapi telinga juga bisa menjadi pintu masuk bagi suara-suara yang meracuni: ajakan untuk mencoba, bisikan bahwa hidup tidak ada harapan, hasutan untuk membalas dendam, dan janji-janji manis dari para pengedar. Ketika pendengaran dirusak, manusia tidak lagi mampu membedakan mana suara yang membangun dan mana yang menghancurkan; ia menelan semua informasi tanpa saringan. KDM menyebut "merusak pendengaran" sebagai bagian dari sistem penjajahan, karena dalam dunia yang bising ini, siapa yang menguasai telinga akan menguasai jiwa. Generasi muda yang telinganya dijejali oleh suara-suara yang salah akan tumbuh menjadi generasi yang bingung, apatis,

atau justru agresif tanpa arah. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, pendengaran adalah air yang mengalirkan nilai-nilai ke dalam hati; jika sumbernya keruh, maka keruh pulalah hati yang menampungnya.

Khayalan, atau imajinasi, adalah hal yang sering diremehkan. Padahal, dari khayalanlah lahir cita-cita, mimpi, dan visi tentang masa depan. Anak-anak membayangkan akan menjadi apa mereka kelak; pemuda membayangkan negeri yang lebih baik; orang dewasa membayangkan keluarga yang bahagia. Khayalan adalah matahari yang memberi cahaya pada jalan hidup; tanpanya, manusia berjalan dalam kegelapan tanpa arah. Narkoba merusak khayalan dengan cara yang sangat halus: ia memberi khayalan-khayalan semu yang menyenangkan sesaat, tetapi kemudian mengosongkan jiwa dari mimpi-mimpi yang sejati. Orang yang kecanduan tidak lagi mampu membayangkan masa depan yang baik bagi dirinya sendiri; yang ada hanya keinginan untuk mengulangi kesenangan semu itu lagi dan lagi. Ketika khayalan tentang masa depan mati, matilah juga semangat untuk belajar, bekerja, dan berjuang. Generasi yang kehilangan khayalannya adalah generasi yang berhenti bertumbuh; ia hadir secara fisik, tetapi jiwanya sudah lama menyerah.

Kerusakan pada pikiran, pendengaran, dan khayalan ini tidak terjadi dalam semalam. Ia berlangsung perlahan, dimulai dari coba-coba, dari rasa penasaran, dari tekanan teman sebaya, atau dari pelarian atas masalah yang tidak tertangani. Seseorang yang mulai menyalahgunakan zat mungkin masih terlihat biasa saja pada awalnya; tetapi di dalam dirinya, perubahan-perubahan halus sedang berlangsung. Konsentrasinya menurun, emosinya tidak stabil, pergaulannya menyempit, dan minatnya pada hal-hal yang sehat perlahan memudar. Keluarga sering kali terlambat menyadari, karena perubahan itu terjadi sedikit demi sedikit. Di sinilah pentingnya kepekaan orang-orang terdekat: orang tua, guru, sahabat, dan tetangga harus peka membaca tanda-tanda itu sebelum semuanya terlambat. KDM mengingatkan bahwa di sudut-sudut kampung, tramadol dijual secara bebas dan kita membiarkannya. Kalimat ini adalah teguran keras bagi kita semua: bahwa kerusakan generasi sering kali terjadi bukan karena tidak ada yang peduli, tetapi karena kita tidak cukup peka untuk melihat.

Dalam kerangka yang lebih luas, rusaknya pikiran, pendengaran, dan khayalan generasi muda adalah kehancuran yang berlipat ganda. Seorang pemuda yang rusak pikirannya tidak hanya kehilangan masa depannya sendiri, tetapi juga merugikan keluarganya, masyarakatnya, dan bangsanya. Ia bisa menjadi pelaku kejahatan yang meresahkan, menjadi beban sosial yang harus ditanggung negara, atau menjadi korban yang terus-menerus berada dalam lingkaran rehabilitasi. Lebih jauh lagi, jika kerusakan ini meluas dalam skala besar, maka bangsa ini akan kehilangan tenaga produktifnya, kehilangan kreativitasnya, dan kehilangan harapannya untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Penjajahan tak terlihat tidak perlu mengibarkan

bendera asing; ia cukup merusak generasi muda, lalu duduk menonton bagaimana bangsa itu runtuh dari dalam.

Oleh karena itu, upaya menyelamatkan generasi dari narkoba harus menyasar ketiga aspek ini sekaligus: memulihkan pikiran yang jernih, membersihkan pendengaran dari racun-racun informasi, dan menyalakan kembali khayalan-khayalan besar tentang masa depan. Pendidikan harus diarahkan bukan hanya untuk mengisi kepala dengan pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk ketahanan mental dan kepekaan moral. Keluarga harus menjadi tempat pertama yang membangun kejernihan pikiran, menyaring apa yang masuk ke telinga anak, dan merawat mimpi-mimpi mereka. Masyarakat harus menghidupkan ruang-ruang yang sehat untuk berekspresi, berkarya, dan bertumbuh, sehingga anak-anak muda tidak perlu mencari pelarian ke tempat-tempat gelap. Semua ini adalah bentuk perlawanan terhadap penjajahan tak terlihat: perlawanan yang tidak menggunakan senjata, tetapi menggunakan kasih sayang, keteladanan, dan harapan.

Dengan memahami rusaknya pikiran, pendengaran, dan khayalan akibat narkoba, kita semakin menyadari bahwa perang melawan narkoba adalah perang memperebutkan masa depan. KDM telah memberikan peringatan yang jujur dan keras; kini bagian kita adalah menjawabnya dengan tindakan nyata. Tidak ada cara lain untuk melindungi generasi kecuali dengan hadir, peduli, dan berani bertindak sebelum terlambat. Sebab setiap anak yang terselamatkan dari jerat narkoba adalah satu kemenangan bagi masa depan bangsa; sebaliknya, setiap anak yang hilang adalah satu kekalahan yang tidak akan pernah bisa digantikan.

Bahaya Laten di Sudut-sudut Kampung

Ada anggapan umum bahwa peredaran narkoba hanya terjadi di tempat-tempat tertentu: diskotek, klub malam, kawasan kumuh, atau kota-kota besar yang gemerlap. Anggapan ini membuat banyak orang merasa aman, seolah-olah bahaya itu jauh dari rumah, jauh dari anak-anak, dan jauh dari lingkungan yang tampak baik-baik saja. Padahal, kenyataan berkata sebaliknya. Zat-zat terlarang justru sering kali menyebar di tempat-tempat yang paling tidak dicurigai: warung kopi di pinggir gang, lapangan kecil tempat anak-anak berkumpul, parkiran sepi di belakang sekolah, bahkan di antara obrolan ringan di depan rumah. KDM menyebut hal ini dengan nada yang penuh kewaspadaan: "Di sudut-sudut kampung tramadol itu dijual secara bebas. Di sudut-sudut kampung kita membiarkannya." Kalimat ini adalah pengingat bahwa bahaya laten tidak datang dengan bunyi sirine; ia hadir dengan tenang, menyamar sebagai keseharian, dan menggerogoti dari dalam.

Bahaya laten semacam ini jauh lebih sulit dilawan daripada bahaya yang tampak. Jika ada kerusuhan, kita tahu harus memanggil polisi; jika ada kebakaran,

kita tahu harus memanggil pemadam; jika ada warga yang sakit, kita tahu harus membawanya ke puskesmas. Tetapi bagaimana dengan pil-pil kecil yang beredar dari tangan ke tangan, dari satu remaja ke remaja lain, tanpa suara, tanpa kekerasan? Bagaimana dengan penjual yang bukan orang asing yang mencurigakan, melainkan tetangga sendiri, bahkan teman sebaya? Dalam situasi seperti ini, masyarakat sering kali lengah. Kita tidak merasa terancam karena tidak melihat ancaman; kita tidak bertindak karena tidak merasa ada yang salah. Justru di situlah penjajahan tak terlihat bekerja paling efektif: ia menyusup ke ruang-ruang kepercayaan, ke relasi-relasi yang akrab, dan ke kebiasaan-kebiasaan yang dianggap biasa.

Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, bahaya laten di sudut-sudut kampung dapat dibaca sebagai serangan terhadap pusat dari dalam lingkungan yang paling dekat. Kampung adalah tanah tempat akar kehidupan tumbuh; di sanalah anak-anak pertama kali belajar berbicara, bersosialisasi, dan mengenal nilai-nilai. Jika tanah itu sudah tercemar oleh peredaran zat, maka akar-akar kehidupan generasi muda akan tumbuh dalam racun. Orang tua yang sibuk bekerja tidak lagi sempat memperhatikan; tetangga yang sibuk dengan urusannya sendiri tidak lagi saling mengingatkan; anak-anak yang mencari identitas menemukan teman-teman yang salah; dan para pengedar yang mencari keuntungan menemukan lahan yang subur. Inilah yang dimaksud dengan "kita membiarkannya": bukan karena kita jahat, tetapi karena kita tidak lagi cukup hadir untuk menjaga lingkungan kita sendiri.

Ketidakpedulian ini sering kali lahir dari kelelahan hidup. Banyak orang tua bekerja dari pagi hingga malam untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga tidak memiliki waktu dan tenaga untuk memantau pergaulan anak-anaknya. Banyak tetangga yang memilih diam karena takut dicap ikut campur urusan orang lain. Banyak tokoh masyarakat yang sibuk dengan kegiatan seremonial, tetapi jarang turun ke gang-gang sempit untuk melihat apa yang terjadi. Para pengedar memahami kelelahan dan keengganan ini, lalu memanfaatkannya dengan cerdik. Mereka memilih waktu-waktu sepi, tempat-tempat yang longgar pengawasannya, dan korban-korban yang lemah pengawasannya. Dalam studi tentang penyalahgunaan zat, lingkungan yang minim kontrol sosial dan minim kohesi antarwarga terbukti lebih rentan terhadap peredaran narkoba (Sampson, Raudenbush, & Earls, 1997). Artinya, bahaya laten tidak hanya tumbuh karena ada penjual dan pembeli, tetapi juga karena ada kekosongan penjagaan dari masyarakat itu sendiri.

KDM menyebut tramadol secara khusus, dan ini bukan kebetulan. Tramadol adalah obat yang relatif murah, mudah didapat, dan sering kali dianggap tidak seberbahaya narkotika kelas berat. Padahal, penyalahgunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, kerusakan saraf, gangguan jiwa, hingga kematian. Karena ia berstatus obat, bukan narkotika yang paling ditakuti, masyarakat sering kali meremehkannya. "Ah, cuma tramadol," begitu kata sebagian orang. Sikap

meremehkan inilah yang membuatnya semakin berbahaya, sebab tanpa disadari ia telah menjadi pintu masuk bagi zat-zat lain yang lebih keras. Perjalanan seorang anak muda menuju kehancuran sering kali tidak dimulai dari heroin atau sabu, melainkan dari sesuatu yang tampak sepele: pil penenang, obat batuk yang disalahgunakan, atau tramadol yang dibeli dengan uang jajan. Maka, kewaspadaan harus dimulai dari hal-hal kecil, dari tanda-tanda awal yang sering kali diabaikan.

Menghadapi bahaya laten ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Polisi tidak mungkin mengawasi setiap warung, setiap gang, dan setiap percakapan di sudut kampung. Yang bisa melakukannya adalah masyarakat itu sendiri: keluarga, tetangga, tokoh agama, kader pemuda, dan semua orang yang hidup di lingkungan tersebut. Kampung yang sehat adalah kampung yang warganya saling mengenal, saling memperhatikan, dan saling berani mengingatkan. Di kampung seperti itu, orang asing yang mencurigakan cepat diketahui, pergerakan yang tidak wajar cepat tercium, dan anak-anak yang mulai terjerumus cepat tertolong. Sebaliknya, kampung yang warganya acuh tak acuh adalah surga bagi para pengedar; mereka bisa beroperasi dengan nyaman tanpa takut dilaporkan. Dengan demikian, melawan bahaya laten adalah pekerjaan menghidupkan kembali semangat gotong royong dan rasa memiliki terhadap lingkungan.

Selain pengawasan sosial, yang tidak kalah penting adalah menghadirkan kegiatan-kegiatan positif yang mengisi ruang-ruang kosong. Banyak anak muda jatuh ke dalam pergaulan yang salah karena tidak ada tempat yang sehat untuk menyalurkan energi dan kreativitasnya. Lapangan yang kumuh, balai desa yang tutup, organisasi pemuda yang mati suri, dan tidak adanya kegiatan keagamaan atau olahraga membuat anak-anak mencari hiburan ke tempat yang salah. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, ruang-ruang kosong itu adalah kekosongan unsur yang harus diisi: tanah yang tidak dirawat akan ditumbuhi semak, air yang tidak mengalir akan menjadi sarang penyakit, udara yang tidak dihirup bersama akan menjadi pengap, dan matahari yang tidak dimanfaatkan akan berlalu tanpa berkah. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mengisi ruang hidupnya dengan kegiatan yang membangun, sehingga tidak ada celah bagi penjajahan tak terlihat untuk menyusup.

Pada titik ini, kita perlu mengakui bahwa melawan bahaya laten di sudut-sudut kampung bukanlah perkara mudah. Ia menuntut kesabaran, keberanian, dan konsistensi. Melaporkan pengedar bukan hal yang ringan; mengawasi anak bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam sehari; menghidupkan kegiatan pemuda membutuhkan tenaga dan dana yang tidak sedikit. Tetapi semua itu jauh lebih ringan daripada menanggung akibat dari generasi yang hancur. Setiap anak yang terselamatkan adalah satu kemenangan; setiap kampung yang pulih adalah satu benteng yang berdiri kembali. Dalam pidato KDM, seruan untuk tidak membiarkan tramadol dijual bebas adalah panggilan untuk bertindak sebelum terlambat. Kita

tidak boleh menunggu sampai anak-anak kita menjadi korban; kita harus bergerak sekarang, di lingkungan kita masing-masing, dengan cara-cara yang paling sederhana sekalipun.

Dengan demikian, bahaya laten di sudut-sudut kampung bukanlah takdir yang harus diterima. Ia adalah kenyataan yang bisa dilawan, asalkan ada kemauan kolektif untuk hadir, peduli, dan bertindak. Kampung bukan sekadar tempat tinggal; ia adalah medan pertempuran pertama dalam perang melawan penjajahan tak terlihat. Jika kita kalah di kampung sendiri, maka kita akan kalah di mana-mana. Tetapi jika kita sanggup menjaga kampung, menjaga anak-anak, dan menjaga lingkungan, maka kita telah memenangkan pertempuran yang paling menentukan bagi masa depan bangsa. KDM telah mengingatkan; kini bola ada di tangan kita semua.

BAB 8
MENGGUGAT IMPERIALISME INTERNAL

SELAMA ini, ketika kita mendengar kata imperialisme, bayangan kita hampir selalu tertuju ke luar: bangsa asing yang datang dengan kapal, tentara kolonial yang memaksakan kekuasaan, atau negara adidaya yang menekan negara-negara kecil melalui kekuatan ekonomi dan militer. Cara pandang ini tidak keliru, karena imperialisme memang sering kali tampil dalam rupa seperti itu. Tetapi ada satu bentuk imperialisme yang lebih dekat, lebih halus, dan lebih sulit dikenali, yaitu imperialisme internal. Ia tidak datang dari seberang lautan; ia lahir di dalam rumah kita sendiri, tumbuh dari struktur sosial yang timpang, dan dijalankan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung bangsanya. Dalam pidato KDM, imperialisme internal ini disebut dengan sangat tegas, terutama ketika ia berbicara tentang feodalisme Priangan dan para pemimpin pribumi yang justru menjadi alat penjajah.

Menggugat imperialisme internal berarti membalik arah pandang kita dari luar ke dalam. Selama ini kita terbiasa menyalahkan penjajah asing atas penderitaan bangsa, dan memang ada benarnya. Tetapi jika kita jujur, kita juga harus bertanya: mengapa penjajahan bisa berlangsung begitu lama? Mengapa rakyat yang jumlahnya jauh lebih besar bisa ditundukkan oleh segelintir orang asing? Jawabannya tidak bisa dilepaskan dari peran para elite lokal yang bersedia bekerja sama dengan kekuatan asing demi kepentingan pribadinya. Mereka adalah jembatan yang memudahkan penjajah menguasai tanah, tenaga, dan hasil bumi. Tanpa mereka, kolonialisme tidak akan sekuat dan selama itu. Inilah luka lama yang sering kali enggan diakui, karena ia menyeret nama-nama yang dihormati, bahkan dianggap sebagai pemimpin.

Dalam catatan sejarah yang dibaca KDM, perilaku kaum feodalis di Priangan pernah mengguncang pemerintah Eropa. Para bangsawan lokal itu hidup dalam kemewahan di atas penderitaan rakyatnya sendiri. Mereka mengadakan pesta-pesta, menarik upeti, dan menikmati kehormatan yang berlebihan, sementara rakyat jelata bekerja keras tanpa upah yang layak. Ketika pemerintah kolonial membangun jalan, gedung, atau infrastruktur lainnya, para pekerja pribumi sering kali tidak dibayar. Upah yang seharusnya mereka terima—yang disebut *rodi*—tidak

pernah sampai ke tangan mereka. Sebagian menguap di tengah rantai birokrasi feodal, sebagian lagi dinikmati oleh para penguasa lokal yang berpesta pora. Rakyat tidak hanya dijajah oleh bangsa asing, tetapi juga oleh bangsanya sendiri. Bahkan penderitaan yang ditimbulkan oleh "saudara sebangsa" itu sering kali lebih menyakitkan, karena ia datang dari orang yang seharusnya menjadi tempat berlindung.

KDM menyuarakan kepedihan ini dengan sebuah kalimat yang menusuk: "Penjajah memang kejam, tapi perilaku feodalistik yang suka menjajah bangsanya sendiri jauh lebih kejam." Kalimat ini bukanlah ungkapan kebencian, melainkan undangan untuk merenungkan luka sejarah yang belum sembuh. Selama kita masih menutup mata terhadap imperialisme internal, selama itu pula kita akan sulit memahami mengapa kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat. Sebab penjajahan tidak berhenti hanya karena bendera kolonial diturunkan; ia berganti bentuk, berganti pelaku, dan berganti cara, tetapi esensinya tetap sama: sebagian orang menindas sebagian yang lain demi keuntungan pribadi.

Bab ini akan menelusuri sejarah kelam feodalisme Priangan, mengungkap bagaimana para pemimpin pribumi bisa menjadi alat penjajah, dan menggali makna dari pernyataan KDM tentang feodalisme yang lebih kejam daripada penjajahan itu sendiri. Kita tidak akan membaca sejarah untuk menumbuhkan kebencian, melainkan untuk mengambil pelajaran. Sebab sejarah adalah cermin; ia menunjukkan siapa kita, dari mana kita datang, dan dosa-dosa apa yang perlu kita tebus. Jika kita berani bercermin dengan jujur, barangkali kita akan menemukan bahwa imperialisme internal tidak hanya hidup di masa lalu, tetapi masih bersemayam dalam cara kita berpikir, bekerja, dan memimpin hari ini.

Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, imperialisme internal adalah bentuk ketidakseimbangan yang paling parah. Dalam kosmologi itu, pusat seharusnya menjadi penjaga keseimbangan, bukan penguasa yang menindas. Tetapi dalam tatanan feodal, pusat justru menjadi pemangsa: ia menarik semua sumber daya ke dirinya sendiri, melemahkan unsur-unsur di sekelilingnya, dan menghancurkan keselarasan yang seharusnya dijaga. Rakyat yang seharusnya menjadi bagian dari keseimbangan diubah menjadi alat yang hanya diambil tenaganya. Tanah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan dirampas untuk kepentingan segelintir orang. Air, udara, dan matahari yang seharusnya menjadi milik bersama dikendalikan untuk keuntungan pribadi. Dalam situasi seperti ini, tidak ada kemerdekaan sejati; yang ada hanyalah pergantian tuan, dari penjajah asing ke penjajah lokal.

Maka, menggugat imperialisme internal bukan berarti mengajak kita untuk terus-menerus menyalahkan sejarah. Justru sebaliknya: dengan memahami sejarah, kita dapat memutus rantai yang selama ini mengikat. Kita dapat mengenali pola-pola lama yang masih berulang, seperti kecenderungan para pemimpin untuk minta dihormati secara berlebihan, kebiasaan menempatkan kepentingan pribadi

di atas kepentingan rakyat, dan sikap tunduk kepada yang kuat sambil menindas yang lemah. Pola-pola ini tidak akan hilang dengan sendirinya; ia harus dilawan dengan kesadaran, keberanian, dan teladan yang berbeda. Kita perlu membangun cara memimpin yang tidak feodal, cara bekerja yang tidak menindas, dan cara hidup yang tidak menggantungkan martabat pada jabatan atau kekayaan.

Dengan demikian, bab ini adalah bab tentang keberanian untuk melihat luka sendiri. Luka itu mungkin terasa perih, tetapi dari situlah penyembuhan bisa dimulai. KDM telah membuka jalan dengan menyebut sejarah secara jujur di hadapan para pejabat dan rakyat. Kini tugas kita adalah melanjutkan pembacaan itu: menelusuri jejak-jejak feodalisme, membongkar cara kerja imperialisme internal, dan merumuskan jalan keluar yang berpihak kepada rakyat kecil. Sebab jika kita tidak sanggup menggugat penjajahan dari dalam, maka kemerdekaan yang kita banggakan akan terus menjadi kulit tanpa isi, simbol tanpa makna, dan janji tanpa bukti.

Sejarah Kelam Feodalisme Priangan

Priangan, atau yang dalam bahasa Belanda disebut *Preanger*, adalah salah satu wilayah yang paling lama merasakan beban sistem feodal kolonial. Sejak masa VOC hingga pemerintahan Hindia Belanda, tanah Priangan tidak hanya menjadi lumbung hasil bumi yang menguntungkan, tetapi juga panggung bagi tumbuhnya kekuasaan para bupati dan priyayi yang menikmati hak-hak istimewa di atas penderitaan rakyatnya. Struktur feodal di sini bukanlah semata-mata warisan budaya lokal yang datang dari dalam; ia dibentuk, diperkuat, dan dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial sebagai alat untuk mengendalikan rakyat dari jarak dekat. Para penguasa lokal diberi gelar, tanah luas, dan keleluasaan memungut upeti, dengan syarat mereka setia kepada kolonial dan memastikan rakyat tetap bekerja untuk kepentingan ekonomi penjajah (Breman, 1983). Dalam sistem semacam ini, rakyat menghadapi dua lapis penindasan sekaligus: satu dari tuan asing yang duduk di Batavia, satu lagi dari tuan sebangsa yang tinggal di pendopo kabupaten.

Kekuasaan para bupati di Priangan pada masa itu sangat besar. Mereka bukan sekadar pejabat administratif, melainkan penguasa wilayah yang memiliki hak atas tanah dan tenaga rakyat. Rakyat diwajibkan menyerahkan sebagian hasil buminya, bekerja di sawah-sawah yang dikuasai bupati, dan mengerahkan tenaga untuk berbagai proyek yang diperintahkan oleh pemerintah kolonial. Semua kewajiban ini sering kali tidak diimbangi dengan imbalan yang layak. Bahkan dalam banyak kasus, rakyat tidak menerima upah sama sekali. Kerja paksa yang oleh Belanda disebut *heerendiensten* atau *rodi* ini menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur kolonial: jalan-jalan, jembatan, gedung-gedung pemerintahan, dan saluran irigasi

dibangun di atas keringat dan darah rakyat yang tidak pernah dihitung sebagai biaya. KDM menyebut hal ini secara eksplisit dalam pidatonya: upah yang mesti dibayarkan kepada rakyat atas pembangunan jalan dan gedung, yang disebut rodi, itu pun tidak dibayarkan. Kalimat ini bukan sekadar pengulangan fakta sejarah; ia adalah pengakuan atas luka lama yang jarang dibicarakan dalam narasi resmi.

Kemewahan para penguasa feodal berbanding terbalik dengan penderitaan rakyatnya. Sementara rakyat bekerja dari pagi hingga malam tanpa upah, para bupati dan keluarganya menggelar pesta-pesta, membangun rumah-rumah besar, dan menikmati segala bentuk kehormatan yang dituntut dari rakyat jelata. KDM menyinggung bahwa pemerintah Eropa pernah diguncang oleh perilaku buruk kaum feodalis di Priangan yang setiap hari berpesta di atas penderitaan. Perilaku semacam ini tidak hanya mengundang kemarahan rakyat, tetapi juga mencemaskan pemerintah kolonial yang khawatir ketidakstabilan sosial akan mengganggu produksi dan ketertiban. Akan tetapi, kekhawatiran itu tidak mengubah struktur dasarnya: kolonial tetap membutuhkan para bupati sebagai perantara, dan para bupati tetap membutuhkan kolonial sebagai pelindung kekuasaannya. Maka rakyat pun tetap berada di dasar, menjadi penanggung semua beban, sementara di atasnya dua kekuasaan saling menguntungkan.

Yang lebih menyakitkan, feodalisme Priangan tidak hanya merampas tenaga dan harta rakyat, tetapi juga merendahkan martabat mereka. Dalam tata krama feodal, rakyat jelata diharuskan menunjukkan penghormatan yang berlebihan kepada para priyayi: menunduk, duduk di bawah, menyembah, dan menerima perintah tanpa boleh membantah. Bahkan bahasa pun diatur sedemikian rupa sehingga ada tingkat tutur yang menegaskan jarak antara atasan dan bawahan. Rakyat dibiasakan untuk merasa rendah, sementara para penguasa dibiasakan untuk merasa tinggi. Inilah luka yang paling dalam dari feodalisme: ia tidak hanya menghisap tenaga, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa manusia memang tidak setara, bahwa ada yang dilahirkan untuk memerintah dan ada yang dilahirkan untuk melayani. Kesadaran ini jauh lebih berbahaya daripada kerja paksa, karena ia bekerja dari dalam, membentuk cara pandang yang sulit dicabut bahkan setelah sistem kolonial runtuh.

Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, feodalisme Priangan adalah contoh paling nyata dari pusat yang berkhianat. Dalam kosmologi itu, pusat seharusnya menjaga keseimbangan empat penjuru; ia adalah pengelola, bukan pemilik; pelindung, bukan pemangsa. Tetapi para penguasa feodal mengubah pusat menjadi sumber penindasan. Tanah yang seharusnya menjadi milik bersama dirampas untuk keuntungan segelintir orang; air yang seharusnya mengairi sawah rakyat dialihkan untuk kepentingan tanah-tanah luas milik bupati; udara dan matahari yang seharusnya dinikmati semua orang menjadi terasa berat karena rakyat tidak punya waktu luang untuk sekadar bernapas lega. Keseimbangan hidup rusak total:

yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah, dan hukum hanya menjadi alat untuk melanggengkan ketimpangan. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada kemerdekaan; yang ada hanyalah rantai yang berganti-ganti bentuk.

Sejarah kelam feodalisme Priangan juga mengajarkan kita bahwa imperialisme internal sering kali tidak kalah ganas dari imperialisme eksternal. Jika penjajah asing datang dengan senjata dan memaksakan aturan dari luar, penjajah sebangsa datang dengan senyum, berpura-pura menjadi pelindung, padahal sesungguhnya sedang menghisap darah saudaranya sendiri. KDM menangkap betul nuansa ini ketika ia mengatakan bahwa penjajah memang kejam, tetapi perilaku feodalistik yang suka menjajah bangsanya sendiri jauh lebih kejam. Sebab penjajah asing pada akhirnya akan pergi, tetapi feodalisme internal bisa menetap dan berganti baju selama berabad-abad. Ia bisa hadir dalam bentuk bupati yang minta dihormati berlebihan, pejabat yang memanfaatkan rakyat, atau pengusaha yang menindas buruhnya. Bentuknya berubah, tetapi intinya sama: manusia memperlakukan manusia lain sebagai alat untuk memuaskan keinginannya sendiri.

Penting untuk dicatat bahwa feodalisme Priangan tidak runtuh begitu saja setelah kemerdekaan. Sebagian besar struktur sosialnya tetap bertahan, hanya berganti wajah. Pemerintahan kolonial diganti dengan pemerintahan nasional, tetapi cara memandang rakyat masih sering kali mewarisi pola lama: pejabat minta dihormati, rakyat takut menyuarakan pendapat, dan jabatan dianggap sebagai tanda kemuliaan. Inilah sebabnya mengapa menggugat feodalisme tidak cukup dengan mengganti nama atau struktur formal. Ia harus sampai ke akar kesadaran, ke cara kita mendidik, memimpin, dan membangun relasi sosial. KDM membuka luka ini di hadapan para pejabat dan rakyat, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk mengajak semua pihak jujur melihat masa lalu agar tidak mengulanginya. Sebab bangsa yang tidak belajar dari sejarahnya akan terus berada dalam lingkaran penjajahan yang sama, meskipun musim dan pemainnya terus berganti.

Dengan memahami sejarah kelam feodalisme Priangan, kita menjadi lebih waspada terhadap bentuk-bentuk penindasan yang tampak samar. Kita belajar bahwa penderitaan rakyat tidak selalu lahir dari serangan asing, tetapi sering kali justru datang dari mereka yang duduk di kursi kekuasaan lokal. Kita juga belajar bahwa kemerdekaan sejati harus dibangun di atas penghapusan segala bentuk kasta, bukan sekadar penggantian bendera. Tanah, air, udara, dan matahari harus dikembalikan kepada rakyat; pusat harus dipulihkan menjadi penjaga keseimbangan, bukan mesin penghisap. Inilah pekerjaan sejarah yang belum selesai, dan bab ini adalah salah satu upaya untuk melanjutkannya.

Pemimpin Pribumi yang Justru Menjadi Alat Penjajah

Dalam banyak kisah sejarah resmi, para pemimpin lokal sering ditampilkan sebagai pahlawan yang berdiri di garis depan melawan penjajah. Citra ini memang tidak sepenuhnya salah, karena banyak raja, bupati, dan tokoh masyarakat yang memilih jalan perlawanan meskipun harus mengorbankan nyawa. Tetapi sejarah yang jujur juga harus mencatat sisi lain yang lebih gelap: ada banyak pemimpin pribumi yang justru memilih bekerja sama dengan kekuatan kolonial, bukan karena terpaksa semata, melainkan karena kerja sama itu memberi mereka kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Mereka menjadi perpanjangan tangan penjajah di tingkat lokal, memastikan bahwa perintah dari pusat kekuasaan asing berjalan mulus, dan memetik keuntungan dari setiap tetes keringat rakyatnya. Inilah wajah lain dari imperialisme internal yang sering kali tidak diajarkan di ruang kelas: pengkhianatan yang dilakukan bukan oleh orang asing, tetapi oleh saudara sebangsa.

KDM menyebut fenomena ini dengan nada yang jernih dan tajam. Ia membaca sejarah dan menemukan bahwa tidak mungkin kolonialisme Belanda menjajah kita dalam waktu terlalu lama kalau tidak ada orang yang bekerja untuk mereka. Kalimat ini sederhana, tetapi implikasinya sangat dalam. Ia membongkar mitos bahwa penjajahan semata-mata ditopang oleh kekuatan militer asing. Kekuatan senjata memang penting, tetapi tanpa dukungan elite lokal, tentara kolonial tidak akan mampu mengendalikan wilayah yang begitu luas dan penduduk yang begitu banyak. Para bupati, kepala desa, dan pejabat pribumi itulah yang menjadi mata, telinga, dan tangan penjajah di lapangan. Mereka mengumpulkan pajak, mengerahkan tenaga kerja, mengawasi gerak-gerik rakyat, dan meredam perlawanan sebelum sempat membesar. Dengan imbalan berupa tanah, gelar, uang, dan keleluasaan menindas, mereka rela menjadikan bangsanya sendiri sebagai kuda beban.

Pola kerja sama semacam ini tidak lahir dalam ruang kosong. Kolonialisme selalu membutuhkan struktur perantara, karena memerintah secara langsung dari jarak jauh tidak efisien dan sering kali memicu perlawanan. Dengan mengangkat para pemimpin lokal sebagai bagian dari sistem, kolonial menciptakan ilusi bahwa rakyat masih diperintah oleh "orangnya sendiri." Padahal, orang-orang itu telah diikat oleh kepentingan yang lebih dekat kepada tuan asing daripada kepada rakyat yang dipimpinnya. Dalam banyak kasus, mereka bahkan lebih kejam daripada pejabat kolonial, karena mereka memahami adat, bahasa, dan psikologi rakyat, sehingga tahu persis bagaimana cara memeras tanpa menimbulkan pemberontakan. Mereka bisa memanfaatkan kewajiban adat, ritual, dan hierarki sosial untuk memaksa rakyat menuruti kehendak mereka, semuanya atas nama ketertiban dan kesetiaan.

KDM menggambarkan karakter elite semacam ini dengan sangat hidup: mereka ingin selalu dihormati, selalu dijunjung tinggi, selalu diangkat-angkat di

hadapan kaum pribumi yang adalah warga biasa, tetapi di hadapan kolonial mereka menundukkan seluruh badannya, membungkukkannya, dan mengajaknya untuk kerja sama. Gambaran ini adalah potret mentalitas yang timpang: menindas ke bawah dan merunduk ke atas. Dalam psikologi penjajahan, mentalitas semacam ini disebut sebagai internalisasi inferioritas sekaligus superioritas; orang merasa rendah di hadapan penjajah tetapi merasa tinggi di hadapan sesamanya yang lebih lemah (Fanon, 1963). Mentalitas ini tidak hanya hidup di masa kolonial, tetapi terus berlanjut sampai sekarang dalam bentuk-bentuk yang lebih modern: pejabat yang tunduk kepada atasannya tetapi angkuh kepada rakyat, pengusaha yang merendahkan buruhnya tetapi menjilat pemodal asing, dan tokoh masyarakat yang berani menindas tetangganya sendiri tetapi tidak berdaya di hadapan kekuasaan yang lebih besar.

Salah satu contoh paling menyakitkan dari pengkhianatan elite lokal adalah praktik *rodi* yang dibiarkan, bahkan dipermudah, oleh para pemimpin pribumi. Ketika pemerintah kolonial membangun jalan, jembatan, atau gedung, rakyat dikerahkan untuk bekerja tanpa upah. Para mandor dan kepala desa yang bertugas mengumpulkan tenaga kerja sering kali tidak membela warganya; sebagian justru ikut mengambil keuntungan dari penderitaan itu. Upah yang seharusnya dibayarkan kepada rakyat tidak pernah sampai ke tangan mereka. Sebagian menguap di meja-meja birokrasi kolonial, sebagian lagi masuk ke kantong para elite lokal. KDM menyebut ini dengan tegas: "upah yang mesti dibayarkan kepada masyarakat disebut rodi, itu pun tidak dibayarkan." Dalam kalimat ini tersimpan kemarahan yang tertahan, bukan hanya kepada penjajah asing, tetapi juga kepada mereka yang seharusnya menjadi pelindung rakyat namun justru ikut menghisap.

Sejarah semacam ini seharusnya menjadi bahan renungan bagi siapa pun yang memegang kekuasaan hari ini. Sebab godaan untuk menjadi alat kepentingan yang lebih besar, atau untuk memanfaatkan rakyat demi keuntungan pribadi, tidak pernah hilang. Bentuknya memang berubah: bukan lagi bekerja untuk VOC atau pemerintah Hindia Belanda, tetapi bisa berarti bekerja untuk korporasi besar yang merusak lingkungan, atau menjadi pelaksana kebijakan yang menindas rakyat kecil, atau sekadar memungut keuntungan dari proyek-proyek pembangunan yang seharusnya menyejahterakan. Intinya tetap sama: kekuasaan digunakan bukan untuk melindungi, melainkan untuk menindas; jabatan dipakai bukan untuk melayani, melainkan untuk memperkaya diri. Jika para pemimpin hari ini tidak belajar dari kesalahan para pendahulunya, maka mereka akan mengulangi dosa yang sama dengan baju yang berbeda.

Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, pemimpin yang menjadi alat penjajah adalah pusat yang telah kehilangan fungsinya. Ia tidak lagi menjaga keseimbangan empat unsur, melainkan menjadi pusat yang menyelewengkan aliran tanah, air, udara, dan matahari hanya untuk dirinya sendiri. Rakyat yang seharusnya diberi

akses ke tanah dan air justru diusir dari sumber-sumber itu. Rakyat yang seharusnya menghirup udara kebebasan justru dipaksa tunduk di bawah kukuh kekuasaan yang represif. Matahari yang seharusnya membagi terang kepada semua orang justru dipasangi sekat-sekat oleh para elite yang ingin menguasai semuanya. Dalam situasi seperti itu, pusat bukan lagi *pancer* yang mempersatukan, melainkan lubang hitam yang menelan segala sesuatu di sekitarnya.

Menyadari hal ini, kita perlu membangun kembali pengertian tentang kepemimpinan yang sehat. Pemimpin sejati bukanlah orang yang paling dihormati secara berlebihan, bukan pula orang yang paling kaya dan paling berkuasa. Pemimpin sejati adalah orang yang sanggup berdiri di tengah, mendengarkan yang lemah, dan memastikan bahwa tidak ada satu pun unsur yang tertindas. Dalam bahasa KDM, pemimpin yang baik adalah mereka yang mau datang ketika rakyatnya sakit, mau mengobati ketika rakyatnya kesusahan, dan mau berdiri paling depan ketika rakyatnya mengalami penindasan. Kepemimpinan seperti ini tidak mungkin lahir dari mentalitas feodal yang ingin selalu diangkat-angkat; ia hanya mungkin lahir dari kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanat yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hak istimewa yang boleh dinikmati semena-mena.

Dengan menggugat para pemimpin pribumi yang menjadi alat penjajah, kita tidak sedang mencari kambing hitam untuk melampiaskan amarah. Kita sedang bekerja untuk memutus rantai pengkhianatan yang masih bisa terulang. Sejarah telah memberi kita pelajaran yang sangat mahal: bahwa kemerdekaan bisa dijual oleh orang dalam dengan harga yang lebih murah daripada harga darah para pahlawan. Maka, tugas kita hari ini adalah memastikan bahwa para pemimpin, pejabat, dan setiap orang yang memegang kekuasaan benar-benar berdiri di pihak rakyat, bukan di pihak kekuatan yang hendak menindas mereka. Sebab jika tidak, kita hanya akan menyaksikan ulangan dari sejarah yang sama, dengan pemeran yang berbeda, tetapi dengan penderitaan rakyat yang tetap sama.

"Penjajah Memang Kejam, tapi Perilaku Feodalistik Jauh Lebih Kejam"

Kalimat ini adalah salah satu pernyataan paling tajam dalam seluruh pidato KDM. Ia bukan sekadar kritik sejarah, melainkan sebuah vonis moral yang menembus lapisan-lapisan kenyamanan kita. Selama ini kita terbiasa mengutuk penjajah asing sebagai biang keladi penderitaan bangsa, dan kutukan itu memang beralasan. Tetapi KDM mengajak kita melangkah lebih jauh: bahwa ada penjajahan yang lebih menyakitkan, lebih dalam, dan lebih sulit dilawan, yaitu penjajahan yang dilakukan oleh bangsa sendiri. Ketika penjajah asing menghisap kekayaan negeri, kita masih bisa menyalakan api perlawanan dengan semangat nasionalisme. Namun,

ketika saudara sebangsa, bahkan pemimpin yang seharusnya melindungi, ikut menghisap, ke mana kita harus berpaling? Di sinilah letak kekejaman feodalisme yang melampaui kekejaman kolonial: ia merampas bukan hanya tenaga dan harta, tetapi juga kepercayaan, harapan, dan martabat.

Kekejaman penjajah asing paling tidak masih bisa dikenali sebagai kekejaman dari luar. Ia datang dengan bendera lain, bahasa lain, dan kepentingan yang jelas-jelas asing. Rakyat bisa melihatnya, membencinya, dan bersatu untuk melawannya. Ada semacam kejelasan moral dalam perlawanan terhadap penjajah asing: kami melawan mereka karena mereka bukan kami. Tetapi feodalisme internal tidak memberi kejelasan semacam itu. Ia justru bekerja melalui orang-orang yang secara budaya adalah bagian dari kita, bahkan sering kali dianggap sebagai panutan. Rakyat yang ditindas oleh bupatinya sendiri berada dalam kebingungan moral: haruskah ia melawan orang yang selama ini dihormati sebagai pemimpin? Haruskah ia membenci orang yang masih dianggap sebagai bagian dari darahnya sendiri? Kebingungan ini membuat penderitaan rakyat berlipat ganda, karena ia tidak hanya kehilangan tenaga dan hartanya, tetapi juga kehilangan pegangan tentang siapa yang bisa dipercaya.

Perilaku feodalistik juga lebih kejam karena ia tidak berhenti pada penguasaan fisik, tetapi menjalar ke dalam kesadaran. Penjajah asing bisa diusir, tetapi mentalitas feodal yang telah tertanam selama berabad-abad tidak akan hilang hanya dengan proklamasi. Ia hidup dalam cara kita memandang jabatan, dalam bahasa yang merendahkan pekerjaan tertentu, dalam sikap pejabat yang ingin dihormati berlebihan, dan dalam kepatuhan rakyat yang sering kali lahir dari rasa takut, bukan rasa hormat yang tulus. Feodalisme mengajarkan bahwa manusia tidak setara, bahwa ada yang dilahirkan untuk memerintah dan ada yang dilahirkan untuk melayani. Ajaran ini jauh lebih berbahaya daripada senjata apa pun, karena ia bekerja dari dalam, membentuk cara berpikir yang sulit dicabut. KDM menyadari hal ini, dan karena itu ia tidak berhenti pada kritik terhadap kolonialisme, tetapi justru menukik ke dalam: menggugat feodalisme sebagai akar penjajahan yang paling gigih.

Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, feodalisme adalah pusat yang menolak keseimbangan. Ia menempatkan satu unsur di atas unsur-unsur lainnya, menjadikan penguasa sebagai satu-satunya yang berhak atas tanah, air, udara, dan matahari. Rakyat tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keseimbangan, melainkan sebagai alat yang bisa dimanfaatkan. Ketika pusat menolak keseimbangan, yang terjadi bukan hanya ketimpangan, tetapi kehancuran perlahan. Tanah menjadi rusak karena diolah tanpa cinta; air menjadi keruh karena diambil tanpa perawatan; udara menjadi pengap karena rakyat tidak punya ruang untuk bernapas; matahari menjadi terasa jauh karena hari-hari rakyat habis untuk bekerja demi kepentingan orang lain. Dalam situasi seperti itu, penderitaan bukan lagi peristiwa, melainkan

keadaan yang dianggap wajar. Inilah kekejaman feodalisme yang paling dalam: ia membuat ketidakadilan terasa seperti tatanan alamiah.

KDM juga mengingatkan bahwa perilaku feodalistik tidak hanya dimiliki oleh mereka yang hidup di masa lalu. Ia masih bisa kita temukan hari ini, dalam bentuk-bentuk yang lebih halus tetapi tidak kalah merusak. Pejabat yang memanfaatkan anggaran untuk kepentingan pribadi, atasan yang menuntut dihormati tanpa mau mendengar bawahannya, tokoh masyarakat yang menindas tetangganya yang lebih lemah, dan siapa pun yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain karena jabatan, kekayaan, atau keturunannya—semuanya adalah pewaris feodalisme. Mereka mungkin tidak lagi mengenakan pakaian kebesaran, tetapi perilaku mereka melanjutkan tradisi lama: menindas ke bawah dan merunduk ke atas. KDM menyebut mereka sebagai "bagian dari kejahatan imperialisme," dan itu bukan tuduhan yang berlebihan. Sebab siapa pun yang menindas bangsanya sendiri sedang bekerja untuk melemahkan bangsanya, persis seperti yang dilakukan para penjajah.

Yang membuat kritik KDM ini sangat penting adalah keberaniannya untuk menyampaikannya di hadapan para pejabat. Ia tidak berbicara di depan rakyat kecil saja, tetapi di depan mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Ia tidak menggurui dari kejauhan, tetapi berdiri di hadapan mereka dan berkata: kita harus malu. Kita harus malu karena masih menuntut tunjangan yang naik, fasilitas yang lebih besar, dan penghormatan yang berlebihan, sementara rakyat di luar sana masih hidup dalam kegelapan. Kalimat ini adalah tamparan bagi mentalitas feodal yang masih bersemayam di dalam birokrasi dan pemerintahan. Ia menuntut perubahan bukan dari rakyat, tetapi dari para pemimpin: berhenti menjadi penjajah bagi bangsanya sendiri, dan mulailah menjadi pelayan yang sesungguhnya. Dalam bahasa *Papat Kalima Pancer*, para pemimpin harus kembali ke posisi pusat yang menjaga keseimbangan, bukan pusat yang menghisap.

Tentu saja, menggugat feodalisme tidak berarti menolak semua bentuk otoritas. Masyarakat tetap membutuhkan pemimpin, guru, orang tua, dan tokoh yang dihormati. Yang ditolak adalah otoritas yang dibangun di atas ketakutan dan paksaan, otoritas yang menuntut dilayani tanpa mau melayani, otoritas yang menganggap dirinya lebih mulia dari yang lain. Dalam masyarakat yang sehat, otoritas lahir dari keteladanan, bukan dari kasta; ia dihormati karena kebaikannya, bukan karena jabatannya. KDM menawarkan model kepemimpinan yang demikian: pemimpin yang mau datang ketika rakyatnya sakit, mau mengobati ketika rakyatnya kesusahan, dan mau berdiri paling depan ketika rakyatnya ditindas. Itulah pemimpin yang merdeka, dan hanya dari pemimpin semacam itulah rakyat dapat belajar tentang kemerdekaan.

Dengan demikian, kalimat "penjajah memang kejam, tapi perilaku feodalistik jauh lebih kejam" bukanlah sekadar penilaian sejarah. Ia adalah cermin yang

dihadirkan KDM di hadapan bangsa ini, agar kita tidak hanya sibuk mengutuk penjajah dari luar, tetapi juga berani melihat penjajah di dalam diri kita sendiri. Selama kita masih mempraktikkan feodalisme, selama itu pula kita belum benar-benar merdeka. Kemerdekaan sejati menuntut kita untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam setiap relasi: antara pemimpin dan rakyat, antara atasan dan bawahan, antara yang kaya dan yang miskin. Inilah pekerjaan besar yang harus kita teruskan, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kesadaran dan keteladanan.

BAGIAN LIMA
KEPEMIMPINAN YANG BERPIHAK

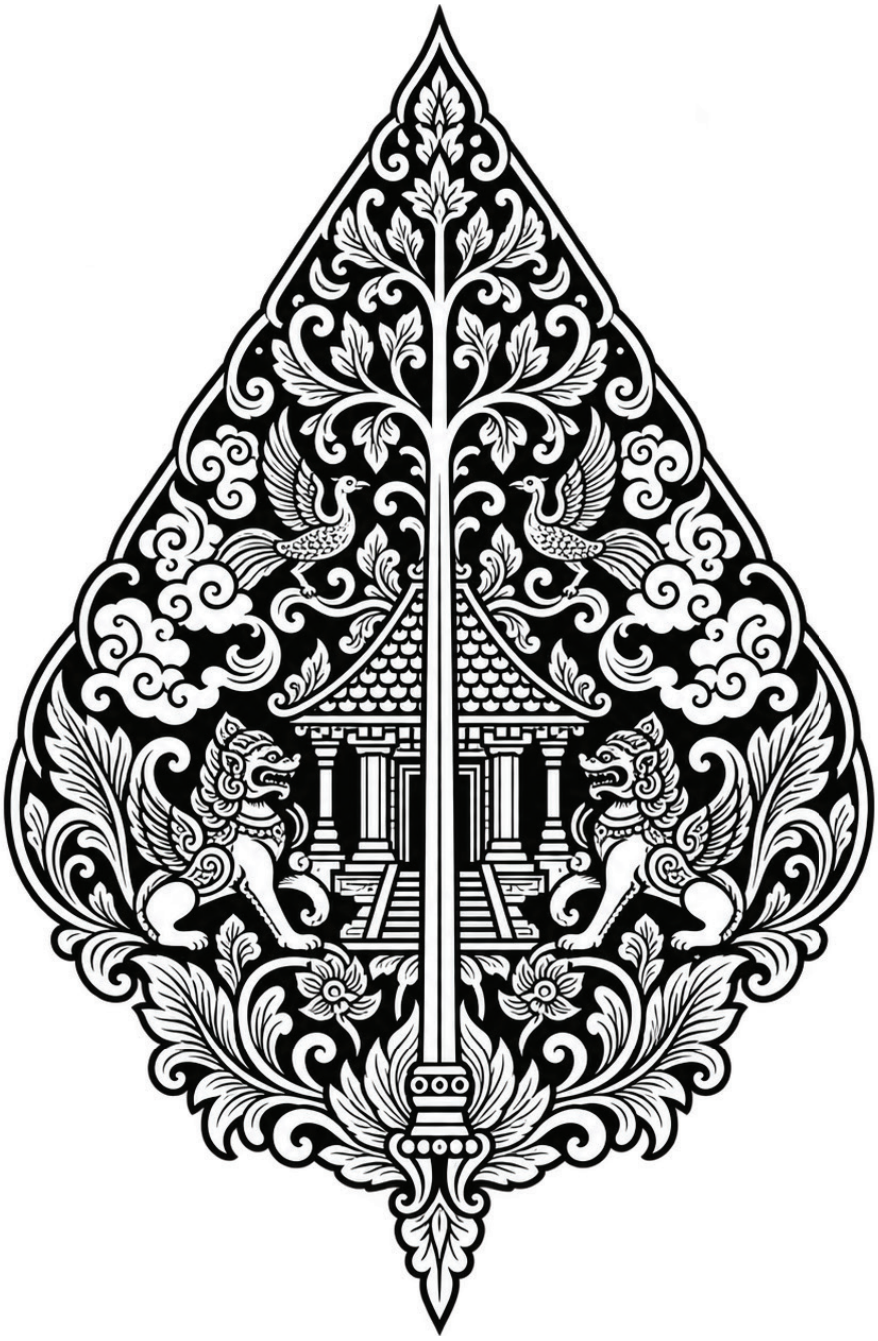

BAB 9
MENUNDA HASRAT PRIBADI

Setelah menelusuri berbagai bentuk penjajahan yang masih membelit bangsa ini—dari yang tampak hingga yang tak terlihat, dari yang datang dari luar hingga yang tumbuh dari dalam—kita tiba pada sebuah pertanyaan yang menentukan: bagaimanakah sosok pemimpin yang sanggup membawa rakyatnya keluar dari lingkaran penjajahan itu? Pertanyaan ini penting, sebab pemimpin bukan sekadar pengelola administrasi atau penjaga stabilitas; ia adalah cermin bagi masyarakatnya. Apa yang dilakukan pemimpin akan ditiru, apa yang diucapkannya akan diulang-ulang, dan apa yang dianggapnya penting akan menjadi arah perhatian bersama. Jika pemimpin hanya sibuk mengejar kenyamanan pribadi, maka rakyat pun akan belajar bahwa kekuasaan adalah alat untuk memuaskan diri. Sebaliknya, jika pemimpin sanggup menunda keinginannya demi kepentingan rakyat, maka ia sedang menanamkan nilai bahwa jabatan adalah amanat, bukan kesempatan.

KDM menyentuh persoalan ini dengan cara yang jarang dilakukan oleh pejabat publik. Ia tidak berbicara tentang kepemimpinan dalam bahasa yang abstrak dan aman. Ia justru menyebut hal-hal yang sangat pribadi dan sering kali dianggap tabu untuk diungkapkan: menunda membeli mobil baru menggunakan uang negara, menunda membeli baju baru menggunakan uang negara, dan menunda menambah properti di rumah dinas menggunakan uang negara. Kalimat-kalimat itu sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebab ia membongkar praktik yang selama ini dianggap lumrah: menggunakan fasilitas negara untuk memenuhi hasrat pribadi. Dalam satu tarikan napas, KDM menggeser fokus dari "apa yang bisa saya ambil" menjadi "apa yang bisa saya tunda demi rakyat." Pergeseran inilah yang menjadi inti dari kepemimpinan yang berpihak.

Mengapa hasrat pribadi begitu berbahaya dalam kepemimpinan? Karena hasrat tidak pernah mengenal kata cukup. Ketika seorang pemimpin mulai menikmati kemewahan, ia akan sulit berhenti. Mobil baru hari ini akan terasa biasa beberapa bulan lagi; baju baru akan cepat usang; properti yang bertambah akan menuntut pengeluaran lebih besar untuk perawatannya. Hasrat yang tidak dikendalikan akan terus meminta, dan untuk memenuhinya, seorang pemimpin akan tergoda melakukan hal-hal yang merusak: mengorupsi anggaran, menyalahgunakan

wewenang, atau menindas orang-orang yang menghalangi keinginannya. Dengan demikian, menunda hasrat pribadi bukanlah urusan kecil; ia adalah benteng pertama yang melindungi seorang pemimpin dari kejatuhan moral. Dalam bahasa *Papat Kalima Pancer*, menunda hasrat adalah cara untuk menjaga agar pusat tidak berubah menjadi penyerap, melainkan tetap menjadi penjaga keseimbangan.

Bab ini akan membahas tiga hal utama. Pertama, kita akan menelusuri makna dari seruan KDM untuk menunda membeli mobil baru, baju baru, dan properti, serta bagaimana seruan ini menjadi kritik tajam terhadap gaya hidup pejabat yang sering kali tidak sejalan dengan kondisi rakyatnya. Kedua, kita akan merenungkan kepemimpinan yang fokus pada kebutuhan rakyat, bukan pada keinginan pribadi, serta bagaimana pemimpin yang demikian dapat mengarahkan anggaran dan kebijakan kepada hal-hal yang benar-benar menyentuh kehidupan orang banyak. Ketiga, kita akan melihat simbolisasi tenda VIP yang diisi oleh petani, nelayan, kuli bangunan, dan tukang sapu, sebagai wujud nyata dari pembalikan tata ruang kekuasaan: yang biasanya dipinggirkan kini didudukkan di tempat terhormat, sementara para elite diminta berdiri di luar. Simbol ini adalah pernyataan tegas bahwa keberpihakan bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga soal siapa yang diberi tempat.

Kita hidup dalam zaman ketika kemewahan para pemimpin sering kali menjadi pemandangan yang kontras dengan penderitaan rakyat. Di satu sisi, kita mendengar berita tentang pejabat yang membeli mobil mewah, membangun rumah megah, atau berlibur ke luar negeri; di sisi lain, kita melihat rakyat yang antre beras, berjuang membayar biaya sekolah, atau tidak mampu membeli obat. Kontras ini bukan hanya menyakitkan secara moral, tetapi juga merusak kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Rakyat yang melihat pemimpinnya hidup mewah sementara dirinya kesulitan akan kehilangan keyakinan bahwa negara sedang bekerja untuknya. Maka, seruan untuk menunda hasrat pribadi bukanlah soal menuntut pemimpin hidup sengsara, tetapi soal menuntut mereka untuk hidup sepadan dengan tanggung jawabnya. Seorang pemimpin tidak harus miskin, tetapi ia harus tahu kapan harus berhenti, terutama ketika kebutuhannya dibiayai oleh uang rakyat.

Dalam kerangka kepemimpinan yang berpihak, menunda hasrat pribadi adalah langkah awal menuju keberanian yang lebih besar. Sebab pemimpin yang sudah sanggup menahan keinginannya sendiri akan lebih mudah bersikap tegas terhadap keinginan-keinginan lain yang lebih besar: keinginan untuk menutupi kesalahan, keinginan untuk mempertahankan jabatan dengan cara apa pun, atau keinginan untuk membalas kritik dengan kekuasaan. Ketika seorang pemimpin berhasil menaklukkan dirinya sendiri, ia baru bisa menaklukkan persoalan-persoalan di luar dirinya dengan jernih. Ia tidak akan mudah dibeli, tidak akan mudah digoyang, dan tidak akan mudah tergoda oleh iming-iming keuntungan pribadi. Kekuatan

semacam ini adalah kekuatan moral yang jauh lebih kokoh daripada kekuatan jabatan atau kekayaan.

Kita juga perlu mengingat bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin di ruang kerjanya, tetapi juga tentang teladan yang ia tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Rakyat belajar dari apa yang mereka lihat. Jika mereka melihat pemimpinnya berangkat kerja dengan mobil dinas yang wajar, berpakaian sederhana, dan tidak pamer kekayaan, mereka akan menyerap pesan bahwa hidup tidak harus berlebihan. Tetapi jika mereka melihat pemimpinnya berganti-ganti mobil mewah, mengenakan pakaian mahal, dan membangun rumah yang megah, mereka akan menyerap pesan yang sebaliknya: bahwa keberhasilan diukur dari seberapa banyak yang bisa dimiliki. Dalam jangka panjang, teladan yang buruk ini akan meracuni mentalitas bangsa, membuat rakyat lebih menghargai penampilan daripada kejujuran, lebih mengejar kekayaan daripada kerja keras. Maka, menunda hasrat pribadi adalah bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin untuk menjaga kesehatan jiwa bangsanya.

Bab ini akan menempatkan semua gagasan itu dalam bingkai *Papat Kalima Pancer*, di mana pemimpin dipahami sebagai *pancer* yang harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi, kepentingan rakyat, dan keberlanjutan alam. Pemimpin yang hanya memikirkan dirinya sendiri adalah pusat yang kehilangan arah; ia tidak lagi menyeimbangkan, tetapi justru menarik segala sesuatu ke dalam dirinya. Sebaliknya, pemimpin yang menunda hasratnya adalah pusat yang berfungsi sebagaimana mestinya: memastikan bahwa tanah, air, udara, dan matahari dibagi secara adil kepada semua. Dengan demikian, bab ini adalah panggilan untuk memulihkan makna kepemimpinan sebagai pengabdian, bukan penguasaan; sebagai amanat, bukan warisan; dan sebagai jalan untuk memerdekakan rakyat, bukan untuk memperkaya diri.

Mobil Baru, Baju Baru, Properti dan Etika Pemimpin

Ketika KDM menyebut mobil baru, baju baru, dan properti sebagai hal-hal yang harus ditunda oleh para pemimpin, ia sebenarnya sedang membongkar tiga simbol paling umum dari gaya hidup pejabat di negeri ini. Tiga benda itu bukan dipilih secara kebetulan; masing-masing mewakili lapisan hasrat yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat. Mobil adalah simbol mobilitas dan status sosial; baju adalah simbol penampilan dan citra diri; properti adalah simbol kekayaan yang menetap dan akumulasi jangka panjang. Ketiganya, ketika dibiayai oleh uang negara, menjadi penanda bahwa kekuasaan telah digunakan bukan untuk melayani, melainkan untuk menikmati. Maka, seruan untuk menunda ketiganya adalah seruan untuk

menghentikan kebocoran etika yang paling sering dianggap sepele: pemanfaatan fasilitas negara untuk kepuasan pribadi.

Mobil baru sering kali menjadi godaan pertama bagi seorang pejabat. Di satu sisi, kendaraan dinas memang diperlukan untuk menunjang tugas; tetapi di sisi lain, perjalanan dinas tidak selalu membutuhkan mobil mewah dengan harga yang selangit. Ketika seorang pemimpin memilih mobil baru yang mahal padahal yang lama masih layak pakai, ia sedang mengirim pesan yang salah: bahwa penampilan dan kenyamanan pribadi lebih penting daripada efisiensi anggaran. Padahal, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli mobil mewah adalah rupiah yang tidak jadi digunakan untuk membangun sekolah, memperbaiki puskesmas, atau menerangi rumah-rumah yang gelap. Dalam kerangka etika pemimpin, keputusan membeli mobil bukan hanya soal selera, melainkan soal prioritas: apakah uang rakyat akan dipakai untuk melayani, atau untuk memanjakan.

Baju baru juga tampak sepele, tetapi menyimpan makna yang dalam. Pakaian adalah bagian dari cara seseorang menampilkan dirinya, dan dalam dunia politik, penampilan sering kali dianggap penting. Namun, ketika anggaran pakaian dinas membengkak, ketika pejabat berganti-ganti pakaian mahal setiap acara, dan ketika rakyat masih banyak yang berpakaian seadanya, terjadilah ketimpangan yang menyakitkan. KDM tidak menuntut pemimpin berpakaian lusuh; ia menuntut kesadaran bahwa pakaian yang berlebihan, apalagi jika dibiayai uang negara, adalah bentuk penghinaan halus terhadap rakyat yang susah. Sebab pakaian yang berlebihan pada akhirnya bukan lagi soal kerapian, melainkan soal pamer; dan pamer di tengah kemiskinan adalah kekejaman yang tidak kasat mata.

Properti adalah hasrat yang paling berat dan paling sulit dikendalikan. Berbeda dengan mobil dan baju yang bersifat habis pakai, properti adalah kekayaan yang menetap dan terus bertambah nilainya. Ketika seorang pejabat menambah rumah, tanah, atau bangunan selama masa jabatannya, muncul pertanyaan yang wajar: dari mana sumber dananya? Jika jawabannya berasal dari uang negara, maka itu adalah penyalahgunaan yang jelas. Jika jawabannya berasal dari uang pribadi, tetap ada pertanyaan etis tentang seberapa jauh seorang pemimpin boleh hidup jauh di atas standar rakyatnya. Seorang pemimpin memang tidak dilarang memiliki kekayaan pribadi, tetapi ia harus menjaga agar kekayaannya tidak menjadi tembok yang memisahkannya dari penderitaan rakyat. Ketika rumah dinas saja sudah ditambah-tambah, ketika tanah-tanah dibeli di sana-sini, maka fokus seorang pemimpin telah bergeser dari melayani menjadi mengumpulkan.

Dalam banyak tradisi filsafat politik, pengendalian diri adalah salah satu keutamaan utama seorang pemimpin. Para filsuf Yunani kuno menyebutnya *sophrosyne*, yaitu keutamaan untuk menahan diri dari dorongan-dorongan yang berlebihan. Pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang paling banyak memiliki, melainkan yang paling sanggup menahan diri. Dalam tradisi Islam,

kesederhanaan para pemimpin juga menjadi teladan utama; banyak kisah tentang khalifah yang justru menolak fasilitas berlebihan karena takut tidak mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan rakyat dan Tuhan. Kearifan-kearifan ini mengajarkan hal yang sama: bahwa kekuasaan adalah ujian, dan orang yang tidak sanggup menahan hasratnya akan cepat jatuh. Mobil, baju, dan properti hanyalah pintu-pintu kecil; tetapi dari pintu-pintu itulah kejatuhan besar sering kali dimulai.

Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, hasrat pribadi yang tidak ditunda adalah tanda bahwa pusat sedang berubah menjadi penyerap. Manusia sebagai *pancer* seharusnya menyeimbangkan aliran sumber daya agar tidak tertumpuk di satu titik. Tetapi ketika seorang pemimpin sibuk membeli mobil baru, baju baru, dan properti, ia sedang menarik aliran itu ke dirinya sendiri. Tanah, air, udara, dan matahari yang seharusnya dibagi rata menjadi tersedot ke pusat. Rakyat yang berada di empat penjuru kehilangan aksesnya, sementara pusat semakin membesar dan semakin gemuk. Inilah gambaran dari ketidakseimbangan yang lahir bukan dari kebijakan besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dianggap wajar. Maka, menunda hasrat pribadi adalah langkah awal untuk mengembalikan pusat kepada fungsinya: menjadi penjaga keseimbangan, bukan penumpuk kekayaan.

Etika pemimpin juga menuntut kepekaan terhadap waktu. Ada saat-saat tertentu ketika rakyat sedang menghadapi krisis, ketika harga-harga naik dan lapangan kerja menyempit, maka kepekaan itu menuntut para pemimpin untuk ikut merasakan suasana itu. Membeli mobil baru di tengah krisis adalah tindakan yang tidak etis, bukan karena membeli itu dilarang, tetapi karena ia menunjukkan ketidakpekaan. Pemimpin yang baik akan menunda bahkan hal-hal yang sebenarnya bukan termasuk korupsi, hanya karena ia tahu bahwa rakyatnya sedang susah. Tindakan seperti ini bukan saja menjaga citra, tetapi juga menjaga batin: seorang pemimpin yang turut menahan diri akan lebih mudah merasakan apa yang dirasakan rakyatnya, dan dari situlah lahir kebijakan yang lebih manusiawi.

Kita juga perlu mengingat bahwa seruan KDM ini tidak hanya ditujukan kepada para pejabat tinggi, tetapi kepada semua orang yang memiliki kuasa atas uang publik. Kepala dinas, camat, kepala desa, bahkan ketua panitia kegiatan yang menggunakan dana bantuan, semuanya memiliki tanggung jawab yang sama: jangan biarkan uang rakyat mengalir untuk memuaskan keinginan pribadi. Etika ini harus menjadi budaya, bukan sekadar aturan tertulis. Sebab selama budaya pemanfaatan fasilitas untuk kepentingan pribadi masih dianggap wajar, selama itu pula aturan akan selalu bisa disiasati. Yang dibutuhkan bukan hanya pengawasan dari luar, tetapi juga kesadaran dari dalam diri setiap pemegang amanat.

Dengan demikian, mobil baru, baju baru, dan properti adalah tiga cermin yang dihadirkan KDM untuk memeriksa seberapa jauh kita telah menjaga etika kepemimpinan. Ketiganya bukan musuh besar, tetapi gejala dari hasrat yang tidak ditata. Ketika seorang pemimpin sanggup menunda ketiganya, ia sedang melatih

dirinya untuk menunda hal-hal yang lebih besar: menunda keserakahan, menunda kesombongan, dan menunda keinginan untuk menang sendiri. Latihan ini mungkin tidak terlihat dalam laporan kinerja, tetapi ia terasa dalam cara rakyat memandang pemimpinnya. Rakyat tidak selalu bisa membaca anggaran, tetapi mereka bisa merasakan ketulusan. Dan ketulusan itulah yang pada akhirnya akan membangun kembali kepercayaan, lebih kuat daripada proyek-proyek megah mana pun.

Kepemimpinan yang Fokus pada Kebutuhan Rakyat

Kepemimpinan yang berpihak tidak diukur dari seberapa sering seorang pemimpin tampil di depan publik, tetapi dari seberapa tajam ia mampu membaca kebutuhan rakyatnya dan mengarahkan seluruh kekuasaannya untuk memenuhinya. Seorang pemimpin yang fokus pada kebutuhan rakyat akan selalu bertanya sebelum membuat keputusan: apakah kebijakan ini menolong mereka yang paling lemah? Apakah anggaran ini menyentuh mereka yang paling membutuhkan? Apakah program ini benar-benar menjawab persoalan, atau sekadar menghabiskan uang? Pertanyaan-pertanyaan itu sederhana, tetapi justru karena sederhananya ia sering dilupakan. Banyak keputusan dibuat bukan berdasarkan kebutuhan rakyat, melainkan berdasarkan keinginan pejabat, tekanan politik, atau kepentingan segelintir orang. Di sinilah kepemimpinan diuji: mampu tidaknya seseorang meletakkan kebutuhan orang banyak di atas keinginan pribadinya.

KDM memberi contoh yang gamblang tentang fokus pada kebutuhan rakyat ketika ia berbicara tentang listrik, kesehatan, dan pendidikan. Ia tidak berbicara tentang proyek-proyek megah yang tampak indah dari kejauhan, tetapi tentang hal-hal yang langsung menyentuh hidup orang banyak: rumah yang terang di malam hari, pasien yang pulang dari rumah sakit tanpa terlilit utang, dan anak-anak yang bisa bersekolah hingga tuntas. Fokus semacam ini lahir dari kemampuan mendengar dan melihat. Seorang pemimpin yang tidak pernah turun ke kampung, tidak pernah duduk bersama petani, tidak pernah menunggu di puskesmas, akan sulit merasakan apa yang paling dibutuhkan rakyatnya. Ia mungkin pandai membaca laporan dan angka, tetapi angka tidak pernah menceritakan seluruh kebenaran. Angka tidak menunjukkan wajah lelah seorang ibu yang harus memilih antara membeli obat atau membayar uang sekolah. Angka tidak memperlihatkan keheningan malam di rumah yang tak berlistrik. Fokus pada kebutuhan rakyat menuntut kepekaan yang lahir dari kedekatan, bukan dari kejauhan.

Kepemimpinan yang fokus pada kebutuhan rakyat juga berarti berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak prioritas. Setiap anggaran yang tersedia selalu terbatas, sementara keinginan selalu tidak terbatas. Maka, pemimpin yang berpihak harus pandai menolak: menolak proyek yang hanya menguntungkan segelintir orang,

menolak perjalanan dinas yang tidak perlu, menolak pembangunan gedung yang megah sementara puskesmas di desa masih kekurangan obat. Menolak dalam hal ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda ketegasan. Pemimpin yang tidak mampu menolak godaan akan menjadi pemimpin yang terbawa arus: ia akan menyetujui banyak hal agar disukai, tetapi rakyat tidak akan pernah merasakan perubahan. KDM menyebut pentingnya menunda hasrat pribadi sebagai langkah awal, tetapi sesungguhnya yang dituntut lebih jauh adalah menunda semua hal yang tidak sejalan dengan kebutuhan rakyat, termasuk proyek-proyek bergengsi yang tidak menyentuh kehidupan sehari-hari.

Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, pemimpin yang fokus pada kebutuhan rakyat adalah pusat yang menjaga aliran tetap adil. Ia memastikan bahwa tanah memberikan hasil bagi petani, air mengalir sampai ke rumah-rumah, udara tetap bersih bagi semua, dan matahari menyinari setiap jengkal negeri tanpa terkecuali. Pusat tidak boleh menjadi bendungan yang menahan semuanya untuk diri sendiri; ia harus menjadi saluran yang membagi dengan jernih. Ketika seorang pemimpin mengalihkan anggaran dari pembelian mobil mewah ke pembangunan jaringan listrik desa, ia sedang menjalankan fungsi pusat itu. Ketika ia memilih memperbaiki pelayanan kesehatan daripada menambah fasilitas pribadi, ia sedang menyeimbangkan aliran air kehidupan. Keputusan-keputusan kecil seperti inilah yang, jika dilakukan terus-menerus, akan mengubah wajah sebuah daerah dan sebuah bangsa.

Fokus pada kebutuhan rakyat juga menuntut kesediaan untuk mendengar, bukan sekadar berbicara. Banyak pemimpin yang pandai berpidato, tetapi tidak banyak yang pandai mendengar. Mendengar bukan hanya soal berdiri di tengah rakyat dan menerima keluhan; ia adalah sikap batin yang mengakui bahwa rakyat tahu banyak tentang penderitaannya sendiri, dan bahwa pemimpin bisa belajar dari mereka. Rakyat yang hidup di desa terpencil tahu persis apa artinya tidak punya listrik; petani yang gagal panen tahu persis apa penyebabnya; ibu-ibu yang antre di puskesmas tahu persis apa yang kurang dari layanan itu. Jika pemimpin bersedia mendengar, ia akan menemukan jawaban-jawaban yang tidak tertulis dalam laporan resmi. KDM tampak menyadari ini; pidatonya justru memberi ruang bagi suara-suara yang biasanya tidak terdengar: petani, nelayan, kuli bangunan, tukang sapu. Ia menyebut mereka satu per satu, memberi mereka tempat, dan dengan begitu menunjukkan bahwa fokusnya bukan pada mereka yang berada di dekat kekuasaan, melainkan pada mereka yang selama ini berada di pinggiran.

Kepemimpinan yang fokus juga berarti berani memilih jangka panjang daripada jangka pendek. Kebutuhan rakyat sering kali tidak bisa dipenuhi dalam satu atau dua tahun. Membenahi pendidikan membutuhkan waktu bertahun-tahun; memperbaiki sistem kesehatan menuntut kesabaran yang panjang; membangun pertanian organik perlu perjuangan yang tidak sebentar. Pemimpin yang hanya

berpikir tentang periode jabatannya akan cenderung memilih proyek yang cepat terlihat hasilnya, meskipun tidak berdampak besar bagi rakyat. Ia akan meresmikan gedung, membangun monumen, atau menggelar acara besar, karena itu semua bisa difoto dan dipublikasikan. Sementara itu, kerja-kerja panjang yang tidak tampak—perbaikan mutu guru, pendampingan petani, perbaikan tata kelola—sering diabaikan. KDM mengingatkan bahwa perubahan menuju pertanian organik harus dilakukan sepetak demi sepetak; ini adalah pengakuan bahwa kerja besar membutuhkan kesabaran, dan bahwa pemimpin yang berpihak harus sanggup memulai pekerjaan yang mungkin tidak sempat ia nikmati hasilnya.

Dengan demikian, kepemimpinan yang fokus pada kebutuhan rakyat adalah gabungan dari kepekaan, ketegasan, kerendahan hati untuk mendengar, dan kesabaran untuk bekerja jangka panjang. Ia bukan tipe kepemimpinan yang mencari sorotan, melainkan tipe yang bekerja dalam sunyi, tetapi hasilnya terasa oleh banyak orang. Pemimpin semacam ini akan dikenang bukan karena pidatonya yang gemilang, tetapi karena listrik yang menyala di rumah-rumah yang dulu gelap, karena anak-anak yang kembali bersekolah, dan karena petani yang kembali tersenyum. Dalam bingkai *Papat Kalima Pancer*, itulah pusat yang menjalankan tugasnya: menjaga keseimbangan, membagi dengan adil, dan memastikan tidak ada satu pun unsur yang tertinggal. Kepemimpinan yang demikian bukan saja mungkin, tetapi juga mendesak, jika kita benar-benar ingin menyelesaikan kemerdekaan yang belum tuntas.

Tenda VIP untuk Petani, Kuli, dan Tukang Sapu

Dalam setiap upacara resmi, tata ruang selalu berbicara. Siapa yang duduk di depan, siapa yang berdiri di belakang, siapa yang diberi kursi empuk, dan siapa yang harus berteduh di pinggir—semuanya adalah bahasa yang jujur tentang siapa yang dianggap penting oleh kekuasaan. Selama ini, tenda VIP adalah tempat bagi para pejabat, tamu kehormatan, dan orang-orang berpangkat. Petani, nelayan, kuli bangunan, dan tukang sapu hampir tidak pernah masuk ke dalam ruang itu; mereka hadir di pinggiran, menjadi pelengkap, atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Maka, ketika KDM menempatkan mereka di dalam tenda VIP dan memindahkan para pejabat ke luar, ia sedang melakukan sebuah tindakan simbolik yang jauh lebih kuat daripada seribu kata. Ia sedang membalik tata ruang yang mapan, dan dengan itu membalik cara pandang kita tentang siapa yang layak dihormati.

Keputusan itu bukan sekadar pencitraan, karena ia menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pejabat yang biasanya menikmati tempat istimewa. Jika itu hanya pencitraan, KDM bisa saja mengundang para petani dan kuli untuk berfoto bersama di depan tenda VIP, lalu mengembalikan kursi-kursi itu kepada

para tamu penting. Tetapi yang ia lakukan justru sebaliknya: ia meminta maaf kepada para pejabat dan tamu undangan karena mereka harus berada di luar arena tenda VIP, sebab tenda itu telah diisi oleh para petani, nelayan, pengemudi ojek online, dan kuli bangunan. Permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf yang sebenarnya; ia adalah sindiran halus, sebuah cara untuk mengatakan bahwa sudah terlalu lama para elite menempati ruang utama, dan sekarang saatnya mereka merasakan bagaimana rasanya berada di luar. Dalam tindakan ini, KDM sedang mempraktikkan apa yang ia ucapkan: bahwa negara merdeka tidak lagi mengenal kaum menak dan kaum cacah, bahwa semua orang berhak mendapatkan tempat yang terhormat.

Mengapa petani, kuli, dan tukang sapu yang dipilih? Karena merekalah yang selama ini menjadi penopang hidup tetapi paling sedikit dihargai. Petani memberi makan, tetapi sering kali hidup dalam kemiskinan; kuli bangunan membangun gedung-gedung megah, tetapi tidak pernah diundang menikmati hasilnya; tukang sapu membersihkan jalan, tetapi jarang disebut namanya. Mereka adalah unsur-unsur yang bekerja dalam sunyi, seperti tanah yang memberi kesuburan tanpa minta pujian, seperti air yang mengalir tanpa minta dihormati. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, mereka adalah wujud nyata dari empat penjuru yang menopang kehidupan, sementara para pejabat hanyalah pusat yang seharusnya menjaga keseimbangan. Dengan menempatkan mereka di tenda VIP, KDM sedang mengingatkan bahwa pusat tidak akan berarti apa-apa tanpa penjuru-penjuru yang bekerja dengan setia.

Tindakan ini juga mengandung kritik yang dalam terhadap cara kita memandang pekerjaan. Selama ini, ada hierarki yang tak tertulis: pekerjaan kantoran dianggap lebih mulia daripada pekerjaan kasar; berdasi lebih terhormat daripada bercaping; dan duduk di ruang ber-AC lebih tinggi daripada berdiri di bawah terik matahari. Hierarki ini adalah warisan feodalisme yang masih hidup, yang mengukur martabat manusia dari jenis pekerjaannya. Dengan menempatkan tukang sapu dan kuli bangunan di tenda VIP, KDM sedang meruntuhkan hierarki itu. Ia sedang berkata bahwa tidak ada pekerjaan yang hina selama ia dilakukan dengan jujur; bahwa orang yang membersihkan jalan memiliki martabat yang sama dengan orang yang menandatangani kebijakan; dan bahwa negara yang sehat adalah negara yang menghormati semua bentuk kerja yang menghidupi bangsanya.

Tentu saja, simbolisme tenda VIP ini tidak akan menyelesaikan masalah jika hanya berhenti sebagai simbol. Petani yang duduk di tenda VIP tetap akan pulang ke sawahnya yang kering; kuli bangunan tetap akan mencari proyek berikutnya; tukang sapu tetap akan bekerja dengan upah yang kecil. Karena itu, tindakan simbolik ini harus diikuti oleh perubahan yang nyata dalam kebijakan: akses lahan yang adil, upah yang layak, perlindungan kerja, dan penghormatan terhadap hak-hak buruh. Namun, menolak pentingnya simbol juga merupakan kesalahan. Simbol

adalah bahasa yang menyentuh kesadaran; ia mengubah cara orang memandang dirinya dan orang lain. Ketika seorang petani duduk di tenda VIP dan disambut oleh gubernurnya, ia tidak hanya mendapat tempat duduk; ia mendapat pengakuan bahwa hidupnya berharga, bahwa keringatnya dilihat, dan bahwa bangsanya menghormati apa yang ia lakukan. Pengakuan semacam ini, meskipun tidak bisa dimakan, adalah makanan bagi jiwa yang telah lama lapar akan penghargaan.

Dalam skala yang lebih luas, pembalikan tenda VIP itu adalah undangan bagi kita semua untuk memeriksa kembali ruang-ruang yang kita huni. Siapa yang kita beri tempat utama dalam hidup kita? Apakah kita memberi tempat utama bagi mereka yang telah berjasa, atau hanya bagi mereka yang berkuasa? Dalam keluarga, siapa yang suaranya paling didengar? Dalam organisasi, siapa yang paling dihormati? Dalam masyarakat, siapa yang paling sering dipinggirkan? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terasa sederhana, tetapi jawabannya menentukan arah keadilan. Jika kita masih menempatkan orang kecil di pinggiran, maka kita belum merdeka. Jika kita masih mengukur martabat dari pekerjaan, maka feodalisme belum benar-benar hilang. Tenda VIP hanyalah sebuah ruang kecil di halaman Gedung Sate, tetapi ia bisa menjadi cermin besar yang memperlihatkan wajah kita sendiri.

Kepemimpinan yang berpihak, dalam pengertian yang paling dalam, adalah kepemimpinan yang berani memindahkan kursi. Ia tidak hanya pandai berbicara tentang keadilan, tetapi juga sanggup menata ulang ruang agar keadilan itu terlihat dan terasa. Tentu saja, tidak semua orang setuju dengan cara ini. Ada yang menganggapnya sebagai pencitraan, ada yang menganggapnya sebagai pelanggaran protokol, dan ada yang merasa tidak nyaman karena tempatnya diambil. Tetapi justru ketidaknyamanan itulah yang diperlukan. Keadilan tidak akan pernah lahir dari kenyamanan yang sudah mapan; ia lahir ketika yang biasa di atas bersedia turun, dan yang biasa di bawah diangkat. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, inilah keseimbangan yang sejati: bukan semua orang berada di posisi yang sama, tetapi setiap orang mendapat tempat yang sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.

Dengan begitu, tenda VIP untuk petani, kuli, dan tukang sapu bukanlah sekadar adegan dalam sebuah upacara. Ia adalah pernyataan politik yang berani, sekaligus pernyataan moral yang dalam. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan milik para elite, melainkan milik semua orang yang telah menopang negeri ini dengan keringatnya. Ia juga mengingatkan bahwa kepemimpinan yang berpihak harus berani mengubah tata ruang, tata pikir, dan tata hati. Sebab pada akhirnya, bangsa ini tidak akan diselamatkan oleh mereka yang duduk di kursi empuk, melainkan oleh mereka yang selama ini bekerja di bawah terik matahari, membangun jalan, membersihkan kota, dan menanam padi di sawah-sawah. Jika mereka diberi tempat yang terhormat, maka sesungguhnya yang dihormati bukanlah mereka semata, tetapi seluruh martabat kemanusiaan yang selama ini terabaikan.

BAB 10
MENGHORMATI YANG TERLUPAKAN

Dalam setiap peradaban, ada orang-orang yang bekerja di balik layar, yang namanya tidak pernah tercatat dalam dokumen resmi, tetapi tangannya ikut membangun zaman. Mereka adalah para pengangkat batu, pengaduk semen, penyapu jalan, penjaga malam, dan ribuan pekerja kecil lain yang hadir sebelum matahari terbit dan pulang setelah gelap. Sejarah sering kali ditulis oleh mereka yang berkuasa, dan karena itu sejarah cenderung mengingat para pemimpin, arsitek, dan pemilik modal, sementara mereka yang mengerjakan bagian paling berat justru lenyap tanpa jejak. Bangunan-bangunan megah berdiri, jalan-jalan raya membentang, kota-kota tumbuh, tetapi siapa yang ingat nama-nama kuli yang membangunnya? Siapa yang tahu berapa banyak keringat yang jatuh ke tanah sebelum gedung itu tegak? Bab ini ingin berbicara tentang mereka, bukan untuk menggurui, tetapi untuk menunaikan satu hal yang selama ini jarang dilakukan: penghormatan.

KDM dalam pidatonya memberi ruang yang istimewa bagi orang-orang yang selama ini tidak terlihat. Ia menyebut tukang sapu yang usianya tidak lagi muda, anggota Linmas yang berdiri tegak di usia rata-rata enam puluh tahun, para kuli bangunan yang bahkan tidak tamat sekolah dasar, serta petani dan nelayan yang bekerja setiap hari tanpa banyak bicara. Sebutan-sebutan itu bukan sekadar basa-basi di hadapan publik; ia adalah bentuk pengakuan bahwa negara ini berdiri di atas punggung mereka. Dalam budaya yang masih feodal, pekerjaan-pekerjaan seperti itu sering dianggap rendah, tidak layak dibanggakan, dan tidak pantas mendapat tempat terhormat. KDM membalik anggapan itu dengan menempatkan mereka di tenda VIP, menyebut mereka satu per satu, dan berterima kasih kepada mereka secara terbuka. Tindakan ini adalah koreksi atas luka lama yang jarang disadari: bahwa kita hampir selalu lupa berterima kasih kepada mereka yang paling banyak berjasa.

Bab ini akan membahas tiga kelompok yang paling sering terlupakan: kuli bangunan, anggota Linmas, dan tukang sapu. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja dalam sunyi, menjaga kota tetap berjalan, dan membangun tempat-tempat yang kelak dianggap megah. Kita akan menelusuri bagaimana jasa

mereka begitu besar, tetapi penghargaan terhadap mereka begitu kecil. Lebih dari itu, kita akan melihat Gedung Sate sebagai monumen yang menyimpan dua wajah sekaligus: keindahan arsitektur di permukaan, dan derita para pekerja di baliknya. Dari sanalah kita akan merenungkan bahwa banyak bangunan yang kita kagumi sesungguhnya dibangun di atas keringat dan air mata orang-orang yang namanya tidak pernah disebut. Terakhir, kita akan membahas tentang ucapan terima kasih yang terlambat: mengapa kita sulit sekali mengucapkannya, dan apa maknanya jika akhirnya diucapkan dengan tulus.

Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, para pekerja kecil adalah unsur-unsur yang menopang keseimbangan. Mereka adalah tanah yang memberi dasar, air yang mengalir tanpa henti, udara yang bekerja tanpa suara, dan matahari yang menyinari tanpa pamrih. Tanpa mereka, pusat tidak akan memiliki apa-apa untuk dirawat. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, pusat sering kali merasa dirinya paling penting, seolah-olah bangunan berdiri karena gagasannya, bukan karena tangan-tangan yang bekerja. Kesombongan semacam ini adalah penyakit lama yang membuat kita lupa bahwa keseimbangan hanya mungkin ada karena semua unsur bekerja bersama. Menghormati yang terlupakan berarti memulihkan kesadaran itu: bahwa tidak ada yang lebih penting, dan tidak ada yang bisa diabaikan.

Kita hidup dalam zaman yang semakin memuja ketenaran. Orang-orang yang dianggap berharga adalah mereka yang tampil di layar, yang namanya dikenal, yang wajahnya menghiasi papan reklame. Sementara itu, mereka yang bekerja di balik layar semakin tersingkir dari perhatian. Padahal, peradaban tidak akan bertahan sehari pun tanpa mereka. Kota akan lumpuh tanpa petugas kebersihan, bangunan akan roboh tanpa pekerja konstruksi, dan keamanan lingkungan akan kacau tanpa mereka yang menjaga. Maka, bab ini juga merupakan undangan untuk memeriksa kembali ukuran-ukuran kita tentang siapa yang layak dihormati. Apakah kita masih mengagungkan mereka yang berkuasa dan kaya, sambil mengabaikan mereka yang bekerja dengan jujur? Apakah kita masih merasa malu menyebut orang tua kita yang seorang petani atau buruh? Apakah kita masih menilai martabat seseorang dari jenis mobil yang dikendarainya?

Penghormatan kepada yang terlupakan juga bukan sekadar soal ucapan, melainkan soal kebijakan. Tukang sapu yang dihormati dalam pidato tetap membutuhkan upah yang layak, jaminan kesehatan, dan kepastian hari tua. Kuli bangunan yang disebut namanya tetap membutuhkan perlindungan kerja, helm keselamatan, dan upah yang dibayar tepat waktu. Linmas yang berdiri di usia lanjut tetap membutuhkan pengakuan atas pengabdiannya, mungkin dalam bentuk tunjangan atau jaminan sosial. Jika penghormatan hanya berhenti pada kata-kata, maka ia tidak lebih dari gema yang hilang ditiup angin. Tetapi jika ia diikuti oleh perubahan nyata, maka ia menjadi kekuatan yang mengangkat martabat banyak orang. KDM telah membuka jalan dengan menyebut mereka dalam upacara resmi;

tugas kita adalah memastikan bahwa sebutan itu tidak berhenti di halaman Gedung Sate, melainkan berlanjut ke dalam kebijakan dan cara hidup sehari-hari.

Bab ini akan ditutup dengan permenungan tentang ucapan terima kasih yang terlambat. Ada sesuatu yang menyedihkan ketika kita baru menghargai orang setelah ia tiada, atau ketika kita baru menyadari jasa seseorang setelah semuanya selesai. Ucapan terima kasih yang terlambat tetap berharga, tetapi ia juga menyimpan penyesalan karena tidak diucapkan lebih awal. KDM mengucapkan terima kasih kepada para pekerja yang hadir, dan itu baik. Tetapi kita semua tahu bahwa masih banyak lagi yang tidak hadir, yang telah pergi, yang telah lelah, dan yang tidak sempat mendengar ucapan itu. Maka, menghormati yang terlupakan adalah pekerjaan yang harus dilakukan sekarang, selagi mereka masih ada, selagi tangan-tangan itu masih bekerja, dan selagi keringat mereka masih jatuh ke tanah. Sebab ada penghormatan yang paling indah justru ketika ia disampaikan pada waktunya, bukan setelah terlambat.

Kuli Bangunan, Linmas, dan Tukang Sapu sebagai Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

Ada jenis kepahlawanan yang tidak pernah masuk dalam buku sejarah. Ia tidak berupa pertempuran besar, tidak melahirkan pidato yang dikenang, dan tidak pula diabadikan dalam prasasti atau nama jalan. Kepahlawanan itu hidup dalam kerja-kerja harian yang dianggap sepele: mengangkat batu, mengecat dinding, menyapu jalan, menjaga pos ronda, dan ribuan tindakan kecil lain yang membuat kehidupan bersama tetap berjalan. Orang-orang yang melakukannya jarang disebut pahlawan, sebab kata itu seakan-akan terlalu besar untuk mereka, atau justru karena kita tidak pernah serius memikirkannya. Tetapi jika kita mau jujur, merekalah yang menanggung beban paling nyata dari peradaban ini. Mereka hadir di bawah terik, di tengah debu, di hadapan risiko, tanpa tanda jasa, tanpa nama, dan sering kali tanpa cukup penghargaan. Di antara mereka, kuli bangunan, anggota Linmas, dan tukang sapu adalah tiga sosok yang paling mudah kita temui, tetapi paling jarang kita hormati.

Kuli bangunan adalah tulang punggung dari setiap gedung yang kita kagumi. Ketika kita berdiri di depan sebuah bangunan megah, mata kita tertuju pada arsiteknya, pada pemiliknya, pada nama besarnya. Kita memuji keindahan bentuk, kekokohan struktur, dan gemerlapnya pencahayaan. Tetapi di balik semua itu ada tangan-tangan kasar yang telah bekerja berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Mereka naik ke ketinggian tanpa jaminan keselamatan yang memadai, mengangkat beban berat di bawah terik matahari, dan tidur di barak-barak sederhana yang jauh dari kata layak. Sebagian dari mereka bahkan tidak tamat

sekolah dasar, tetapi keterampilan tangannya telah membangun ruang-ruang tempat orang lain menuntut ilmu, beribadah, bekerja, dan tinggal. KDM menyebut mereka secara khusus dalam pidatonya, bahkan mengakui bahwa halaman Gedung Sate yang indah itu adalah karya kuli bangunan yang sekolah SD pun tidak tamat. Pengakuan ini bukan sekadar pujian, melainkan koreksi atas cara kita memandang kecerdasan: bahwa ada kecerdasan tangan dan ketekunan yang tidak bisa diukur dengan ijazah, dan justru itulah yang menopang dunia.

Linmas, atau perlindungan masyarakat, adalah sosok yang hadir di hampir setiap lingkungan, tetapi jarang diperhitungkan. Mereka adalah warga biasa yang bersedia berjaga di malam hari, mengamankan acara-acara kampung, membantu korban bencana, dan menjaga ketertiban tanpa bayaran yang sepadan. Banyak di antara mereka yang usianya tidak muda lagi, tetapi masih berdiri tegak di bawah terik atau hujan demi menjalankan tugas. Dalam upacara kemerdekaan yang disebut KDM, anggota Linmas yang hadir rata-rata berusia enam puluh tahun, dan mereka tetap berdiri mengikuti upacara dengan khidmat. Ini adalah gambaran pengabdian yang melebihi batas fisik: bukan karena mereka kuat, tetapi karena mereka setia. Dalam masyarakat yang semakin individualistis, di mana orang sibuk dengan urusan masing-masing, kehadiran Linmas menjadi pengingat bahwa masih ada orang-orang yang rela menjaga ruang bersama tanpa menuntut banyak. Mereka adalah penjaga keseimbangan sosial yang bekerja dalam senyap, seperti udara yang menjaga napas kota tetap berjalan tanpa pernah minta dilihat.

Tukang sapu, atau petugas kebersihan, adalah kelompok yang paling sering direndahkan. Pekerjaan mereka dianggap kotor, tidak bergengsi, dan bahkan kadang-kadang dipakai sebagai ancaman bagi anak-anak yang malas belajar: "Kalau tidak sekolah, nanti jadi tukang sapu." Kalimat ini menunjukkan betapa dalamnya luka budaya kita: pekerjaan yang paling mulia sekalipun bisa dihina karena diukur dari gengsi, bukan dari manfaat. Padahal, tanpa tukang sapu, kota akan tenggelam dalam sampah. Jalan-jalan yang kita lalui setiap pagi dengan nyaman adalah hasil kerja mereka yang telah bangun sebelum subuh, menyapu dedaunan, memungut sampah, dan membersihkan selokan. KDM menyebut bahwa upacara kemerdekaan itu diikuti oleh para tukang sapu yang setiap hari membersihkan jalan-jalan di Jawa Barat, dan jumlahnya hampir tiga ribu orang. Ia mengucapkan terima kasih kepada mereka, sebuah pengakuan yang mungkin sederhana, tetapi bagi banyak tukang sapu, mendengar nama mereka disebut dalam upacara resmi adalah bentuk penghormatan yang jarang mereka terima seumur hidup.

Ketiga kelompok ini—kuli bangunan, Linmas, dan tukang sapu—memiliki satu kesamaan: mereka bekerja untuk kepentingan umum, tetapi nyaris tidak pernah menikmati hasilnya secara layak. Kuli bangunan membangun rumah-rumah mewah, tetapi mereka sendiri tinggal di barak atau kontrakan sempit. Linmas menjaga keamanan lingkungan, tetapi mereka sendiri sering kali tidak memiliki jaminan

sosial. Tukang sapu membersihkan kota, tetapi mereka sendiri sering dipandang sebelah mata oleh kota yang mereka bersihkan. Ketimpangan ini adalah potret dari ketidakseimbangan yang lebih luas: mereka yang berada di pusat menikmati kenyamanan, sementara mereka yang berada di penjuru menanggung beban. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, mereka adalah unsur-unsur yang memberi hidup, tetapi pusat telah lupa berterima kasih kepada mereka. Pusat menikmati tanah yang subur, air yang jernih, udara yang bersih, dan sinar matahari yang hangat, tetapi lupa bahwa semua itu hadir karena ada yang merawat dan menjaganya.

Mengapa kita begitu mudah melupakan mereka? Salah satu sebabnya adalah budaya feodal yang masih hidup. Dalam budaya itu, martabat manusia diukur dari jenis pekerjaannya, bukan dari kejujurannya. Pekerjaan yang bersentuhan dengan tanah, debu, dan sampah dianggap rendah, sementara pekerjaan yang duduk di belakang meja dianggap mulia. Ukuran ini jelas tidak adil, tetapi telah diwariskan turun-temurun. Sebab lainnya adalah budaya pencitraan yang membuat kita lebih senang menghormati orang-orang yang tampil di depan, yang wajahnya dikenal, yang namanya terpampang, daripada mereka yang bekerja di belakang layar. Kita lupa bahwa di balik setiap panggung yang gemerlap ada orang-orang yang menyiapkan panggung itu, menatanya, dan membersihkannya setelah acara selesai. Tanpa mereka, tidak ada panggung, tidak ada acara, dan tidak ada kemeriahan. Namun, mereka justru paling cepat dilupakan setelah lampu padam.

KDM, dalam pidatonya, mencoba memulihkan ingatan itu. Ia tidak hanya mengucapkan terima kasih, tetapi juga memberi tempat terhormat kepada para pekerja kecil. Tenda VIP yang biasanya diisi oleh pejabat justru diberikan kepada petani, nelayan, kuli bangunan, dan tukang sapu. Ini adalah simbol yang kuat: bahwa dalam negara yang merdeka, tidak ada lagi tempat istimewa yang hanya boleh diisi oleh kaum menak. Setiap orang yang bekerja dengan jujur berhak atas penghormatan yang sama. Tentu saja, tindakan ini tidak akan menyelesaikan semua ketimpangan, tetapi ia membuka ruang kesadaran baru. Ia mengajak kita untuk bertanya: sudahkah kita menghormati mereka dalam kehidupan sehari-hari? Atau kita hanya tersentuh sesaat ketika mendengar pidato, lalu kembali pada kebiasaan lama yang menganggap mereka tidak penting?

Penghormatan yang sejati tidak boleh berhenti pada seremonial. Ia harus mewujud dalam kebijakan: upah yang layak, jaminan sosial, perlindungan keselamatan kerja, dan pengakuan atas pengabdian. Ia juga harus mewujud dalam sikap: tidak memandang rendah tukang sapu, tidak meremehkan kuli bangunan, dan tidak menganggap Linmas sebagai penjaga malam yang bisa diabaikan. Dalam keluarga, orang tua harus berhenti memakai pekerjaan-pekerjaan ini sebagai ancaman; sebaliknya, mereka harus mengajarkan bahwa setiap pekerjaan yang halal adalah mulia, dan bahwa yang memalukan bukanlah pekerjaan kasar, melainkan perbuatan curang. Dalam masyarakat, kita perlu membangun budaya

yang menghormati kerja, bukan hanya hasil; yang menghargai proses, bukan hanya penampilan.

Di titik ini, kita diingatkan bahwa kemerdekaan tidak boleh hanya diukur dari seberapa tinggi gedung-gedung menjulang, tetapi juga dari seberapa adil kita memperlakukan mereka yang membangun gedung-gedung itu. Gedung yang megah tidak akan berarti apa-apa jika dibangun di atas penderitaan para pekerjanya. Jalan yang bersih tidak akan membanggakan jika petugas kebersihannya hidup dalam kekurangan. Keamanan kampung tidak akan lestari jika para penjaganya tidak diperhatikan kesejahteraannya. Menghormati yang terlupakan adalah bagian dari menyelesaikan kemerdekaan yang belum tuntas, karena kemerdekaan sejati adalah ketika tidak ada lagi warga yang merasa direndahkan oleh bangsanya sendiri. Maka, ucapan terima kasih yang diucapkan KDM kepada kuli bangunan, Linmas, dan tukang sapu adalah awal yang baik, tetapi perjalanannya masih panjang. Kita semua adalah bagian dari perjalanan itu, dan setiap langkah kecil untuk menghormati mereka adalah langkah menuju Indonesia yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih bermartabat.

Gedung Sate sebagai Monumen Derita dan Jasa Rakyat Kecil

Gedung Sate berdiri megah di jantung Kota Bandung. Bentuknya yang khas, dengan menara tengah yang dihiasi ornamen tusuk sate, telah menjadi ikon Jawa Barat dan kebanggaan banyak orang. Setiap hari, ribuan pasang mata memandangnya; wisatawan berfoto di depannya; para pejabat bekerja di dalamnya; dan anak-anak sekolah menyebut namanya dalam pelajaran mengenal daerah. Namun, di balik keindahan arsitekturnya, tersimpan sejarah panjang yang jarang diceritakan: sejarah tentang kerja paksa, penderitaan, dan keringat rakyat kecil yang menjadi fondasi bangunan itu. Gedung Sate bukanlah sekadar gedung pemerintahan; ia adalah monumen yang menyimpan dua wajah sekaligus—di permukaan ia tampil sebagai simbol kemegahan, tetapi di kedalamannya ia menyimpan derita yang panjang. KDM mengajak kita untuk melihat wajah yang kedua itu, wajah yang selama ini tersembunyi di balik keindahan.

Pembangunan Gedung Sate pada masa kolonial tidak dapat dilepaskan dari praktik kerja rodi yang membebani rakyat pribumi. Ketika pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun kantor pusat jawatan pekerjaan umum, mereka tidak mendatangkan tenaga kerja dari negeri asing; mereka mengerahkan rakyat setempat. Rakyat diwajibkan bekerja, sering kali tanpa upah yang layak, bahkan tanpa upah sama sekali. Mereka diambil dari desa-desa, dipisahkan dari keluarga, dan ditempatkan di lokasi pembangunan dengan kondisi yang

sangat minim. KDM menyebut bahwa di balik gedung yang sangat indah itu terhampar derita yang panjang: ada beribu-ribu nyawa yang merenggang untuk membangunnya, ada beribu-ribu orang yang ditinggalkan rumahnya, dan ada yang tertimpa hingga meninggal di dalamnya. "Kita tidak pernah mengetahuinya dan kita tidak pernah berterima kasih," kata KDM. Kalimat ini adalah pengakuan yang menyakitkan: bahwa selama puluhan tahun kita memandang gedung itu tanpa pernah memikirkan mereka yang membangunnya.

Sejarah semacam ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada Gedung Sate. Banyak bangunan kolonial di Nusantara dibangun di atas penderitaan rakyat: jalan raya pos Anyer-Panarukan, rel kereta api, gedung-gedung pemerintahan, dan benteng-benteng pertahanan. Semuanya melibatkan tenaga kerja paksa yang diambil dari kampung-kampung. Namun, sejarah resmi sering kali hanya mencatat siapa yang memerintahkan pembangunan dan siapa yang merancangnya, sementara mereka yang mengangkat batu, menggali tanah, dan mempertaruhkan nyawa diabaikan begitu saja. Mereka adalah angka-angka yang tidak tercatat, nama-nama yang tidak terukir, dan jiwa-jiwa yang tidak diberi penghormatan. Dalam budaya yang masih feodal, penderitaan rakyat kecil dianggap sebagai bagian dari kewajiban, bukan sebagai pengorbanan yang layak dihargai. Maka, tidak ada upacara untuk mengenang mereka, tidak ada prasasti yang menyebut nama mereka, dan tidak ada ucapan terima kasih yang pernah sampai ke telinga mereka.

KDM berusaha memulihkan ingatan itu. Ia tidak memandang Gedung Sate hanya sebagai simbol kekuasaan, tetapi sebagai karya nyata dari tangan-tangan rakyat kecil yang bahkan tidak tamat sekolah dasar. Ia menyebut bahwa halaman Gedung Sate yang kini berdiri indah adalah karya kuli bangunan dan tukang cat yang bekerja setiap waktu. Penyebutan ini bukan sekadar apresiasi, melainkan pembalikan cara pandang: bahwa yang berjasa bukan hanya mereka yang memiliki gagasan membangun, tetapi juga mereka yang mengerjakan pembangunan itu. Bahkan KDM melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa para kuli itu "jauh lebih berjasa" daripada pemilik gagasan. Sebab gagasan hanyalah angan-angan jika tidak ada tangan yang mewujudkannya; rencana hanyalah kertas jika tidak ada keringat yang menghidupinya. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, para pekerja kecil adalah tanah yang memberi dasar, air yang mengalirkan tenaga, udara yang memberi napas, dan matahari yang menyinari kerja. Pusat memang penting, tetapi pusat tidak akan ada artinya tanpa penjuru-penjuru yang bekerja.

Gedung Sate hari ini telah direnovasi, dicat ulang, dan ditata sedemikian rupa agar tampak megah. KDM menyebut bahwa gedung itu hampir puluhan tahun tidak pernah dicat dengan standardisasi, dan kini halamannya diubah menjadi ruang yang dinamai Pasanggrahan Pancarasa. Renovasi itu sendiri melibatkan para pekerja yang sama: kuli bangunan, tukang cat, dan pekerja harian yang bekerja dengan upah kecil. Di sinilah letak ironi yang halus: untuk memperbaiki monumen

yang dibangun di atas penderitaan rakyat, kita kembali mengandalkan rakyat kecil yang sama, tetapi tetap saja jarang mengakui jasa mereka. Mereka datang, bekerja, menyelesaikan proyek, lalu pergi begitu saja setelah menerima upah yang tidak seberapa. Sementara itu, mereka yang memotong pita peresmian akan dikenang, difoto, dan disebut dalam pidato. Pekerja-pekerja itu mungkin tidak pernah lagi menginjakkan kaki di tempat yang mereka bangun, kecuali sebagai tukang yang dipanggil untuk perbaikan berikutnya.

Dalam banyak kebudayaan, bangunan dianggap sebagai saksi bisu dari zaman. Ia menyimpan cerita tentang kekuasaan, ambisi, dan selera pemiliknya. Tetapi jarang orang mau mendengarkan cerita dari sisi yang lain: bagaimana batu-batu itu diangkat dengan susah payah, bagaimana semen diaduk di bawah terik, bagaimana pekerja jatuh dari ketinggian dan tidak pernah kembali. Jika bangunan bisa berbicara, barangkali ia akan lebih banyak bercerita tentang yang tertindas daripada yang berkuasa. Sebab bangunan bukan hanya hasil dari keputusan politik, tetapi juga endapan dari keringat dan darah banyak orang. KDM mengajak kita untuk mendengarkan cerita yang tidak terucapkan itu, untuk membayangkan berapa banyak orang yang telah mengorbankan hidupnya demi berdirinya sebuah gedung, dan untuk menyesali bahwa kita tidak pernah berterima kasih kepada mereka. Ini adalah ajakan untuk memperlakukan bangunan tidak sekadar sebagai objek estetika, tetapi sebagai monumen moral yang menuntut kita untuk mengingat.

Mengingat jasa rakyat kecil bukan berarti kita harus menolak keindahan gedung atau menghapus sejarah kolonialnya. Justru sebaliknya: dengan mengingat, kita memberi makna yang lebih dalam kepada bangunan itu. Gedung Sate tidak lagi hanya menjadi simbol kejayaan arsitektur, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kemegahan sering kali dibangun di atas penderitaan. Dari pengingat itu lahir kesadaran baru: bahwa pembangunan hari ini tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Ketika kita membangun jalan, gedung, atau infrastruktur apa pun, kita harus memastikan bahwa para pekerjanya diperlakukan secara adil, dibayar dengan layak, dan dilindungi keselamatannya. Jangan sampai generasi mendatang memandang bangunan-bangunan yang kita buat dengan perasaan yang sama seperti kita memandang Gedung Sate: kagum pada bentuknya, tetapi sedih pada sejarahnya.

Menghormati yang terlupakan, dengan demikian, juga berarti membangun cara pandang yang baru terhadap hasil kerja. Sebuah gedung bukan hanya milik negara atau pemilik modal; ia adalah hasil dari kerja bersama yang melibatkan banyak orang. Dalam hasil itu tertanam potongan hidup para pekerjanya: waktu yang dihabiskan jauh dari keluarga, tenaga yang terkuras, dan risiko yang dihadapi. Maka, ketika kita menikmati gedung itu, kita seharusnya tidak hanya mengagumi arsiteknya, tetapi juga menghormati para pekerjanya. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, ini adalah panggilan untuk memulihkan keseimbangan: memberi tempat

kepada semua unsur yang terlibat, bukan hanya kepada pusat yang paling terlihat. Dengan cara itulah sebuah bangsa belajar untuk tidak melupakan, dan dari ingatan itu tumbuh keadilan yang lebih nyata.

Gedung Sate, dengan segala kemegahannya, seharusnya menjadi guru bagi kita semua. Ia mengajarkan bahwa di balik setiap keindahan ada harga yang harus dibayar, dan harga itu sering kali ditanggung oleh mereka yang paling lemah. Ia juga mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak boleh berhenti pada simbol; ia harus turun ke dalam perlakuan kita terhadap mereka yang bekerja. Jika kita masih membangun dengan cara-cara yang menindas, maka kita belum merdeka. Jika kita masih mengagumi bangunan tanpa mengingat yang membangunnya, maka kita belum merdeka. Tetapi jika kita sanggup melihat Gedung Sate dan teringat pada kuli bangunan, tukang cat, dan pekerja rodi yang telah lama tiada, maka kita sedang belajar untuk merdeka: merdeka dari lupa, merdeka dari ketidakadilan, dan merdeka dari kesombongan yang menganggap hanya kaum pusat yang berjasa. Itulah penghormatan yang sejati, dan itulah pelajaran terpenting dari sebuah monumen yang berdiri di atas derita dan jasa rakyat kecil.

Ucapan Terima Kasih yang Terlambat

Ada sesuatu yang menyedihkan sekaligus mengharukan dalam sebuah ucapan terima kasih yang datang terlambat. Ia tetap bernilai, tetapi nilainya dibayangi oleh kesadaran bahwa banyak hal telah berlalu: orang yang seharusnya menerima ucapan itu mungkin telah tiada, tenaga yang terkuras mungkin telah habis, dan luka yang diderita mungkin telah mengering tanpa pernah diakui. Ucapan terima kasih yang terlambat adalah pengakuan yang lahir dari kepekaan yang bangun setelah sekian lama tertidur. Ia seperti hujan yang turun setelah tanah retak karena kemarau; ia tetap membasahi, tetapi tidak bisa mengembalikan benih-benih yang telah mati kekeringan. Dalam konteks penghormatan kepada rakyat kecil—kuli bangunan, petani, tukang sapu, Linmas, dan para pekerja paksa di masa kolonial—kita sebenarnya sedang berhadapan dengan ucapan terima kasih yang telah terlambat sangat lama, bahkan mungkin lebih dari satu abad.

KDM menyampaikan terima kasih kepada mereka yang hadir dalam upacara: para tukang sapu, para anggota Linmas, para kuli bangunan yang bekerja membangun halaman Gedung Sate. Ucapan itu baik dan patut dihargai. Tetapi di balik yang hadir, ada bayang-bayang yang jauh lebih banyak: mereka yang tidak hadir karena telah tiada, mereka yang tidak pernah diundang, dan mereka yang bekerja tanpa sempat melihat hasil akhirnya. Bayang-bayang itu adalah para pekerja rodi yang membangun gedung-gedung kolonial tanpa upah, para petani yang tanamannya diambil tanpa harga yang adil, para kuli yang jatuh dari ketinggian

dan tidak pernah kembali ke rumahnya. Kepada mereka, tidak ada satu pun ucapan terima kasih yang pernah disampaikan secara resmi. Mereka mati tanpa nama, tanpa penghargaan, dan tanpa kesadaran bahwa mereka telah berjasa. Di sinilah letak luka yang lebih dalam: bangsa ini terlambat mengucapkan terima kasih, dan keterlambatan itu bukan sekadar soal waktu, melainkan soal ketidakmauan untuk mengakui jasa orang kecil.

Mengapa kita begitu sering terlambat mengucapkan terima kasih? Salah satu sebabnya adalah karena kita baru menyadari nilai sesuatu setelah ia hilang. Selama tukang sapu masih bekerja, kita menganggapnya bagian dari pemandangan biasa; selama kuli bangunan masih mengangkat batu, kita menganggapnya sekadar orang yang sedang mencari nafkah. Tetapi ketika mereka berhenti, ketika jalanan mulai kotor atau bangunan mulai reyot, barulah kita sadar bahwa kehadiran mereka penting. Kesadaran yang datang belakangan ini memang manusiawi, tetapi ia juga menunjukkan bahwa kita jarang melibatkan hati dalam memandang kerja orang lain. Kita sibuk dengan urusan sendiri, dengan kemajuan yang ingin kita capai, dan dengan penampilan yang ingin kita jaga, sehingga lupa bahwa di belakang kita ada orang-orang yang menopang setiap langkah. Ucapan terima kasih yang terlambat, dengan demikian, bukanlah kesalahan kecil; ia adalah cermin dari cara pandang yang menempatkan orang kecil di luar perhatian sampai mereka tidak ada lagi.

Namun, keterlambatan itu tidak boleh membuat kita berhenti. Justru karena sudah terlambat, kita harus segera mengucapkannya sekarang, sebelum ia menjadi lebih terlambat lagi. Setiap hari kita masih memiliki kesempatan untuk berterima kasih kepada mereka yang hadir: kepada tukang sapu yang lewat di depan rumah, kepada petani yang menjual hasil buminya di pasar, kepada kuli bangunan yang sedang membangun tetangga kita, kepada Linmas yang menjaga pos ronda. Ucapan itu mungkin tidak akan mengubah nasib mereka secara langsung, tetapi ia mengubah cara kita memandang mereka, dan pada gilirannya mengubah cara kita memperlakukan mereka. Orang yang terbiasa berterima kasih akan sulit menindas; orang yang terbiasa menghargai akan sulit merendahkan. Maka, ucapan terima kasih adalah latihan kecil yang membentuk kepekaan besar: kepekaan untuk melihat, untuk mengakui, dan untuk berlaku adil.

Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, ucapan terima kasih adalah pemulihan hubungan antara pusat dan penjuru. Pusat yang bersyukur akan lebih mudah menjaga keseimbangan, karena ia sadar bahwa dirinya tidak berdiri sendirian. Ia sadar bahwa tanah yang dipijaknya adalah hasil kerja banyak orang, air yang diminumnya adalah hasil pengorbanan banyak tangan, udara yang dihirupnya adalah ruang yang dijaga oleh banyak jiwa, dan matahari yang menyinarinya adalah berkah yang harus dibagi. Sebaliknya, pusat yang tidak pernah berterima kasih akan menjadi sombong; ia menganggap semua yang ada di sekelilingnya sebagai sesuatu yang memang seharusnya ada, tanpa perlu diakui. Kesombongan

inilah yang menjadi akar dari penindasan. Maka, berterima kasih adalah cara untuk menundukkan kepala, mengakui keterbatasan, dan memulihkan keseimbangan yang telah lama rusak.

Ucapan terima kasih yang terlambat juga membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar: apa yang harus kita lakukan setelah mengucapkannya? Sebab ucapan tanpa tindakan akan menjadi gema yang hilang. Jika kita benar-benar berterima kasih kepada para pekerja kecil, maka kita harus memperjuangkan hak-hak mereka: upah yang layak, jaminan sosial, perlindungan kerja, dan penghormatan atas martabat mereka. Jika kita benar-benar berterima kasih kepada para pekerja rodi yang telah tiada, maka kita harus memastikan bahwa pembangunan hari ini tidak mengulangi kesalahan yang sama: tidak ada lagi kerja paksa, tidak ada lagi upah yang tidak dibayar, tidak ada lagi nyawa yang dianggap murah. Ucapan terima kasih, dengan demikian, bukanlah titik akhir, melainkan titik awal untuk bertindak. Ia adalah pengakuan yang harus diikuti oleh perubahan, dan hanya dengan perubahan itulah ucapan itu menjadi tulus.

Kita juga perlu belajar untuk tidak menunggu momen besar untuk berterima kasih. Penghormatan tidak selalu harus diucapkan di atas panggung dengan tepuk tangan meriah. Ia bisa dimulai dari hal-hal kecil: menyapa tukang sapu dengan ramah, membayar kuli bangunan tepat waktu, memberi tempat duduk kepada petani tua di dalam bus, atau sekadar tidak memandang rendah orang yang sedang bekerja. Tindakan-tindakan kecil ini mungkin tampak sepele, tetapi di dalamnya terkandung pengakuan yang dalam: bahwa orang lain adalah manusia, bahwa kerjanya bernilai, dan bahwa hidup kita tidak akan utuh tanpa mereka. Dalam kehidupan sehari-hari yang sering kali sibuk dan keras, tindakan kecil semacam ini adalah jalan untuk merawat kemanusiaan kita bersama.

Pada akhir refleksi ini, kita diingatkan bahwa ucapan terima kasih tidak boleh lagi ditunda untuk hal-hal yang penting. Terutama kepada mereka yang selama ini bekerja dalam sunyi dan terlupakan, ucapan itu harus disampaikan selagi mereka masih bisa mendengarnya, selagi tangan mereka masih bisa merasakan jabat terima kasih, selagi mata mereka masih bisa melihat bahwa mereka dihargai. Sebab ada penyesalan yang tidak akan pernah bisa ditebus, yaitu penyesalan karena tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah berjasa. KDM telah memberikan contoh dengan menyebut para pekerja kecil dalam pidatonya. Kini kita semua harus meneruskan: di rumah, di jalan, di tempat kerja, dan di mana pun kita berada. Sebab bangsa ini akan lebih bermartabat bukan ketika ia banyak memiliki gedung megah, tetapi ketika ia tidak pernah lupa berterima kasih kepada mereka yang membangunnya.

BAGIAN ENAM
PERTANIAN HIJAU DAN KEDAULATAN PANGAN

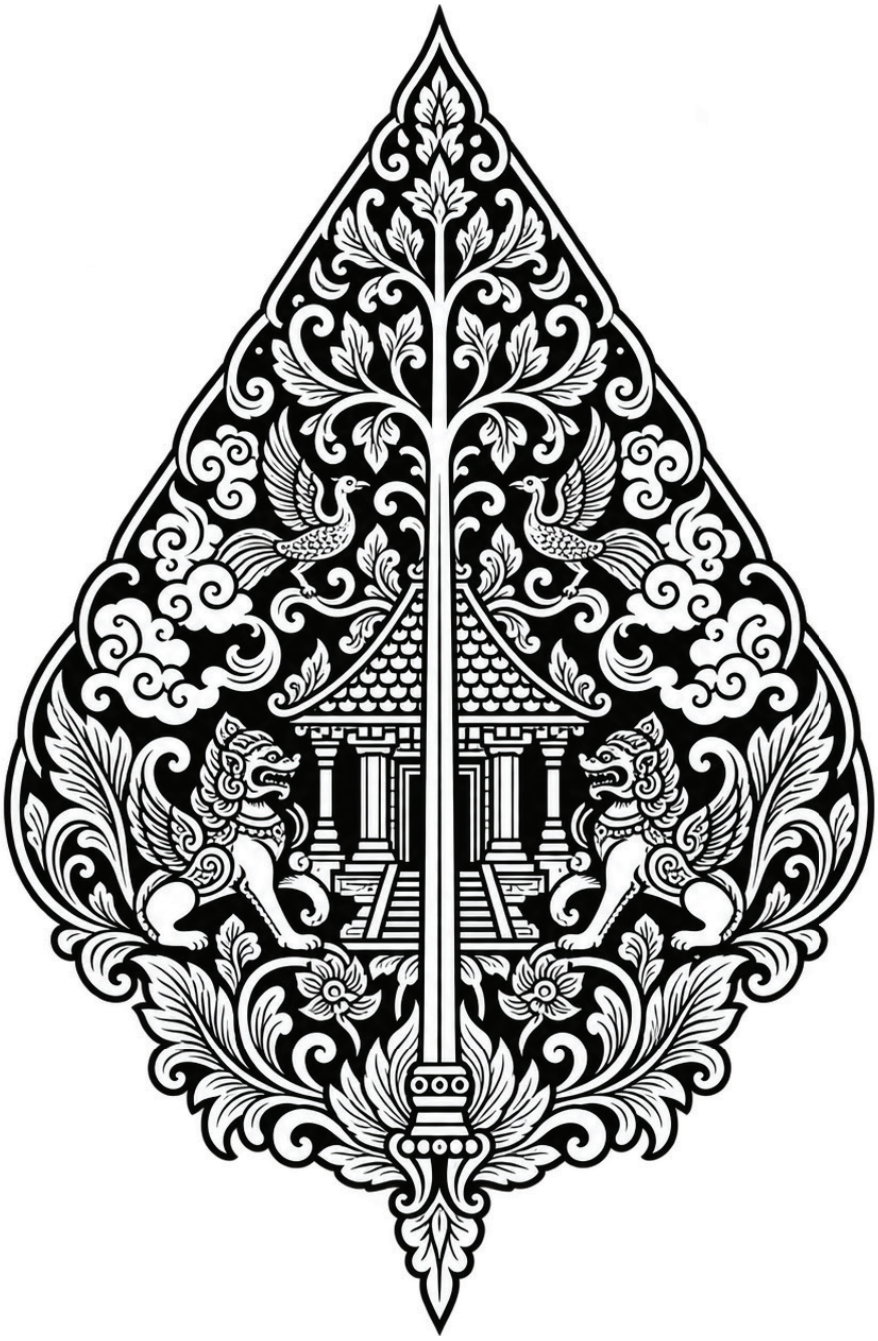

BAB 11
PERTANIAN ORGANIK SEBAGAI JALAN KEMANDIRIAN

Di balik setiap butir nasi yang kita makan, tersembunyi sebuah pertanyaan besar yang jarang kita ajukan: dari tanah seperti apakah padi itu tumbuh? Kita menikmati sayur, buah, dan beras tanpa pernah memikirkan perjalanan panjangnya—dari sebutir benih yang jatuh ke tanah, melawan hama, disuburkan oleh pupuk, dipanen oleh tangan-tangan petani, hingga sampai ke meja makan kita. Dalam kesibukan hidup yang serba cepat, pangan sering kali hanya dipandang sebagai barang dagangan yang bisa dibeli selama uang tersedia. Kita lupa bahwa pangan adalah perpanjangan dari tanah, air, udara, dan matahari; bahwa setiap makanan adalah potongan alam yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka, cara kita memperlakukan tanah sebenarnya adalah cara kita memperlakukan diri sendiri. Jika tanah diracuni oleh zat-zat kimia, maka racun itu akan kembali kepada kita melalui makanan. Jika tanah dimuliakan, maka kemuliaan itu pun akan sampai ke tubuh dan jiwa kita.

Pertanian organik adalah cara untuk mengingat kembali hubungan yang terlupakan itu. Ia bukan sekadar teknik bercocok tanam yang menghindari pestisida dan pupuk kimia, melainkan sebuah sikap hidup yang menghormati keseimbangan alam. Dalam pertanian organik, tanah diperlakukan sebagai makhluk hidup yang harus dirawat, bukan sebagai benda mati yang boleh dipaksa berproduksi terus-menerus. Air dijaga agar tetap bersih, udara dibiarkan mengalir, dan sinar matahari dimanfaatkan tanpa merusak. Petani organik belajar membaca musim, memahami jenis tanah, memelihara mikroorganisme, dan menanam secara tumpang sari agar alam bekerja sama dengannya, bukan melawannya. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, pertanian organik adalah wujud nyata dari posisi manusia sebagai pusat yang menjaga keseimbangan empat unsur: tanah, air, udara, dan matahari. Manusia tidak mengeksploitasi, tetapi merawat; tidak memaksa, tetapi mendampingi.

KDM menyebut pertanian organik sebagai arah yang harus dituju oleh Jawa Barat. Ia tidak berbicara tentangnya sebagai pilihan gaya hidup yang eksklusif, melainkan sebagai jalan kemandirian bagi rakyat dan penyelamatan bagi lingkungan. Menurutnya, pertanian yang terus-menerus menggunakan pestisida dan pupuk kimia tidak lagi bisa masuk ke pasar dunia, dan lebih penting lagi, tidak bisa membuat

petani untung. Kalimat ini mungkin terdengar mengejutkan, karena selama ini kita mengira bahwa pertanian kimiawi adalah cara paling modern untuk meningkatkan hasil. Tetapi KDM justru menunjukkan kebalikannya: bahwa ketergantungan pada zat kimia telah membuat kita terjebak dalam lingkaran yang merugikan—tanah rusak, hasil menurun, biaya naik, dan produk ditolak pasar. Dalam situasi seperti ini, pertanian organik bukanlah romantisme masa lalu, melainkan pilihan yang paling rasional untuk menyelamatkan masa depan.

Bab ini akan membahas tiga hal utama. Pertama, kita akan menelusuri kritik terhadap pestisida dan pupuk kimia, tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga dari sisi ekonomi, ekologi, dan kedaulatan petani. Kita akan melihat bagaimana zat-zat kimia itu telah mengubah tanah menjadi gurun yang tandus, mengubah petani menjadi buruh di lahan sendiri, dan mengubah pangan menjadi barang yang sarat risiko. Kedua, kita akan merenungkan kenyataan bahwa negara-negara maju yang dulu mendorong penggunaan pestisida kini justru menolak produk pertanian yang berpestisida. Ini adalah ironi sejarah yang harus kita baca dengan jernih: mereka menikmati kemajuan dengan menjual bahan kimia kepada kita, lalu mengubah standar setelah mereka cukup kaya dan sadar akan bahayanya. Ketika kita masih sibuk menyemprot, mereka sudah pindah ke pangan organik. Ketiga, kita akan melihat gagasan KDM bahwa Dinas Pertanian harus bekerja sepetak demi sepetak, sebagai pendekatan yang sabar, realistis, dan berakar pada pengalaman petani. Perubahan besar tidak dimulai dari proyek besar, melainkan dari langkah-langkah kecil yang konsisten.

Penting untuk ditekankan bahwa pertanian organik bukanlah pelarian ke masa lalu. Ia adalah masa depan yang lebih cerdas, karena ia memanfaatkan ilmu pengetahuan modern tentang tanah, mikroba, dan ekosistem, tanpa mengulangi kesalahan industri kimia. Pertanian organik tidak menolak teknologi; ia menolak ketergantungan yang merusak. Ia juga tidak menolak peningkatan hasil; justru dalam jangka panjang ia menjaga kesuburan tanah sehingga hasilnya berkelanjutan. Bedanya, pertanian organik memandang hasil bukan hanya dari kuantitas, tetapi juga dari kualitas: pangan yang bersih, sehat, dan bernutrisi. Dalam dunia yang semakin sadar akan bahaya bahan kimia, pangan organik justru memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Maka, pertanian organik bukan hanya jalan kemandirian ekologis, tetapi juga jalan kemandirian ekonomi bagi petani.

Bab ini juga akan mengingatkan kita bahwa kedaulatan pangan adalah bagian dari kemerdekaan. Bangsa yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan selalu berada dalam ketergantungan, sebagaimana orang yang tidak punya tanah akan selalu bergantung pada pemilik tanah. Kedaulatan pangan tidak hanya berarti cukup beras, tetapi juga berarti rakyat punya kendali atas apa yang mereka tanam, apa yang mereka makan, dan bagaimana tanah mereka dikelola. Ketika petani diikat oleh ketergantungan pada benih impor, pupuk impor, dan pestisida

impor, maka mereka tidak merdeka, meskipun tanahnya sendiri berada di negeri merdeka. Pertanian organik, dengan menggunakan pupuk kompos lokal, benih lokal, dan pestisida alami, adalah upaya untuk merebut kembali kedaulatan itu. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, ini adalah pemulihan keseimbangan antara tanah, air, udara, matahari, dan manusia sebagai pusat yang berdaulat.

Dengan kerangka itu, bab ini akan menjadi ajakan untuk memandang pertanian tidak hanya sebagai urusan petani, tetapi sebagai urusan kita semua. Setiap kali kita memilih makanan di pasar, kita sedang memilih cara bertani. Setiap kali kita membeli beras, sayur, atau buah, kita sedang memberi suara kepada tanah. Maka, tidak ada alasan untuk berkata bahwa pertanian bukan urusan kita. Pertanian adalah urusan semua orang, karena ia adalah sumber hidup kita. KDM telah membuka mata kita dengan menempatkan pertanian organik sebagai bagian dari visi kemerdekaan. Tugas kita adalah melanjutkan kesadaran itu: belajar menghargai tanah, mendukung petani kecil, dan memilih pangan yang tidak hanya sehat untuk tubuh, tetapi juga sehat untuk bumi. Sebab pada akhirnya, tanah yang kita rawat akan merawat kita kembali, dan tanah yang kita rusak akan merusak kita pula.

Kritik terhadap Pestisida dan Pupuk Kimia

Pestisida dan pupuk kimia lahir dari sebuah janji besar: bahwa tanah bisa dipaksa menghasilkan lebih banyak, lebih cepat, dan lebih seragam. Janji itu datang pada masa ketika dunia dicekam kebutuhan pangan yang meningkat, dan ilmu pertanian modern menawarkan jalan pintas yang tampak cemerlang. Dalam beberapa dekade, hamparan sawah dan ladang di seluruh dunia berganti menjadi ajang percobaan kimiawi: urea ditebar, pestisida disemprot, herbisida disebar, dan tanah dipaksa bekerja melampaui kemampuannya. Hasilnya memang tampak pada awalnya: produksi naik, hama berkurang, dan panen tampak melimpah. Tetapi di balik kenaikan itu, tersembunyi biaya yang tidak dihitung dengan jujur: tanah kehilangan kesuburannya, air tercemar, serangga dan mikroorganisme yang berguna ikut mati, dan manusia yang mengonsumsi hasilnya mulai menanggung akibat yang tidak ringan. Kritik terhadap pestisida dan pupuk kimia bukanlah kritik yang lahir dari romantisme masa lalu, melainkan dari kesadaran bahwa janji itu telah mengkhianati mereka yang paling mempercayainya, yaitu para petani dan konsumen.

Tanah adalah korban pertama dari pertanian kimiawi. Dalam ekosistem yang sehat, tanah adalah makhluk hidup yang dihuni oleh jutaan mikroorganisme, cacing, jamur, dan bakteri yang bekerja sama menjaga kesuburan. Mereka mengurai sisa-sisa organik, mengikat nitrogen, dan membuat unsur hara tersedia bagi tanaman. Tetapi ketika pupuk kimia ditebar secara berlebihan, keseimbangan itu

rusak. Mikroorganisme mati, struktur tanah menjadi keras, dan tanah kehilangan kemampuannya untuk menyimpan air. Pestisida, di sisi lain, tidak hanya membunuh hama sasaran, tetapi juga serangga-serangga yang berguna, termasuk lebah dan predator alami hama. Akibatnya, tanah yang dulu subur berubah menjadi lahan mati yang hanya bisa berproduksi jika terus-menerus disuntik bahan kimia. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, ini adalah pembunuhan terhadap unsur tanah: tanah tidak lagi dimuliakan, tetapi dipaksa dan diracuni. Ketika tanah mati, manusia yang bergantung padanya pun perlahan ikut melemah.

Air juga menjadi korban. Residu pupuk dan pestisida meresap ke dalam tanah dan mencemari air tanah, sungai, danau, dan akhirnya laut. Nitrat dari pupuk kimia yang berlebihan mengalir ke sungai dan menyebabkan *eutrofikasi*, yaitu pertumbuhan ganggang yang tidak terkendali yang menghabiskan oksigen dan membunuh ikan-ikan. Sementara itu, pestisida yang terbawa air mengancam kesehatan manusia yang menggunakan air tersebut untuk minum, memasak, dan mandi. Di banyak kawasan pertanian, air sumur penduduk telah tercemar residu kimia yang melebihi ambang aman. Ini berarti bahwa praktik pertanian yang salah tidak hanya merusak lahan, tetapi juga meracuni sumber kehidupan masyarakat luas. Dalam perspektif *Papat Kalima Pancer*, air yang seharusnya menjadi pembawa kehidupan telah diubah menjadi pembawa racun. Ketika air tercemar, keseimbangan hidup goyah, karena tidak ada satu pun makhluk yang bisa bertahan tanpa air bersih.

Kesehatan manusia adalah korban berikutnya. Petani yang menyemprot pestisida tanpa perlindungan memadai terpapar langsung oleh zat-zat beracun yang dapat merusak saraf, mengganggu hormon, dan memicu penyakit kronis. Konsumen yang mengonsumsi sayur dan buah dengan residu pestisida juga menanggung risiko dalam jangka panjang, meskipun dalam dosis kecil sekalipun. Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan, karena tubuh mereka masih berkembang dan sistem detoksifikasinya belum sempurna. Penelitian-penelitian epidemiologi telah mengaitkan paparan pestisida dengan gangguan perkembangan otak, gangguan endokrin, dan peningkatan risiko beberapa jenis kanker (Carson, 1962; Roberts & Karr, 2012). Maka, kritik terhadap pestisida bukanlah sekadar soal rasa atau gaya hidup, melainkan soal keselamatan publik. KDM menyentuh hal ini ketika ia menghubungkan pertanian organik dengan kualitas kesehatan masyarakat: bahwa kesehatan tidak boleh dimulai dari rumah sakit, tetapi dari tanah yang menumbuhkan pangan.

Pupuk kimia juga menciptakan ketergantungan yang dalam. Petani yang terbiasa memakainya akan sulit melepaskan diri, karena tanahnya telah kehilangan kesuburan alami dan hanya bisa berproduksi jika terus diberi pupuk buatan. Akibatnya, petani menjadi terikat pada pabrik-pabrik pupuk dan pestisida, sementara harga bahan-bahan kimia itu terus naik dan menggerus keuntungan mereka. Ketergantungan ini adalah bentuk penjajahan baru yang bekerja melalui sistem pertanian: petani

tidak lagi mandiri, tetapi terikat pada rantai pasok yang dikuasai oleh segelintir perusahaan besar. Dalam banyak kasus, petani harus berutang untuk membeli pupuk dan pestisida, lalu hasil panennya tidak cukup untuk membayar utang itu. Lingkaran ini menjerumuskan mereka ke dalam kemiskinan yang semakin dalam. KDM menyinggung hal ini ketika ia berkata bahwa pertanian kimiawi "tidak bisa lagi membuat untung para petani." Ini adalah pengakuan bahwa sistem pertanian yang bergantung pada bahan kimia telah gagal menyejahterakan mereka yang bekerja paling keras.

Lebih jauh, pertanian kimiawi juga merusak keanekaragaman hayati. Penggunaan pestisida secara luas membunuh serangga-serangga yang menjadi penyerbuk alami, seperti lebah dan kupu-kupu. Padahal, penyerbukan adalah proses yang tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh teknologi. Jika populasi penyerbuk menurun, produksi pangan akan terancam secara global. Selain itu, praktik monokultur yang didorong oleh pertanian modern membuat lahan pertanian kehilangan keragaman tanaman. Padahal, keragaman adalah benteng alami melawan hama dan penyakit. Ketika satu jenis tanaman ditanam terus-menerus dalam skala besar, hama dan penyakit akan lebih mudah menyebar, sehingga petani semakin bergantung pada pestisida untuk menanggulanginya. Ini adalah lingkaran setan yang lahir dari cara pandang yang menyederhanakan alam secara berlebihan.

Kritik terhadap pestisida dan pupuk kimia pada akhirnya adalah kritik terhadap cara berpikir yang menempatkan manusia di luar alam. Selama kita memandang tanah sebagai benda mati yang bisa dipaksa, air sebagai saluran yang bisa dicemari, dan serangga sebagai hama yang harus dimusnahkan, kita akan terus berada dalam jerat pertanian kimiawi. Tetapi jika kita bersedia memandang alam sebagai mitra yang harus dihormati, maka kita akan mencari cara-cara bertani yang selaras dengan hukum-hukumnya. Di sinilah pertanian organik menemukan tempatnya: bukan sekadar teknik, melainkan perubahan cara pandang. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, pertanian organik adalah upaya untuk memulihkan keseimbangan empat unsur—tanah, air, udara, dan matahari—dengan manusia sebagai penjaga. Tanah dipulihkan, air dijaga, udara dibersihkan, dan matahari dimanfaatkan tanpa merusak. Ini bukan kembali ke masa lalu, melainkan melangkah ke depan dengan kearifan yang lebih dalam.

Kita juga perlu memahami bahwa transisi dari pertanian kimiawi ke pertanian organik bukanlah perkara mudah. Banyak petani yang telah terbiasa dengan cara lama akan mengalami penurunan hasil pada masa-masa awal, dan itu bisa membuat mereka ragu untuk melanjutkan. Karena itu, kritik terhadap pestisida tidak boleh berhenti pada kecaman; ia harus disertai dengan dukungan nyata: pendampingan teknis, akses pasar, subsidi pupuk organik, dan kebijakan yang berpihak. Petani tidak bisa dibiarkan berjalan sendirian. Negara, lembaga penelitian, dan masyarakat harus ikut menanggung risiko transisi itu. KDM menyinggung hal ini ketika ia

mengajak Dinas Pertanian bekerja sepetak demi sepetak, membangun perubahan secara bertahap dan sabar. Kesabaran itu penting, karena perubahan besar yang dipaksakan sekaligus sering kali justru melahirkan kegagalan dan kekecewaan.

Dengan semua argumen itu, kritik terhadap pestisida dan pupuk kimia bukanlah seruan untuk kembali ke zaman bercocok tanam yang serba sulit. Ia adalah panggilan untuk membangun pertanian yang lebih cerdas, lebih selaras, dan lebih mandiri. Pertanian yang tidak meracuni tanah dan air, tidak memperbudak petani pada perusahaan kimia, dan tidak mengorbankan kesehatan konsumen demi keuntungan sesaat. Pertanian semacam ini mungkin tidak selalu tampak gemilang dalam angka produksi jangka pendek, tetapi ia akan bertahan dalam jangka panjang, karena ia dibangun di atas fondasi yang sehat: tanah yang hidup, air yang bersih, udara yang segar, dan matahari yang tetap bersinar. Inilah jalan kedaulatan pangan yang sejati, dan inilah yang dimaksud KDM ketika ia berbicara tentang pertanian organik sebagai bagian dari upaya memerdekakan rakyat.

Negara Maju Menolak Produk Berpestisida Mengapa Kita Masih Memakainya?

Dalam percakapan global tentang pangan, terjadi sebuah ironi yang jarang kita sadari. Negara-negara maju yang dulu mempelopori pertanian kimiawi, yang membangun pabrik-pabrik pestisida raksasa, dan yang mengirim para ahli untuk meyakinkan dunia bahwa pestisida adalah penyelamat umat manusia, kini justru menjadi pihak yang paling ketat menolak produk pertanian yang mengandung residu pestisida. Uni Eropa, misalnya, telah menerapkan batas maksimum residu yang sangat rendah, menolak masuknya banyak komoditas dari negara berkembang yang tidak memenuhi standar, dan mendorong pertanian organik melalui subsidi besar-besaran. Amerika Serikat, meskipun lebih longgar dibanding Eropa, juga memperketat izin pestisida tertentu dan meningkatkan pengawasan terhadap pangan impor. Pertanyaan yang menggelitik pun muncul: mengapa negara-negara yang dulu menjual bahan kimia itu kepada kita kini menolak produk yang menggunakan bahan kimia itu? Mengapa kita masih memakainya, sementara mereka telah melangkah ke arah yang berlawanan?

Jawabannya terletak pada perbedaan posisi dalam rantai kekuasaan global. Negara maju memiliki modal besar, teknologi maju, dan pasar yang kuat. Ketika mereka mendorong pertanian kimiawi, mereka sedang membangun industri yang menguntungkan mereka: pabrik pupuk, pabrik pestisida, dan perusahaan benih mencatat keuntungan berlipat. Negara-negara berkembang menjadi pasar yang sangat besar, karena petani kecil di negeri-negeri itu tidak punya akses terhadap teknologi alternatif. Setelah bertahun-tahun menikmati keuntungan, negara-negara maju mulai menyadari dampak buruk pestisida terhadap kesehatan dan lingkungan. Mereka pun berbalik arah: mengeluarkan regulasi ketat, menyubsidi

pertanian organik, dan menuntut produk bersih dari para pemasoknya. Namun, alih-alih membantu negara berkembang untuk ikut beralih, mereka justru meninggalkan kita di tengah jalan, masih memegang kaleng pestisida yang sama yang mereka jual, sambil menutup pintu pasar bagi produk yang kena semprotannya. Kita ditinggalkan dalam kebingungan, tetap memakai bahan kimia karena itulah yang kita tahu, sementara mereka menikmati pangan bersih di atas meja mereka.

KDM menyentuh ironi ini dengan cukup tajam: "Selama cara berpikir kita meletakkan diri pada orang lain untuk meraih kemajuan, selama metodologi pembangunan kita diletakkan terus-menerus pada keinginan orang lain, maka percayalah kita tidak akan pernah mencapai kemerdekaan yang dicita-citakan." Kalimat ini adalah cermin bagi bangsa yang selalu mengejar standar orang lain, tanpa pernah berani menetapkan standar sendiri. Ketika kita masih sibuk menyesuaikan diri dengan permintaan pasar global yang lama, pasar global itu telah bergerak ke arah yang baru. Ketika kita masih menganggap pestisida sebagai tanda modernitas, negara maju telah menganggapnya sebagai racun yang harus dijauhi. Kita selalu terlambat, bukan karena kita bodoh, tetapi karena kita tidak pernah berdaulat dalam menentukan arah. Kita menunggu perintah dari luar, alih-alih mendengarkan kebijaksanaan dari dalam negeri sendiri.

Mengapa kita masih memakai pestisida? Ada beberapa alasan yang saling berkaitan. Pertama, ketergantungan telah terlanjur mendarah daging. Para petani kita telah puluhan tahun diajari bahwa pestisida adalah satu-satunya cara untuk mengendalikan hama dan meningkatkan hasil. Ilmu yang mereka terima dari penyuluh, iklan, dan kebiasaan turun-temurun telah membentuk keyakinan yang sulit diubah. Kedua, insentif ekonomi jangka pendek lebih kuat daripada pertimbangan jangka panjang. Petani kecil hidup dalam tekanan untuk memenuhi kebutuhan hari ini, bukan untuk memikirkan kesuburan tanah sepuluh tahun mendatang. Pestisida menawarkan hasil cepat, sementara pertanian organik menuntut kesabaran yang sering kali tidak terjangkau oleh petani yang hidup pas-pasan. Ketiga, kebijakan pertanian kita masih banyak yang berpihak pada pendekatan kimiawi, misalnya melalui subsidi pupuk kimia dan lemahnya dukungan bagi pertanian organik. Keempat, pengetahuan tentang alternatif masih sangat terbatas; banyak petani tidak tahu cara membuat kompos yang baik, tidak tahu cara memanfaatkan musuh alami hama, dan tidak punya akses pasar untuk produk organik.

Namun, alasan-alasan itu tidak boleh menjadi pembenaran untuk berdiam diri. Justru karena kita tahu mengapa kita masih terjerat, kita bisa merancang jalan keluar yang masuk akal. Peralihan dari pertanian kimiawi ke organik memang tidak bisa dilakukan dalam semalam, tetapi bisa dimulai dari langkah-langkah kecil: memberikan pelatihan intensif kepada petani, menyediakan akses pupuk organik yang murah, menciptakan pasar bagi produk organik, dan mengubah kebijakan subsidi secara bertahap. Pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi

tani harus bekerja sama untuk membangun ekosistem pertanian yang sehat. KDM menyinggung hal ini dengan mengajak Dinas Pertanian bekerja sepetak demi sepetak. Ini adalah pendekatan yang bijak: tidak memaksa, tetapi membuktikan. Setiap petak yang berhasil diubah menjadi organik adalah bukti bahwa perubahan itu mungkin, dan dari bukti-bukti kecil itulah keyakinan akan tumbuh.

Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, pertanyaan "mengapa kita masih memakainya?" adalah pertanyaan tentang keseimbangan yang hilang. Ketika tanah, air, udara, dan matahari dikuasai oleh logika luar yang tidak berpihak pada kelestarian, maka manusia sebagai pusat kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kita menjadi pengikut, bukan pengambil keputusan. Kita menjadi konsumen dari teknologi yang ditentukan orang lain, dan pada saat yang sama menjadi korban dari teknologi itu. Untuk keluar dari jerat ini, kita harus merebut kembali posisi sebagai pusat yang berdaulat: pusat yang berani menetapkan standar sendiri, yang tidak mudah terpikat oleh janji-janji cepat, dan yang sanggup menjaga keseimbangan antara kebutuhan hari ini dan keselamatan hari esok. Itu berarti kita harus berani berkata tidak pada pestisida, bukan karena orang lain menyuruh, tetapi karena kita sendiri memahami bahayanya dan menginginkan yang lebih baik bagi tanah dan rakyat kita.

Penting juga untuk diingat bahwa pangan organik bukan hanya untuk pasar ekspor, tetapi terutama untuk rakyat kita sendiri. Selama ini, banyak produk organik Indonesia justru dijual ke luar negeri, sementara rakyat dalam negeri mengonsumsi pangan yang penuh residu. Ini adalah ironi yang menyakitkan: kita menanam yang baik untuk orang lain, dan menyimpan yang buruk untuk diri sendiri. Ke depan, kesadaran akan pangan sehat harus ditumbuhkan di dalam negeri. Konsumen dalam negeri harus belajar memilih pangan yang bersih, bukan hanya murah. Petani organik harus diberi insentif agar mereka bisa menjual produknya dengan harga yang adil di pasar lokal. Sekolah-sekolah harus mengajarkan anak-anak tentang pentingnya tanah yang sehat dan makanan yang bersih. Semua ini adalah bagian dari membangun kedaulatan pangan yang sejati: tidak bergantung pada pasar global, tetapi berakar pada kebutuhan dan kebijaksanaan lokal.

Negara-negara maju telah menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin. Mereka tidak berbalik ke organik dalam semalam; mereka melaluinya lewat regulasi, pendidikan, subsidi, dan riset yang panjang. Mereka juga tidak segan menolak produk yang tidak memenuhi standar, meskipun itu merugikan negara lain. Kita bisa belajar dari mereka tanpa harus menjadi mereka: belajar tentang pentingnya regulasi yang tegas, tentang pentingnya riset pertanian organik, tentang pentingnya melindungi petani kecil selama masa transisi, dan tentang pentingnya menempatkan kesehatan rakyat di atas keuntungan industri. Tetapi yang lebih penting dari belajar dari mereka adalah belajar dari diri sendiri: dari kearifan lokal yang telah lama mengenal pertanian tanpa pestisida, dari nenek

moyang yang tidak meracuni tanahnya, dan dari filosofi *Papat Kalima Pancer* yang mengajarkan bahwa tanah yang dimuliakan akan melahirkan manusia yang mulia. Kita tidak perlu menunggu negara maju menyuruh kita; kita bisa mulai dari kebijaksanaan yang sudah ada di tanah sendiri.

Akhirnya, pertanyaan "mengapa kita masih memakainya?" harus dijawab dengan sebuah tekad: bahwa kita tidak akan selamanya menjadi pengikut. Ada saatnya kita harus berhenti mengejar standar orang lain dan mulai menetapkan standar sendiri. Standar itu tidak harus sama dengan standar Eropa atau Amerika; ia harus lahir dari kesadaran kita sendiri tentang apa yang baik bagi tanah, petani, dan rakyat Indonesia. Dalam hal ini, pertanian organik bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan moral dan spiritual. Ia adalah wujud dari penghormatan kepada tanah yang telah memberi hidup, kepada air yang telah mengalirkan rezeki, kepada udara yang telah memberi napas, dan kepada matahari yang telah menyinari hari-hari kita. Jika kita sanggup menghormati semua itu, maka kita tidak lagi bertanya mengapa negara maju menolak pestisida; kita justru akan bertanya, mengapa kita pernah memakainya begitu lama.

Dinas Pertanian Bekerja Sepetak demi Sepetak

Perubahan besar sering kali dibayangkan sebagai peristiwa yang datang sekaligus: sebuah revolusi yang membalik keadaan dalam semalam, sebuah program raksasa yang mengubah wajah pertanian dalam satu musim. Imajinasi semacam ini memang memikat, tetapi jarang sesuai dengan kenyataan. Sejarah menunjukkan bahwa perubahan yang bertahan justru lahir dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, dari kerja-kerja sunyi yang tidak selalu tampak di permukaan, dan dari kesediaan untuk memulai dari hal yang paling sederhana. Ketika KDM berbicara tentang pertanian organik, ia tidak mengumumkan proyek besar yang akan mengubah semua sawah dalam satu atau dua tahun. Ia justru memilih bahasa yang rendah hati: "Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat bekerja sepetak demi sepetak." Kalimat ini adalah pengakuan bahwa perubahan pertanian tidak bisa dipaksakan dari atas, melainkan harus tumbuh dari bawah, sepetak demi sepetak, sejengkal demi sejengkal, dengan kesabaran yang menyerupai kerja seorang petani.

Pendekatan sepetak demi sepetak adalah pendekatan yang realistis. Pertanian bukanlah mesin yang bisa diganti suku cadangnya dalam semalam; ia adalah sistem hidup yang melibatkan tanah, air, iklim, hama, pengetahuan petani, dan pasar. Mengubah satu unsur saja—misalnya mengganti pupuk kimia dengan pupuk organik—tanpa memahami unsur-unsur lain hanya akan melahirkan kegagalan. Petani yang terbiasa dengan cara lama tidak bisa tiba-tiba disuruh berhenti total, karena hidup mereka bergantung pada hasil panen berikutnya. Mereka

membutuhkan waktu untuk belajar, untuk mencoba, dan untuk percaya. Maka, pendekatan yang bijak adalah memulai dari lahan kecil, membuktikan bahwa cara organik bisa berhasil, lalu memperluasnya secara bertahap. Setiap petak yang berhasil menjadi saksi; setiap panen organik yang baik menjadi guru; setiap petani yang tersenyum menjadi pembawa kabar bagi petani lain. Dalam cara kerja semacam ini, Dinas Pertanian tidak lagi berperan sebagai komandan yang memberi perintah, melainkan sebagai pendamping yang berjalan bersama petani.

Pendekatan ini juga mengajarkan kita tentang makna kesabaran dalam membangun. Di tengah budaya yang serba ingin cepat, kesabaran sering dianggap sebagai kelemahan. Kita ingin hasil segera, ingin perubahan instan, ingin semua selesai hari ini. Tetapi alam tidak bekerja seperti itu. Padi membutuhkan waktu untuk tumbuh; tanah membutuhkan waktu untuk pulih; pengetahuan membutuhkan waktu untuk meresap. Orang yang tidak sabar akan cepat frustrasi ketika hasil organik belum tampak pada musim pertama, lalu kembali ke pestisida demi mengejar hasil. Padahal, tanah yang telah bertahun-tahun diracuni tidak mungkin pulih dalam satu atau dua musim. Ia butuh waktu, dan hanya mereka yang sabar yang akan menuai hasilnya. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, kesabaran adalah bagian dari sikap memuliakan: kita tidak memaksa tanah untuk berubah sesuai keinginan kita, tetapi mendampinginya untuk pulih sesuai kodratnya. Manusia sebagai pusat bukanlah pemaksa, melainkan penjaga yang sabar.

Dinas Pertanian yang bekerja sepetak demi sepetak juga sedang menumbuhkan kembali kepercayaan petani terhadap pemerintah. Selama ini, banyak petani yang skeptis terhadap program-program pertanian yang datang dari atas. Mereka sering kali menjadi korban dari proyek-proyek yang tidak berkelanjutan: benih dibagikan lalu ditinggalkan, pelatihan diadakan lalu tidak ada pendampingan, bantuan diberikan lalu tidak ada kelanjutan. Akibatnya, petani belajar untuk tidak terlalu berharap. Pendekatan sepetak demi sepetak, jika dilakukan dengan serius, bisa memulihkan kepercayaan itu. Petani melihat sendiri bahwa petugas tidak hanya berbicara, tetapi ikut bekerja; tidak hanya memberi perintah, tetapi ikut belajar; tidak hanya datang pada saat seremonial, tetapi setia mendampingi dari musim ke musim. Dari kebersamaan itulah lahir kepercayaan yang lebih kokoh daripada sekadar bantuan dana.

Dalam praktiknya, bekerja sepetak demi sepetak menuntut perencanaan yang teliti. Dinas Pertanian harus memetakan daerah-daerah yang paling siap untuk memulai, memilih petani-petani perintis yang bersedia mencoba, dan menyediakan pendampingan teknis yang memadai. Setiap petak harus dijadikan tempat belajar: di sana dicoba berbagai teknik organik, dicatat hasilnya, dibandingkan dengan cara lama, dan disebarluaskan kepada petani lain. Petani perintis menjadi kader yang akan mengajari tetangganya. Dari satu petak, kemudian menjadi satu kampung; dari satu kampung, kemudian menjadi satu kecamatan; dari satu kecamatan, kemudian

menjadi satu kabupaten. Inilah cara penyebaran yang alami, yang tumbuh dari bukti dan kepercayaan, bukan dari paksaan dan slogan. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, ini adalah pemulihan keseimbangan yang dimulai dari titik-titik kecil, kemudian merambat ke seluruh penjuru.

Kita juga perlu menyadari bahwa transisi menuju pertanian organik bukan hanya tanggung jawab Dinas Pertanian. Ia membutuhkan dukungan dari banyak pihak: dinas kesehatan yang harus mengedukasi masyarakat tentang bahaya residu pestisida, dinas perdagangan yang harus membuka akses pasar bagi produk organik, perguruan tinggi yang harus mengembangkan riset pertanian berkelanjutan, dan media yang harus menyuarakan pentingnya pangan sehat. Semua pihak ini adalah unsur-unsur yang harus seimbang, dan Dinas Pertanian hanyalah salah satu di antaranya. KDM menyebut kerja bersama antara berbagai instansi sebagai kunci untuk mewujudkan masyarakat yang merdeka dan sejahtera. Dalam pertanian organik, kerja bersama itu diwujudkan dalam bentuk sinergi kebijakan, anggaran, pendampingan, dan pasar. Tanpa sinergi itu, petani organik akan berjuang sendirian, dan perjuangan sendirian tidak akan pernah cukup untuk mengubah sistem.

Pendekatan sepetak demi sepetak juga sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam ilmu ekologi. Ekosistem adalah jaring-jaring yang rumit; setiap perubahan kecil bisa menimbulkan akibat yang tidak terduga. Dengan bekerja bertahap, kita bisa mengamati akibat-akibat itu dan menyesuaikan diri sebelum kerusakan meluas. Jika satu petak organik ternyata gagal, kita bisa belajar dari kegagalan itu tanpa harus mengorbankan seluruh lahan. Jika satu teknik berhasil, kita bisa menyebarkannya dengan lebih percaya diri. Prinsip ini sama seperti yang dipakai oleh para petani bijak sejak dulu: mencoba dulu di lahan kecil, baru kemudian memperluas. Kebijaksanaan ini telah lama hidup dalam tradisi agraris Nusantara, dan KDM hanya menghidupkannya kembali dalam bahasa pemerintahan.

Pada akhirnya, bekerja sepetak demi sepetak adalah cara untuk merawat harapan. Harapan yang terlalu besar sering kali mudah patah, karena ia tidak sanggup menanggung beban kenyataan. Tetapi harapan yang tumbuh dari langkah-langkah kecil akan lebih tahan banting, karena ia melihat bukti setiap hari. Petani yang melihat petak organiknya berhasil akan punya harapan yang lebih kokoh daripada petani yang hanya mendengar janji. Masyarakat yang melihat kampungnya berubah sedikit demi sedikit akan lebih percaya daripada yang hanya membaca berita tentang program besar. Dari harapan-harapan kecil itulah terbangun gerakan besar, bukan dari satu peristiwa yang gemerlap, tetapi dari ribuan petak yang diam-diam berubah menjadi lebih sehat. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, inilah keseimbangan yang hidup: tidak ada yang dipaksa, tetapi semuanya tumbuh; tidak ada yang ditinggalkan, tetapi semuanya dirawat. Sebagaimana tanah yang dimuliakan tidak akan pernah berhenti memberi, demikian pula kerja yang dilakukan dengan sabar dan penuh hormat tidak akan pernah sia-sia.

BAB 12
TANAH AIR YANG MENGIKAT DIRI

Dalam kehidupan sehari-hari, kita jarang memikirkan bahwa tanah tempat kita berpijak sebenarnya sedang berbicara kepada kita. Ia berbicara melalui rasa manggis yang manis, melalui renyahnya sayur yang baru dipetik, melalui butir padi yang mengisi piring, dan melalui air yang mengalir jernih dari mata air. Semua itu adalah bahasa tanah, air, udara, dan matahari yang telah saling mengikat sejak awal kehidupan. Masyarakat agraris Nusantara sejak dulu memahami bahasa ini. Mereka tidak sekadar memandang tanah sebagai lahan, air sebagai sarana irigasi, udara sebagai hembusan angin, dan matahari sebagai penerang. Mereka memandang semuanya sebagai jalinan hidup yang saling menghidupi, dan manusia di tengahnya sebagai penjaga yang bertugas menjaga agar jalinan itu tidak putus. Dari kesadaran inilah lahir ungkapan-ungkapan seperti *gemah ripah repeh rapih*, sebuah gambaran tentang masyarakat yang hidup dalam kelimpahan, ketenteraman, dan keteraturan, yang semua bersumber dari tanah yang dirawat dengan cinta.

Bab ini hendak menutup seluruh pembahasan tentang pertanian hijau dan kedaulatan pangan dengan sebuah renungan yang lebih dalam: bahwa tanah, air, udara, dan matahari bukan sekadar unsur alam, melainkan ikatan yang membentuk jati diri manusia dan masyarakat. Apa yang kita tanam, cara kita merawat, dan apa yang kita makan adalah bagian dari ikatan itu. Jika kita memuliakan tanah, maka tanah akan mengikat kita dalam kebaikan: pangan yang lahir darinya menjadi sumber kesehatan, buah-buahan khas yang tumbuh di atasnya menjadi identitas, dan masyarakat yang menikmatinya akan sampai pada keadaan *gemah ripah repeh rapih*. Sebaliknya, jika kita merusak tanah, maka ikatan itu berubah menjadi jerat: pangan yang lahir darinya membawa racun, buah-buahan kehilangan cita rasa dan kejernihan asalnya, dan masyarakat perlahan kehilangan kesehatannya, jati dirinya, dan kedamaiannya. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, inilah makna saling mengikatkan diri: manusia tidak bisa melepaskan diri dari alam, karena setiap butir nasi adalah tanah yang berubah bentuk, setiap teguk air adalah hujan yang kembali, dan setiap helaan napas adalah pertukaran dengan udara di sekelilingnya.

KDM menyentuh kesadaran ini ketika ia berbicara tentang kualitas pangan

yang lahir dari tanah yang dimuliakan. Ia mengingatkan bahwa masyarakat Jawa Barat tidak akan menjadi sehat hanya dengan membangun rumah sakit, tetapi dengan memastikan bahwa setiap hari mereka mengonsumsi air yang berkualitas dan buah-buahan yang bermutu. Kalimat ini sederhana, tetapi mengubah arah perhatian kita: dari hilir ke hulu, dari pengobatan ke pencegahan, dari rumah sakit ke dapur, dari obat ke makanan. Buah-buahan khas Jawa Barat seperti pisang, rambutan, manggis, dan duren disebut bukan sekadar sebagai daftar kekayaan hayati, melainkan sebagai penanda identitas dan sumber kebanggaan. Di dalam buah-buahan itu tersimpan sejarah tanah, iklim, dan budaya yang tidak bisa ditiru oleh negeri lain. Maka, meningkatkan kualitasnya bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal menjaga jati diri sebagai masyarakat agraris yang menghormati tanahnya.

Bab ini akan mengalir dalam tiga bagian. Pertama, kita akan merenungkan kembali gagasan bahwa pangan berkualitas lahir dari tanah yang dimuliakan. Kita akan melihat bahwa kualitas tidak bisa dipisahkan dari cara kita memperlakukan tanah, dan bahwa setiap tindakan merawat tanah adalah tindakan merawat diri sendiri. Kedua, kita akan menelusuri buah-buahan khas Jawa Barat sebagai identitas, bukan hanya sebagai komoditas, melainkan sebagai cermin dari kekayaan rasa, sejarah, dan budaya yang harus dilestarikan. Ketiga, kita akan sampai pada gambaran masyarakat *gemah ripah repeh rapih*, sebuah cita-cita lama yang ternyata masih sangat relevan untuk menjawab kegelisahan zaman sekarang. Masyarakat yang subur, damai, dan tertib tidak lahir dari pembangunan yang serba tergesa, tetapi dari hubungan yang benar dengan tanah, air, udara, dan matahari.

Kita hidup di zaman yang semakin bising oleh janji kemajuan, tetapi semakin jauh dari kesederhanaan tanah. Banyak orang tidak lagi mengenal rasa asli tomat, tidak lagi membedakan manggis yang tumbuh di tanah subur dengan yang dipaksa matang oleh karbitan. Kita lebih percaya pada label dan kemasan daripada pada tangan petani yang merawat. Padahal, di dalam setiap pangan yang tumbuh dari tanah yang dimuliakan, ada energi yang tidak bisa digantikan oleh zat apa pun: energi ketulusan, kesabaran, dan keseimbangan. KDM seakan mengajak kita untuk kembali merasakan energi itu, untuk berhenti sejenak dari kesibukan mengejar hasil, dan mulai memuliakan proses. Sebab dari proses yang benar itulah lahir pangan yang benar, dan dari pangan yang benar itulah lahir manusia yang benar.

Dalam bab ini juga kita akan menegaskan bahwa kedaulatan pangan tidak hanya tentang cukupnya persediaan beras, tetapi tentang kemampuan sebuah masyarakat untuk mengenali dirinya sendiri melalui makanannya. Makanan adalah ingatan kolektif: ia menyimpan cerita tentang asal-usul, tentang musim, tentang tangan-tangan yang menanam dan memanen. Ketika kita kehilangan makanan khas, kita sebenarnya kehilangan bagian dari ingatan kita. Ketika kita mengganti semuanya dengan makanan seragam yang datang dari luar, kita kehilangan kekayaan rasa dan cerita. Maka, menjaga buah-buahan khas dan pangan lokal

adalah bagian dari menjaga jiwa masyarakat. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, ini adalah menjaga unsur tanah agar tetap subur, unsur air agar tetap jernih, unsur udara agar tetap segar, dan unsur matahari agar tetap memberi kehangatan, sehingga manusia di tengahnya tidak kehilangan arah.

Akhirnya, bab ini ingin mengantar kita pada sebuah pemahaman yang menyejukkan: bahwa merawat tanah bukanlah beban, melainkan jalan pulang. Di tengah dunia yang semakin kompleks, ada kebijaksanaan sederhana yang telah menunggu kita di sawah, di kebun, di mata air, dan di bawah sinar matahari pagi. Kebijaksanaan itu tidak menuntut kita untuk menjadi petani, tetapi menuntut kita untuk menghormati mereka yang bertani, memilih makanan yang tidak merusak tanah, dan mengingat bahwa hidup kita bergantung pada ikatan-ikatan yang sering kali tidak terlihat. Dengan cara itu, kita ikut menjaga agar tanah air ini tetap mengikat kita dalam kebaikan, bukan dalam kehancuran. Inilah warisan terbaik yang bisa kita teruskan kepada anak cucu: bukan sekadar tanah yang luas, tetapi tanah yang subur; bukan sekadar air yang banyak, tetapi air yang bersih; bukan sekadar udara yang tersedia, tetapi udara yang sehat; dan bukan sekadar matahari yang terbit, tetapi matahari yang disambut dengan syukur.

Pangan Berkualitas Lahir dari Tanah yang Dimuliakan

Tanah sering kali dibayangkan sebagai hamparan pasif yang hanya perlu diolah, diberi pupuk, dan ditanami. Pandangan seperti ini telah membuat banyak orang memperlakukan tanah sebagai benda mati yang tidak memiliki kehendak, tidak memiliki daya, dan tidak memiliki martabat. Padahal, tanah adalah salah satu ekosistem paling hidup di muka bumi. Di dalam segenggam tanah yang sehat, terdapat miliaran mikroorganisme yang bekerja tanpa henti: bakteri pengikat nitrogen, jamur yang membantu akar menyerap unsur hara, cacing yang menggemburkan struktur, dan serangga-serangga kecil yang menguraikan sisa-sisa organik. Mereka adalah pekerja-pekerja tersembunyi yang membuat tanah menjadi subur, dan kesuburan itu pada gilirannya menentukan mutu dari setiap tanaman yang tumbuh di atasnya. Tanah yang hidup akan melahirkan pangan yang hidup; tanah yang mati, betapapun banyak pupuk kimianya, hanya akan melahirkan pangan yang kosong dari daya.

Dalam kerangka pemikiran seperti ini, "tanah yang dimuliakan" bukanlah metafora kosong. Ia menunjuk pada praktik-praktik nyata yang menghormati kehidupan tanah: memberi kompos, menjaga kelembapan, tidak meracuni dengan pestisida, dan menanam secara beragam agar mikroorganisme tanah tetap seimbang. Ketika tanah diperlakukan demikian, ia membalas dengan hasil

yang melimpah secara kualitas: sayur yang lebih renyah dan bernutrisi, buah yang lebih manis dan beraroma, biji-bijian yang lebih padat dan utuh. Kualitas ini tidak bisa direkayasa dengan cepat; ia tumbuh dari proses yang pelan dan setia, seperti persahabatan yang tidak bisa diburu-buru. KDM menangkap hal ini dengan baik ketika ia berkata bahwa dari tanah-tanah yang dimuliakan akan tumbuh pepohonan yang mulia, sayur-sayuran yang mulia, buah-buahan yang mulia, padi yang mulia, jagung yang mulia, bawang merah dan bawang putih yang mulia. Kata "mulia" di sini bukan penilaian moral, melainkan pengakuan bahwa ada derajat mutu yang hanya bisa lahir dari hubungan yang benar antara manusia dan tanah.

Pangan yang lahir dari tanah yang dimuliakan membawa serta informasi kehidupan yang tidak kasat mata. Ia mengandung unsur hara yang lengkap dan seimbang, tidak hanya karbohidrat atau gula, tetapi juga mineral, vitamin, dan senyawa-senyawa fitokimia yang penting bagi tubuh. Tanaman yang tumbuh di tanah sehat memiliki daya tahan alami terhadap hama dan penyakit, sehingga tidak memerlukan pestisida berlebihan. Akar yang menembus tanah yang gembur dan hidup akan menjangkau lapisan-lapisan yang kaya mineral, membawa unsur-unsur itu naik ke batang, daun, dan buah. Sebaliknya, tanaman yang dipaksa tumbuh di tanah mati yang hanya disuntik urea dan NPK akan tumbuh cepat tetapi rapuh; ia besar, tetapi tidak berisi; ia tampak segar, tetapi mudah busuk. Inilah perbedaan antara pangan yang menghidupkan dan pangan yang sekadar mengenyangkan. Masyarakat yang terbiasa dengan pangan yang dimuliakan akan merasakan perbedaan itu dalam tubuhnya: daya tahan yang lebih baik, pikiran yang lebih jernih, dan perasaan yang lebih tenang.

KDM menghubungkan mutu pangan ini dengan mutu manusia secara langsung: "Kemuliaan itu akan dimakan oleh warganya. Maka warganya menjadi warga yang mulia. Mulia darahnya, mulia detak jantungnya, mulia tatapan matanya, mulia pendengarannya, mulia pengucapannya." Kalimat ini mungkin terdengar puitis, tetapi jika direnungkan, ia mengandung pemahaman yang sangat dalam tentang hubungan antara makanan, tubuh, dan jiwa. Makanan bukan hanya bahan bakar; ia adalah pembentuk. Dari makanan, darah dibentuk; dari darah, organ-organ bekerja; dari kerja organ yang baik, lahirlah suasana hati yang stabil, pikiran yang jernih, dan tutur kata yang terkendali. Orang yang tubuhnya diracuni oleh makanan yang buruk cenderung lebih mudah lelah, lebih mudah marah, dan lebih sulit berpikir jernih. Sebaliknya, orang yang tubuhnya dirawat dengan pangan yang bersih memiliki dasar yang kuat untuk menjadi manusia yang sabar, cerdas, dan berbudi. Maka, memuliakan tanah pada akhirnya adalah memuliakan manusia; dan merusak tanah adalah merusak manusia dengan cara yang lambat tetapi pasti.

Dalam kehidupan modern, kita sering kali memilih makanan berdasarkan harga, kemasan, atau tren, tanpa bertanya dari tanah seperti apa makanan itu berasal. Kita membeli sayur yang tampak mulus tanpa tahu berapa banyak pestisida yang

disemprotkan kepadanya; kita makan buah yang manis tanpa tahu apakah manisnya alami atau hasil rekayasa. Ketidaktahuan ini bukan hanya soal kurangnya informasi, tetapi juga soal putusnya hubungan kita dengan sumber pangan. Sebagian besar dari kita tidak lagi mengenal petani yang menanam makanan kita, tidak pernah melihat tanah tempat padi kita tumbuh, dan tidak pernah menyaksikan betapa besar perjuangan alam untuk menghasilkan sebutir buah. Akibatnya, kita kehilangan rasa hormat kepada tanah, dan bersama itu kita kehilangan kemampuan untuk membedakan mana pangan yang mulia dan mana yang tidak. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, putusnya hubungan ini adalah bentuk ketidakseimbangan: manusia sebagai pusat tidak lagi menyadari bahwa ia terikat pada empat penjuru, dan karena itu ia tidak lagi merasa bertanggung jawab untuk menjaganya.

Untuk memulihkan kesadaran itu, kita tidak harus menjadi petani. Cukup dengan mulai bertanya: dari mana asal makanan ini? Siapa yang menanamnya? Bagaimana cara menanamnya? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini akan membawa kita pada perjumpaan kembali dengan tanah, bahkan jika kita tinggal di tengah kota yang jauh dari sawah. Kita bisa mulai memilih pangan dari petani lokal, mengunjungi pasar-pasar tani, menanam sendiri di pekarangan sempit, atau sekadar menghormati makanan dengan tidak membuangnya sia-sia. Setiap tindakan kecil itu adalah bentuk pengakuan bahwa tanah adalah sumber hidup, dan bahwa pangan yang kita makan adalah hasil dari ikatan yang harus dijaga. Dengan cara itu, kita ikut menjaga agar tanah air ini tetap mengikat kita dalam kebaikan, bukan dalam keterasingan.

Jadi, pangan berkualitas bukanlah hasil dari teknologi canggih semata, melainkan dari hubungan yang benar antara manusia dan tanah. Teknologi bisa membantu, tetapi ia tidak bisa menggantikan kesuburan alami yang lahir dari kesabaran dan penghormatan. Ketika tanah dimuliakan, ia tidak hanya memberi hasil yang melimpah, tetapi juga hasil yang menyembuhkan, menguatkan, dan mengangkat martabat manusia. Ketika manusia memakan pangan yang mulia, ia tidak hanya kenyang, tetapi juga diingatkan bahwa dirinya adalah bagian dari jalinan hidup yang lebih besar. Dalam kesadaran itulah kemerdekaan pangan yang sejati bermula: bukan dari berapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa dalam kita menghormati asal-usulnya. Sebab hanya dengan penghormatan itu, tanah akan terus memberi, air akan terus mengalir, udara akan tetap bersih, dan matahari akan tetap menyinari hari-hari kita dengan berkah yang tidak putus.

Buah-buahan Khas Jawa Barat sebagai Identitas

Di antara semua kekayaan yang tumbuh dari tanah Jawa Barat, buah-buahan khas memiliki tempat yang istimewa. Pisang, rambutan, manggis, dan duren bukan

sekadar nama dalam daftar produk pertanian; mereka adalah penanda identitas yang menghubungkan manusia dengan tanah leluhurnya. Setiap buah menyimpan cerita tentang iklim, tanah, musim, dan cara hidup masyarakat yang telah merawatnya turun-temurun. Rasa manis manggis yang dalam, aroma duren yang tajam, kesegaran rambutan yang merah merekah, dan kelembutan pisang yang mengenyangkan adalah bahasa yang hanya dipahami oleh mereka yang tumbuh di tanah ini. KDM menyebut buah-buahan itu bukan untuk sekadar memperkaya pidato, melainkan untuk mengingatkan bahwa di dalam setiap gigitan buah ada ingatan kolektif yang harus dijaga: ingatan tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana tanah ini telah membentuk rasa dan jiwa kita.

Identitas sebuah masyarakat tidak hanya dibangun oleh bahasa, pakaian, atau upacara adat. Ia juga dibangun oleh makanan, terutama buah-buahan yang tumbuh di sekitar tempat tinggalnya. Dalam banyak kebudayaan, buah-buahan lokal menjadi bagian dari ritus, perayaan, dan kehidupan sehari-hari: pisang hadir dalam sesaji dan selamatan, rambutan mewarnai pasar-pasar saat musim panen, manggis menjadi oleh-oleh yang dibanggakan, dan duren mengundang orang untuk berkumpul dan berbagi. Buah-buahan ini bukan sekadar komoditas ekonomi; mereka adalah perekat sosial yang mempertemukan orang, membuka percakapan, dan menghidupkan rasa kebersamaan. Ketika kita kehilangan buah-buahan khas, kita tidak hanya kehilangan sumber pendapatan petani, tetapi juga kehilangan salah satu benang yang menjahit kebersamaan kita. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, buah-buahan adalah buah dari keseimbangan tanah, air, udara, dan matahari; mereka adalah bukti nyata bahwa ketika unsur-unsur itu dimuliakan, kehidupan akan menjawab dengan manisnya hasil.

Namun, ada sesuatu yang mengusik di zaman sekarang: buah-buahan khas semakin tergeser oleh buah impor yang tampak lebih seragam, lebih besar, dan lebih lama bertahan di rak pasar. Apel dari negeri jauh, anggur dari benua lain, dan jeruk impor membanjiri pasar-pasar kita, sementara rambutan dan manggis sering dianggap buah kampung yang kurang bergengsi. Pergeseran ini bukan hanya soal selera, tetapi juga soal cara pandang yang menilai segala sesuatu dari luar lebih baik daripada yang dari dalam. Kita mengagumi buah impor karena tampilannya yang sempurna, tanpa bertanya dari tanah seperti apa ia tumbuh, berapa lama ia disimpan, dan apa yang hilang dari rasanya selama perjalanan panjangnya. Padahal, buah khas Jawa Barat yang dipetik pagi hari dan dimakan siangnya membawa kesegaran dan energi yang tidak bisa ditandingi oleh buah yang telah berminggu-minggu di kapal dan gudang. KDM menyebut buah-buahan khas Jawa Barat sebagai bagian dari kekayaan yang harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya; ini adalah ajakan untuk berhenti memandang rendah apa yang tumbuh di tanah sendiri.

Memuliakan buah-buahan khas berarti juga memuliakan petani yang menanamnya. Petani duren, misalnya, harus menunggu bertahun-tahun sebelum

pohonnya berbuah; petani manggis harus sabar menghadapi musim yang tidak selalu bersahabat; petani rambutan harus memanjat dan memetik dengan hati-hati agar buahnya tidak rusak. Kerja mereka adalah kerja yang panjang, penuh ketidakpastian, tetapi juga penuh cinta. Ketika kita membeli buah impor, kita memilih untuk tidak melihat kerja-kerja itu. Ketika kita membeli buah lokal, kita sedang mengakui bahwa di balik setiap buah ada tangan yang telah merawat, ada tanah yang telah memberi, dan ada musim yang harus dilewati. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, pilihan membeli buah lokal adalah bagian dari menjaga keseimbangan: kita menjaga petani tetap hidup, menjaga tanah tetap dirawat, dan menjaga agar identitas kita sebagai masyarakat agraris tidak hilang ditelan arus global.

Buah-buahan khas juga memiliki potensi besar untuk menjadi kebanggaan daerah jika dirawat dengan serius. KDM menyinggung pentingnya meningkatkan kualitas buah-buahan khas, bukan sekadar membiarkannya tumbuh apa adanya. Peningkatan kualitas ini bisa dilakukan melalui perbaikan budi daya, pemilihan bibit unggul lokal, pengolahan pascapanen yang baik, dan pengemasan yang menarik. Manggis Jawa Barat, misalnya, sebenarnya sudah dikenal di pasar internasional; tetapi tanpa penanganan yang baik, kualitasnya tidak konsisten dan harganya jatuh. Demikian pula duren, yang memiliki banyak varietas unggul tetapi belum dikelola sebagai identitas daerah. Jika buah-buahan khas ini dirawat dengan standar yang tinggi, mereka tidak hanya akan menjadi sumber pendapatan, tetapi juga duta budaya yang memperkenalkan Jawa Barat kepada dunia. Dalam hal ini, memuliakan buah-buahan khas adalah memuliakan potensi yang telah diberikan oleh tanah, air, udara, dan matahari kepada kita.

Ada juga dimensi spiritual dalam hubungan kita dengan buah-buahan khas. Buah adalah hasil dari kesabaran alam; ia tidak bisa dipaksa, tidak bisa dikejar dengan tergesa. Pohon harus tumbuh dulu, berbunga, lalu berbuah; semuanya mengikuti irama yang telah ditentukan. Dalam dunia yang serba ingin cepat, buah-buahan khas mengajarkan kita untuk menunggu, untuk percaya pada proses, dan untuk mensyukuri apa yang datang pada waktunya. Setiap musim buah adalah pengingat bahwa hidup ini punya musim-musimnya sendiri: ada saat menanam, ada saat memanen, ada saat beristirahat, dan ada saat merayakan. Masyarakat yang masih merayakan musim buah-buahan—berkumpul saat duren matang, saling mengirim rambutan saat panen—adalah masyarakat yang masih hidup dalam kesadaran musim, dan karena itu masih dekat dengan alam. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, kesadaran ini adalah tanda bahwa manusia masih berdiri di pusat keseimbangan, tidak tercerabut oleh ritme mesin yang serba seragam.

Kita juga perlu merenungkan bahwa buah-buahan khas adalah bagian dari pendidikan rasa. Anak-anak yang tumbuh dengan mengenal rasa asli rambutan, duren, dan manggis akan memiliki kepekaan yang berbeda terhadap makanan.

Mereka akan belajar membedakan yang alami dan yang dipaksa, yang segar dan yang lama tersimpan, yang tumbuh dari tanah sendiri dan yang datang dari jauh. Kepekaan ini mungkin tampak sepele, tetapi ia membentuk cara anak memandang dunia: apakah ia akan menjadi pribadi yang menghargai asal-usul, atau pribadi yang hanya mengejar penampilan? Dengan memperkenalkan buah-buahan khas sejak dini, kita sedang menanamkan kecintaan kepada tanah air, bukan melalui hafalan, tetapi melalui pengalaman rasa yang nyata. Ini adalah pendidikan yang tidak bisa digantikan oleh buku pelajaran.

Buah-buahan khas Jawa Barat, pada akhirnya, adalah cermin dari jalinan hidup yang harus terus dijaga. Ketika kita memuliakannya, kita sedang memuliakan tanah yang menumbuhkannya, air yang menyiraminya, udara yang menyapanya, dan matahari yang mematangkannya. Kita juga sedang memuliakan para petani yang merawatnya, para pedagang yang membawanya ke pasar, dan para leluhur yang telah mewariskan pengetahuan tentang cara menanam dan merawatnya. Dalam jalinan itulah identitas kita sebagai masyarakat agraris tersimpan, dan dari jalinan itu pula harapan untuk masa depan yang lebih sehat dan berdaulat bisa tumbuh. Sebab identitas bukanlah sesuatu yang beku; ia hidup dalam setiap biji, setiap kulit, dan setiap rasa yang kita jaga. Jika kita menjaga buah-buahan khas, kita menjaga diri kita sendiri, dan kita mewariskan kepada anak cucu sebuah tanah air yang tidak hanya luas, tetapi juga kaya rasa, kaya cerita, dan kaya syukur.

Dari Tanah yang Subur menuju Masyarakat Gemah Ripah Repeh Rapih

Ungkapan *gemah ripah repeh rapih* sering kali hanya dipakai sebagai hiasan dalam pidato atau slogan di papan-papan desa. Bunyinya memang indah, berirama, dan terasa akrab di telinga, tetapi maknanya jarang benar-benar direnungkan. Padahal, di dalam empat kata itu tersimpan sebuah gambaran utuh tentang masyarakat ideal yang diimpikan oleh leluhur Sunda. *Gemah* berarti makmur, *ripah* berarti subur dan melimpah, *repeh* berarti tenteram dan damai, *rapih* berarti tertib dan teratur. Keempatnya bukan sekadar tumpukan harapan; ia adalah akibat logis dari sebuah cara hidup yang selaras dengan alam. Masyarakat tidak bisa menjadi *gemah ripah repeh rapih* hanya karena diberi bantuan, dibangunkan gedung, atau dijanjikan kemajuan. Ia lahir dari tanah yang subur, air yang bersih, udara yang sehat, dan matahari yang menyinari hari-hari dengan cukup. Dengan kata lain, masyarakat yang ideal adalah buah dari tanah yang dimuliakan.

Tanah yang subur adalah fondasi pertama dari *gemah ripah*. Dari tanah yang subur, padi tumbuh menguning, sayur-mayur menghijau, dan buah-buahan berjatuhan pada musimnya. Pangan menjadi melimpah, dan kelimpahan itu

menurunkan rasa takut akan lapar. Tetapi yang lebih penting, tanah yang subur melahirkan kemandirian: masyarakat yang bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tidak mudah diombang-ambingkan oleh gejolak harga dan tidak mudah ditekan oleh kekuatan luar. Kemandirian inilah yang menjadi dasar dari kedaulatan sejati. KDM memahami hal ini, dan karena itu ia tidak memisahkan antara pertanian organik, kesehatan, pendidikan, dan kemerdekaan. Semuanya adalah satu mata rantai yang dimulai dari cara kita memperlakukan tanah. Tanah yang dimuliakan melahirkan pangan yang mulia; pangan yang mulia melahirkan tubuh yang sehat; tubuh yang sehat melahirkan pikiran yang jernih; dan pikiran yang jernih melahirkan masyarakat yang tahu cara menjaga keseimbangan. Dari sinilah *gemah ripah repeh rapih* tidak lagi terdengar sebagai mimpi, melainkan sebagai kemungkinan yang nyata.

Namun, *repeh*—ketenteraman—tidak lahir hanya dari perut yang kenyang. Ia lahir dari rasa aman bahwa setiap orang mendapat tempatnya, bahwa tidak ada yang ditindas, dan bahwa keadilan sungguh-sungguh ditegakkan. Masyarakat yang pangan melimpah tetapi dikuasai segelintir orang tidak akan pernah tenteram, karena di dalamnya selalu ada iri, marah, dan rasa diperlakukan tidak adil. Sebaliknya, masyarakat yang adil akan tumbuh dari kesadaran bahwa tanah, air, udara, dan matahari adalah milik bersama yang harus dibagi dengan jernih. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, ini adalah peran pusat: menjaga agar aliran unsur-unsur kehidupan tidak tertahan di satu tempat, tetapi sampai ke seluruh penjuru. Ketika pusat menjalankan peran ini, masyarakat tidak hanya makmur secara materi, tetapi juga damai secara sosial. Itulah *repeh*: bukan sekadar tidak ada konflik, tetapi ada kedamaian yang tumbuh dari rasa saling percaya dan saling menghormati.

Rapih—keteraturan—juga tidak boleh dipahami secara sempit sebagai kepatuhan terhadap aturan. Keteraturan yang sehat lahir dari kesadaran, bukan dari paksaan. Masyarakat yang *rapih* adalah masyarakat yang menjaga kebersihan karena tahu bahwa sungai yang bersih adalah sumber kehidupannya, menanam pohon karena tahu bahwa udara segar adalah napasnya, dan mengatur waktu tanam karena tahu bahwa musim adalah gurunya. Keteraturan semacam ini tidak bisa dilahirkan oleh peraturan daerah atau sanksi denda semata; ia harus tumbuh dari pendidikan, kebiasaan, dan teladan. Di sinilah peran pemimpin menjadi penting: ketika para pemimpin hidup selaras dengan alam, rakyat akan mengikuti; ketika para pemimpin merusak hutan dan mengotori sungai, rakyat pun akan belajar bahwa alam boleh diperlakukan sesuka hati. Maka, menuju masyarakat *gemah ripah repeh rapih* adalah pekerjaan membangun kesadaran bersama, mulai dari rumah, sekolah, kantor, hingga ruang-ruang pengambilan kebijakan.

Masyarakat ideal semacam ini sebenarnya pernah hidup dalam ingatan banyak orang tua kita. Di banyak kampung, meskipun tidak kaya, orang-orang masih saling berbagi hasil panen, menjaga mata air bersama, menanam pohon di perbatasan

tanah, dan menghormati musim. Mereka tidak memiliki banyak uang, tetapi mereka memiliki rasa cukup. Mereka tidak memiliki gedung megah, tetapi mereka memiliki ketenteraman. Modernisasi memang membawa banyak kemudahan, tetapi sering kali juga membawa serta kegelisahan baru: rasa tidak pernah cukup, persaingan yang tidak sehat, dan keterasingan dari alam. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, dan memang tidak perlu. Tetapi kita bisa membawa nilai-nilai lama itu—kesederhanaan, kecukupan, kebersamaan, dan penghormatan kepada alam—ke dalam kehidupan modern. Nilai-nilai itu bukan milik masa lalu yang usang; ia adalah kompas yang akan menuntun kita melewati zaman yang semakin rumit.

KDM menutup bagian dari pidatonya tentang tanah dan alam dengan sebuah kalimat yang menyejukkan: bahwa Tuhan hadir dalam setiap jengkal tanah, melahirkan kesuburan, melahirkan masyarakat Jawa Barat yang subur makmur, *gemah ripah*, *repeh*, *rapih*. Kalimat ini menghubungkan dimensi ekologis dengan dimensi spiritual. Kesuburan tanah bukan hanya hasil kerja manusia, tetapi juga anugerah yang mengandung kehadiran Ilahi. Maka, memuliakan tanah adalah bentuk syukur; merusaknya adalah bentuk pengingkaran. Masyarakat yang menyadari ini akan memperlakukan tanahnya bukan sebagai benda yang boleh diperas, tetapi sebagai amanat yang harus dijaga. Dari kesadaran itu, lahir semua kebaikan yang lain: pangan yang bersih, tubuh yang sehat, hubungan yang adil, dan kehidupan yang tenteram. Inilah *gemah ripah repeh rapih* dalam maknanya yang paling dalam: bukan sekadar kondisi lahiriah, tetapi keadaan batin dan sosial yang lahir dari hubungan yang benar dengan Tuhan, sesama, dan alam.

Jadi, jalan menuju masyarakat yang ideal tidaklah sesulit yang dibayangkan, tetapi juga tidak bisa ditempuh dengan terburu-buru. Ia dimulai dari hal-hal yang kecil: dari sebutir benih yang ditanam dengan hormat, dari sepetak tanah yang dirawat dengan sabar, dari sebatang pohon yang tidak ditebang sia-sia, dan dari segelas air yang dijaga kebersihannya. Setiap tindakan kecil itu, jika dilakukan oleh banyak orang, akan menjadi kekuatan besar yang mengubah wajah masyarakat. Dinas Pertanian yang bekerja sepetak demi sepetak adalah lambang dari perubahan itu: tidak gegap gempita, tetapi pasti. Petani yang memilih organik adalah pelakunya; konsumen yang memilih pangan lokal adalah pendukungnya; dan anak-anak yang diajarkan mencintai tanah adalah harapannya. Dengan cara itu, *Papat Kalima Pancer* tidak lagi menjadi kosakata masa lampau, tetapi menjadi cara hidup yang hidup kembali di tengah kita.

Ketika tanah air ini dirawat dengan cinta, ia akan mengikat kita dalam ikatan yang membahagiakan: kita tidak akan merasa terasing dari alam, tidak akan merasa dikejar-kejar oleh kebutuhan yang tidak pernah habis, dan tidak akan merasa kehilangan arah. Kita akan menjadi bagian dari jalinan yang lebih besar, di mana tanah memberi, air mengalir, udara menyapa, dan matahari menyinari. Dari jalinan itulah lahir manusia-manusia yang mulia, masyarakat yang tenteram, dan bangsa

yang benar-benar merdeka. Itulah yang dimaksud oleh KDM ketika ia berbicara tentang kemerdekaan yang belum selesai: ia tidak hanya berbicara tentang listrik, rumah sakit, dan sekolah, tetapi juga tentang tanah yang harus dipulihkan, air yang harus dijernihkan, udara yang harus dibersihkan, dan matahari yang harus disambut dengan syukur. Masyarakat yang mampu melakukan semua itu adalah masyarakat yang sedang berjalan menuju *gemah ripah repeh rapih*, dan dari sana kemerdekaan sejati akan tumbuh seperti pohon yang akarnya menancap dalam ke tanah, batangnya menjulang ke langit, dan buahnya dinikmati oleh semua.

BAGIAN ENAM
REFLEKSI DAN ARAH KE DEPAN

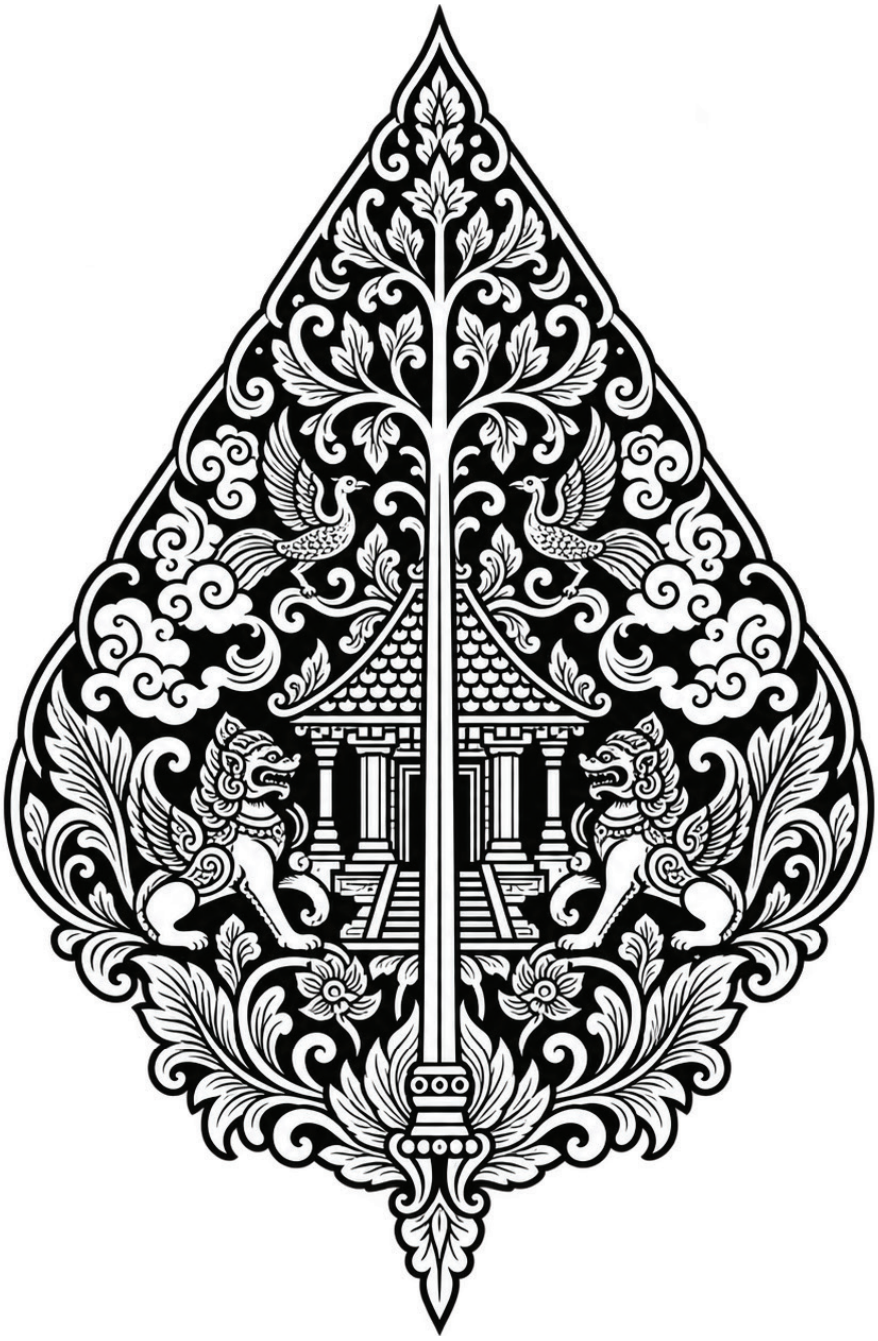

BAB 13
NASIONALISME SEJATI ADALAH MENJAGA TANAH DAN AIR

SELAMA ini, nasionalisme hampir selalu dihubungkan dengan perlawanan: melawan penjajah, melawan dominasi asing, melawan intervensi kekuatan luar. Dalam bayangan banyak orang, pahlawan sejati adalah mereka yang memanggul senjata, berteriak merdeka di medan perang, dan rela menyerahkan nyawa demi bumi pertiwi. Gambaran itu tidak salah, tetapi ia belum utuh. Sebab nasionalisme yang berhenti pada perlawanan fisik akan kehilangan arah setelah musuh yang tampak telah pergi. Ketika penjajah sudah angkat kaki, ketika bendera asing sudah diturunkan, dan ketika kedaulatan politik sudah diraih, apa lagi yang harus diperjuangkan? Pertanyaan inilah yang sering kali tidak terjawab oleh nasionalisme yang sempit. Ia hanya tahu apa yang harus ditolak, tetapi tidak tahu apa yang harus dirawat. Ia hanya sibuk mengusir, tetapi lupa menjaga. Padahal, kemerdekaan sejati menuntut lebih dari sekadar mengusir penjajah; ia menuntut kesediaan untuk menjaga segala sesuatu yang membuat bangsa ini layak disebut tanah air.

KDM membuka sebuah pintu pemahaman yang lebih dalam tentang nasionalisme ketika ia menghubungkan kecintaan kepada tanah air dengan perawatan terhadap tanah dan air. Ia berkata bahwa manusia Indonesia sejati yang mencintai tanah airnya, yang menghormati Merah Putih, adalah dia yang setiap waktu menjaga tanahnya, menjaga airnya, mengorbankan keringat dan darahnya demi tanah dan airnya. Kalimat ini memperluas makna patriotisme: bukan hanya berkorban di medan perang, tetapi juga berkorban dalam kesabaran merawat sawah; bukan hanya berani menghadapi serdadu, tetapi juga berani menolak menggusur hutan; bukan hanya cinta kepada bendera, tetapi juga cinta kepada mata air. Dalam kerangka ini, nasionalisme tidak berhenti pada seremoni atau simbol; ia turun ke dalam tanah, mengalir ke dalam air, dan menyatu dengan napas kehidupan sehari-hari. Seorang petani yang menjaga kesuburan tanahnya, seorang warga yang tidak membuang sampah ke sungai, seorang pemimpin yang menolak proyek yang merusak lingkungan—mereka semua adalah patriot dalam arti yang paling nyata.

Bab ini ingin merenungkan ulang makna nasionalisme dengan menempatkan tanah dan air sebagai pusatnya. Kita akan melihat bahwa merdeka bukan hanya tentang melawan penjajah, karena masih ada bentuk-bentuk penjajahan lain yang justru hadir setelah kemerdekaan politik diraih: penjajahan atas tanah oleh segelintir orang, penjajahan atas air oleh industri yang rakus, dan penjajahan atas udara oleh asap dan limbah. Penjajahan jenis ini tidak datang dengan kapal perang, tetapi dampaknya tidak kalah menghancurkan. Jika dulu rakyat dijajah oleh bangsa asing, kini rakyat bisa dijajah oleh bangsanya sendiri yang menguasai sumber-sumber kehidupan. Maka, nasionalisme sejati harus melawan penjajahan dalam segala bentuknya, termasuk penjajahan atas alam. Merdeka tidak cukup hanya dengan mengibarkan bendera; merdeka berarti tanahnya subur, airnya bersih, udaranya segar, dan mataharinya menyinari semua orang tanpa kecuali.

Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, nasionalisme sejati adalah sikap yang memulihkan keseimbangan antara manusia, alam, sesama, dan Tuhan. Nasionalisme yang hanya sibuk dengan urusan politik akan melupakan tanah; nasionalisme yang hanya sibuk dengan pertumbuhan ekonomi akan melupakan air; nasionalisme yang hanya sibuk dengan pembangunan fisik akan melupakan udara; dan nasionalisme yang hanya sibuk dengan simbol-simbol akan melupakan matahari yang seharusnya menjadi sumber energi dan kehidupan. Manusia sebagai *pancer* tidak boleh hanya berdiri di tengah sebagai penguasa; ia harus berdiri sebagai penjaga yang memastikan semua unsur seimbang. Itulah sebabnya KDM menyebut bahwa menjaga tanah dan air adalah bagian dari mencintai Merah Putih. Sebab Merah Putih bukan sekadar kain; ia adalah lambang darah yang mengalir dan kesucian niat, yang keduanya hanya akan bermakna jika tanah airnya dirawat dengan tulus.

Bab ini juga akan menegaskan bahwa ada dimensi spiritual dalam nasionalisme yang sering kali diabaikan. KDM mengingatkan bahwa Tuhan hadir dalam setiap jengkal tanah, melahirkan kesuburan, melahirkan masyarakat yang gemah ripah repeh rapih. Kalimat ini menempatkan nasionalisme dalam relasi dengan Yang Maha Kuasa. Mencintai tanah air bukan hanya urusan politik atau ekonomi, tetapi juga urusan iman. Sebab tanah, air, udara, dan matahari adalah ayat-ayat Tuhan yang terbentang; merusaknya adalah bentuk pengingkaran, sementara merawatnya adalah bentuk syukur. Dalam banyak tradisi, mencintai tanah air bahkan disebut sebagai bagian dari iman, karena dari tanah airlah manusia belajar tentang asal-usul, tanggung jawab, dan pengabdian. Dengan demikian, nasionalisme sejati bukanlah nasionalisme yang kosong dari nilai-nilai spiritual; ia adalah panggilan untuk menjadi khalifah di bumi sendiri, menjaga amanat yang telah diberikan Tuhan, dan mewariskannya kepada generasi yang akan datang.

Kita hidup di zaman ketika tanah dan air sedang mengalami tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alih fungsi lahan, pencemaran sungai, penambangan liar, dan eksploitasi sumber daya alam berlangsung dalam skala besar, sering

kali atas nama pembangunan. Di tengah arus seperti ini, merawat tanah dan air bukanlah pekerjaan yang populer; ia sering kali dianggap menghambat kemajuan. Petani yang mempertahankan sawahnya di tengah gempuran proyek dianggap kolot; warga yang menolak pabrik yang mencemari sungai dianggap melawan investasi. Padahal, mereka justru sedang menjalankan nasionalisme yang paling tulus: mempertahankan sumber kehidupan dari kehancuran. KDM memberi tempat terhormat kepada para petani, nelayan, dan kuli bangunan dalam pidatonya, karena ia tahu bahwa mereka adalah penjaga-penjaga tanah dan air yang selama ini tidak dihargai. Dengan begitu, ia sedang membalik cara pandang yang menganggap pembangunan fisik lebih penting daripada kelestarian hidup.

Dengan merenungkan kembali makna nasionalisme, kita juga akan dihadapkan pada pertanyaan tentang apa yang akan kita wariskan. Kemerdekaan tidak hanya diwariskan dalam bentuk lembaran proklamasi atau lagu-lagu perjuangan, tetapi juga dalam bentuk tanah yang masih subur, air yang masih mengalir, udara yang masih bersih, dan matahari yang masih bisa dinikmati tanpa takut akan polusi. Jika kita hanya mewariskan gedung-gedung dan jalan raya, tetapi tanahnya tandus dan airnya keruh, maka kita sebenarnya mewariskan kehancuran. Generasi mendatang tidak akan bisa makan dari beton, tidak akan bisa minum dari aspal. Mereka akan bertanya, dengan nada marah atau sedih: apa yang telah kalian lakukan atas tanah air yang kalian puja-puja itu? Maka, nasionalisme sejati adalah sikap yang memikirkan masa depan, bukan hanya masa kini; ia adalah kesediaan untuk menanam pohon yang tidak akan sempat kita nikmati buahnya, menjaga mata air yang tidak akan sempat kita minum, dan memulihkan tanah yang tidak akan sempat kita panen. Inilah cinta tanah air yang paling dewasa: cinta yang tidak menuntut balasan segera.

Bab ini akan menutup seluruh rangkaian buku dengan sebuah refleksi yang dalam: bahwa menjaga tanah dan air adalah bentuk tertinggi dari merdeka. Sebab selama tanah masih subur, air masih bersih, udara masih segar, dan matahari masih menyinari, maka harapan itu masih ada. Harapan untuk pangan yang cukup, tubuh yang sehat, anak-anak yang ceria, dan kehidupan yang tenteram. Kemerdekaan sejati bukanlah titik yang pernah selesai, melainkan jalan yang harus terus dirawat. Dan jalan itu bernama tanah, air, udara, dan matahari. Siapa saja yang menjaga jalan itu, apa pun pekerjaannya, dari mana pun asalnya, adalah pejuang kemerdekaan yang sesungguhnya. Mereka tidak selalu tampak di monumen, tetapi mereka hidup dalam setiap butir nasi, setiap teguk air, dan setiap helaan napas yang menyehatkan. Maka, marilah kita belajar kembali menjadi bangsa yang mencintai tanah airnya bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tangan yang merawat, hati yang bersyukur, dan jiwa yang berani menjaga.

Merdeka Bukan Hanya Melawan Penjajah

Sejak kecil, kita diajari bahwa kemerdekaan diraih melalui perlawanan terhadap penjajah. Buku-buku pelajaran menceritakan pertempuran-pertempuran besar, gerilya di hutan-hutan, diplomasi di meja perundingan, dan pengorbanan para pahlawan yang gugur di medan laga. Semua cerita itu benar dan layak dihormati. Tetapi jika kita hanya berhenti di sana, kita akan mewarisi cara pandang yang sempit: bahwa merdeka hanyalah soal mengusir pihak asing yang menjajah. Padahal, penjajahan tidak selalu datang dari seberang lautan. Ia bisa lahir dari dalam, tumbuh perlahan, dan memakai wajah yang berbeda. Penjajahan atas tanah oleh segelintir pemilik modal, penjajahan atas air oleh pabrik-pabrik yang membuang limbah seenaknya, penjajahan atas udara oleh asap kendaraan dan cerobong industri, penjajahan atas pikiran oleh konsumerisme dan obat-obatan—semuanya adalah bentuk penjajahan yang tidak kalah kejam, tetapi jarang disadari. Maka, memperluas makna perjuangan adalah keniscayaan: kita harus berani menyebut bahwa ada penjajah-penjajah baru yang harus dilawan, dan salah satunya adalah kerakusan kita sendiri terhadap alam.

KDM menyentuh perluasan makna ini ketika ia berbicara tentang nasionalisme sejati. Ia tidak berhenti pada seremoni atau simbol, melainkan menukik pada pertanyaan yang lebih mendasar: setelah bendera berkibar, apa yang kita lakukan terhadap tanah dan air kita? Ia berkata bahwa manusia Indonesia sejati adalah dia yang setiap waktu menjaga tanahnya, menjaga airnya, mengorbankan keringat dan darahnya demi tanah dan airnya. Kalimat ini menegaskan bahwa medan perang tidak lagi berada di garis depan melawan serdadu, tetapi di sawah-sawah yang terancam alih fungsi, di sungai-sungai yang tercemar, di hutan-hutan yang digunduli, dan di udara yang semakin pekat. Medan perang itu tidak membutuhkan senjata; ia membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan keberanian untuk berkata tidak terhadap segala bentuk eksploitasi yang merusak. Dengan kata lain, merdeka bukan hanya tentang mengusir penjajah, tetapi tentang menjaga agar negeri ini tidak dijajah kembali oleh keserakahan, ketidakadilan, dan perusakan lingkungan.

Dalam konteks Indonesia hari ini, penjajahan baru itu tampak dalam berbagai wujud yang sering kali dianggap lumrah. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau perumahan mewah terjadi di banyak tempat, menggusur petani dari tanah warisannya dan mengubah lumbung pangan menjadi beton. Hutan-hutan dibuka untuk tambang dan perkebunan besar, menghilangkan mata air dan mempercepat bencana banjir serta longsor. Sungai-sungai dijadikan tempat pembuangan limbah, sehingga air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi pembawa penyakit. Udara di kota-kota besar dipenuhi polusi yang menggerogoti paru-paru anak-anak. Semua ini adalah penjajahan yang berlangsung secara pelan tapi pasti, dan ironisnya, pelakunya sering kali adalah bangsanya

sendiri. Maka, perjuangan melawan penjajah tidak boleh berhenti pada upacara peringatan; ia harus berlanjut dalam bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang merusak lingkungan, terhadap praktik bisnis yang rakus, dan terhadap gaya hidup yang tidak menghargai alam.

Kita juga perlu menyadari bahwa penjajahan baru ini sering kali bersembunyi di balik bahasa yang indah: "pembangunan", "investasi", "pertumbuhan ekonomi", dan "kemajuan". Kata-kata itu tidak salah, tetapi sering disalahgunakan untuk menutupi perampasan hak rakyat dan perusakan alam. Ketika hutan digunduli atas nama pembangunan, yang diuntungkan bukan rakyat banyak, melainkan segelintir pemegang modal. Ketika sungai dicemari atas nama industri, yang menanggung akibatnya adalah warga yang tinggal di hilir. Ketika lahan pertanian diubah menjadi pabrik, yang kehilangan bukan hanya petani, tetapi juga kedaulatan pangan kita sebagai bangsa. Dalam situasi seperti ini, nasionalisme sejati menuntut kita untuk berani membongkar bahasa-bahasa yang menipu itu. Merdeka berarti berani bertanya: pembangunan untuk siapa? Investasi untuk kepentingan siapa? Pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh siapa? Jika jawabannya bukan untuk rakyat banyak, maka kita sedang berhadapan dengan penjajahan yang harus dilawan, meskipun ia datang dari dalam negeri sendiri.

Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, memperluas makna perjuangan berarti mengembalikan keseimbangan antara empat unsur dan manusia sebagai pusat. Tanah, air, udara, dan matahari adalah unsur-unsur yang harus dijaga agar tidak dikuasai oleh satu pihak. Ketika tanah dikuasai oleh segelintir orang, rakyat kehilangan akses untuk bercocok tanam; ketika air dikuasai oleh industri, rakyat kehilangan akses untuk minum; ketika udara dikotori oleh kendaraan dan pabrik, rakyat kehilangan hak untuk bernapas lega; ketika matahari tidak lagi sampai ke tanah karena polusi, rakyat kehilangan sumber energi yang murni. Dalam keadaan seperti itu, manusia sebagai pusat tidak lagi berfungsi sebagai penjaga, melainkan sebagai korban dari ketidakseimbangan yang ia ciptakan sendiri. Maka, perjuangan sejati adalah perjuangan untuk memulihkan keseimbangan itu: merebut kembali tanah untuk petani, air untuk rakyat, udara untuk semua, dan matahari untuk kehidupan.

Perlawanan terhadap penjajahan baru ini tidak selalu harus dalam bentuk demonstrasi atau konfrontasi. Ia bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana dan sehari-hari: memilih untuk tidak membuang sampah ke sungai, memilih untuk membeli produk dari petani lokal, memilih untuk menanam pohon di pekarangan, memilih untuk menghemat air dan listrik, dan memilih untuk tidak mendukung praktik-praktik yang merusak lingkungan. Tindakan-tindakan kecil ini, jika dilakukan oleh banyak orang secara konsisten, akan menjadi gerakan yang besar. Ia membangun budaya baru: budaya yang menempatkan alam sebagai mitra, bukan sebagai objek; budaya yang menghargai air sebagai sumber kehidupan, bukan sebagai tempat

sampah; budaya yang mencintai tanah sebagai warisan, bukan sebagai komoditas. Dalam budaya semacam ini, nasionalisme tidak lagi menjadi urusan upacara, tetapi menjadi napas kehidupan sehari-hari. Dan itulah sesungguhnya yang dimaksud dengan merdeka: bukan sekadar bebas dari penjajah, tetapi sanggup menjaga diri, keluarga, dan tanah air dari segala bentuk perusakan.

Kita juga bisa belajar dari banyak komunitas adat dan petani kecil yang telah lama mempraktikkan perlawanan ini tanpa banyak bicara. Mereka menjaga hutan adat, memelihara mata air, menanam beragam tanaman, dan menolak tawaran-tawaran yang merusak. Bagi mereka, tanah adalah ibu, air adalah darah, hutan adalah nadi, dan langit adalah atap. Mereka tidak perlu diajari tentang nasionalisme, karena hidup mereka sendiri adalah wujud dari kecintaan kepada tanah air. Sayangnya, suara mereka sering kali diabaikan, bahkan mereka dianggap menghalangi kemajuan. Padahal, merekalah yang paling paham apa artinya menjaga keseimbangan. KDM tampaknya menyadari hal ini ketika ia memberi tempat terhormat kepada petani, nelayan, dan kuli bangunan dalam upacara kemerdekaan. Ia sedang mengingatkan bahwa mereka yang bekerja paling dekat dengan tanah dan air adalah pahlawan-pahlawan yang sebenarnya, karena mereka menjaga sumber kehidupan yang sering diabaikan oleh mereka yang duduk di ruang ber-AC.

Pada titik ini, kita perlu menegaskan bahwa merdeka bukanlah keadaan yang pernah selesai. Setiap zaman punya penjajahnya sendiri, dan setiap generasi harus menemukan cara untuk melawannya. Generasi dulu melawan penjajah dengan bambu runcing dan diplomasi; generasi sekarang harus melawan penjajahan baru dengan kesadaran ekologis, kebijakan yang adil, dan tindakan yang berkelanjutan. Jika kita tidak sanggup melawan penjajahan atas tanah dan air, maka kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah akan sia-sia. Sebab apa artinya negeri merdeka jika tanahnya tandus, airnya keruh, udaranya beracun, dan rakyatnya masih diperas oleh segelintir orang? Maka, perjuangan kita hari ini adalah perjuangan untuk menjaga, bukan hanya untuk merebut; perjuangan untuk merawat, bukan hanya untuk membangun; perjuangan untuk mewariskan, bukan hanya untuk menikmati. Inilah makna merdeka yang lebih luas, dan inilah panggilan bagi siapa saja yang mengaku mencintai tanah air.

Merdeka adalah Menjaga Kesuburan, Udara, dan Air

Jika kita bertanya kepada tanah, barangkali ia akan berkata bahwa kemerdekaan bukanlah urusan bendera atau lagu kebangsaan. Bagi tanah, merdeka berarti ia tidak lagi diracuni oleh zat-zat kimia yang membunuh kehidupannya; merdeka berarti ia dibiarkan bernapas melalui pori-porinya, dihuni kembali oleh cacing

dan mikroorganisme yang telah lama pergi; merdeka berarti ia tidak lagi dipaksa berproduksi melampaui kodratnya. Demikian pula air. Bagi air, merdeka berarti ia tidak dijadikan tempat pembuangan limbah; merdeka berarti ia bisa mengalir jernih dari mata airnya, menyusuri sungai tanpa takut dicemari, dan sampai ke rumah-rumah tanpa membawa penyakit. Udara pun punya bahasanya sendiri: merdeka berarti ia tidak dipenuhi asap dan racun; merdeka berarti anak-anak bisa menghirupnya dengan lega, tanpa takut paru-parunya rusak. Ketiga unsur ini tidak peduli pada pidato-pidato yang membahas kemerdekaan; mereka hanya merasakan, secara langsung, apakah manusia sungguh-sungguh memandangnya sebagai saudara atau sekadar alat. Dan dari perlakuan itulah kita bisa membaca seberapa jujur nasionalisme kita.

Kesuburan tanah adalah salah satu ukuran paling nyata dari kemerdekaan sebuah bangsa. Bangsa yang tanahnya subur memiliki masa depan yang terbuka: ia bisa menanam pangannya sendiri, memberi makan rakyatnya, dan bahkan mengirimkan hasil bumi ke negeri lain. Tetapi kesuburan tidak bertahan dengan sendirinya. Ia harus dirawat, seperti persahabatan yang harus dijaga. Tanah yang dibiarkan tandus, yang dikeruk terus-menerus, yang disiram pestisida dan pupuk kimia tanpa jeda, pada akhirnya akan menjadi gurun yang tidak bisa ditanami. Ketika tanah kehilangan kesuburannya, kemerdekaan pun menjadi rapuh, karena bangsa yang tidak bisa menghidupi dirinya sendiri akan selalu bergantung pada bangsa lain. Dalam banyak kasus, ketergantungan pangan adalah bentuk penjajahan yang paling halus: ia tidak membutuhkan tentara, tetapi cukup dengan mengendalikan pasokan dan harga. Maka, menjaga kesuburan tanah adalah tindakan mempertahankan kedaulatan. KDM menyadari ini ketika ia berbicara tentang pertanian organik, tentang tanah yang dimuliakan, dan tentang pangan yang lahir dari tanah yang sehat. Ia sedang berbicara tentang kemerdekaan yang paling dasar: kemampuan untuk makan dari hasil bumi sendiri tanpa diracuni dan tanpa diperas oleh pihak lain.

Menjaga air adalah bentuk lain dari mempertahankan kemerdekaan. Air adalah hak hidup yang paling asasi. Tidak ada makhluk yang bisa bertahan tanpa air, dan tidak ada peradaban yang bisa tumbuh jauh dari sumber air. Tetapi di zaman modern, air telah menjadi komoditas yang diperebutkan. Perusahaan-perusahaan besar mengambil air dari dalam tanah, mengemasnya, dan menjualnya kembali kepada rakyat yang tanahnya sendiri sedang kekeringan. Industri membuang limbah ke sungai tanpa rasa bersalah, mencemari sumber air yang dipakai oleh ribuan keluarga di hilir. Ketika air dikuasai dan dicemari, rakyat kehilangan haknya yang paling mendasar. Mereka yang tidak mampu membeli air minum kemasan harus minum air yang tidak layak, dan anak-anak mereka menanggung penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, air adalah unsur yang memberi kejernihan; jika ia dikuasai oleh keserakahan, maka kejernihan itu

berubah menjadi kekeruhan, dan masyarakat yang meminumnya akan kehilangan kejernihan jiwa. Merdeka, dengan demikian, berarti memastikan bahwa air tetap menjadi milik bersama, mengalir bersih dari hulu ke hilir, dan tidak dijadikan alat untuk mencari untung di atas penderitaan orang banyak.

Udara, meskipun tidak terlihat, adalah unsur yang paling cepat dirasakan ketika ia rusak. Kita bisa bertahan beberapa hari tanpa air dan beberapa minggu tanpa makanan, tetapi hanya beberapa menit tanpa udara. Udara yang bersih adalah syarat mutlak bagi kehidupan, tetapi ia justru paling sering diabaikan. Asap kendaraan, cerobong pabrik, pembakaran sampah, dan debu dari proyek-proyek pembangunan telah mengubah udara di banyak kota menjadi racun yang pelan-pelan menggerogoti kesehatan. Anak-anak yang tumbuh di kota besar hari ini tidak lagi merasakan udara segar seperti yang dinikmati oleh generasi sebelumnya. Mereka tumbuh dalam kabut polusi, dan tubuh mereka menyesuaikan diri dengan cara yang menyedihkan: lebih banyak asma, lebih banyak alergi, lebih banyak penyakit pernapasan. Dalam situasi seperti ini, siapa yang bisa berkata bahwa kita sudah merdeka? Merdeka seharusnya berarti bisa bernapas dengan lega tanpa takut akan racun. Menjaga udara bersih adalah perjuangan yang sama pentingnya dengan menjaga perbatasan negara, karena udara adalah perbatasan yang tidak terlihat tetapi menentukan hidup mati kita setiap hari.

Kesuburan tanah, kebersihan air, dan kejernihan udara adalah tiga hal yang tidak bisa dipisahkan dari kemerdekaan sejati. Selama tiga unsur ini dirusak, maka kemerdekaan politik yang telah diraih hanyalah kulit kosong. Rakyat yang tidak bisa makan dari tanahnya, tidak bisa minum dari airnya, dan tidak bisa bernapas dari udaranya adalah rakyat yang masih terjajah, meskipun tidak ada serdadu asing di negerinya. Mereka dijajah oleh pencemaran, dijajah oleh keserakahan, dijajah oleh kebijakan yang lebih memihak industri daripada rakyat. Maka, perjuangan kemerdekaan harus diteruskan ke medan yang baru: medan lingkungan hidup. Di medan ini, musuh bukan lagi bangsa asing, tetapi cara pandang yang menganggap alam sebagai objek yang boleh dieksploitasi tanpa batas. KDM mengajak kita untuk berbalik arah: dari mengeksploitasi menjadi merawat, dari menguasai menjadi menjaga, dan dari memandang tanah, air, dan udara sebagai sumber keuntungan menjadi memandangnya sebagai amanat yang harus diwariskan.

Merawat kesuburan, udara, dan air juga menuntut perubahan dalam cara kita membangun. Selama ini, pembangunan sering kali diukur dari seberapa cepat gedung-gedung menjulang, seberapa lebar jalan raya membentang, dan seberapa besar pabrik-pabrik beroperasi. Tetapi pembangunan yang merusak tanah, air, dan udara bukanlah pembangunan; ia adalah perusakan dengan nama yang indah. Pembangunan sejati adalah yang memperkuat keseimbangan, bukan yang menghancurkannya. Ia membangun tanpa menggusur petani, memproduksi tanpa mencemari sungai, dan bergerak tanpa mengotori udara. Dalam kerangka *Papat*

Kalima Pancer, pembangunan sejati adalah pembangunan yang menjaga empat unsur tetap seimbang: tanah tetap subur, air tetap bersih, udara tetap segar, dan matahari tetap memberi kehidupan. Manusia sebagai pusat bertugas memastikan bahwa setiap langkah pembangunan tidak mengorbankan salah satu unsur demi unsur lainnya. Ini bukan berarti menolak kemajuan, tetapi menuntut kemajuan yang selaras dengan alam. Hanya dengan cara itu kemerdekaan bisa bertahan dari generasi ke generasi.

Tindakan menjaga juga harus dimulai dari kesadaran pribadi, bukan hanya dari kebijakan pemerintah. Setiap orang bisa ikut menjaga kesuburan tanah dengan tidak membuang sampah plastik sembarangan, ikut menjaga air dengan tidak mencemari sungai, dan ikut menjaga udara dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta menanam pohon. Tindakan-tindakan kecil ini, bila dilakukan bersama-sama, akan menjadi kekuatan yang besar. Ia mengubah budaya: dari budaya membuang menjadi budaya merawat, dari budaya mengeksploitasi menjadi budaya melestarikan. Dalam budaya seperti ini, anak-anak akan tumbuh dengan kesadaran bahwa tanah, air, dan udara adalah saudara yang harus dijaga, bukan benda mati yang boleh diperlakukan seenaknya. Dan ketika kesadaran itu menjadi kebiasaan, maka kemerdekaan tidak lagi menjadi milik para pejuang masa lalu, tetapi menjadi pekerjaan sehari-hari setiap warga. Itulah makna terdalam dari merdeka: bukan hanya bebas, tetapi juga bertanggung jawab.

Pada akhirnya, menjaga kesuburan, udara, dan air adalah cara kita berterima kasih kepada bumi yang telah memberi hidup. Bumi tidak menuntut banyak; ia hanya ingin dirawat sebagaimana ia merawat kita. Ketika kita melakukannya, kita akan menemukan bahwa kemerdekaan bukanlah sesuatu yang jauh di masa lalu, melainkan sesuatu yang hidup di sini dan sekarang: di tanah yang gembur, di air yang jernih, di udara yang segar, dan di matahari yang hangat. Dari sanalah segala kebaikan mengalir: pangan yang cukup, tubuh yang sehat, hati yang tenang, dan masa depan yang penuh harapan. Maka, merdeka adalah menjaga, dan menjaga adalah mencintai. Siapa pun yang mencintai tanah airnya akan menjaga tanah dan airnya; dan siapa pun yang menjaga tanah dan airnya, sesungguhnya sedang memerdekakan dirinya, keluarganya, dan bangsanya. Inilah nasionalisme sejati yang diajarkan oleh KDM melalui pidatonya, dan inilah arah yang harus kita tempuh jika kita ingin menjadi bangsa yang benar-benar merdeka.

Tuhan Hadir dalam Setiap Jengkal Tanah

Pernyataan bahwa Tuhan hadir dalam setiap jengkal tanah bukanlah sekadar ungkapan puitis untuk memperindah pidato. Ia adalah sebuah pengakuan teologis yang dalam, yang menempatkan tanah tidak lagi sebagai benda mati, tetapi sebagai

ruang perjumpaan dengan Yang Maha Kuasa. Dalam banyak tradisi spiritual, alam semesta dipandang sebagai ayat atau tanda yang memantulkan kehadiran Ilahi. Gunung, sungai, hutan, dan tanah bukan sekadar latar kehidupan, melainkan saksi dari kebesaran Tuhan yang terus bekerja. Masyarakat Sunda lama meyakini hal ini dalam praktik kesehariannya: mereka menjaga mata air, merawat hutan keramat, dan memperlakukan tanah sebagai ibu yang tidak boleh dilukai. Kesadaran semacam ini oleh para ahli disebut sebagai sacred ecology, yaitu cara pandang ekologis yang disatukan dengan rasa hormat kepada yang sakral (Berkes, 1999). Dalam konteks inilah kalimat KDM menemukan bobotnya: jika Tuhan hadir dalam tanah, maka merusak tanah bukan lagi persoalan teknis atau ekonomi, melainkan persoalan moral dan spiritual.

Ketika manusia menyadari kehadiran Tuhan di dalam tanah, cara ia bekerja akan berubah. Mencangkul bukan lagi sekadar membalik gumpalan bumi, melainkan sentuhan dengan amanat yang harus dijaga. Menanam bukan lagi sekadar mengejar hasil, melainkan ikut serta dalam kerja penciptaan yang berkelanjutan. Memanen bukan lagi sekadar mengambil, melainkan menerima dengan syukur. Cara pandang semacam ini melahirkan etika pertanian yang tidak serakah, tidak merusak, dan tidak memaksakan tanah melampaui kemampuannya. Petani yang menyadari bahwa Tuhan hadir di tanahnya tidak akan tega meracuninya dengan pestisida berlebihan, karena ia tahu bahwa ia sedang meracuni sesuatu yang suci. Dalam kerangka Papat Kalima Pancer, kesadaran ini menempatkan manusia sebagai pusat yang rendah hati, bukan pusat yang angkuh. Ia menjaga keseimbangan bukan karena takut rugi, tetapi karena merasa bahwa tanah, air, udara, dan matahari adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada sesama, tetapi juga kepada Tuhan.

Kehadiran Tuhan dalam setiap jengkal tanah juga mengubah cara kita memandang pembangunan. Pembangunan yang hanya diukur dari angka-angka pertumbuhan cenderung menyingkirkan dimensi transenden; ia melihat tanah sebagai lahan, air sebagai sumber daya, hutan sebagai cadangan devisa, dan manusia sebagai tenaga kerja. Dalam cara pandang itu, Tuhan tidak mendapat tempat, karena semua hal dinilai dari manfaat materialnya. Namun, ketika kesadaran ilahi dihidupkan, pembangunan berubah menjadi ibadah. Membangun jalan bukan sekadar mempermudah transportasi, tetapi juga membuka akses keadilan; membangun sekolah bukan sekadar menaikkan angka partisipasi, tetapi juga memuliakan manusia sebagai makhluk yang diberi akal; menjaga sungai bukan sekadar mencegah banjir, tetapi juga menghormati air sebagai tanda kebesaran Tuhan. KDM seakan ingin mengingatkan para pemimpin bahwa di balik setiap kebijakan yang menyangkut tanah dan air, ada pertanggungjawaban yang lebih tinggi dari sekadar laporan tahunan. Ada Tuhan yang hadir dan melihat, bahkan ketika manusia tidak melihat.

Dalam tradisi Islam, manusia disebut sebagai khalifah di muka bumi, yaitu wakil Tuhan yang bertugas memakmurkan dan menjaga bumi, bukan merusaknya. Tugas ini menuntut keseimbangan antara mengambil manfaat dan memelihara kelestarian. Seorang khalifah tidak akan menghabiskan air di hulu tanpa memikirkan yang di hilir; tidak akan menjual tanah subur kepada pemilik modal tanpa memikirkan nasib petani; tidak akan menebang pohon tanpa menanam penggantinya. Dalam bahasa Sunda, tugas yang sama tercermin dalam konsep pancer: manusia adalah pusat yang bertugas menyeimbangkan empat unsur kehidupan. Kedua konsep ini bertemu dalam satu titik yang sama: bahwa manusia bukan pemilik mutlak, melainkan penjaga yang diberi amanat. Kesadaran ini seharusnya menumbuhkan rasa takut untuk berbuat zalim kepada alam, karena alam bukan milik manusia, melainkan milik Tuhan yang dititipkan kepada seluruh makhluk-Nya.

Lebih jauh, pengakuan bahwa Tuhan hadir dalam setiap jengkal tanah juga berbicara tentang kesetaraan seluruh wilayah. Tidak ada tanah yang lebih kudus dari tanah yang lain, tidak ada daerah yang lebih diberkahi dari daerah yang lain, karena Tuhan hadir di mana-mana. Maka, kebijakan pembangunan yang hanya memusatkan perhatian pada kota-kota besar sambil mengabaikan desa-desa terpencil adalah bentuk ketidakadilan yang tidak hanya menyakiti manusia, tetapi juga mengabaikan kehadiran Tuhan di tempat-tempat yang dilupakan. Jika Tuhan hadir di setiap jengkal tanah, maka setiap jengkal tanah berhak diperhatikan, dirawat, dan diperlakukan dengan adil. Desa yang gelap karena tidak ada listrik adalah tanah yang menunggu untuk disentuh oleh keadilan; sawah yang kering karena irigasi rusak adalah tanah yang menunggu uluran tanggung jawab. Dalam pengertian ini, pengakuan KDM tentang 80.000 rakyat yang belum menikmati listrik bukan hanya laporan sosial, melainkan panggilan spiritual untuk menghadirkan keadilan Tuhan di setiap jengkal tanah.

Kita juga perlu merenungkan bahwa ketika tanah rusak, yang terluka bukan hanya petani atau ekosistem, tetapi juga relasi manusia dengan Tuhan. Sebab tanah yang rusak membuat manusia sulit bersyukur; air yang keruh membuat manusia sulit memandang kejernihan Ilahi; udara yang kotor membuat napas terasa berat; dan matahari yang terhalang polusi membuat hari kehilangan cahayanya. Kerusakan alam, dengan demikian, adalah kerusakan spiritual juga. Ia menjauhkan manusia dari pengalaman akan keindahan dan kehadiran Tuhan yang seharusnya bisa dirasakan melalui alam. Maka, memulihkan tanah dan air adalah bagian dari memulihkan iman; menjaga kebersihan sungai adalah bagian dari menjaga kebersihan hati; dan menanam pohon adalah bagian dari menanam harapan akan kebaikan yang tumbuh. Dalam kerangka ini, nasionalisme sejati dan spiritualitas bukanlah dua hal yang terpisah. Keduanya bertemu dalam tindakan merawat bumi sebagai rumah bersama, sebagai amanat Tuhan, dan sebagai wujud cinta kepada tanah air yang tidak berhenti pada kata-kata.

Dengan menyadari bahwa Tuhan hadir dalam setiap jengkal tanah, kita diajak untuk mengubah cara kita melangkah di atas bumi. Setiap langkah di atas tanah adalah perjumpaan; setiap jengkal yang kita pijak adalah ruang suci; setiap tindakan yang merawat atau merusak adalah pilihan moral yang disaksikan oleh Yang Maha Mengetahui. Maka, tidak ada alasan untuk merasa bahwa urusan tanah dan air hanyalah urusan teknis yang bisa diserahkan kepada segelintir ahli. Ia adalah urusan iman, urusan kemanusiaan, dan urusan kebangsaan yang harus dirawat oleh semua orang. Dari kesadaran inilah lahir harapan bahwa tanah air ini akan tetap menjadi tempat yang memberkati, bukan hanya bagi generasi sekarang, tetapi juga bagi anak cucu yang akan datang. Mereka berhak mewarisi tanah yang masih menyimpan kehadiran Tuhan, air yang masih jernih, udara yang masih bersih, dan matahari yang masih menyinari dengan hangat. Di dalam warisan itulah terletak kemerdekaan sejati yang tidak akan pernah selesai dirumuskan, tetapi selalu bisa dirawat dan diteruskan.

Bab 14
Jawa Barat
sebagai Model Kemerdekaan Holistik

Setiap zaman memiliki wilayah-wilayah yang memikul harapan lebih besar daripada sekadar menjalankan administrasi pemerintahan. Wilayah-wilayah itu menjadi tempat lahirnya gagasan, percobaan sosial, dan arah baru yang kemudian memengaruhi daerah-daerah lain. Dalam sejarah Indonesia, beberapa daerah pernah memainkan peran semacam itu, baik sebagai pusat kebangkitan, pusat pendidikan, maupun pusat perlawanan. Jawa Barat, dengan segala kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusianya, memiliki potensi untuk mengambil peran yang serupa di masa kini: menjadi model bagi Indonesia dalam membangun kemerdekaan yang utuh. Bukan hanya kemerdekaan politik yang sudah diraih, melainkan kemerdekaan yang menyatu dengan tanah, air, udara, dan matahari—kemerdekaan yang hidup dalam keseharian, bukan sekadar dikumandangkan dalam upacara.

Gagasan menjadikan Jawa Barat sebagai model kemerdekaan holistik bukanlah keinginan untuk menonjolkan satu daerah di atas yang lain. Ia justru lahir dari kesadaran bahwa krisis yang dihadapi Indonesia hari ini adalah krisis cara pandang. Kita telah begitu lama memisahkan hal-hal yang seharusnya menyatu: ekonomi dipisahkan dari ekologi, pendidikan dipisahkan dari karakter, pembangunan dipisahkan dari spiritualitas, dan kemajuan dipisahkan dari keadilan. Akibatnya, negeri ini tumbuh dalam keterpecahan: gedung-gedung menjulang tetapi sungai-sungai tercemar; angka pertumbuhan naik tetapi jurang ketimpangan melebar; sekolah-sekolah mencetak lulusan tetapi jiwa-jiwa kehilangan arah. Di tengah keterpecahan itulah, Jawa Barat—dengan warisan budaya Sunda yang menekankan keseimbangan—memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa ada jalan lain. Sebuah jalan yang tidak menolak kemajuan, tetapi menuntut agar kemajuan itu selaras dengan alam dan manusia.

Pidato KDM yang menjadi bahan renungan buku ini sesungguhnya adalah cetak biru awal dari model tersebut. Ia tidak hanya berisi kritik dan pengakuan, tetapi juga arah: bahwa pembangunan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar

warga; bahwa pertanian harus kembali menjadi pertanian hijau; bahwa kesehatan harus dimulai dari tanah, air, dan udara; bahwa generasi muda harus dilindungi dari penjajahan tak terlihat; dan bahwa para pemimpin harus menunda hasrat pribadinya demi kepentingan rakyat. Semua arah itu tidak berdiri sendiri-sendiri; ia ditenun oleh satu benang merah yang disebut *Papat Kalima Pancer*. Dalam benang merah itulah letak kekuatan Jawa Barat sebagai model: ia menawarkan bukan sekadar kebijakan, tetapi sebuah kerangka berpikir yang utuh, yang lahir dari akar budaya sendiri dan karena itu memiliki kedalaman yang tidak dimiliki oleh model-model pembangunan impor.

Model kemerdekaan holistik yang dibayangkan di sini menolak pendekatan pembangunan yang serba terfragmentasi. Selama ini, kita terbiasa menangani masalah secara terpisah-pisah: ada dinas pertanian, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan dinas lingkungan, tetapi masing-masing bekerja dalam sekat-sekatnya sendiri. Pertanian dikejar untuk produksi tanpa memikirkan kesehatan; kesehatan ditangani dengan membangun rumah sakit tanpa memperbaiki lingkungan; pendidikan diarahkan untuk mengejar angka tanpa membentuk manusia. Dalam model holistik, sekat-sekat itu ditembus. Pertanian, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan dipandang sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi. Tanah yang sehat menghasilkan pangan yang sehat; pangan yang sehat menghasilkan tubuh yang sehat; tubuh yang sehat menopang pendidikan yang baik; dan pendidikan yang baik melahirkan kesadaran untuk menjaga tanah. Ini adalah lingkaran kebaikan yang hanya mungkin berjalan jika semua unsur diperlakukan sebagai bagian dari satu kesatuan, bukan sebagai sektor-sektor yang bersaing.

Jawa Barat memiliki modal yang besar untuk menjalankan model ini. Secara ekologis, wilayah ini dianugerahi tanah yang subur, air yang melimpah, dan potensi energi terbarukan yang besar. Secara kultural, masyarakat Sunda mewarisi kearifan yang menghormati alam dan menjunjung keseimbangan, sebagaimana tercermin dalam *Papat Kalima Pancer*, *gemah ripah repeh rapih*, dan berbagai ungkapan lokal lainnya. Secara sosial, Jawa Barat memiliki sumber daya manusia yang besar, termasuk generasi muda yang berprestasi di tingkat internasional, sebagaimana disebut KDM dalam pidatonya. Yang diperlukan adalah keberanian untuk merajut semua modal itu ke dalam satu arah pembangunan yang jelas, bukan membiarkannya tercecer dalam proyek-proyek yang tidak saling terhubung. Di sinilah peran kepemimpinan menjadi kunci: dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya pandai berpidato, tetapi sanggup menyatukan visi, menggerakkan birokrasi, dan merawat kepercayaan rakyat.

Bab ini akan menjadi semacam penutup reflektif dari seluruh perjalanan buku ini. Kita akan membahas bagaimana pembangunan yang menyatukan ekonomi, ekologi, pendidikan, dan spiritualitas dapat dirumuskan; bagaimana arah baru pembangunan

berbasis filosofi lokal dapat ditegakkan tanpa terjebak pada romantisme masa lalu; dan bagaimana pengalaman Jawa Barat, jika berhasil, dapat menjadi sumbangan bagi Indonesia secara keseluruhan. Kita tidak sedang membayangkan sebuah utopia yang sempurna; kita sedang merintis sebuah kemungkinan yang lahir dari kenyataan dan harapan. Sebab di tengah kebisingan zaman, kita memerlukan contoh yang hidup: sebuah daerah yang berani membuktikan bahwa kemerdekaan sejati bukanlah mimpi yang mustahil, melainkan pekerjaan yang bisa dimulai dari hal-hal yang paling sederhana—dari tanah, air, udara, dan matahari yang dirawat dengan penuh cinta.

Dengan menjadikan Jawa Barat sebagai model, kita juga sedang menegaskan bahwa kearifan lokal bukanlah peninggalan yang hanya layak disimpan di museum. Ia adalah sumber hidup yang dapat memberi arah bagi pembangunan. Selama ini, kita terlalu sering menganggap bahwa cara berpikir modern harus menggantikan cara berpikir lokal, padahal keduanya bisa berjalan bersama. *Papat Kalima Pancer* bukanlah pengganti ilmu pengetahuan; ia adalah kerangka nilai yang dapat memberi makna pada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memberi kita alat untuk memahami tanah, air, dan udara; *Papat Kalima Pancer* mengingatkan kita bahwa tanah, air, dan udara adalah saudara yang harus dihormati. Perpaduan inilah yang dapat melahirkan pembangunan yang cerdas dan bermoral, yang maju tanpa merusak, yang tumbuh tanpa menindas.

Bab ini juga mengajak kita untuk berpikir tentang tanggung jawab antardaerah dan antargenerasi. Jawa Barat tidak hidup sendirian; ia adalah bagian dari Indonesia, dan keberhasilannya harus dibagikan, bukan disimpan untuk diri sendiri. Gagasan-gagasan yang lahir di tanah Sunda—tentang pertanian organik, tentang keadilan sosial, tentang kepemimpinan yang menunda hasrat—harus bisa diterjemahkan oleh daerah-daerah lain sesuai dengan konteks masing-masing. Dengan demikian, model kemerdekaan holistik bukanlah milik satu daerah, melainkan milik bangsa. Ia adalah undangan bagi seluruh Indonesia untuk kembali kepada akar-akarnya, kepada tanah dan airnya, kepada kearifan leluhurnya, dan kepada cita-cita kemerdekaan yang belum selesai. Dalam kerangka ini, Jawa Barat bukanlah pusat yang ingin mendominasi, melainkan *pancer* yang ingin menjaga keseimbangan, sebagaimana diajarkan oleh filosofi Sunda itu sendiri.

Akhirnya, bab ini ditulis dengan harapan agar pembaca tidak hanya berhenti pada kata-kata. Sebab sebuah buku, sebagus apa pun, hanyalah kertas jika ia tidak menggerakkan tangan untuk bekerja, hati untuk peduli, dan kaki untuk melangkah. Model kemerdekaan holistik tidak akan lahir dari ruang diskusi; ia harus lahir dari sawah-sawah yang dirawat, sungai-sungai yang dijaga, sekolah-sekolah yang mendidik, dan para pemimpin yang berani menunda hasratnya. Jawa Barat bisa menjadi awal, tetapi ujungnya haruslah Indonesia yang lebih utuh. Dari tanah Sunda, kita belajar bahwa hidup adalah jalinan yang saling mengikat; dari sana pula

kita percaya bahwa kemerdekaan sejati akan tumbuh, bukan dari gedung-gedung yang tinggi, tetapi dari akar-akar yang menancap dalam ke bumi, dari air yang mengalir jernih, dari udara yang segar, dan dari hati yang bersyukur. Itulah warisan terbaik yang bisa kita teruskan, dan itulah makna paling dalam dari merdeka.

Pembangunan yang Menyatukan Ekonomi, Ekologi, Pendidikan, dan Spiritualitas

Pembangunan yang selama ini kita kenal hampir selalu menempatkan ekonomi sebagai pusat gravitasi. Pertumbuhan ekonomi dijadikan ukuran utama keberhasilan, seolah-olah seluruh aspek kehidupan dapat dijelaskan dengan angka-angka produksi, pendapatan, dan investasi. Dalam kerangka semacam ini, ekologi sering kali diperlakukan sebagai sektor yang menghambat: hutan dianggap sebagai lahan tidur yang harus diubah menjadi kawasan industri, sungai dianggap sebagai saluran pembuangan yang tidak perlu dipedulikan, dan tanah dianggap sebagai komoditas yang bisa dijual kepada penawar tertinggi. Pendidikan pun direduksi menjadi mesin pencetak tenaga kerja, sementara spiritualitas dipinggirkan sebagai urusan pribadi yang tidak relevan dengan kebijakan publik. Akibatnya, pembangunan berjalan seperti mesin yang kehilangan arah: ia menghasilkan banyak hal, tetapi juga menghancurkan banyak hal; ia memperkaya segelintir orang, tetapi memiskinkan banyak orang; ia memajukan teknologi, tetapi memundurkan kemanusiaan.

Model pembangunan holistik yang diusulkan dalam bab ini menolak cara pandang yang memisahkan itu. Ia berangkat dari keyakinan bahwa ekonomi, ekologi, pendidikan, dan spiritualitas adalah empat unsur yang saling mengikat, seperti tanah, air, udara, dan matahari dalam *Papat Kalima Pancer*. Tidak ada satu pun yang boleh didahulukan dengan mengorbankan yang lain. Ekonomi yang sehat hanya mungkin tumbuh di atas ekologi yang sehat; pendidikan yang baik hanya akan bermakna jika membentuk manusia yang utuh; dan pembangunan yang tidak berakar pada spiritualitas akan cepat jatuh ke dalam keserakahan dan kehancuran. KDM tampaknya menyadari hal ini ketika ia merangkai pidatonya dengan alur yang tidak biasa: dari pengakuan kegagalan, ke kritik feodalisme, ke pertanian organik, ke kesehatan, ke narkoba, lalu ke kepemimpinan yang menunda hasrat. Semua topik itu terlihat melompat-lompat, tetapi sesungguhnya ditenun oleh satu kesadaran yang sama: bahwa kemerdekaan sejati adalah keseimbangan, dan pembangunan yang timpang akan terus melahirkan penjajahan.

Menyatukan ekonomi dan ekologi adalah langkah pertama yang paling mendesak. Selama ini, kita terbiasa mendengar bahwa menjaga lingkungan berarti mengorbankan pertumbuhan, dan mengejar pertumbuhan berarti membiarkan lingkungan rusak. Dikotomi ini keliru dan menyesatkan. Pertanian organik yang

diusulkan KDM adalah bukti bahwa ekonomi dan ekologi bisa berjalan beriringan. Tanah yang dirawat secara organik memang mungkin menghasilkan panen yang lebih sedikit pada awal transisi, tetapi ia memulihkan kesuburan, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang harganya terus naik, dan menghasilkan produk yang lebih bernilai di pasar. Dalam jangka panjang, petani organik justru lebih sejahtera karena biaya produksinya turun dan harga jualnya naik. Demikian pula ekowisata, energi terbarukan, dan industri kreatif berbasis budaya lokal—semuanya adalah sektor ekonomi yang justru tumbuh subur justru karena ekologi dijaga. Jadi, persoalannya bukan memilih antara ekonomi atau ekologi, melainkan membangun ekonomi yang menjadikan ekologi sebagai fondasi, bukan sebagai korban.

Pendidikan dalam model holistik tidak boleh berhenti pada transfer pengetahuan. Ia harus membentuk manusia yang seimbang: cakap secara intelektual, peka secara sosial, dan teguh secara moral. KDM menyinggung ini ketika ia menyebut bahwa pendidikan harus ditingkatkan bukan hanya angka rata-rata lama sekolahnya, tetapi juga mutunya. Namun, mutu di sini tidak boleh diartikan secara sempit sebagai nilai ujian atau peringkat internasional. Mutu yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk memahami keterhubungan antara diri, sesama, alam, dan Tuhan. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, pendidikan adalah proses menumbuhkan kesadaran pusat: membantu setiap anak menyadari bahwa ia adalah penjaga keseimbangan, bukan sekadar calon pekerja. Maka, kurikulum harus menyentuh pengalaman nyata: anak-anak diajak menanam, merawat, memanen, membersihkan sungai, memahami musim, dan menghormati pekerjaan orang lain. Dari situ mereka belajar bahwa hidup tidak hanya soal bersaing, tetapi juga soal merawat; tidak hanya soal memiliki, tetapi juga soal memberi. Pendidikan semacam ini akan melahirkan generasi yang tidak hanya pandai, tetapi juga baik—generasi yang tidak akan merusak hutan demi keuntungan, karena sejak kecil mereka telah belajar bahwa hutan adalah saudara.

Spiritualitas, yang sering kali dianggap tidak relevan dalam urusan pembangunan, justru merupakan fondasi yang paling dalam. Tanpa spiritualitas, pembangunan akan didorong oleh keserakahan yang tidak pernah puas. Ia akan terus mengejar pertumbuhan tanpa pernah bertanya untuk apa. Tetapi ketika spiritualitas dihidupkan, manusia diingatkan bahwa bumi ini adalah amanat, bahwa kekayaan bukanlah tujuan akhir, dan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada banyaknya harta, melainkan pada keselarasan hidup. KDM menyebut bahwa Tuhan hadir dalam setiap jengkal tanah; ini adalah pernyataan spiritual yang menuntut tanggung jawab ekologis. Jika Tuhan hadir di tanah, maka merusak tanah adalah merusak sesuatu yang suci. Jika Tuhan hadir di air, maka mencemari air adalah penghinaan terhadap anugerah-Nya. Maka, spiritualitas bukan hanya urusan masjid, gereja, atau ritual pribadi; ia adalah sumber etika publik yang menjaga

pembangunan tetap berpihak pada kehidupan. Pemimpin yang saleh bukan yang paling banyak berdoa, tetapi yang paling takut merugikan rakyat dan merusak alam.

Keempat unsur ini—ekonomi, ekologi, pendidikan, dan spiritualitas—tidak bisa disatukan secara instan. Ia menuntut perubahan struktural dalam cara kita merancang kebijakan dan anggaran. Selama ini, setiap dinas bekerja dalam sekatnya sendiri, mengejar targetnya masing-masing, dan sering kali justru saling merugikan. Dinas ekonomi mendorong investasi yang merusak hutan; dinas lingkungan berjuang sendirian melawan pencemaran; dinas pendidikan sibuk mengejar angka kelulusan; dan urusan spiritualitas diserahkan kepada Kantor Kementerian Agama yang juga bekerja sektoral. Model holistik menuntut duduk bersama: merancang pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh, di mana setiap keputusan ekonomi mempertimbangkan dampak ekologis, setiap kebijakan pendidikan menanamkan kesadaran spiritual, dan setiap program pembangunan diuji dengan pertanyaan sederhana: apakah ia menyejahterakan rakyat, merawat alam, mencerdaskan generasi, dan mendekatkan manusia kepada Tuhannya? Jika jawabannya tidak, maka program itu harus ditunda atau dibatalkan, betapapun menguntungkannya secara finansial.

Jawa Barat memiliki peluang untuk mempraktikkan model ini karena ia memiliki akar budaya yang mendukung. Masyarakat Sunda sejak lama mengenal konsep *silih asih, silih asah, silih asuh*—saling mengasihi, saling mencerdaskan, saling memelihara. Ini adalah modal sosial yang luar biasa untuk membangun pembangunan holistik. Jika nilai-nilai itu dihidupkan dalam birokrasi, maka para pejabat tidak akan bekerja sebagai penguasa yang saling berebut anggaran, tetapi sebagai pelayan yang saling mengingatkan dan melengkapi. Jika nilai-nilai itu dihidupkan dalam masyarakat, maka warga tidak akan tinggal diam melihat sungainya dicemari atau tanahnya dijual kepada investor asing. Mereka akan bergerak, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kesadaran bahwa menjaga alam adalah bagian dari menjaga diri sendiri. Dalam suasana seperti ini, pembangunan tidak lagi menjadi proyek yang ditakuti rakyat, tetapi menjadi kerja bersama yang menggembirakan.

Tentu saja, semua ini tidak akan terjadi dengan sendirinya. Dibutuhkan pemimpin yang berani memulai, birokrasi yang mau berubah, dan masyarakat yang bersedia terlibat. KDM dalam pidatonya telah memberikan isyarat awal: dengan menempatkan rakyat kecil di tenda VIP, ia menunjukkan bahwa prioritas pembangunan harus berpindah dari kaum elite ke kaum marjinal. Dengan menyerukan pertanian organik, ia menunjukkan bahwa ekonomi harus dibangun di atas ekologi. Dengan mengajak menunda hasrat pribadi, ia menunjukkan bahwa spiritualitas bukanlah kata kosong, melainkan praktik harian para pemimpin. Semua isyarat itu perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret, program yang terukur, dan budaya kerja yang baru. Jika itu terjadi, maka Jawa Barat tidak hanya

menjadi provinsi yang maju, tetapi juga menjadi teladan bagi Indonesia tentang bagaimana membangun tanpa merusak, tumbuh tanpa menindas, dan merdeka tanpa melupakan akar. Inilah wujud nyata dari kemerdekaan holistik, dan di sinilah semua benang merah buku ini bertemu.

Arah Baru Pembangunan Berbasis Filosofi Lokal

Pembangunan selama ini lebih banyak dipandu oleh angka-angka daripada oleh nilai-nilai. Rencana pembangunan disusun dengan target-target kuantitatif: berapa persen pertumbuhan ekonomi, berapa kilometer jalan yang harus dibangun, berapa ton padi yang harus dipanen, dan berapa persen angka kemiskinan yang harus diturunkan. Semua itu memang perlu, tetapi angka-angka tersebut tidak pernah bisa menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: untuk apa semua itu, dan bagaimana caranya agar pembangunan tidak merusak apa yang justru menjadi sumber kehidupan? Di sinilah filosofi lokal menemukan tempatnya. Ia hadir bukan untuk menggantikan perencanaan teknokratis, melainkan untuk memberinya arah dan makna. *Papat Kalima Pancer*, sebagai warisan kosmologi Sunda, menawarkan sebuah arah baru: pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan, tetapi pada keseimbangan; tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga merawat proses; tidak hanya berpusat pada manusia, tetapi juga menghormati tanah, air, udara, dan matahari sebagai unsur yang setara.

Arah baru ini berangkat dari keyakinan bahwa cara pandang lokal bukanlah penghalang kemajuan. Sebaliknya, ia adalah sumber kebijaksanaan yang telah teruji oleh waktu. Masyarakat Sunda sejak lama memahami bahwa hidup yang baik adalah hidup yang *seimbang*, bukan hidup yang menumpuk. Mereka mengungkapkannya dalam berbagai pepatah dan falsafah: *silih asih, silih asah, silih asuh*; *gemah ripah repeh rapih*; dan *papat kalima pancer*. Semua ungkapan itu, jika direnungkan, sebenarnya adalah pedoman pembangunan yang utuh: saling mengasihi berarti membangun solidaritas sosial; saling mencerdaskan berarti membangun pendidikan yang merata; saling memelihara berarti menjaga alam dan lingkungan. *Gemah ripah repeh rapih* adalah gambaran hasil akhirnya: masyarakat makmur, tenteram, dan tertib. *Papat Kalima Pancer* adalah prinsip kerjanya: menjaga keseimbangan empat unsur dengan manusia sebagai pusat yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, para leluhur Sunda telah meninggalkan sebuah model pembangunan yang justru sangat relevan dengan krisis zaman sekarang.

Masalahnya, filosofi lokal semacam ini selama ini hanya ditempatkan sebagai hiasan budaya. Ia diucapkan dalam pidato, ditulis di papan nama, tetapi jarang diterjemahkan ke dalam kebijakan. Dinas-dinas pembangunan bekerja dengan logika sektoral yang jauh dari nilai-nilai itu. Anggaran disusun berdasarkan

kepentingan jangka pendek, bukan berdasarkan prinsip keseimbangan. Tata ruang dirancang untuk mendatangkan investasi, bukan untuk menjaga kelestarian. Akibatnya, filosofi lokal kehilangan dayanya; ia menjadi benda mati yang tidak mampu memengaruhi cara kita bekerja. Maka, membangun arah baru berbasis filosofi lokal berarti melakukan sesuatu yang lebih serius: menjadikan nilai-nilai itu sebagai dasar perumusan kebijakan. Misalnya, setiap proyek pembangunan harus diuji dengan pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari *Papat Kalima Pancer*: Apakah proyek ini menjaga tanah tetap subur? Apakah ia menjaga air tetap bersih? Apakah ia tidak mencemari udara? Apakah ia membuka akses energi secara adil? Apakah ia menempatkan manusia sebagai penjaga, bukan sebagai perusak? Jika jawabannya tidak, maka proyek itu harus ditolak, meskipun menjanjikan keuntungan besar.

Penerapan filosofi lokal juga menuntut perubahan dalam cara kita memandang kemajuan. Selama ini, kemajuan hampir selalu diukur dari seberapa banyak yang berubah: lahan hijau menjadi gedung, desa menjadi kota, air mengalir menjadi air dalam kemasan. Tetapi kemajuan sejati tidak selalu berarti mengubah; kadang-kadang ia berarti mempertahankan. Menjaga mata air tetap jernih adalah kemajuan; mempertahankan sawah tetap produktif adalah kemajuan; memelihara hutan tetap rimbun adalah kemajuan. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, kemajuan adalah ketika empat unsur tetap seimbang dan manusia tetap berperan sebagai pusat yang merawat. Dengan kata lain, pembangunan berbasis filosofi lokal adalah pembangunan yang berani melawan arus modernisasi yang serba mengubah, dengan mengajukan pertanyaan kunci: apakah perubahan ini benar-benar membuat hidup lebih baik, atau justru membuat kita kehilangan sumber kehidupan? Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh angka, tetapi oleh kebijaksanaan.

Tentu saja, arah baru ini tidak mudah dijalankan. Ia menghadapi tantangan besar, terutama dari cara berpikir yang sudah telanjur terbentuk. Banyak pejabat dan pengusaha yang masih menganggap bahwa tanah adalah komoditas, air adalah sumber keuntungan, dan hutan adalah lahan tidur. Mengubah cara pandang ini membutuhkan pendidikan yang panjang, teladan yang kuat, dan keberanian politik yang tidak kecil. Selain itu, ada pula godaan untuk menjadikan filosofi lokal sebagai slogan kosong: diucapkan di mana-mana, tetapi tidak dijalankan. KDM sendiri tampak menyadari bahaya ini; pidatonya tidak hanya menyebut *Papat Kalima Pancer*, tetapi juga mengecam perilaku feodalistik dan menuntut para pemimpin untuk menunda hasrat pribadinya. Ini adalah isyarat bahwa filosofi lokal hanya akan bermakna jika ia dihidupkan dalam tindakan, bukan sekadar diucapkan dalam upacara. Pidato tanpa tindakan adalah kemunafikan; filosofi tanpa praksis adalah kertas usang.

Salah satu jalan untuk menerjemahkan filosofi lokal ke dalam kebijakan adalah melalui pendidikan dan pelatihan birokrasi. Para pemimpin daerah, para kepala

dinas, dan para perencana pembangunan perlu diajak untuk memahami kembali akar budaya mereka sendiri. Mereka perlu belajar bahwa *Papat Kalima Pancer* bukan sekadar istilah kuno, tetapi kerangka berpikir yang dapat memandu perencanaan. Jika para birokrat ini memahami maknanya, mereka akan lebih mudah membuat kebijakan yang selaras: anggaran yang memprioritaskan pertanian organik, tata ruang yang melindungi kawasan resapan air, transportasi yang mengurangi emisi, dan layanan publik yang menghormati martabat warga. Dengan demikian, filosofi lokal bukan hanya menjadi milik para budayawan, tetapi menjadi milik pemerintahan, menjadi napas birokrasi, dan menjadi ukuran keberhasilan. Ini adalah langkah penting menuju pembangunan yang benar-benar holistik.

Masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif. Sebab filosofi lokal hidup bukan di kertas, tetapi di tengah-tengah warga. Petani yang menolak pestisida, pemuda yang membersihkan sungai, ibu-ibu yang menanam sayur di pekarangan, dan tokoh adat yang menjaga mata air adalah pelaku-pelaku utama dari arah baru ini. Pemerintah perlu membuka ruang bagi mereka, mendukung dengan kebijakan yang memudahkan, dan belajar dari pengalaman mereka. Dalam kerangka *Papat Kalima Pancer*, masyarakat adalah empat penjuru yang harus didengar oleh pusat; bukan hanya diperintah, tetapi diajak berdialog. Pembangunan tidak boleh lagi berjalan dari atas ke bawah dengan rakyat sebagai objek; ia harus tumbuh dari bawah ke atas dengan rakyat sebagai subjek. KDM memberi contoh bagaimana hal itu bisa dilakukan: dengan menempatkan rakyat kecil di tenda VIP, ia sedang mengatakan bahwa suara rakyat kecil lebih penting daripada kenyamanan para elite. Jika semangat ini diterjemahkan ke dalam kebijakan, maka rakyat akan merasa memiliki pembangunan, dan pembangunan itu akan berakar kuat.

Arah baru ini juga membuka kemungkinan bagi lahirnya ekonomi yang lebih bermartabat. Selama ini, ekonomi kita banyak bergantung pada eksploitasi sumber daya alam dengan nilai tambah yang rendah: tanah digali, hutan ditebang, air dikuras, lalu semuanya dijual mentah-mentah. Dalam kerangka filosofi lokal, ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang mengolah tanpa merusak, yang menghasilkan tanpa menghabiskan, dan yang menyejahterakan tanpa menindas. Misalnya, buah-buahan khas Jawa Barat seperti manggis, duren, dan rambutan bisa diolah menjadi produk-produk bernilai tinggi jika didukung oleh riset, desain, dan pemasaran yang baik. Petani organik bisa mendapatkan harga yang lebih adil jika rantai pasoknya dipendekkan dan pasar lokalnya dihidupkan. Energi panas bumi bisa dikembangkan dengan tetap menjaga kelestarian hutan di atasnya. Semua ini adalah contoh-contoh nyata bahwa filosofi lokal tidak anti-ekonomi; ia justru mengarahkan ekonomi ke jalan yang lebih berkelanjutan dan lebih adil.

Dengan demikian, arah baru pembangunan berbasis filosofi lokal bukanlah utopia yang mengawang. Ia adalah pilihan yang realistis dan mendesak, terutama di tengah krisis ekologi dan sosial yang semakin nyata. Jawa Barat, dengan warisan

budayanya yang kaya, memiliki kesempatan untuk menjadi pelopor. Bukan dengan cara menyombongkan diri, tetapi dengan bekerja sungguh-sungguh: merawat tanah, menjaga air, membersihkan udara, membuka akses energi secara adil, mendidik generasi dengan nilai-nilai keseimbangan, dan memimpin dengan teladan yang bersahaja. Jika semua itu dilakukan, maka Jawa Barat akan menunjukkan kepada Indonesia bahwa kemerdekaan sejati bukanlah mimpi yang jauh, melainkan jalan yang bisa dimulai dari sekarang, dari tempat kita berdiri, dan dari cara kita memperlakukan alam dan sesama. Ini adalah arah yang telah digariskan oleh para leluhur, disuarakan kembali oleh KDM, dan kini menunggu untuk diwujudkan oleh kita semua.

Dari Jawa Barat untuk Indonesia

Gagasan bahwa satu daerah dapat menjadi model bagi daerah lain bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia. Sejak masa kebangkitan nasional, berbagai kota dan wilayah telah memainkan peran sebagai pusat gagasan, pendidikan, dan pergerakan yang kemudian menyebar ke seluruh Nusantara. Yogyakarta dan Surakarta pernah menjadi basis pendidikan dan kebudayaan, Sumatera Barat melahirkan banyak pemikir kebangsaan, dan Bandung sendiri pernah menjadi saksi dari semangat internasionalisme yang melahirkan Konferensi Asia-Afrika. Dari sejarah itu kita belajar bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari pusat kekuasaan; ia sering kali lahir dari daerah-daerah yang memiliki keberanian untuk berpikir dan bertindak lebih dahulu. Dalam konteks itulah gagasan tentang Jawa Barat sebagai model kemerdekaan holistik menemukan relevansinya: bukan karena Jawa Barat lebih istimewa, tetapi karena ia memiliki warisan budaya, kekayaan alam, dan tantangan sosial yang mewakili Indonesia dalam skala kecil.

Jawa Barat adalah Indonesia dalam bentuk miniatur. Di dalamnya terdapat kota-kota besar yang padat dan desa-desa terpencil yang masih gelap; terdapat kawasan industri yang modern dan sawah-sawah yang membutuhkan perhatian; terdapat pusat-pusat pendidikan tinggi dan anak-anak yang putus sekolah; terdapat pegunungan yang menyimpan energi panas bumi dan sungai-sungai yang tercemar limbah. Semua persoalan yang dihadapi Indonesia—ketimpangan, kerusakan lingkungan, krisis generasi, feodalisme, dan krisis kepemimpinan—hadir di Jawa Barat dalam kadar yang cukup untuk dipelajari dan ditangani. Jika Jawa Barat mampu menemukan jalan keluar dari persoalan-persoalan itu dengan berpegang pada kearifan lokalnya, maka pengalaman itu akan menjadi pelajaran berharga bagi daerah-daerah lain. Sebaliknya, jika Jawa Barat gagal, maka kegagalannya juga akan menjadi cermin bagi seluruh negeri. Dengan kata lain, Jawa Barat bukan

sekadar provinsi; ia adalah laboratorium kebangsaan tempat gagasan-gagasan tentang kemerdekaan sejati diuji dan dihidupkan.

Sumbangan terbesar yang bisa diberikan Jawa Barat kepada Indonesia bukanlah gedung-gedung megah atau angka pertumbuhan yang tinggi, melainkan cara pandang baru tentang pembangunan. Selama ini, Indonesia terjebak dalam pola pembangunan yang seragam: meniru model pertumbuhan yang menekankan industrialisasi besar-besaran, eksploitasi sumber daya alam, dan modernisasi perkotaan. Pola ini memang menghasilkan kemajuan, tetapi juga menciptakan kerusakan yang dalam. Jawa Barat, dengan warisan *Papat Kalima Pancer*, memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa ada jalan lain yang lebih seimbang. Jalan itu tidak menolak kemajuan, tetapi menuntut agar kemajuan tidak merusak tanah, air, udara, dan matahari sebagai sumber kehidupan. Jika jalan ini berhasil dipraktikkan di Jawa Barat, maka ia akan menjadi kabar baik bagi seluruh Indonesia: bahwa pembangunan tidak harus selalu dibayar dengan penderitaan rakyat kecil dan kerusakan alam; bahwa kearifan lokal bukan penghambat, melainkan penuntun; dan bahwa kemerdekaan sejati adalah keseimbangan, bukan sekadar pertumbuhan.

Untuk mewujudkan itu, Jawa Barat perlu memulai dari dirinya sendiri: menata ulang birokrasinya agar tidak feodal, mengarahkan anggarannya untuk kebutuhan dasar rakyat, memulihkan tanah dan airnya melalui pertanian organik, melindungi generasinya dari penjajahan tak terlihat, dan menjadikan para pemimpinnya sebagai teladan dalam menunda hasrat pribadi. Semua ini bukan pekerjaan yang selesai dalam satu atau dua periode pemerintahan. Ia adalah pekerjaan lintas generasi yang menuntut kesinambungan visi dan keteguhan hati. Namun, justru di situlah letak ujiannya: apakah Jawa Barat sanggup menjaga arah ini ketika ganti pemimpin, ganti kebijakan, dan ganti prioritas? Di sinilah pentingnya melembagakan nilai-nilai, bukan sekadar mengandalkan sosok. *Papat Kalima Pancer* harus dijadikan dasar dalam dokumen-dokumen perencanaan, kurikulum pendidikan, dan kode etik pemerintahan, sehingga ia tidak hilang ketika satu pemimpin berlalu. Dengan cara itu, model pembangunan holistik akan menjadi milik masyarakat, bukan milik satu orang atau satu era.

Lebih dari itu, pengalaman Jawa Barat harus dibagikan secara terbuka. Belajar dari Konferensi Asia-Afrika yang lahir di Bandung, Jawa Barat dapat menjadi tuan rumah bagi pertemuan-pertemuan antardaerah untuk saling berbagi praktik baik. Petani organik dari Jawa Barat bisa mengajarkan metodenya kepada petani dari Sumatera atau Nusa Tenggara; para kepala desa bisa saling bercerita tentang cara menjaga mata air; para pemimpin daerah bisa belajar bersama tentang kepemimpinan yang menunda hasrat. Dengan demikian, "dari Jawa Barat untuk Indonesia" bukanlah slogan egois, melainkan undangan untuk bekerja sama. Sebab pada akhirnya, kemerdekaan Indonesia tidak akan terwujud oleh satu daerah saja; ia

adalah hasil dari gotong royong seluruh penjuru negeri. Jawa Barat hanyalah salah satu dari empat penjuru itu, dan perannya adalah menjadi penjaga keseimbangan dengan cara memberi teladan.

Kita juga perlu menegaskan bahwa model kemerdekaan holistik yang ditawarkan di sini bukanlah milik satu suku atau satu agama. *Papat Kalima Pancer* memang lahir dari kosmologi Sunda, tetapi nilainya melampaui batas-batas etnis. Seluruh suku di Indonesia memiliki kearifan yang serupa: ada *hamemayu hayuning bawana* dari Jawa, *tri hita karana* dari Bali, *lubuk larangan* dari Sumatera, dan banyak lagi. Semuanya mengajarkan hal yang sama: bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam, adil kepada sesama, dan tunduk kepada Tuhan. Maka, menjadikan Jawa Barat sebagai model bukanlah upaya untuk mengunggulkan Sunda di atas yang lain, melainkan untuk menunjukkan bahwa kearifan lokal mana pun dapat menjadi landasan pembangunan yang bermartabat. Dengan berpegang pada nilainya sendiri, setiap daerah di Indonesia dapat menjadi model bagi dirinya sendiri, dan dari situlah kebangsaan yang sejati akan tumbuh: bukan dari keseragaman, tetapi dari kesediaan untuk saling menghormati dan saling belajar.

Tentu saja, ada risiko dalam setiap upaya memulai sesuatu yang baru. Ada yang akan mencemooh, ada yang akan meragukan, dan ada yang akan mencoba menghambat. Godaan untuk kembali ke cara-cara lama yang nyaman akan selalu datang, terutama ketika hasil dari pendekatan holistik belum terlihat dalam waktu singkat. Tetapi di sinilah dibutuhkan keberanian untuk percaya pada jalan yang benar, meskipun jalan itu panjang. KDM telah memberi contoh dengan berani mengakui kegagalan dan mengajak rakyatnya untuk berubah. Ia tidak menjanjikan kemudahan; ia justru menunjukkan betapa beratnya pekerjaan itu. Namun, di balik kejujurannya, tersimpan keyakinan bahwa perubahan itu mungkin, asalkan dilakukan bersama. Dari halaman Gedung Sate, ia mengajak seluruh rakyatnya untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, untuk menjaga tanah dan air, dan untuk memuliakan para pekerja kecil. Itulah modal terbesar yang dimiliki Jawa Barat: bukan kekayaan alamnya semata, tetapi keberanian untuk memulai.

Sebagai penutup dari bab ini dan sekaligus penutup dari seluruh rangkaian buku, kita perlu kembali kepada pertanyaan yang menjadi titik berangkat kita: sudahkah kita merdeka? Jawabannya tidak sederhana. Kemerdekaan politik telah diraih, tetapi kemerdekaan sejati—yang mencakup keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap alam—masih harus diperjuangkan setiap hari. Jawa Barat, dengan warisan *Papat Kalima Pancer*-nya, menawarkan sebuah arah untuk melanjutkan perjuangan itu. Jika arah ini diikuti, bukan tidak mungkin Jawa Barat akan menjadi salah satu daerah yang pertama kali membuktikan bahwa model pembangunan holistik itu bukan utopia. Dari bukti itulah Indonesia dapat belajar, dan dari belajar itu Indonesia dapat berubah. Bukan dengan lompatan besar yang menakjubkan, tetapi dengan langkah-langkah sepetak demi sepetak, sejengkal

demi sejengkal, sebagaimana tanah yang dirawat dengan sabar akan memberi hasil pada waktunya.

Dengan demikian, dari Jawa Barat untuk Indonesia bukanlah sekadar arah geografis, melainkan arah hati. Ia adalah ajakan untuk pulang ke akar, untuk menjaga apa yang telah diwariskan, dan untuk membangun masa depan dengan tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Selama tanah masih subur, air masih mengalir, udara masih bersih, dan matahari masih menyinari, maka harapan itu tetap ada. Harapan itu mungkin tidak akan langsung mengubah segalanya, tetapi ia akan menjadi benih yang, jika dirawat oleh banyak tangan, akan tumbuh menjadi pohon yang rindang tempat anak cucu kita berteduh. Di bawah pohon itu kelak mereka akan belajar bahwa kemerdekaan sejati bukanlah sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang dirawat; bukan sesuatu yang dikenang, melainkan sesuatu yang dihidupi. Maka, mulailah dari tempat kita berdiri, dari tanah yang kita pijak, dari air yang kita minum, dan dari udara yang kita hirup. Di sanalah Indonesia yang merdeka sedang menunggu untuk dilahirkan kembali.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

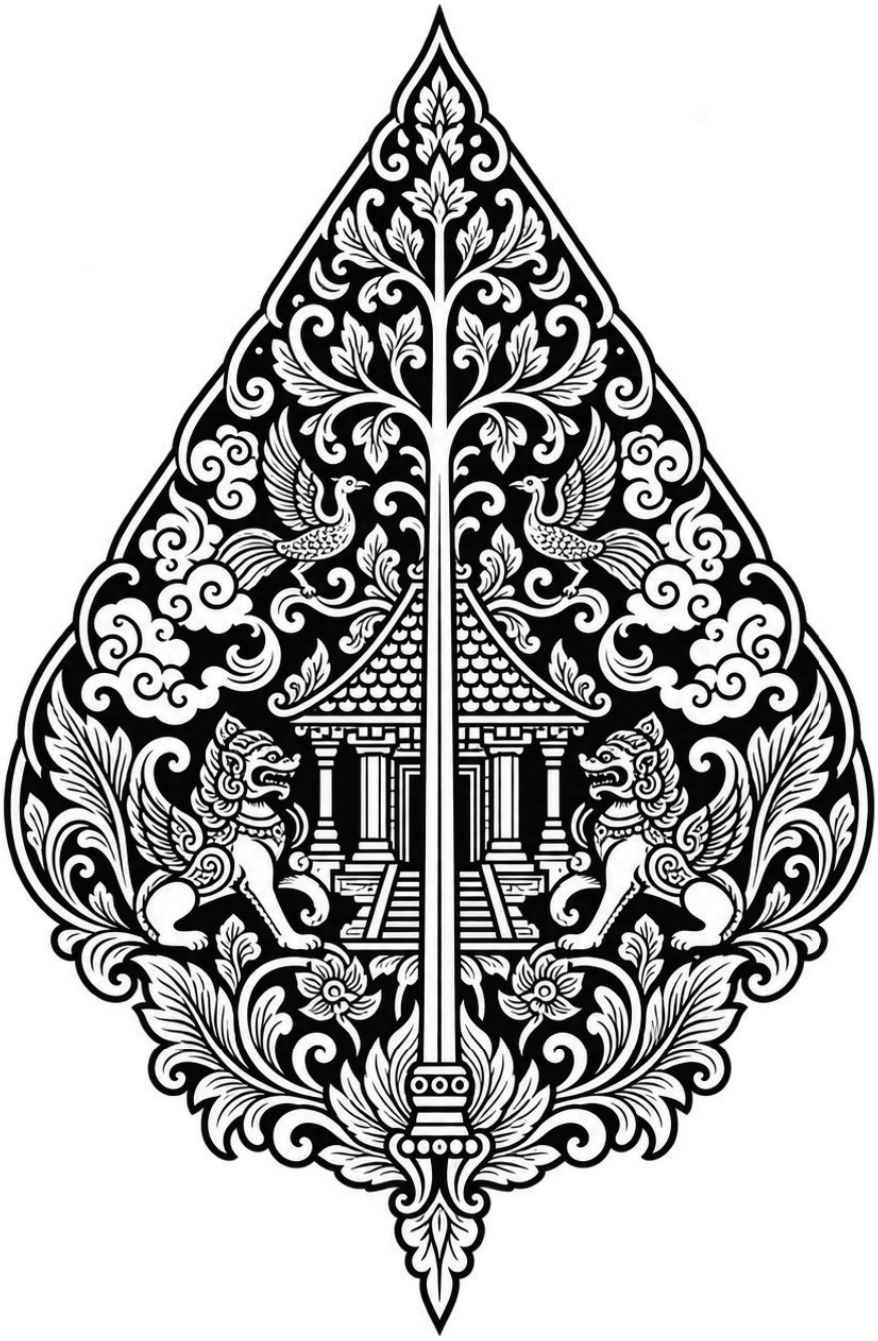

LAMPIRAN 1: TEKS LENGKAP PIDATO KDM

Naskah Pidato KDM
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia
Halaman Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sampurasun.

Yang kami hormati, kami muliakan, dan kami banggakan segenap warga masyarakat Provinsi Jawa Barat di mana pun berada, yang hari ini bersama-sama untuk menundukkan kepala, menyatukan jiwa, mengepalkan tangan, meneriakkan pekik "Merdeka!" sebagai nilai-nilai nasionalisme yang harus diwujudkan.

Kemerdekaan itu oleh kami, para penyelenggara dan pemangku kepentingan, harus diwujudkan dari prinsip-prinsip dasar demokrasi dan ketatanegaraan.

Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih.

Peserta, istri Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat beserta istri, Pangdam III Siliwangi, Kapolda Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat beserta istri.

Kita panjatkan doa kepada almarhum sesepuh masyarakat Jawa Barat, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Solihin GP, yang hari ini keluarganya turut hadir.

Yang saya hormati Gubernur Senior Provinsi Jawa Barat, Bapak Ahmad Heryawan beserta istri.

Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat senior, Pak Nu'man Abdul Hakim,

Bapak Iwa Karniwa beserta istri, Bapak Wawan Ridwan, Ibu Tuti Setia Hidayat, saya ucapkan terima kasih.

Jepopong, saya ucapkan terima kasih.

Para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya.

Para perwira tinggi TNI/Polri yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya.

Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf. Pada saat ini kita berada di luar arena tenda VIP karena tenda VIP hari ini diisi oleh para petani, nelayan, ojol,

Grab, termasuk kuli bangunan yang bekerja bersusah payah ingin menyelesaikan target pembangunan di seluruh Provinsi Jawa Barat dan pembangunan halaman Gedung Sate yang saya beri nama Pancarasa, Pasanggrahan Pancarasa.

Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh para pejabat instansi vertikal Provinsi Jawa Barat, para kepala BUMD, BUMN yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, unsur organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, para alim ulama, guru, para pelajar, dan semua yang hadir, masyarakat Jawa Barat yang berprestasi.

Hadir juga di sini Ataf Faturrahman, peraih medali emas internasional matematika. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kita sampaikan tepuk tangan.

Natanael Wil Atmaja, juara dunia tingkat Neuroscience Olympics.

Lupida Pranama, juara medali emas internasional Olimpiade Sains.

Alana Ratna, silver International Olympiad Science.

Ai Asya Citra, juara bronze International Olympiad Science.

Hania, silver International Olympiad Science.

Kalista Natalia, France International Olympiad Science.

Kirina, Olimpiade Entrepreneurship Silver.

Dan Gaisa Futri, Remaja Jawa Barat 2026.

Di pagi yang berbahagia ini, pertama saya mengucapkan ucapan terima kasih pada para pengibar bendera pusaka Sang Saka Merah Putih sebagai simbol dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mengibarkan Sang Saka dengan sempurna.

Apa yang Anda lakukan, pelatihan yang Anda buat, sikap mental yang ditempuh selama ini, cermin bahwa negeri ini tidak kekurangan anak-anak muda yang memiliki spirit patriotik, yang mau mengorbankan masa remajanya demi kepentingan kehormatan Sang Saka Merah Putih.

Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta upacara dari jajaran TNI dan Polri serta anak-anak pelajar Purwakarta, pelajar Jawa Barat yang sudah mengikuti pendidikan barak militer yang tumbuh menjadi anak-anak patriotik.

Saya ucapkan terima kasih pada Linmas yang usianya sudah rata-rata 60 tahun yang mau berdiri berupacara.

Dan saya ucapkan terima kasih. Hari ini upacara juga diikuti oleh para tukang sapu yang setiap hari membersihkan seluruh areal jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat yang hampir kita rekrut lebih dari 3.000 orang.

Di hari kemerdekaan yang ke-81 ini, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Barat yang berada di Jawa Barat, di luar Jawa Barat, di luar daerah Provinsi Jawa Barat, bahkan sampai di luar negeri untuk mencari nafkah.

Kami menyampaikan permohonan maaf.

81 tahun Indonesia merdeka. Kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat.

Masih ada 80.000 rakyat Jawa Barat yang sampai hari ini belum memiliki jaringan listrik sehingga ketika malam dia kegelapan. Dan 2027 akan kami selesaikan.

Di 2025, pada saat kami menjabat, ada 500.000 lebih rakyat Jawa Barat tidak memiliki listrik.

Padahal Jawa Barat adalah pusat energi, baik geotermal, pembangkit listrik tenaga air yang terhampar luas, dari mulai Jatiluhur, Jatigede, Cirata, Saguling, dan seluruhnya terhampar menyalakan listrik yang menerangi Jawa Barat dan berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk geothermal di berbagai pegunungan di Jawa Barat.

Tetapi ada sebuah ironi ketika kita memiliki energi yang besar, tapi rakyat kita, bahkan yang dekat di pembangkit itu, tidak memiliki listrik.

Seluruh ironi itu harus kita selesaikan secara bersama dengan upaya melakukan penataan dalam sistem keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terarah pada aspek yang menjadi kebutuhan dasar warga.

Bagaimana Jawa Barat harus dilindungi rakyatnya dari gangguan kesehatan.

Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang masuk ke rumah sakit, pulangnya berhutang karena ketidakmampuan keuangan.

Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang terhimpit karena kemiskinannya meninggal tanpa perawatan dari dokter dan paramedis.

Tidak boleh ada rakyat Jawa Barat yang terlahir kemudian caesar dan akhirnya KTP-nya ditahan oleh rumah sakit karena ketidakmampuan pembiayaan.

Seluruhnya akan kita wujudkan secara bersama dengan kerja secara bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat, seluruh instansi vertikal, baik Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat, Kodam III Siliwangi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama, semuanya harus bahu-membahu.

Instansi kita ada instansi daerah, ada instansi vertikal. Tetapi tujuan kita adalah satu, mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

Rasa adil memiliki dua kualifikasi.

Yang pertama adalah keadilan komutatif.

Di mana kita memiliki hak yang sama. Kita berhak menghirup udara bersih setiap hari. Walaupun udaranya tidak semua bersih sampai hari ini, kita berhak mengenyam pendidikan, kita berhak menerima layanan kesehatan, kita berhak mengeluarkan pendapat dan merdeka dalam berorganisasi. Tetapi tetap dipertanggungjawabkan seluruh tindakan kita.

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Itulah kemerdekaan komutatif. Walaupun seluruh kemerdekaan itu pun belum bisa dinikmati oleh seluruh warga.

Keadilan distributif kita wujudkan dengan apa?

Berdasarkan prestasi yang dimiliki oleh setiap orang, maka negara harus memberikan ruang bagi siapapun warganya untuk berprestasi tanpa dihalang-halangi.

Negara merdeka tidak ada lagi kalimat kaum cacah.

Negara merdeka tidak ada lagi kalimat kaum menak.

Negara merdeka tidak lagi orang berpangkat.

Semuanya merdeka, berhak mendapatkan yang terbaik, berhak meraih kedudukan yang terbaik dan yang tertinggi di negeri ini.

Itulah makna kemerdekaan.

Seluruh rangkaian makna kemerdekaan itu harus dikerjakan secara bersama, dikerjakan oleh pemimpin yang mengerti mengelola anggaran, fokus pada apa yang menjadi kebutuhan, menunda seluruh hasrat pribadinya.

Menunda membeli mobil baru menggunakan uang negara.

Menunda membeli baju baru menggunakan uang negara.

Menunda menambah properti di rumah dinasnya sebanyak-banyaknya menggunakan uang negara.

Menunda.

Maka seluruh penundaan itu diarahkan untuk apa?

Mengangkat derajat agar masyarakat Jawa Barat setingkat demi setingkat angka pendidikannya semakin meningkat, tidak lagi terus berkutat di 8 tahun.

Ke depan harus kita meraih minimal 12 tahun, agar masyarakat Jawa Barat angka peningkatan kualitas kesehatannya terus meningkat, agar seluruh layanan kesehatannya siapsiaga, agar masyarakat Jawa Barat ekonominya terus meningkat, mereka memiliki kesempatan kerja.

Seluruh kesempatan kerja tidak bisa lahir dengan sendirinya.

Harus diciptakan dalam sebuah iklim.

Iklim pertanian yang memiliki orientasi sebagai pertanian hijau.

Karena pertanian yang terus-terusan menggunakan pestisida dan pupuk kimia tidak bisa lagi masuk ke pasar dunia dan tidak bisa lagi membuat untung para petani.

Maka sudah selayaknya kita secara bertahap, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat bekerja sepetak demi sepetak.

Seluruh sawah di Jawa Barat dirubah untuk apa?

Mencapai tingkat derajat pertanian organik.

Pertanian organik itu memiliki fungsi pada peningkatan kualitas ekonomi, memiliki fungsi pada kualitas peningkatan kesehatan.

Karena kesehatan tidak melulu rumah sakit. Kesehatan tidak melulu puskesmas. Kesehatan tidak melulu alat kesehatan. Kesehatan tidak melulu paramedis. Kesehatan tidak melulu dokter.

Karena dokter yang sejati adalah diri kita sendiri.

Maka pertanian organik merupakan tahapan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang sehat, yaitu masyarakat Jawa Barat setiap hari mengonsumsi air yang berkualitas.

Masyarakat Jawa Barat setiap hari mengonsumsi buah-buahan yang berkualitas.

Buah-buahan khas Jawa Barat. Ada pisang, ada rambutan, ada manggis, ada duren, banyak lagi buah-buahan khas kita.

Dan itu kalau kita bersama mendorong peningkatan kualitasnya, maka dalam setiap waktu kita akan menikmati makanan yang bermutu yang dilahirkan dari apa?

Dari tanah air di mana kita pijak.

Tanah air di mana kita pijak saling mengikatkan diri.

Dalam filosofi Sunda disebutnya papat kalimat pancer.

Papat kalimat pancer adalah saling mengikatnya air, matahari, tanah, dan udara.

Melahirkan sebuah energi, melahirkan tanaman-tanaman yang berkualitas yang tumbuh penuh dengan cinta kasih.

Di mana para petani mencintai tanahnya, menghormati tanahnya, mengurus tanahnya, memuliakan tanahnya.

Dari tanah-tanah yang dimuliakan, maka akan tumbuh pepohonan yang mulia, maka akan tumbuh sayur-sayuran yang mulia, maka akan tumbuh buah-buahan yang mulia, maka akan tumbuh padi yang mulia, jagung yang mulia, bawang merah yang mulia, bawang putih yang mulia.

Kemuliaan itu akan dimakan oleh warganya.

Maka warganya menjadi warga yang mulia.

Mulia darahnya, mulia detak jantungnya, mulia tatapan matanya, mulia pendengarannya, mulia pengucapannya.

Maka mengikatkan diri dengan Sang Saka Merah Putih.

Maka merah dan putih bukan sesuatu yang terpisah.

Tapi merah dan putih adalah satu kesatuan.

Maka manusia Indonesia yang sejati, yang mencintai tanah air, yang menghormati Merah Putih adalah dia yang setiap waktu menjaga tanahnya, menjaga airnya, mengorbankan keringat dan darahnya demi tanah dan airnya.

Maka dalam kekinian adalah menjaga kesuburan tanahnya, menjaga kesuburan airnya.

Maka kalau kita ingin menjadi nasionalisme sejati, negeri kita sebenarnya tak perlu pestisida.

Negeri kita sebenarnya tak perlu bahan kimia kalau kita mengikatkan diri dengan seluruh alam raya ini secara sempurna.

Dan Tuhan hadir dalam setiap jengkal tanah, melahirkan kesuburan, melahirkan masyarakat Jawa Barat yang subur makmur, gemah ripah, repeh, rapih.

Sifat saling mengikatkan adalah sifat ketuhanan, sifat kemanusiaan, sifat persatuan, sifat kerakyatan, dan sifat keadilan.

Dalam kaidah Islam disebutnya insan kamil atau dalam kaidah kebangsaan disebutnya manusia Indonesia seutuhnya.

Prinsip dasar itu dulu tercerabut oleh prinsip-prinsip pengejaran aspek material produksi sehingga kita masuk dalam sebuah teknik pertanian kimiawi yang berlangsung saat ini yang menjadi ketergantungan.

Sedangkan negara-negara maju yang dulu mendorong kita menggunakan pestisida, hari ini menjadi bangsa yang menolak produk pertanian berpestisida.

Selama cara berpikir kita meletakkan diri pada orang lain untuk meraih kemajuan, selama metodologi pembangunan kita diletakkan terus-menerus pada keinginan orang lain, maka percayalah kita tidak akan pernah mencapai kemerdekaan yang dicita-citakan.

Karena apa?

Selamanya kita masuk dalam standar mereka.

Ketika kita masuk dalam standar mereka, mereka sudah mengubah standarnya.

Ini prinsip-prinsip dasar filosofi kebangsaan ke-Jawa-Baratan yang harus kita renungkan.

Maka dalam perspektif ke depan kita harus apa?

Memiliki kesetaraan.

Kesetaraan harus kita lakukan dengan apa?

Membangun generasi baru yang terbebas.

Apa unsur kimiawi?

Bukan hanya sekadar kimiawi karena sakit, tetapi kimiawi yang disengaja.

Apa itu?

Mereka korban obat-obatan terlarang.

Tren hari ini tramadol.

Ribuan orang terjatuh pada pergumulan kejahatan dari mulai tawuran, pembacokan, pencopetan, perampokan, pembunuhan.

Dan di sudut-sudut kampung tramadol itu dijual secara bebas.

Di sudut-sudut kampung kita membiarkannya.

Maka di 81 kemerdekaan Republik Indonesia, kita merdekakan bangsa ini dari penjajahan yang tidak terlihat.

Penjajahan yang tidak terlihat adalah sistematika kolonial gaya baru.

Dengan cara apa?

Merusak pikiran kita, merusak pendengaran kita, merusak khayalan kita dalam sistem yang tidak terlihat.

Orang seperti disenangkan tetapi dia dihancurkan.

Perspektif itulah yang harus dibangun.

Kenapa?

Hamparan tanah kita adalah tanah khatulistiwa yang sangat subur.

Kekayaan alam yang berlimpah yang tidak berhenti diambil oleh kolonial.

Kita tidak miskin.

Diambil berpuluh-puluh tahun.

81 tahun kita merdeka.

Sampai hari ini pun kita tidak miskin walaupun rakyatnya masih banyak yang miskin.

Perspektif itu mengakibatkan ketertarikan orang untuk apa?

Melumpuhkan generasi muda.

Hilang nasionalismenya, hilang spirit hidupnya, hancur masa depannya, rusak kehidupannya.

Maka ini adalah kewaspadaan nasional yang tentu memilih spirit kita bersama untuk bersama-sama dibersihkan.

Dan pada tahun ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang pertama kali menggelar upacara kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Gedung Sate.

Biasanya kita menggunakan Gasibu.

Kita berdiri di sini bukan karya saya, tapi ini adalah karya-karya kuli bangunan yang sekolah SD pun tidak tamat.

Karya-karya tukang ngecat yang dipicu dalam setiap waktu harus bekerja.

Dan hari ini yang memperingati kemerdekaan bukan hanya kita.

Tapi burung-burung ini pun ikut memeriahkan kemerdekaan.

Dia menikmati hamparan jalan yang mungkin selama puluhan tahun dia tidak pernah bermain di sini.

Di balik Gedung Sate yang sangat indah, terhampar derita yang panjang.

Mari kita berpikir di balik gedung yang dititipkan pada kita untuk dirawat yang hampir puluhan tahun tidak pernah dicat dengan standardisasi.

Ada berapa ribu nyawa merenggang untuk membangunnya?

Ada berapa ribu orang-orang yang ditinggalkan rumahnya untuk membangunnya?

Ada berapa orang yang tertimpa meninggal di dalamnya?

Kita tidak pernah mengetahuinya dan kita tidak pernah berterima kasih.

Yang berjasa bukan hanya yang memiliki gagasan membangun Gedung Sate, tetapi para kuli itu jauh lebih berjasa.

Dan kita juga memahami bahwa prinsip-prinsip dasar karakter penjajahan bukan hanya dimiliki oleh kolonialisme.

Kita boleh dalam setiap tahun terus-terusan menggelorakan antikolonialisme.

Kita dalam setiap tahun memberikan kutukan terhadap imperialisme.

Tetapi kita harus menyadari diri kita bahwa karakter kolonialisme, perilaku imperialisme bukan hanya dimiliki mereka yang datang ke sini untuk menjajahnya.

Tetapi dalam catatan sejarah yang saya baca ternyata banyak juga pribumi, bahkan dianggap sebagai pemimpin di lingkungannya, itu merupakan bagian dari kejahatan imperialisme.

Tidak mungkin kolonialisme Belanda menjajah kita dalam waktu terlalu lama kalau tidak ada orang yang bekerja untuk mereka.

Orang yang bekerja itu seringkali memiliki karakter feodalistik.

Ingin selalu dihormati, ingin selalu dijunjung tinggi, ingin selalu diangkat-angkat di hadapan kaum pribumi yang mereka adalah warga biasa.

Tetapi di hadapan kolonial dia menundukkan seluruh badannya, membungkukkannya dan mengajaknya untuk kerja sama.

Dalam catatan yang saya baca bahwa pemerintah Eropa pernah diguncang oleh perilaku buruk dari kaum feodalis yang berada di Priangan yang dalam setiap hari mereka berpesta di atas penderitaan.

Bahkan ketika ada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, membangun jalan, membangun gedung, upah yang mesti dibayarkan kepada masyarakat disebut rodi.

Itu pun tidak dibayarkan.

Penjajah memang kejam, tapi perilaku feodalistik yang suka menjajah bangsanya sendiri jauh lebih kejam.

Untuk itu, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama meninggalkan seluruh tradisi itu dengan tidak menuntut terlalu banyak pada negara, tapi berupaya memberikan yang terbaik pada negara.

Tidak terus-terusan kita berpikir menaikkan kenaikan tunjangan yang kita miliki yang menurut saya sudah besar.

Tidak terus-terusan kita menuntut fasilitas pada negara.

Padahal kita sudah besar.

Kita harus malu.

Pada apa?

Para status diri kita yang seharusnya berdiri paling tegak untuk menegakkan Sang Saka Merah Putih, membangun rasa adil pada seluruh rakyat.

Yakinlah bahwa seluruh rakyat akan mencintai bangsanya, akan mengorbankan jiwa raga demi bangsanya, akan memiliki patriotik dan nasionalisme yang tinggi.

Manakala para pemimpin dan pejabatnya memperlihatkan sikap teladan, di mana di mata mereka mau datang ketika mereka sakit, mau mengobati mereka, ketika mereka kesusahan, mau berdiri paling depan ketika mereka mengalami penindasan.

Inilah cara kita untuk bersama rakyat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, menghormati Sang Saka Merah Putih.

Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua.

Semoga Sang Saka Merah Putih tetap berkibar di tengah gempuran perubahan zaman.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sampurasun.

Glosarium Istilah Sunda

Glosarium ini disusun untuk membantu pembaca memahami sejumlah istilah Sunda, serapan sejarah, dan ungkapan khas yang muncul dalam naskah pidato KDM pada Peringatan HUT ke-81 RI. Makna yang diberikan tidak hanya bersifat kamus, tetapi juga diletakkan dalam konteks pidato agar pembaca dapat menangkap kedalaman pesan yang disampaikan.

1. **Sampurasun**

   Sampurasun adalah salam pembuka khas masyarakat Sunda. Secara harfiah, kata ini sering diartikan sebagai permohonan maaf sekaligus harapan keselamatan dan keberkahan bagi yang mendengar. Dalam penggunaannya, *Sampurasun* bukan sekadar sapaan formal; ia membawa semangat kerendahan hati, karena orang yang mengucapkannya memohon agar dirinya diterima dan diberi ruang oleh sesama. Dalam pidato KDM, *Sampurasun* diucapkan di awal dan di akhir sebagai penanda bahwa pidato kenegaraan itu tidak berdiri di ruang hampa budaya, melainkan lahir dari akar masyarakat Jawa Barat.

2. **Papat Kalima Pancer**

   Dalam naskah pidato, istilah ini ditulis sebagai **papat kalimat pancer**, tetapi makna dan rujukannya merujuk pada konsep yang sama, yaitu *Papat Kalima Pancer*. *Papat* berarti empat, *kalima* berarti kelima, dan *pancer* berarti pusat atau titik tetap. Dalam kosmologi Sunda, *Papat Kalima Pancer* menggambarkan empat unsur atau empat arah—sering dimaknai sebagai tanah, air, udara, dan matahari—yang dipusatkan oleh manusia sebagai *pancer*, yaitu penjaga keseimbangan. KDM memakai istilah ini untuk menjelaskan bahwa hidup yang sehat, pangan yang bermutu, dan masyarakat yang merdeka hanya mungkin lahir apabila manusia menjaga keseimbangan unsur-unsur alam tersebut.

3. **Gemah Ripah Repeh Rapih**

   Gemah ripah repeh rapih adalah ungkapan Sunda yang menggambarkan masyarakat ideal. *Gemah* berarti makmur, *ripah* berarti subur atau melimpah, *repeh* berarti tenteram atau damai, dan *rapih* berarti tertib atau teratur. Dalam pidato KDM, ungkapan ini dipakai untuk menggambarkan tujuan akhir dari

masyarakat Jawa Barat yang tanahnya dimuliakan, airnya dijaga, dan warganya hidup dalam keseimbangan. Ungkapan ini bukan hanya doa atau slogan, melainkan arah pembangunan yang berakar pada kearifan lokal.

4. **Cacah**

   Cacah adalah istilah lama dalam masyarakat Sunda yang merujuk pada rakyat kebanyakan atau golongan bawah dalam tatanan feodal. Kaum *cacah* adalah orang-orang yang bekerja menggarap tanah, membayar upeti, dan sering kali tidak memiliki hak suara atas hidupnya sendiri. Dalam pidato KDM, kata *cacah* dipakai untuk mengingatkan bahwa negara merdeka seharusnya tidak lagi mengenal pembedaan antara kaum *cacah* dan kaum *menak*, karena semua warga memiliki martabat dan hak yang setara.

5. **Menak**

   Menak adalah golongan bangsawan atau priyayi dalam struktur sosial Sunda lama. Kaum *menak* biasanya memiliki tanah luas, jabatan turun-temurun, dan hak-hak istimewa yang tidak dimiliki rakyat biasa. Dalam pidato KDM, *menak* disebut bersama dengan *cacah* sebagai warisan feodal yang harus ditinggalkan. Ia menegaskan bahwa dalam negara yang merdeka, tidak boleh ada lagi kelompok yang dianggap lebih mulia hanya karena keturunan atau kekuasaan.

6. **Rodi**

   Rodi adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda, *heerendiensten*, yang merujuk pada kerja paksa yang dibebankan kepada rakyat pribumi pada masa kolonial. Rakyat diwajibkan bekerja membangun jalan, jembatan, gedung, dan proyek-proyek pemerintah tanpa upah yang layak, bahkan sering kali tanpa upah sama sekali. Dalam pidato KDM, *rodi* disebut untuk mengingatkan bahwa Gedung Sate dan banyak bangunan kolonial lainnya didirikan di atas penderitaan rakyat kecil yang tidak pernah mendapat penghargaan. Kata ini menjadi kritik terhadap sejarah pembangunan yang melupakan mereka yang paling berjasa.

7. **Insan Kamil**

   Insan kamil bukan berasal dari bahasa Sunda, melainkan dari tradisi Islam, khususnya tasawuf. Istilah ini berarti "manusia sempurna", yaitu manusia yang mampu memancarkan sifat-sifat ilahi dalam kehidupan, menjaga keseimbangan antara akal, hati, dan perbuatan, serta menjalankan amanat sebagai penjaga bumi. Dalam pidato KDM, *insan kamil* disejajarkan dengan *Papat Kalima Pancer* dan "manusia Indonesia seutuhnya". Penyandingan ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dan ajaran spiritual bertemu dalam satu cita-cita: lahirnya manusia yang utuh, adil, dan bertanggung jawab.

8. **Pasanggrahan Pancarasa**

   Pasanggrahan Pancarasa adalah nama yang diberikan KDM kepada halaman Gedung Sate yang telah ditata ulang. *Pasanggrahan* dalam tradisi Jawa-Sunda

berarti tempat peristirahatan atau tempat pertemuan, sedangkan *Pancarasa* dapat diartikan sebagai lima rasa atau beragam rasa. Dalam konteks pidato, penamaan ini mengandung semangat bahwa ruang publik tersebut bukan untuk menampilkan kemewahan kekuasaan, melainkan untuk menerima semua lapisan masyarakat, termasuk para petani, nelayan, dan kuli bangunan yang justru menempati tenda VIP.

9. **Priangan**

   Priangan atau dalam ejaan Belanda *Preanger* adalah sebutan historis untuk wilayah dataran tinggi di Jawa Barat yang membentang dari sekitar Bogor hingga Ciamis. Pada masa kolonial, Priangan dikenal sebagai daerah perkebunan yang subur dan pusat kekuasaan para bupati feodal. Dalam pidato KDM, *Priangan* disebut ketika ia membicarakan sejarah kaum feodal yang berpesta di atas penderitaan rakyat. Istilah ini membawa ingatan kolektif tentang masa lalu yang penuh ketimpangan, sekaligus menjadi cermin untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Daftar Pustaka dan Referensi

Sumber Primer

KDM. (2026, Agustus 17). *Pidato lengkap KDM pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di halaman Gedung Sate, Bandung* [Transkrip pidato]. Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Buku dan Artikel Jurnal

Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and secularism*. International Institute of Islamic Thought and Civilization.

Arendt, H. (1958). *The human condition*. University of Chicago Press.

Aristotle. (2004). *Rhetoric* (W. R. Roberts, Trans.). Dover Publications.

Berkes, F. (1999). *Sacred ecology: Traditional ecological knowledge and resource management*. Taylor & Francis.

Breman, J. (1983). *Control of land and labour in colonial Java*. Foris Publications.

Carson, R. (1962). *Silent spring*. Houghton Mifflin.

Chatterjee, P. (1993). *The nation and its fragments: Colonial and postcolonial histories*. Princeton University Press.

Chittick, W. C. (1989). *The Sufi path of knowledge: Ibn al-'Arabi's metaphysics of imagination*. State University of New York Press.

Danasasmita, S. (1987). *Sewaka Darma, Sanghyang Siksa Kanda Ng Karesian, Amanat Galunggung: Transkripsi dan terjemahan*. Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda.

Ekadjati, E. S. (1995). *Kebudayaan Sunda: Suatu pendekatan sejarah*. Pustaka Jaya.

Fanon, F. (1963). *The wretched of the earth*. Grove Press.

Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.

Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.

Hatta, M. (1977). *Pengertian Pancasila*. Idayu Press.

Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). *The experience of nature: A psychological perspective*. Cambridge University Press.

Kingsley, P. (1995). *Ancient philosophy, mystery, and magic: Empedocles and Pythagorean tradition*. Oxford University Press.

Kunto, H. (1986). *Semerbak bunga di Bandung Raya*. Granesia.

Leopold, A. (1949). *A Sand County almanac*. Oxford University Press.

Maslow, A. H. (1971). *The farther reaches of human nature*. Viking Press.

Mustapa, R. H. (2013). *Adat istiadat Sunda* (M. Sastrawijaya, Trans.). Kiblat.

Naess, A. (1973). The shallow and the deep, long-range ecology movement: A summary. *Inquiry, 16*(1–4), 95–100. https://doi.org/10.1080/00201747308601682

Pocock, J. G. A. (1975). *The Machiavellian moment: Florentine political thought and the Atlantic republican tradition*. Princeton University Press.

Roberts, J. R., & Karr, C. J. (2012). Pesticide exposure in children. *Pediatrics, 130*(6), e1765–e1788. https://doi.org/10.1542/peds.2012-2758

Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., & Earls, F. (1997). Neighborhoods and violent crime: A multilevel study of collective efficacy. *Science, 277*(5328), 918–924. https://doi.org/10.1126/science.277.5328.918

Schimmel, A. (1975). *Mystical dimensions of Islam*. University of North Carolina Press.

Shiva, V. (1993). *Monocultures of the mind: Perspectives on biodiversity and biotechnology*. Zed Books.

Singer, M. (2008). *Drugging the poor: Legal and illegal drugs and social inequality*. Waveland Press.

Soedjatmoko. (1984). *Etika pembangunan*. LP3ES.

Spivak, G. C. (1988). Can the subaltern speak? In C. Nelson & L. Grossberg (Eds.), *Marxism and the interpretation of culture* (pp. 271–313). University of Illinois Press.

Trocki, C. A. (1999). *Opium, empire and the global political economy: A study of the Asian opium trade, 1750–1950*. Routledge.

United Nations. (1948). *Universal declaration of human rights*. https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights

Catatan Singkat

Beberapa sumber dalam daftar ini digunakan untuk memperkuat pembahasan tentang ekologi, filsafat politik, sejarah kolonial, tasawuf, pendidikan kritis, dan kearifan lokal. Tidak semua kutipan ditampilkan secara eksplisit dalam teks utama, tetapi semua memberikan landasan pemikiran yang menyatu dengan argumen yang dibangun sepanjang buku. Jika buku ini akan diterbitkan secara formal, seluruh kutipan dalam teks perlu ditelusuri kembali ke halaman yang tepat sesuai edisi sumber yang digunakan.

Sinopsis

Pidato peringatan kemerdekaan sering berhenti pada seremoni. Namun dalam amanatnya pada HUT ke-81 RI di halaman Gedung Sate, KDM menghadirkan kemerdekaan sebagai pekerjaan yang belum selesai. Dari isu listrik bagi warga, beban layanan kesehatan, masa depan petani, ancaman narkoba, hingga martabat pekerja kecil, pidato itu mengajak bangsa ini membaca ulang makna merdeka secara lebih jujur dan membumi.

Melalui lensa filosofi Sunda Papat Kalima Pancer, buku ini menafsirkan pidato tersebut sebagai refleksi kebudayaan, kritik sosial, dan ajakan moral sekaligus. Empat unsur kehidupan—tanah, air, udara, dan matahari—dipertemukan dengan pancer, yakni pusat keseimbangan manusia, untuk menegaskan bahwa kemerdekaan sejati hanya lahir ketika pembangunan, keadilan sosial, kelestarian alam, dan spiritualitas berjalan seiring.

Ditulis dengan nada reflektif, buku ini membawa pembaca menelusuri hubungan antara Gedung Sate sebagai simbol sejarah kolonial, rakyat kecil sebagai subjek utama kemerdekaan, dan Jawa Barat sebagai ruang perenungan bagi Indonesia. Bukan sekadar pembacaan atas sebuah pidato, PAPAT KALIMA PANCER adalah undangan untuk memahami kemerdekaan sebagai amanat etis: memuliakan manusia, merawat alam, dan menata bangsa dengan kebijaksanaan yang berakar pada kearifan lokal.

Sebuah bacaan penting bagi pembaca yang ingin melihat kemerdekaan bukan hanya sebagai perayaan, melainkan sebagai tanggung jawab sejarah dan moral.

JIM & ZAM